



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)**

**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018-2023**



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja RPJMD menunjukkan hasil yang belum optimal sebagai akibat munculnya bencana non alam pandemi *Covid-19* yang berpengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
3. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Menjelaskan kinerja keuangan Periode RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang masih berlaku, kebijakan pengelolaan keuangan Periode RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang masih berlaku dan kerangka pendanaan untuk sisa Periode RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.
4. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.
5. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Berisi Visi, Misi serta Perubahan tujuan dan sasaran.
6. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Berisi Perubahan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.
7. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Berisikan Perubahan program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta Perubahan indikator kinerja.
8. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARA PERANGKAT DAERAH
Penetapan Perubahan indikator kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.
9. BAB IX : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan dan pengembangan pembiayaan pembangunan.

(2) Perubahan RPJMD sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan, Bupati wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya pada tahun terakhir pemerintahannya sebagai pedoman penyusunan RKPD.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
- (5) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR,

AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU
(II.15.A/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir selain memuat visi dan misi juga memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan dan berfungsi sebagai berikut :

- a. Pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- c. Alat atau instrument monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; dan
- d. Instrumen tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun dan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Beberapa alasan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Terjadinya Pandemi *Covid-19* yang menyebar di seluruh dunia, yang menyebabkan gangguan sosio-ekonomi global, termasuk di Indonesia. Pandemi *Covid-19* telah mempengaruhi rencana pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Upaya untuk mencegah penyebaran virus dan pemulihan aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi *Covid-19* menyebabkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus segera mengubah fokus Program, Kegiatan dan alokasi anggaran. Pemerintah harus membuat atau mengganti formula kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan sekarang dan diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau, serta merubah target makro ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
2. RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 mengacu pada Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (penyesuaian nomenklatur urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan), untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka diperlukan penyelerasan arah kebijakan nasional dengan arah kebijakan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Tahun 2022-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ..	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana	II-16
2.1.3. Kondisi Demografi	II-18
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-21
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-21
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-35
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-50
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-54
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar	II-54
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-124
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan	II-174
2.3.4. Urusan Penunjang	II-193
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-202
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-202
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-205
2.4.3. Iklim Investasi.....	II-206
2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia.....	II-212
BAB III Gambaran Keuangan Daerah	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III- 3
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-5
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-26
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-26
3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah	III-32
3.3. Kerangka Pendanaan	III-36
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-36
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-43

BAB IV Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Daerah	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-2
4.1.2. Aspek Pelayanan Umum.....	IV-4
4.2. Isu-Isu Strategis	IV-17
4.2.1. Isu Strategis Internasional	IV-18
4.2.2. Isu Strategis Nasional.....	IV-28
4.2.3. Isu Strategis Provinsi Riau	IV-33
4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir.....	IV-36
BAB V Visi Misi Tujuan dan Sasaran	V-1
5.1. Visi.....	V-1
5.2. Misi.....	V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-4
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah ..	VI-1
6.1. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	VI-1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	VI-10
6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah	VI-23
6.4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19.....	VI-38
6.5. Integrasi KLHS dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.....	VI-45
6.6. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	VI-52
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah	VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah.....	VII-4
BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VIII-1
BAB IX Penutup	IX-1

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2020.....	II-3
Tabel	2.2	Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-12
Tabel	2.3	Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015-2019.....	II-14
Tabel	2.4	Banyaknya Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-17
Tabel	2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-19
Tabel	2.6	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	II-21
Tabel	2.7	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020.....	II-24
Tabel	2.8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020.....	II-25
Tabel	2.9	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Kinerja dan Capaian SPM.....	II-71
Tabel	2.10	Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan Serta Solusi dalam mencapai SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-71
Tabel	2.11	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	II-88
Tabel	2.12	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Berdasarkan Permenkes No : 43/MENKES/PER/VIII/2016.....	II-91
Tabel	2.13	Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan tahun 2015 – 2020	II-92
Tabel	2.14	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator, dan capaian SPM Bidang PU-PR	II-103
Tabel	2.15	Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang PU-PR di Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-104
Tabel	2.16	Jumlah Dan Luas Kawasan Kumuh di kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Berdasarkan Kewenangan Penanganan.....	II-109
Tabel	2.17	Jumlah Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan SK Bupati Tahun 2016-2020.....	II-109
Tabel	2.18	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	II-110
Tabel	2.19	Permasalahan Dalam Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-111
Tabel	2.20	Jenis Layanan Dasar, Indikator Kinerja dan Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam negeri.....	II-117
Tabel	2.21	Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-118
Tabel	2.22	Jenis Pelayanan, Indikator dan Capaian Bidang Sosial.....	II-122

Tabel	2.23	Permasalahan/hambatan Dalam Penrapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-122
Tabel	2.24	Perkembangan Realisasi, target dan capaian kinerja indikator Opini BPK Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020.....	II-198
Tabel	2.25	Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2020.....	II-199
Tabel	2.26	Daftar Investor PMA Dan PMDM Masih Beroperasi Berdasarkan IP Yang Berinvestasi Di kabupaten Indragiri Hilir s/d Tahun 2018.....	II-206
Tabel	2.27	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Yang Mendukung Iklim Usaha.....	II-210
Tabel	2.28	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-214
Tabel	3.1	Skala Interval Otonomi Fiskal.....	III-4
Tabel	3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020.....	III-4
Tabel	3.3	Realiasi Pendapatan 2018-2020 dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.....	III-8
Tabel	3.4	Proporsi Sumber Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020.....	III-9
Tabel	3.5	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020.....	III-10
Tabel	3.6	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020.....	III-11
Tabel	3.7	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2018 - 2020	III-13
Tabel	3.8	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2020.....	III-15
Tabel	3.9	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun Anggaran 2018-2020 Kabupaten Indragiri Hilir.....	III-18
Tabel	3.10	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020.....	III-24
Tabel	3.11	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020.....	III-27
Tabel	3.12	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020.....	III-29
Tabel	3.13	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020.....	III-30
Tabel	3.14	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020.....	III-31
Tabel	3.15	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020 (dalam jutaan.....	III-33
Tabel	3.16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020.....	III-34
Tabel	3.17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020.....	III-35
Tabel	3.18	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020.....	III-36

Tabel	3.19	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020.....	III-37
Tabel	3.20	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023.....	III-39
Tabel	3.21	Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2023.....	III-43
Tabel	3.22	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023.....	III-44
Tabel	3.23	Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023.....	III-45
Tabel	3.24	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021-2023.....	III-47
Tabel	4.1	Integrasi Antara Isu - Isu Strategis Internasional/ Global, Nasional, Provinsi Riau, dan Kabupaten Indragiri Hilir.....	IV-42
Tabel	5.1	Perbandingan Tujuan RPJMD Murni dan RPJMD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.....	V-5
Tabel	5.2	Indikator Tujuan/Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.....	V-6
Tabel	5.3	Perbandingan Sasaran Pembangunan RPJMD Murni dan RPJMD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.....	V-14
Tabel	5.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Target Capaian Indikator Kinerja Evaluasi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.....	V-20
Tabel	6.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023.....	VI-3
Tabel	6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023.....	VI-11
Tabel	6.3	Kondisi Awal dan Target Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2019.....	VI-21
Tabel	6.4	Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2006.....	VI-23
Tabel	6.5	Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020.....	VI-41
Tabel	6.6	Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023.....	VI-42
Tabel	6.7	Integrasi Program Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	VI-46
Tabel	6.8	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 - 2023 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.....	VI-53
Tabel	7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023.....	VII-3
Tabel	7.2	Program Prioritas yang Disertai Pendanaan Realisasi 2019 dan 2020 Kabupaten Indragiri Hilir yang Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.....	VII-5

Tabel	7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.....	VII-65
Tabel	8.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir 2019 – 2023.....	VIII-1
Tabel	8.2	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023.....	VIII-2
Tabel	8.3	Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas dan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023.....	VIII-11

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar	2.1	Peta Kabupaten Indragiri Hilir..... II-2
Gambar	2.2	Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering..... II-15
Gambar	2.3	Nilai PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2020..... II-22
Gambar	2.4	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2020..... II-23
Gambar	2.5	Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020..... II-26
Gambar	2.6	Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020..... II-27
Gambar	2.7	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2014 – 2020..... II-29
Gambar	2.8	Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020..... II-29
Gambar	2.9	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan Tahun 2016 – 2020..... II-30
Gambar	2.10	Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020..... II-31
Gambar	2.11	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 – 2020 II-32
Gambar	2.12	Kinerja Indikator Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020..... II-33
Gambar	2.13	Perkembangan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020..... II-34
Gambar	2.14	Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir..... II-35
Gambar	2.15	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020..... II-36
Gambar	2.16	Kinerja Indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020..... II-37
Gambar	2.17	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020..... II-38
Gambar	2.18	Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir..... II-39
Gambar	2.19	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020..... II-40
Gambar	2.20	Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir..... II-41
Gambar	2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020..... II-42
Gambar	2.22	Kinerja Indikator APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir..... II-43

Gambar	2.23	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020.....	II-44
Gambar	2.24	Kinerja Indikator APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir	II-45
Gambar	2.25	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	II-46
Gambar	2.26	Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-47
Gambar	2.27	Kinerja Indikator Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-48
Gambar	2.28	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Indragiri Hilir dan kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	II-49
Gambar	2.29	Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-50
Gambar	2.30	Perkembangan Cakupan Fasilitas Seni Budaya di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-51
Gambar	2.31	Perkembangan Group kesenian di kabupaten Indragiri Hilir	II-51
Gambar	2.32	Kinerja Indikator Cakupan Fasilitas Seni Budaya.....	II-52
Gambar	2.33	Kinerja Indikator Jumlah Lapangan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-53
Gambar	2.34	Perkembangan APM SD/MTs dan APM SMP/MTs.....	II-55
Gambar	2.35	Kinerja Indikator APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-56
Gambar	2.36	Kinerja Indikator APM SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-57
Gambar	2.37	Perkembangan APS 7 – 12 Tahun dan APS 13 – 15 Tahun.....	II-58
Gambar	2.38	Kinerja Indikator APS 7 – 12 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir..	II-59
Gambar	2.39	Kinerja Indikator APS 13 – 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-60
Gambar	2.40	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-61
Gambar	2.41	Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI.....	II-62
Gambar	2.42	Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs.....	II-62
Gambar	2.43	Perkembangan Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah.....	II-63
Gambar	2.44	Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 7 – 12 tahun	II-64
Gambar	2.45	Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 13 - 15 tahun.....	II-65
Gambar	2.46	Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-66
Gambar	2.47	Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI.....	II-67
Gambar	2.48	Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs.....	II-68
Gambar	2.49	Perkembangan Guru Berkualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-69
Gambar	2.50	Kinerja Indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV.....	II-70
Gambar	2.51	Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	II-75

Gambar	2.52	Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-76
Gambar	2.53	Perkembangan Rasio puskesmas per 1.000 penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020.....	II-77
Gambar	2.54	Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-78
Gambar	2.55	Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2020.....	II-79
Gambar	2.56	Kinerja Indikator Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-80
Gambar	2.57	Perkembangan Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-81
Gambar	2.58	Kinerja Indikator Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-82
Gambar	2.59	Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020.....	II-83
Gambar	2.60	Kinerja Indikator Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-84
Gambar	2.61	Perkembangan Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020.....	II-85
Gambar	2.62	Kinerja Indikator Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-86
Gambar	2.63	Perkembangan Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020.....	II-87
Gambar	2.64	Kinerja Indikator Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-88
Gambar	2.65	Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020.....	II-94
Gambar	2.66	Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-95
Gambar	2.67	Perkembangan Jalan dengan Kondisi Mantap dan Tidak Mantap Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020.....	II-96
Gambar	2.68	Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-97
Gambar	2.69	Perkembangan Jembatan dengan Kondisi Baik dan Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-98
Gambar	2.70	Perkembangan Kondisi Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-99
Gambar	2.71	Kinerja Indikator Luas Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-100
Gambar	2.72	Kinerja Indikator Ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-101
Gambar	2.73	Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-103

Gambar	2.74	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau.....	II-105
Gambar	2.75	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-106
Gambar	2.76	Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-107
Gambar	2.77	Kinerja Indikator Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-108
Gambar	2.78	Kinerja Indikator Rasio Rumah Ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-113
Gambar	2.79	Kinerja Indikator Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-114
Gambar	2.80	Kinerja Indikator Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-115
Gambar	2.81	Kinerja Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020	II-116
Gambar	2.82	Kinerja Indikator Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-120
Gambar	2.83	Kinerja Indikator PPKS Yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-121
Gambar	2.84	Perkembangan TPAK Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2013-2020...	II-125
Gambar	2.85	Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-126
Gambar	2.86	Kinerja Indikator Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-127
Gambar	2.87	Kinerja Indikator Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-128
Gambar	2.88	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	II-129
Gambar	2.89	Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-130
Gambar	2.90	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	II-131
Gambar	2.91	Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020.....	II-132
Gambar	2.92	Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-133
Gambar	2.93	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2020....	II-134

Gambar	2.94	Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-135
Gambar	2.95	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2020....	II-136
Gambar	2.96	Kinerja Indikator Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-136
Gambar	2.97	Kinerja Indikator Luas Tanah Bersertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-137
Gambar	2.98	Kinerja Indikator Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-138
Gambar	2.99	Kinerja Indikator Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-139
Gambar	2.100	Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.....	II-141
Gambar	2.101	Kinerja Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-142
Gambar	2.102	Kinerja Indikator Kepemilikan KTP di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-143
Gambar	2.103	Kinerja Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-145
Gambar	2.104	Kinerja Indikator Cakupan Program "Desa Maju Inhil Jaya" di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-146
Gambar	2.105	Kinerja Indikator Jumlah Desa "Maju" di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-147
Gambar	2.106	Kinerja Indikator PKK Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-148
Gambar	2.107	Kinerja Indikator Posyandu Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-149
Gambar	2.108	Kinerja Indikator Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-150
Gambar	2.109	Kinerja Indikator PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber KB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-152
Gambar	2.110	Kinerja Indikator Ratio PPKBD Satu Petugas Di Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-153
Gambar	2.111	Kinerja Indikator Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-155
Gambar	2.112	Kinerja Indikator Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum Pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-157
Gambar	2.113	Kinerja Indikator Tersedianya Kapal Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Atau Trayek Dalam Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-158

Gambar	2.114	Kinerja Indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Website di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-159
Gambar	2.115	Kinerja Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-160
Gambar	2.116	Kinerja Koperasi Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-161
Gambar	2.117	Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-162
Gambar	2.118	Kinerja Indikator Realisasi PMDN di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-163
Gambar	2.119	Kinerja Indikator PMA di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-165
Gambar	2.120	Kinerja Indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-167
Gambar	2.121	Kinerja Indikator Kecamatan Dalam Angka di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-168
Gambar	2.122	Kinerja Indikator Penyelenggaraan Festival Seni Budaya di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-169
Gambar	2.123	Kinerja Indikator Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-170
Gambar	2.124	Kinerja Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-171
Gambar	2.125	Kinerja Indikator Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-172
Gambar	2.126	Kinerja Indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-173
Gambar	2.127	Kinerja Indikator Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-174
Gambar	2.128	Kinerja Indikator Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-175
Gambar	2.129	Kinerja Indikator Produktivitas Padi di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-177
Gambar	2.130	Kinerja Indikator Produksi Beras di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-178
Gambar	2.131	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020.....	II-180
Gambar	2.132	Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-181
Gambar	2.133	Produktivitas Kelapa Sawit (Ton CPO/Hektar) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020.....	II-183
Gambar	2.134	Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-184
Gambar	2.135	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-185

Gambar	2.136	Kinerja Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-187
Gambar	2.137	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-188
Gambar	2.138	Perkembangan Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-189
Gambar	2.139	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-190
Gambar	2.140	Kinerja Indikator Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-192
Gambar	2.141	Kinerja Indikator Konsumsi Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-193
Gambar	2.142	Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-194
Gambar	2.143	Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-196
Gambar	2.144	Kinerja Indikator Penjabaran RPJMD kedalam RKPd Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-197
Gambar	2.145	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020.....	II-200
Gambar	2.146	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Persentase Temuan APIP Yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-200
Gambar	2.147	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Rasio Pembahasan Prolegda di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-201
Gambar	2.148	Perkembangan Pengeluaran Per kapita Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020.....	II-203
Gambar	2.149	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-204
Gambar	2.150	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-205
Gambar	2.151	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-205
Gambar	2.152	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.....	II-209
Gambar	2.153	Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Magrib Mengaji melalui Program DMIJ 2016-2020.....	II-211
Gambar	2.154	Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan melalui Program DMIJ 2016-2020.....	II-212
Gambar	2.155	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hilir	

		Tahun 2016-2020.....	II-212
Gambar	3.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020	III-5
Gambar	6.1	Tahapan Pencapaian Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	VI-11
Gambar	6.2	Alokasi Anggaran DMIJ (2014-2018) dan DMIJ Plus Terintegrasi (2019-2020) Kabupaten Indragiri Hilir	VI-22

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 264 Ayat 5 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan

3. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017 di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah karena terjadi perubahan mendasar yaitu terjadinya bencana non alam pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar di seluruh sektor pembangunan nasional dan daerah, termasuk juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir serta perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar merubah substansi RPJMD. Berikut beberapa peraturan perundangan yang menyebabkan substansi Perda tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, dirubah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan indikator makro daerah, meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode; dan

6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Setelah pelaksanaan RPJMD selama 2 tahun anggaran (Tahun 2019-2020), maka terjadi berbagai dinamika eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pada Aspek Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perubahan dokumen terhadap RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dari sisi perumusan dan pelaksanaan dipengaruhi oleh aspek regulasi dan sinkronisasi kebijakan. Beberapa bentuk aspek regulasi adalah adanya perubahan dasar regulasi peraturan perundang-undangan mulai dari PP No. 12 tahun 2019, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomo5 050-3708 tahun 2020 serta surat edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3499/SJ dan No 3 tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Selain itu, berdasarkan surat KEMENPAN RB Nomor : B/204/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan reuiu (revisi) dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja yang telah disusun sampai ke level individu.

2. Dinamika Pembangunan Nasional dan Daerah

Dinamika pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir dihadapkan pada dampak pandemi COVID-19, sehingga harus dilakukan

penyesuaian kembali sesuai program prioritas di tahun berikutnya dengan rencana proyek nasional, yaitu pemulihan ekonomi dan sosial penanggulangan ekonomi untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Perubahan mendasar terhadap RPJMD terjadi diakibatkan adanya pandemi Corona atau COVID-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah, kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir harus disesuaikan. Target indikator sasaran yang ditetapkan sampai tahun 2023 perlu disesuaikan terkait adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan pembangunan khususnya bidang perekonomian.

3. Evaluasi Ketercapaian RPJMD

Kesimpulan dari Hasil analisis dalam evaluasi hasil RPJMD kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Capaian indikator makro RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2019 dan 2020 menunjukkan Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Gini mampu mencapai target bahkan diatas target, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum mencapai target.
- b. Capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 dan 2020 menunjukkan dari 20 IKU terdapat 10 indikator (50,00 persen) yang melampaui target, 1 (satu) indikator (5.00 persen) yang mencapai target, 9 (sembilan) indikator (45.00 persen) yang belum tercapai.
- c. Capaian Kinerja IKK (tingkat impact) menunjukkan dari 123 IKK tingkat impact pada Tahun 2020, yang memiliki capaian kinerja melampaui sebanyak 50 indikator atau 40.65 persen, Tercapai sebanyak 14 indikator atau 11,38 persen, Belum Tercapai sebesar 50

indikator atau 40.65 persen, dan Tidak Tersedia Data sebanyak 9 indikator atau 7,32 persen.

- d. Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sebesar 77.85 persen dengan Kategori Tinggi dan rata-rata tingkat capaian anggaran program perangkat daerah sebesar 76.77 persen dengan kategori tinggi.

Hasil analisis dalam evaluasi hasil RPJMD ini, dapat disimpulkan beberapa kendala atau masalah yang dialami oleh perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Pengisian format evaluasi hasil Renja PD dan RKPD secara manual menjadi salah satu hambatan penyajian laporan yang benar, akurat dan tepat waktu.
- b. Terdapat beberapa perangkat daerah yang melaporkan realisasi IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program berbeda dengan yang termuat di Bab 7 RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisis. Sebagian dari perangkat daerah tersebut melaporkan realisasi indikator kinerja yang seharusnya digunakan pada periode 2020-2023.
- c. Jumlah SDM Aparatur yang belum ideal, sebab beban kerja yang melebihi ketersediaan sumber daya aparatur
- d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran serta penyusunan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- e. Penetapan kegiatan tahunan tidak mengacu pada perencanaan strategis
- f. Terdapat beberapa kegiatan yang indikatornya tidak sesuai sehingga capaian indikator tidak dapat terukur
- g. Masih banyak yang belum memahami perbedaan Realisasi Fisik dengan Kinerja.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir 2005–2025. Selanjutnya, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun di sisa periode pembangunan (2022 dan 2023).

Kebijakan dalam melakukan perubahan RPJMD sudah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan perubahan RPJMD sebagaimana diatur pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 342 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Pada ayat (3) disebutkan bahwa Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dua perubahan mendasar yang telah disebutkan di atas, yaitu (1) krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan (2) perubahan kebijakan nasional, menyebabkan perlunya dilakukan perubahan pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah Kabupaten/Kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

1. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

2. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019- 2024

RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 telah terintegrasi sesuai dengan amanat RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dengan kebijakan kewilayahan untuk Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 dengan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 dan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir.

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 telah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025.

Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya.

4. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir menjadi acuan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dituangkan didalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Bupati bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD, yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antar para pemangku kepentingan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir juga memperhatikan dokumen terkait lainnya seperti Integrasi kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Isu Pemanasan Global dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan perencanaan pembangunan kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Sementara itu, tujuan dari Perubahan RPJMD ini adalah:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Kebijakan Nasional.
2. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir lima tahun terakhir baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah

maupun analisis gambaran umum keuangan daerah.

3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota.
4. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih.
5. Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
6. Merumuskan kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; dan
7. Merumuskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 adalah:

BAB 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

**BAB 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB 8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

BAB 9. PENUTUP

BAB

2

ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir dianalisis dari 4 aspek yaitu aspek Geografi dan Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

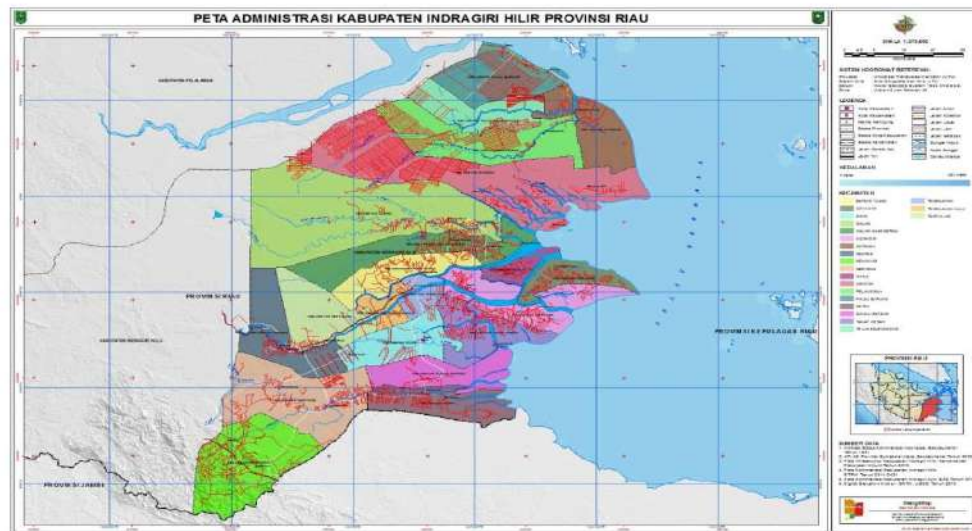
Karakteristik lokasi dan wilayah menggambarkan mengenai letak, luas dan batas wilayah administrasi, Kondisi geografis, Kondisi topografi, Kondisi geologi, Kondisi Hidrologi, Jenis Tanah, Daya Dukung Lahan, dan Kondisi klimatologi.

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0°36' Lintang Utara - 1°07' Lintang Selatan dan 102°32' Bujur Timur - 104°10' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 1.352.510 Ha. Batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,

- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).



Gambar 2- 1 Peta Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi oleh jalan Nasional 'Lintas Timur'. Posisi kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2020

No	Kecamatan	Luas		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Keritang	91,896	6,79	16	1
2	Kemuning	90,717	6,71	11	1
3	Reteh	52,929	3,91	11	3
4	Sungai Batang	41,335	3,06	7	1
5	Enok	45,776	3,38	10	4
6	Tanah Merah	50,207	3,71	9	1
7	Kuala Indragiri	81,434	6,02	7	1
8	Concong	28,038	2,07	5	1
9	Tembilahan	16,957	1,25	-	8
10	Tembilahan Hulu	14,871	1,10	4	2
11	Tempuling	58,662	4,34	5	4
12	Kempas	57,660	4,26	10	2
13	Batang Tuaka	40,622	3,00	12	1
14	Gaung Anak Serka	67,148	4,96	9	3
15	Gaung	209,353	15,48	15	1
16	Mandah	174,739	12,92	16	1
17	Kateman	49,190	3,64	8	3
18	Pelangiran	86,516	6,40	15	1
19	Teluk Belengkong	41,292	3,05	13	-
20	Pulau Burung	53,168	3,93	14	-
	Jumlah	1,352,510	100,00	197	39

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau yang terdapat di

Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 - 3 Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 - 35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh kemiringan 0 - 2 % seluas 1.298.763 Ha (94.97 %), kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas 40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %). Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0 - 8 %.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir merupakan jalur cekungan sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan tektonik bumi yang menyebar luas dan berbentuk morfologi pendataran. Morfologi pendataran ini biasanya memiliki bentuk sungai berbelok-belok dan membawa pasokan material sedimen dari hulu ke hilir. Sedimen-sedimen tersebut akhirnya terperangkap bersama media air pada cekungan-cekungan. Tanah pada cekungan tersebut ditumbuhi oleh mangrove (hutan bakau) sebagai sumber daya hayati pada ekosistem rawa dan hutan dataran rendah. Dalam jangka waktu skala geologi, cekungan-cekungan dan sumberdaya hayati di atasnya mengalami penurunan untuk mencari keseimbangan akibat adanya gaya-gaya tektonik dan pembenanan. Cekungan-cekungan ini tertutup kembali oleh sedimen yang terus memasoknya dimana kejadian ini berulang terus hingga sekarang.

Sumberdaya hayati yang terperangkap dan tertutup sedimen pada masa muda akhirnya membentuk suatu endapan rawa pada tanah gambut. Sementara proses-proses ini terus berlangsung, endapan gambut yang sudah berumur lebih dewasa dapat disebut sebagai batu bara muda. Jadi gambut dapat dianggap sebagai tahapan awal pembentukan batubara. Endapan batubara yang mengalami pembebanan hingga jangka waktu skala geologi sampai suatu saat berubah menjadi lempung hitam dapat dianggap sebagai sumber minyak bumi yang mengalami pencucian atau leaching. Hasil pencucian ini akhirnya terjebak dalam suatu batuan perangkap minyak bumi

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran alluvium Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran alluvium tersebut sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran alluvium Sumatera Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut kembali surut, tetapi proses pembentukan gambut dan

akumulasi sedimen di daerah rawa dan sepanjang pantai wilayah kabupaten Indragiri Hilir tetap berlangsung terus. Batuan yang tersingkap di permukaan kawasan pesisir kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari jenis alluvium, endapan pantai (Qac) dan endapan rawa (Qs) yang keduanya mempunyai umur Kuartar. Tanah dan batuan yang tampak dipermukaan terdiri dari gambut, lumpur, lempung dan pasir. Gambut terletak di atas lumpur dan lempung, serta pasir didapatkan sebagai sisipan pada lumpur dan lempung. Sedangkan kedalaman batuan dasar sangat beragam, dimana ke arah pantai semakin dalam.

Tanah dan batuan di kawasan dataran pantai merupakan alluvium dan endapan pantai (Qac) yang disusun oleh pasir, lanau, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal, sisa tumbuhan setempat dan lapisan gambut dengan tebal mencapai 5 meter. Tanah di dataran pantai terdiri dari lumpur berwarna abu-abu (terdapat dalam keadaan cair, sangat lunak, sangat plastik, memiliki rekah kerut tinggi, kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10% dan nilai unconfined strength kurang dari 0.5 kg/cm²).

Dalam keadaan kering sifat lumpur sulit dibedakan dengan lempung. Lumpur abu-abu memiliki sifat keteknikan buruk, kurang teguh dan stabil. Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 60 meter. Karena batuan dasar, diperkirakan satu-satunya batuan keras di wilayah kabupaten Indragiri Hilir dapat ditafsirkan sebagai lapisan keras yang mampu menahan bangunan berat dan berada pada kedalaman lebih dari 60 meter. Tanah dan batuan di dataran limbah banjir dan rawa tepian sungai merupakan endapan rawa (Qs) yang disusun oleh lempung, lanau, pasir dan gambut. Tanah di kawasan ini terutama terdiri dari lempung abu-abu atau abu-abu dengan bercak kuning. Di beberapa lokasi kadang-kadang di atas lempung ditemukan gambut dengan ketebalan beragam, berkisar antara 50-300 cm.

- **Lempung abu-abu**, terdapat dalam keadaan liat, bersifat plastis,

mengotori tangan/sticky, dan kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10%, rekah kerutnya tinggi, mudah mencair dan memiliki nilai *unconfined strength* kurang dari 2 kg/cm². Selain itu, dalam keadaan kering dapat mencapai 4 kg/cm² dan menjadi bersifat rapuh/*brittle* (Rajiyowiryo, 1986).

- **Pasir**, terdapat sebagai sisipan tipis pada lempung dan lumpur. Komposisi utamanya berupa kuarsa yang belum terikat kuat dan masih bersifat lepas.
- **Batuan dasar**, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 40 meter.
- **Gambut**, bersifat sangat higroskopis, mampu menghisap dan melepas air dengan cepat, butirannya tidak terlalu kuat karena hanya terikat oleh tegangan pori dari air yang mengisi rongga antar butiran. Dalam keadaan kering akan kehilangan tegangan pori hingga mudah lepas, tetapi dalam kondisi kelewat jenuh air, gambut bersifat cair dan daya dukungnya bertambah lemah, sehingga gambut memiliki sifat keteknikan yang buruk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (90 %) merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut ini.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat delapan Kecamatan yang berlokasi di wilayah pesisir atau wilayah kecamatan berada di wilayah pesisir, yang meliputi 50 Desa. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan kateman, Pulau Burung, Mandah, gaung Anak Serka, Kuala Indragiri, Tanah Merah, Sungai Batang dan Reteh. Kecamatan-Kecamatan tersebut sebagian masih belum bisa disentuh melalui jalan darat seperti Pulau Burung, kateman, Kula Indragiri, sementara lima Kecamatan lainnya sudah dapat dihubungi melalui jalan darat (roda 4 atau roda 2).

Kompleknya permasalahan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan pembangunan pesisir daerah ini agak lambat. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah pesisir adalah keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan/jerambah, dermaga, air bersih, PLN dan

telekomunikasi. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah perambahan/penebangan hutan mangrove, illegal fishing dan minimnya sarana prasarana penangkapan dan pengolahan hasil perikanan.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat, di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir disamping terkenal dengan julukan Negeri Sri Gemilang, juga di kenal sebagai Negeri Seribu Parit. Sumberdaya air di wilayah kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/*unconfined ground water* dan air tanah agak tertekan/*semiconfined groundwater*. Penentuan potensi ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumberdaya air terutama ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan di samping dari data yang terhimpun dari penelitian terdahulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pesisir Selatan ke arah Utara, yaitu DAS Reteh Gangsal, DAS Indragiri Tuaka, DAS Gaung Anak Serka, DAS Batangtumu, dan DAS Guntung Kateman.

2.1.1.5. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (80%) memiliki struktur tanah berupa tanah Organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang

banyak mengandung bahan organik. Lapisan tanah gambut mencapai ketebalan lebih dari 100 cm. Tanah ini dominan di daratan rendah diantara aliran sungai. Jenis tanah ini berasal dari akumulasi humus atas permukaan hutan yang melapuk pada permukaan tanah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, jenis tanah ini hampir menyebar di semua kecamatan.

Di sepanjang aliran sungai pada umumnya terdapat formasi tanggul alam *Natural River Leves* yang terdiri dari tanah-tanah Aluvial (*Entisol*) dan Gley Humus (*Inceptisol*). Selain itu, juga terdapat jenis tanah Podsolik merah-kuning dan bahan induk batuan endapan dengan fisiografi dataran. Jenis ini hanya terdapat di bagian barat ke arah selatan (Kecamatan Kerintang). Di samping itu, sebagian wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan daerah muara sungai. Lapisan atas batuan permukaannya terdiri dari endapan alluvial lunak yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh sungai, sehingga sebagian besar lapisan permukaan tanah yang dilewati oleh aliran sungai adalah deposit sabuk meander. Secara teknis lapisan permukaan alluvial lunak (lapisan sabuk meander, organik dan gambut) mempunyai sifat kompresitasnya yang tinggi, sehingga menyebabkan mudahnya penurunan lapisan tanah.

Penurunan lapisan tanah diakibatkan oleh adanya aliran air pori menuju ke butir tanah karena pembebanan struktur yang bersifat konstan baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian akan diperlukan biaya yang lebih besar terutama dari material dan teknik pembangunan untuk mendapatkan struktur bangunan yang baik di atas tanah tersebut. Berdasarkan Peta Zonasi Kerentanan Tanah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Zona Kerentanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah (ZKGTSR) dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah (ZKGTR). ZKGTSR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah,

baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. ZKGTR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Daerah Indragiri Hilir bagian Selatan disekitar Kecamatan Keritang terdapat tanah Podsolik merah kuning (Ultisol). Potensi tanah Orgasol ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut atau bahan organiknyanya. Daerah-daerah yang mempunyai ketebalan gambut lebih dari 1 (satu) meter pada umumnya tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kesuburan tanah-tanah glei humus dan organosol termasuk sedang sampai tinggi, sehingga tanah-tanah di daerah ini cukup baik untuk pengembangan komoditi pertanian dalam arti luas.

Nilai ekonomis tanah gambut untuk lahan pertanian ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut. Semakin tebal lapisan gambut, maka semakin kurang baik tanah itu untuk pertanian. PH tanah gambut sangat rendah, yaitu antara 3,5 - 6, sehingga bersifat asam. Di daerah Reteh, lapisan mineral di bawah gambut berwarna kelabu. Ditempat-tempat dengan tebal bahan organik 100 - 200 cm, pada umumnya telah ditanami dengan tanaman keras seperti kelapa, karet, kopi, buah-buahan dan tanaman-tanaman tahunan lainnya.

Tanah gambut yang tebal diidentifikasi memiliki bahan organiknyanya lebih dari 200 cm. Sampai dengan saat ini praktis belum terolah dan walaupun ada masih sangat terbatas luasnya. Karena masalah yang dihadapi dari tanah gambut, maka diperlukan adanya usaha reklamasi tanah dengan pembuatan drainase, akan tetapi berakibat bahwa akan terjadi aksinasi yang cepat dari bahan organik. Oleh sebab itu, pembuatan parit harus memperhatikan agar pengaturan kedalaman air

tanah sampai pada batas yang dikehendaki sehingga tidak mempercepat terjadinya pengerutan tanah. Sebagaimana halnya dengan gleihumus tanah organosol yang peka terhadap peristiwa penurunan atau pengerutan tanah, sehingga juga perlu usaha reklamasi.

2.1.1.6. Daya Dukung Lahan

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Indragiri Hilir digolongkan menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral yaitu tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan seperti tanah latosol (merah) dan tanah andosol (hitam). Sedangkan tanah dari hasil pematangan sisa-sisa tanaman akan membentuk tanah organik seperti tanah gambut. Keadaan fisiografi, bentuk wilayah dan sifat-sifat tanah menggambarkan karakteristik yang membedakan satuan lahan. Kualitas lahan sangatlah dipengaruhi oleh kualitas jenis tanahnya yang juga sangat tergantung pada kondisi geologis, iklim maupun topografinya. Secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 5 (lima) kelompok satuan lahan fisiografi, yaitu: kelompok marin, kubah gambut, alluvial, dataran dan perbukitan.

1. Kelompok Marin, terletak disepanjang pantai dengan ini merupakan hasil proses sedimentasi dan secara jelas terlihat dengan adanya pelebaran pantai yang terjadi karena penambahan bahan endapan dan proses penangkatan. Satuan lahan pada kelompok ini dapat dibedakan antara lain beting pasir, dataran pasang surut, rawa belakang pantai, dan endapan delta. Kelompok ini luasnya mencapai 17.09% dari luas lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan umumnya adalah berupa dataran pasang-surut dengan kemiringan lahan yang umumnya kurang dari 3%.
2. Kelompok Kubah Gambut, terbentuk dari endapan organik yang berasal dari endapan permukaan muda dan tua. Secara umum ketebalan gambut akan meningkat semakin jauh dari sungai. Dengan

pengendalian tata air yang baik, daerah ini sebenarnya memiliki potensi untuk perkebunan. Namun miskinnya kandungan hara dapat menjadi penghambat utama. Tanah organosol atau tanah gambut ini merupakan jenis tanah yang paling dominan terdapat di kabupaten Indragiri Hilir, mencapai 75.32% dari luas wilayahnya dan umumnya mempunyai ketebalan lebih dari 2 meter.

3. Kelompok Alluvial, terbentuk dari endapan alluvial sungai dan terletak di sepanjang jalur- jalur aliran sungai. Pada umumnya daerah ini cukup potensial untuk lahan persawahan, tentunya dengan memperhatikan jalur hijau yang harus dipertahankan. Kelompok ini merupakan satuan fisiografi yang terkecil di Indragiri Hilir, yaitu hanya sekitar 0.57% dari luas wilayah.

Tabel 2-2 Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Satuan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Keterangan
1	Marin	233.714	17,09	Umumnya kelerengan < 3% dan sebagian kecil < 8%
2	Kubah Gambut	1.030.039	75,32	Didominasi oleh oligotrofik air tawar dengan kedalaman > 2 meter
3	Alluvial	7.795	0,57	Umumnya Kelerengan < 3%
4	Dataran	58.121	4,25	Umumnya Kelerengan < 3% dan terdapat di bagian selatan
5	Perbukitan	37.881	2,77	Umumnya kelerengan 16-25% dan terdapat dibagian selatan
Total		1.367.551	100	

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir

4. Kelompok Dataran, berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya <3%. Luasnya mencapai 4.25% dari luas wilayah.
5. Kelompok Perbukitan, seperti halnya kelompok dataran, kelompok perbukitan berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya 16-25%, terutama yang berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu dan provinsi Jambi (TNBT). Luasnya mencapai 2.77% dari luas total wilayah kabupaten Indragiri Hilir.

2.1.1.7. Klimatologi

Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim. Iklim dalam konteks ini membahas tentang perkembangan curah hujan dan hari hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, *runoff* dan infiltrasi. Sifat hujan dibagi kedalam tiga kategori yaitu (i) diatas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya, (ii) normal, jika nilai curah hujan antara 85 -115% terhadap rata-ratanya dan (iii) dibawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Curah hujan normal sekitar 150 mm/bulan dengan kisaran antara 2.000 – 3.000 mm/tahun.

Selama periode 2016 - 2020, rata-rata hari hujan di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 106 - 149 hari hujan per tahunnya. Rata-rata hari hujan menurun tajam pada tahun 2016 yang hanya sebanyak 106 hari hujan dengan curah hujan yang rendah yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disertai kabut kabut asap.

Tabel 2-3 Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015-2020

No.	Bulan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)
1	Januari	16	216	10	137,7	9	123,4	11	171,8	9	124,5
2	Februari	23	174	11	169	10	141,8	9	138,2	7	98
3	Maret	11	181	14	226,4	14	215,9	10	170	9	134
4	April	10	160	12	183,1	13	214,1	12	188,7	12	198,9
5	Mei	11	161	10	120,8	11	154	9	142,5	12	234,1
6	Juni	8	85	8	98,7	8	91,2	8	88	9	154,2
7	Juli	9	133	6	86,8	7	99,1	5	62,1	8	129,5
8	Agustus	9	141	9	142,1	7	102,1	6	84,5	9	147,8
9	September	11	135	11	183,7	10	169,7	5	79,9	13	229,6
10	Oktober	12	150	10	184,8	12	226,6	8	110,9	11	236,5
11	November	16	241	13	240,6	13	264,4	11	169,7	13	263,2
12	Desember	13	144	13	191,9	13	218,8	12	162,9	11	210,2
Jumlah		149	1921	127	1965,6	127	2021,1	106	1569,2	123	2160,5

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2015 - 2020, rata-rata hari hujan dan curah hujan yang relatif rendah atau musim kemarau, umumnya mulai terjadi pada bulan Juni hingga bulan September, kecuali pada tahun 2015 yang lebih panjang hingga bulan Oktober. Sejalan dengan hari hujan, curah hujan di Kabupaten Indragiri Hilir juga dibawah normal dengan kisaran sebesar 1.307 mm/tahun - 2.021 mm/tahun dengan rata-rata sebesar 1.744 mm/tahun, lebih rendah dibanding curah hujan di kabupaten Indragiri Hulu yang rata-ratanya sebesar 2.292 mm/tahun. Curah hujan yang jauh dibawah normal umumnya terjadi pada bulan Juni - September. Musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga September ini yang ditandai dengan rendahnya hari hujan dan curah hujan mendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan kejadian tahun 2014 dan 2015.

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi pengembangan pertanian khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki total luas lahan kering dan lahan basah Kabupaten Indragiri terluas di Riau yaitu seluas 1.355.095,84 hektar atau 15,25% dari total luas lahan kering dan lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki lahan basah seluas 1.321.623,13 hektar atau 15,18% dari total lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki total luas lahan kering seluas 33,457,33 hektar atau 18,63% dari total lahan kering Provinsi Riau.



Gambar 2-2 Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering

Sumber: BPS Provinsi Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2017)

Potensi lahan basah dan lahan kering yang sebagian telah dikembangkan menjadi perkebunan kelapa dan kelapa sawit serta tanaman pangan. Produksi hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir. Oleh karena itu,

meneruskan untuk mewujudkan kawasan industri Kuala Enok perlu terus dilakukan.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan. Bencana banjir di kabupaten Indragiri Hilir terjadi karena perubahan musim khususnya musim hujan yang disertai dengan gelombang pasang surut yang juga cukup besar. Bencana tanah longsor umumnya terjadi dikawasan tepi sungai yang merupakan kawasan sempadan sungai yang penggunaan untuk budidaya atau perumahan. Potensi bencana longsor di Kabupaten Indragiri Hilir berada di kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Indragiri Hilir. Selama periode 2016 – 2020, bencana tanah longsor terjadi sebanyak 35 kali yang terjadi di sembilan kecamatan yaitu di kecamatan Reteh sebanyak 1 kali, Tanah Merah sebanyak 15 kali, Kuala Indragiri sebanyak 6 kali, Tembilahan sebanyak 2 kali, Tembilahan Hulu sebanyak 5 kali, Tempuling sebanyak 3 kali, Kempas sebanyak 1 kali, Batang Tuaka Sebanyak 1 kali, Gaung sebanyak 1 kali.

Bencana gelombang pasang surut terjadi sebanyak 2 kali didua kecamatan yaitu kecamatan Concong dan Kateman. Bencana puting beliung terjadi sebanyak 19 kali yaitu di kecamatan Reteh, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Kateman, dan Mandah yang masing-masingnya sebanyak 2 kali dan Concong, Batang Tuaka, Gaung dan Planggiran yang masingnya-masingnya terjadi sekali. Bencana banjir terjadi tujuh yaitu di kecamatan Tempuling sebanyak 3 kali dan kecamatan Tembilahan sebanyak 4 kali. Meski Kabupaten Indragiri Hilir bukan daerah dengan potensi bencana yang besar namun antisipasi terhadap kejadian bencana longsor, gelombang pasang surut, angin puting beliung dan bencana banjir perlu terus dilakukan.

Tabel 2-4 Banyaknya Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Gelombang Pasang Surut	Angin Puting Beliung	Kebakaran Hutan dan Lahan
1	Keritang	-	-	-	-	26
2	Kemuning	-	-	-	-	5
3	Reteh	1	-	-	2	2
4	Sungai Batang	-	-	-	-	4
5	Enok	-	-	-	1	6
6	Tanah Merah	15	-	-	2	1
7	Kuala Indragiri	6	-	-	2	1
8	Concong	-	-	1	1	2
9	Tembilahan	2	4	-	2	5
10	Tembilahan Hulu	5	-	-	2	4
11	Tempuling	3	3	-	-	31
12	Kempas	1	-	-	-	20
13	Batang Tuaka	1	-	-	1	16
14	Gaung Anak Serka	-	-	-	-	4
15	Gaung	1	-	-	1	12
16	Mandah	-	-	-	2	10
17	Kateman	-	-	1	2	5
18	Pelangiran	-	-	-	1	5
19	Teluk Belengkong	-	-	-	-	2
20	Pulau Burung	-	-	-	-	11
	Kab. Indragiri Hilir	35	7	2	19	172

Sumber: BPBD Kabupaten Indragiri Hilir (2021)

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang banyak terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2016 – 2020. Kebakaran hutan dan lahan yang ditunjukkan dari jumlah titik api di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat. Kondisi ini perlu perhatian serius untuk diantisipasi karena saat ini dan kedepan, pembukaan lahan gambut pasang surut di Kabupaten Indragiri Hilir akan terus terjadi. Menurut data BPBD Indragiri Hilir tahun 2021, selama periode 2016 – 2020, Kecamatan Tempuling, Keritang dan Kempas adalah 3 kecamatan dengan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan terbanyak. Bencana tanah longsor merupakan bencana kedua yang sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir setelah kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, Kecamatan Tanah Merah adalah daerah yang paling sering mengalami bencana tersebut.

Menurut data BPBD Indragiri Hilir (2018) pada tahun 2016 tercatat terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 12 lokasi yaitu di Kecamatan Kateman dan Tempuling yang masing-masingnya di 3 lokasi, Pulau Burung dan Kempas masing-masingnya di 2 lokasi dan Reteh di 1 lokasi. Pada tahun 2017, jumlah kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 7 lokasi yaitu di Kecamatan Keritang sebanyak 4 lokasi dan Kecamatan Tempuling, Batang Tuaka serta Tempuling yang masing-masingnya 1 kali.

2.1.3. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 654.909 jiwa yang terdiri atas 339.599 jiwa penduduk laki-laki dan 315.310 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,7.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 mencapai 48,42 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tembilahan sebesar 459,17 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Kuala Indragiri sebesar 18,03 jiwa/km².

Kondisi lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir karena Kabupaten Indragiri Hilir “belum” menjadi ‘sasaran’ migrasi penduduk luar Provinsi Riau. Dimasa yang akan datang dengan semakin berkembangnya perekonomian dan khususnya industri kelapa sawit dan kelapa, akan menarik migrasi penduduk ke Indragiri Hilir.

Tabel 2-5 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keritang	66.017	66.823	67.616	61.203	63.103
2	Kemuning	32.946	33.643	34.388	35.893	38.499
3	Reteh	45.109	45.601	46.077	34.970	35.974
4	Sungai Batang	12.629	12.763	12.892	10.098	10.066
5	Enok	31.812	35.664	36.470	33.999	33.846
6	Tanah Merah	31.812	32.147	32.470	24.916	25.236
7	Kuala Indragiri	20.010	20.226	20.435	14.345	14.679
8	Concong	13.817	13.988	14.156	11.660	11.764
9	Tembilahan	75.108	76.122	77.135	75.864	77.862
10	Tembilahan Hulu	46.262	46.921	47.585	45.781	46.662
11	Tempuling	31.799	32.187	32.569	31.848	31.633
12	Kempas	35.255	35.725	36.194	37.574	38.671
13	Batang Tuaka	28.431	28.787	29.139	26.727	27.190
14	Gaung Anak Serka	22.726	22.977	23.221	22.476	22.591
15	Gaung	41.396	41.886	42.367	36.930	38.367
16	Mandah	40.716	41.127	41.520	33.416	34.531
17	Kateman	47.393	48.051	48.711	37.007	39.284
18	Pelangiran	45.979	46.777	47.604	28.718	35.318
19	Teluk Belengkong	17.485	17.735	17.604	8.579	9.229
20	Pulau Burung	22.870	23.084	17.987	17.837	20.404
	Kab. Indragiri Hilir	713.034	722.234	731.396	740.598	654.909

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2016 – 2019, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir meningkat yaitu dari 713.034 orang menjadi 740.598 orang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,95% per tahun. Rata-rata pertumbuhan

penduduk Kabupaten Indragiri Hilir ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau pada periode yang sama yang masing-masingnya 1,41% per tahun, 3,74% per tahun dan 1,76% per tahun.

Namun, pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan menjadi 654.909 orang atau menurun 11,60% dari tahun 2019.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat kepadatannya selama periode 2016 - 2020 berkisar antara 48 - 64 jiwa/Km² dan masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, penduduk terpadat menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat di kecamatan Tembilahan yang merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebesar 459 jiwa/Km² diikuti oleh Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 314 jiwa/Km², Kecamatan Kateman dengan 80 jiwa/Km² dan Kecamatan Keritang 69 jiwa/Km². Sedangkan untuk kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kuala Indragiri dan Kecamatan Gaung dengan 18 jiwa/Km². Tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan ini berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sekitar 69,39% terkategori umur produktif dan 30,61% terkategori tidak produktif. Hal yang mendapat perhatian adalah bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai mendapat 'baby boom' yang ditunjukkan dari porsi penduduk usia muda (0 - 14 tahun) yang saat ini sedang sekolah yaitu sebesar 26,23%. Oleh karena itu, penguatan program keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pembukaan kesempatan bekerja dan berusaha harus lebih mendapat perhatian lebih dalam pembangunan ke depan.

Tabel 2-6 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	28.484	26.982	55.466
2	5 - 9	29.434	28.071	57.505
3	10 - 14	30.142	28.688	58.830
4	15 - 19	29.361	27.760	57.121
5	20 - 24	30.502	28.619	59.121
6	25 - 29	28.751	26.372	55.123
7	30 - 34	28.077	26.149	54.226
8	35 - 39	26.284	24.950	51.234
9	40 - 44	25.513	24.218	49.731
10	45 - 49	22.627	20.993	43.620
11	50 - 54	18.586	17.072	35.658
12	55 - 59	14.562	12.994	27.556
13	60 - 64	11.199	9.847	21.046
14	65 - 69	8.446	6.790	15.236
15	70 - 74	4.385	3.416	7.801
16	75+	3.246	2.389	5.635
Indragiri Hilir		339.599	315.310	654.909

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga.

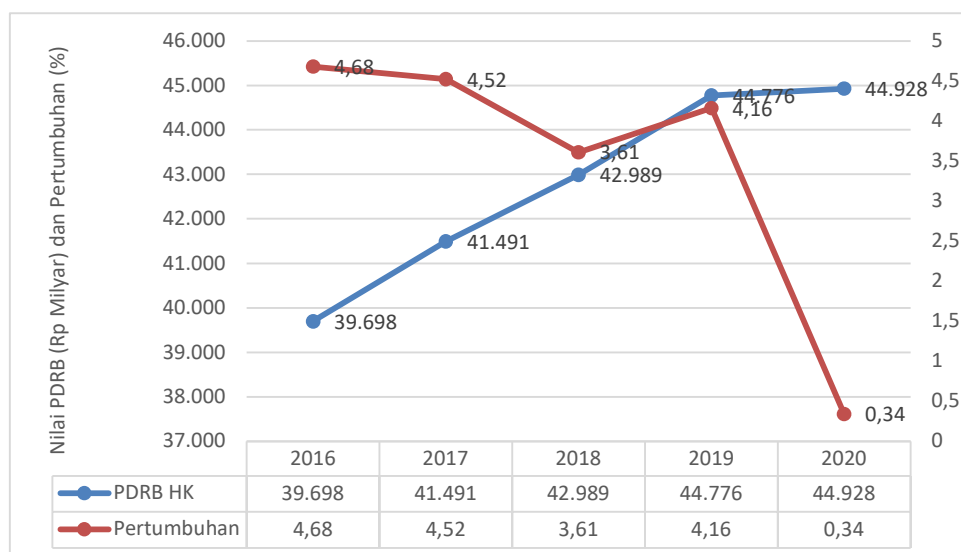
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita harga konstan, indeks ketimpangan Williamson, jumlah penduduk miskin dan kemiskinan.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Selama periode 2016-2020, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar harga konstan dengan trend meningkat. Namun pertumbuhan PDRB ini memiliki tren berfluktuatif menurun.

Penurunan pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pada tahun 2018 dan 2020 erat kaitannya dengan kelembaban ekonomi dunia, diperparah oleh wabah covid-19 pada tahun 2020 sehingga aktifitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat dan menurun.

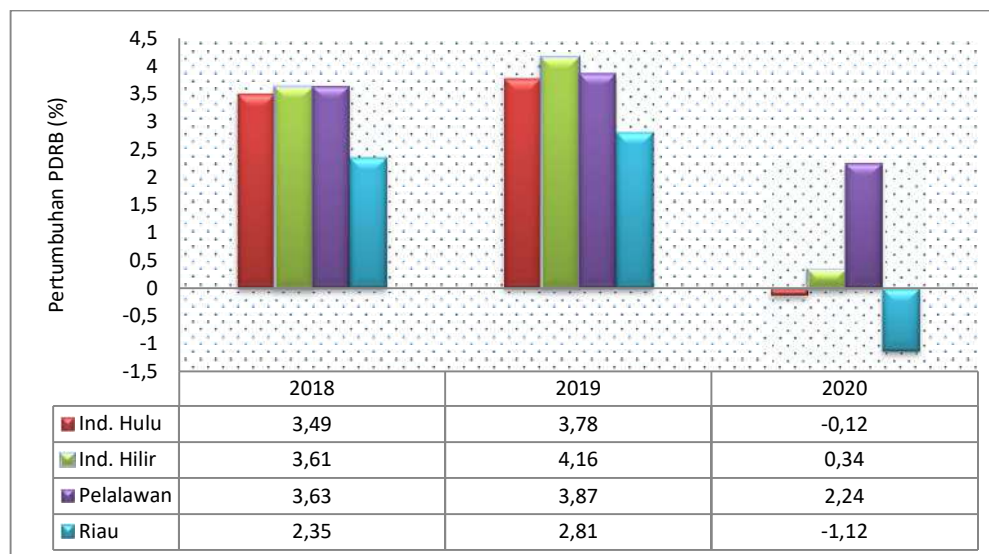


Gambar 2-3 Nilai PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir lebih baik dibanding Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau. Pada tahun 2020, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Hanya Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan yang mengalami pertumbuhan positif yaitu 0,34% dan 2,24%. Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi minus 0,12% dan minus 1,12%. Kabupaten Indragiri Hilir masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi 46,78%

terhadap PDRB. Sedangkan Kabupaten Pelalawan ditopang oleh kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masing – masing sebesar 48,65% dan 40,62%.



Gambar 2-4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2018 - 2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2016 – 2020, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi. Lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan tren kontribusinya semakin menurun yaitu dari 48,09% pada tahun 2015 menjadi 44,76% pada tahun 2019, kemudian kembali mengalami peningkatan sebesar 46,78% pada 2020. Meski kontribusi lapangan usaha pertanian cenderung menurun namun kontribusi pertanian yang besar telah menyakinkan semua pihak bahwa Pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penurunan kontribusi lapangan usaha pertanian yang seharusnya diimbangi dengan meningkatnya tren kontribusi industri pengolahan. Namun kenyataannya kontribusi industri pengolahan berfluktuatif menurun yaitu dari 24,48% pada tahun 2016 menurun menjadi 23,59% pada

tahun 2019. Kondisi ini menggambarkan telah mulai terjadi kemunduran dalam transformasi ekonomi di kabupaten Indragiri Hilir dari pertanian ke industri.

Tabel 2-7 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

LAPANGAN USAHA/INDUSTRI		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,09	48,03	44,74	44,68	46,78
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,83	1,97	0,96	0,79
C	Industri Pengolahan	24,82	24,48	24,11	23,59	24,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	5,34	5,57	6,12	6,27	5,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,12	15,50	16,91	17,53	16,14
H	Transportasi dan Pergudangan	1,09	1,08	1,14	1,15	0,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,42	0,44	0,48	0,47	0,38
J	Informasi dan Komunikasi	0,55	0,56	0,61	0,64	0,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,55	0,60	0,59	0,58
L	Real Estat	0,78	0,80	0,86	0,88	0,86
M,N	Jasa Perusahaan	0,0029	0,003	0,0034	0,0035	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	1,85	1,73	1,78	1,76	1,66
P	Jasa Pendidikan	0,56	0,56	0,61	0,63	0,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,14	0,15	0,16	0,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,43	0,46	0,52	0,53	0,42
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2016 - 2020, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan konstruksi yang merupakan lapangan usaha terbesar

ketiga dan keempat pembentuk Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir. Relatif terbatasnya sumber - sumber lapangan usaha yang hanya mengandalkan pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi maka dipandang perlu upaya - upaya mengerakkan lapangan usaha potensial yang belum tersentuh dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir.

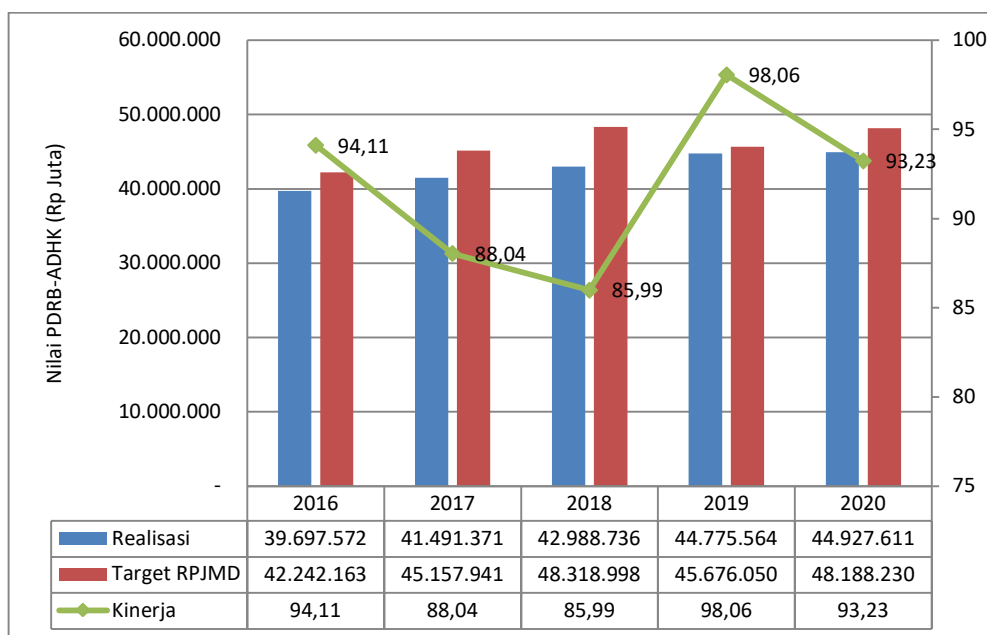
Tabel 2-8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA/INDUSTRI		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,71	3,64	2,04	4,00	3,49
B	Pertambangan dan Penggalian	1,39	43,54	47,89	0,45	-7,75
C	Industri Pengolahan	4,33	3,73	3,22	4,28	1,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,84	4,33	6,40	0,28	6,89
E	Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,38	15,71	-1,90	1,62	0,40
F	Konstruksi	6,26	6,66	4,04	4,87	-3,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,10	7,12	6,90	4,87	-8,30
H	Transportasi dan Pergudangan	4,77	3,88	2,16	2,23	- 18,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,31	6,79	4,51	2,54	- 17,99
J	Informasi dan Komunikasi	6,07	6,57	5,42	6,81	8,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,46	-2,87	3,88	0,17	1,63
L	Real Estat	5,29	5,84	4,31	6,03	0,95
M,N	Jasa Perusahaan	6,47	8,03	9,10	2,67	- 20,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	0,37	1,60	0,72	1,18	-3,29
P	Jasa Pendidikan	5,41	3,46	5,87	4,64	1,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,90	0,92	6,30	9,96	12,36
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,90	9,13	8,61	6,06	- 20,66

Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	4,68	4,56	3,61	4,19	0,34
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

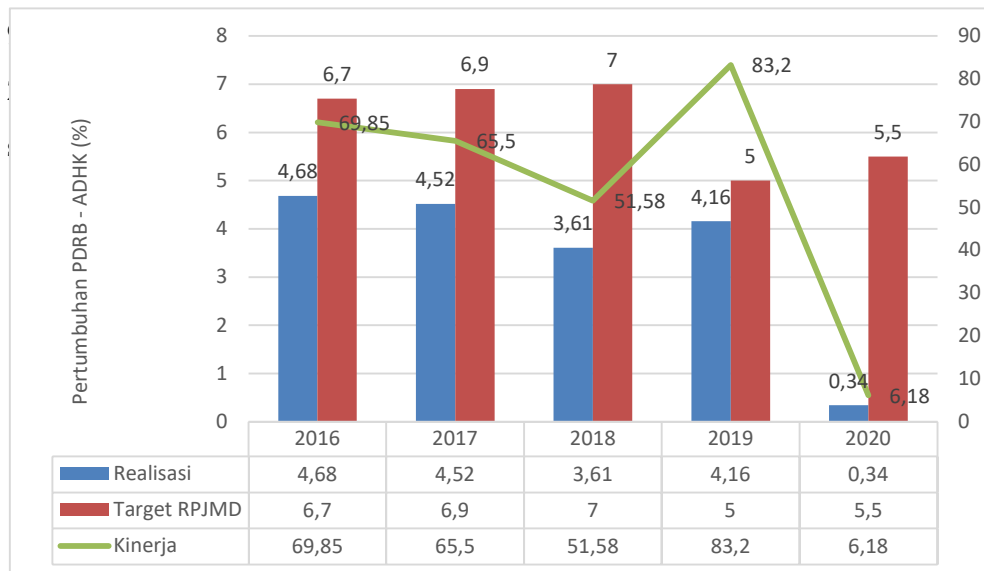
Lapangan usaha yang perlu mendapat perhatian untuk didorong agar dapat memberikan kontribusi yang besar pada Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat dari pertumbuhannya yang tinggi dari rata-rata pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 melanda, lapangan usaha jasa perusahaan dan jasa lainnya mengalami kontraksi cukup dalam yaitu 20,83% dan 20,66%. Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 12,36%. Lapangan usaha informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan cukup tinggi seiring dengan pembatasan interaksi yang diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah juga dilakukan secara daring. Lapangan usaha ini adalah sektor perlu mendapat perhatian, namun demikian, sektor pertanian dan industri pengolahan tetap menjadi prioritas utama.



Gambar 2-5 Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah 42.242.163 Pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp 48.318.998 (juta) pada tahun 2018. Kemudian target RPJMD untuk tahun 2019 dan 2020 disesuaikan menjadi Rp 45.676.050 (juta) dan Rp 48.188.230 (juta), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023. Realisasi nilai PDRB tahun 2016 sebesar Rp 39.697.572 (juta) dan pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,34% maka nilai PDRB 2020 Rp 44.927.611 (juta). Realisasi kinerja selama periode 2016 - 2020 berkisar antara 85,99% -



Gambar 2-6 Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

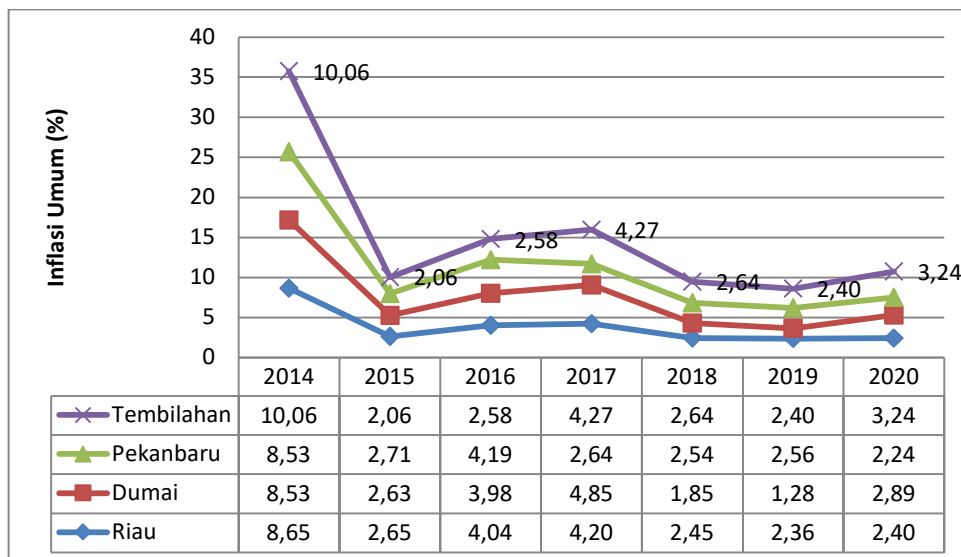
Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Pada tahun 2016 - 2018, realisasi pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami penurunan dari 4,68% - 3,61%. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir mulai pulih sehingga realisasi kinerjanya juga meningkat dengan sebesar 83,20% yang terkategori Sedang. Pada tahun 2020, realisasi pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kontraksi yang cukup dalam

akibat dari pandemi COVID-19 menjadi 0,34% dengan realisasi kinerja hanya 6,18%.

2.2.1.2. Inflasi

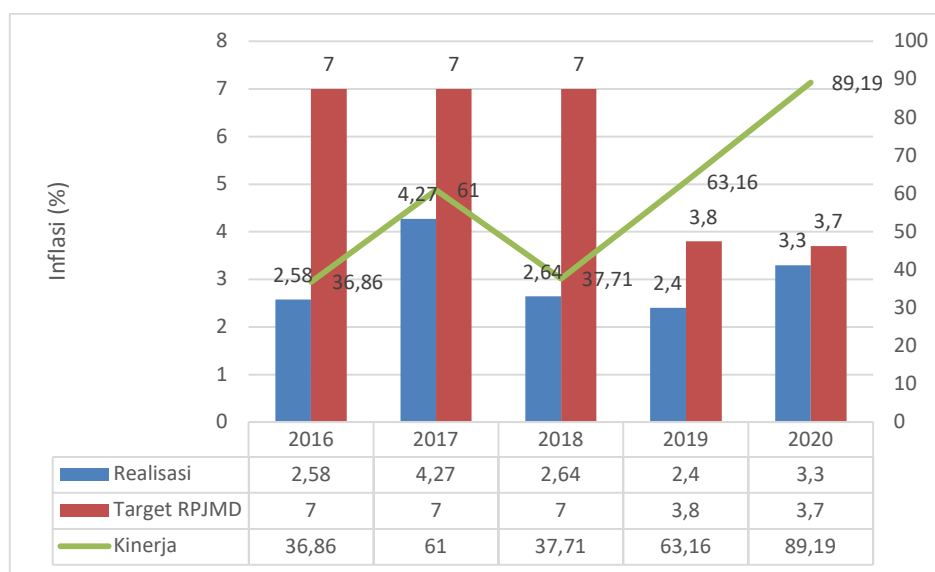
Selama periode 2014 – 2020, inflasi di Tembilahan – Indragiri Hilir berada terkategori inflasi ringan, kecuali tahun 2014 yang terkategori inflasi sedang. Bila dibandingkan daerah lain, secara umum inflasi di Tembilahan relatif lebih rendah. Pada tahun 2014, yang merupakan inflasi tertinggi pada periode ini, dimana andil inflasi menurut kelompok pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran bahan makanan (15,64%) diikuti transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (10,97%) dan perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (9,14%). Pada tahun 2017, andil inflasi menurut kelompok pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberi andil sebesar 2,84% diikuti pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,38%) dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,32%). Oleh karena itu, untuk lebih menjaga agar inflasi di Indragiri Hilir tetap rendah dengan kategori inflasi ringan maka kelompok pengeluaran bahan makanan; transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dan perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar perlu menjadi perhatian khususnya dalam hal kelancaran distribusinya.



Gambar 2-7 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2014 - 2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,0% serta untuk tahun 2019 dan 2020 sebesar 3,80% dan 3,70% yang masih terkategori inflasi ringan. Selama periode 2016 - 2020, inflasi di Indragiri Hilir berkisar antara 2,40% - 4,27%. Selama periode 2016 - 2020, realisasi kinerja umumnya terkategori sangat tinggi.

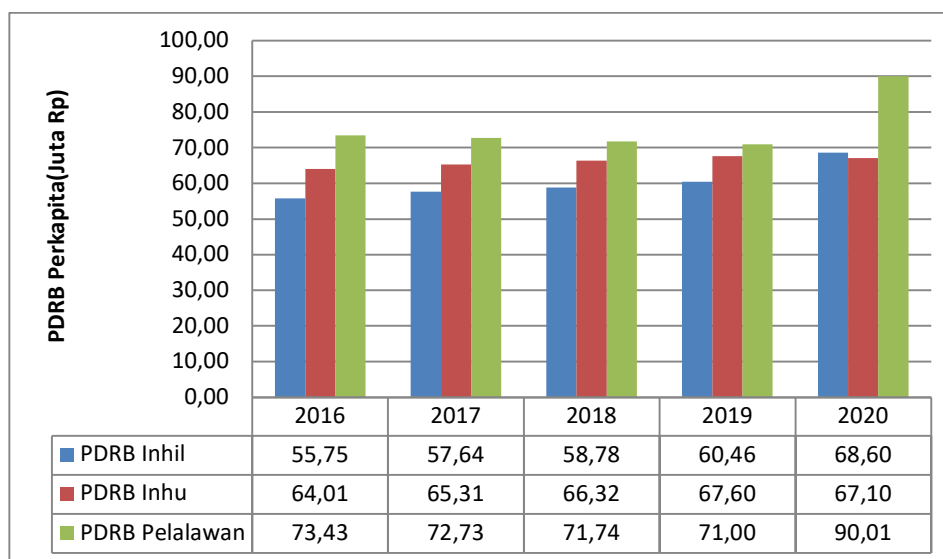


Gambar 2-8 Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.1.3. PDRB Per kapita

Selama periode 2016 - 2020, PDRB atas dasar harga konstan per kapita Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren yang terus meningkat. Pada tahun 2016, PDRB per kapita sebesar Rp 55,75 juta per kapita/tahun meningkat menjadi Rp 60,46 juta per kapita/tahun pada tahun 2019. PDRB per kapita kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hulu maupun PDRB per kapita Kabupaten Pelalawan. Selama periode 2016 - 2020, meski nilai PDRB per kapita kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terkecil namun memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi dibanding Indragiri Hulu maupun Pelalawan. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita meningkat sebesar 2,33% per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hulu yang hanya sebesar 1,42% per tahun dan Pelalawan yang pertumbuhannya -1% per tahun.

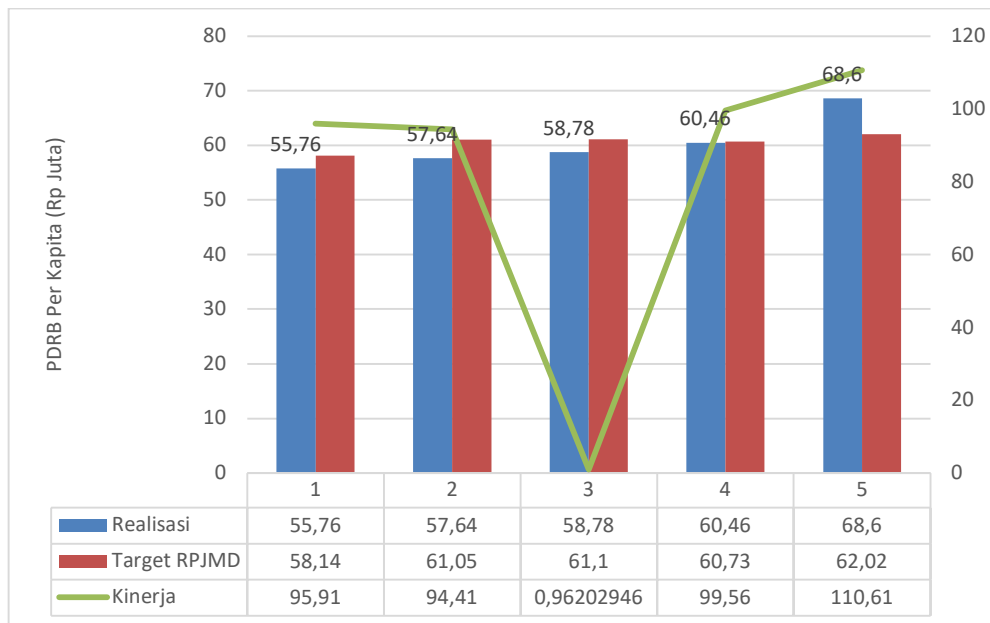


Gambar 2-9 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan Tahun 2016 - 2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditargetkan PDRB per kapita harga konstan tahun 2016 sebesar Rp 58,14 juta/kap/tahun, meningkat menjadi Rp 61,10 juta/kap/tahun pada tahun

2018. Kemudian untuk tahun 2019 disesuaikan menjadi 60,73 juta/kap/tahun dan sebesar 62,02 juta/kap/tahun pada tahun 2020 sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023. Realisasi PDRB per kapita tahun 2016 - 2020 berkisar antara Rp 55,76 juta/kap/tahun – Rp 62,02 juta/kap/tahun. Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja PDRB per kapita terkategori sangat tinggi.

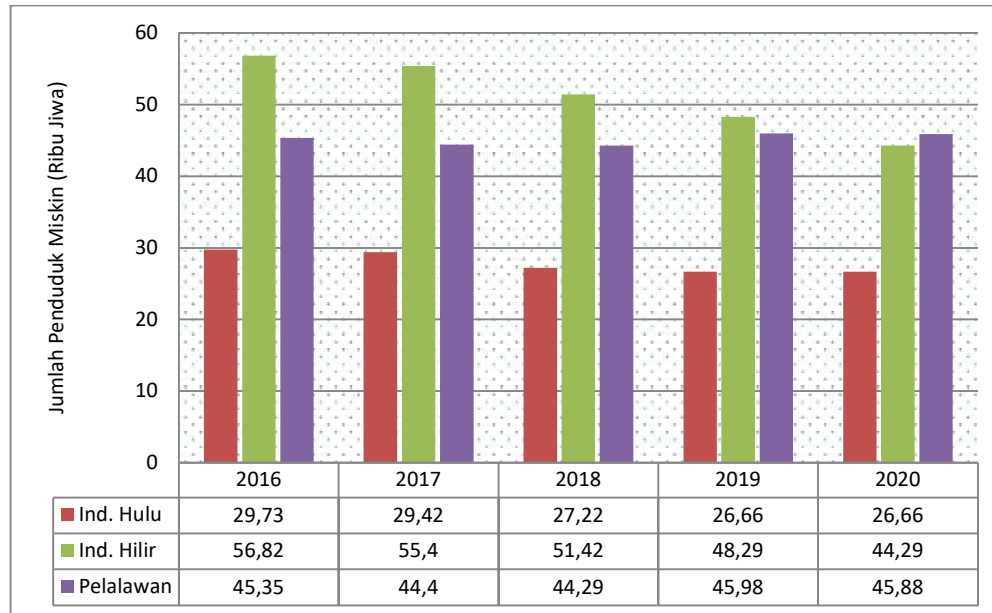


Gambar 2-10 Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Aumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.1.4. Kemiskinan

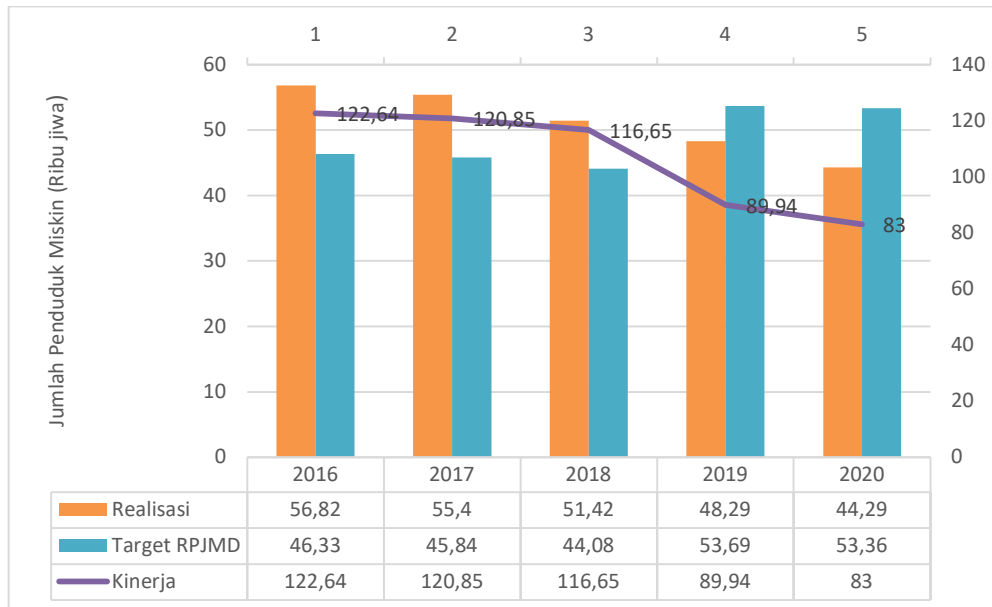
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 – 2020 memiliki tren menurun, dapat dilihat dari tabel berikut :



Gambar 2-11 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 – 2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

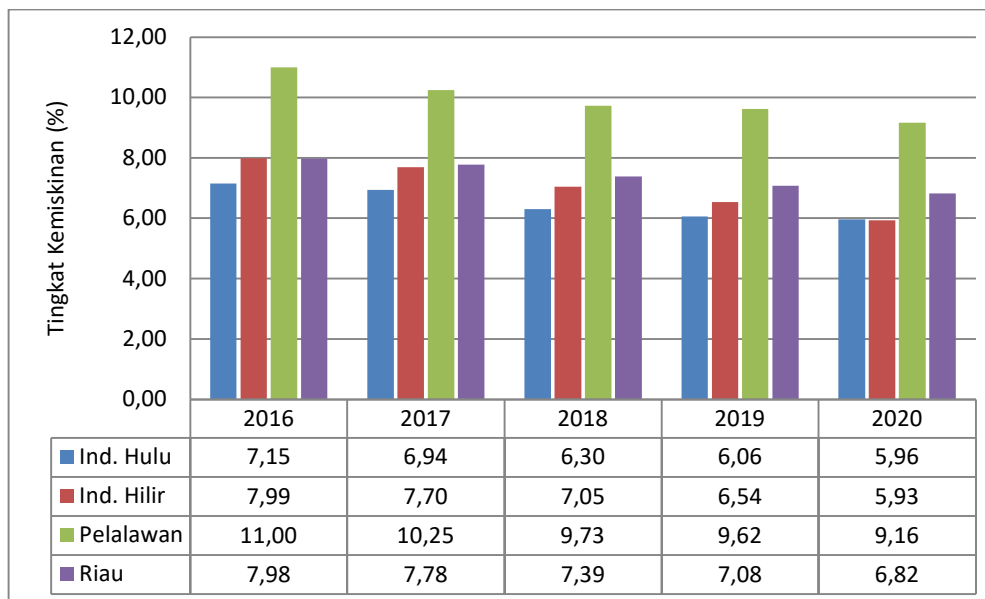
Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 – 2020 telah ditargetkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 46,33 ribu jiwa pada tahun 2016 menjadi 44,08 ribu jiwa pada tahun 2018, dan disesuaikan dengan target pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 target untuk tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 53,69 dan 53,36 ribu jiwa. Selama periode 2016 – 2020, realisasi jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir menurun. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir berjumlah 56,82 ribu jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 122,64% dan terkategori Sangat Tinggi.



Gambar 2-12 Kinerja Indikator Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

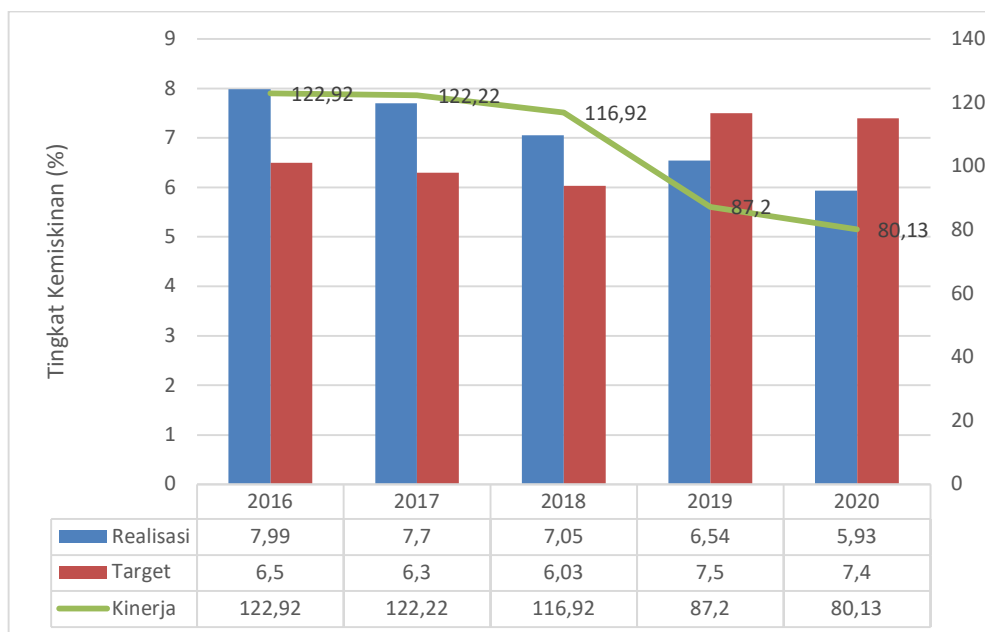
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir dan persentase kemiskinan memiliki tren berfluktuatif menurun. Selama periode 2016 – 2020, persentase kemiskinan atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 7,99% pada tahun 2016, turun menjadi 5,93% pada tahun 2020 atau rata-rata pertumbuhan penurunannya sebesar -7,74% per tahun. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Indragiri Hilir ini lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir lebih rendah dibanding Provinsi Riau yaitu 6,82%.



Gambar 2-13 Perkembangan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Sejalan dengan perkembangan realisasi jumlah penduduk miskin, Target persentase kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2020 adalah 7,50% dan 7,40%. Realisasi persentase kemiskinan tahun 2016 sebesar 7,99% dengan realisasi kinerja sebesar 122,92% dan terkategori sangat tinggi. Pada periode 2017 - 2020, realisasi persentase kemiskinan menurun dibanding tahun 2016 dengan realisasi kinerja berada pada kisaran antara 80,13% - 122,22% dan terkategori tinggi - sangat tinggi.



Gambar 2-14 Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir

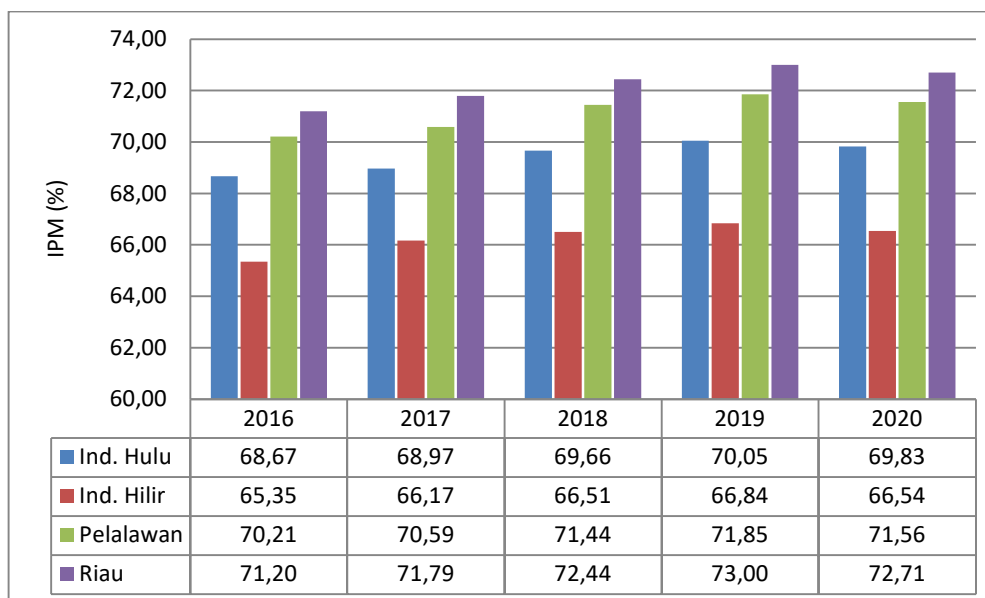
Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial menganalisis melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, APK SD/MI, APK SMP/MTs, angka harapan hidup, prevalensi balita gizi buruk dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

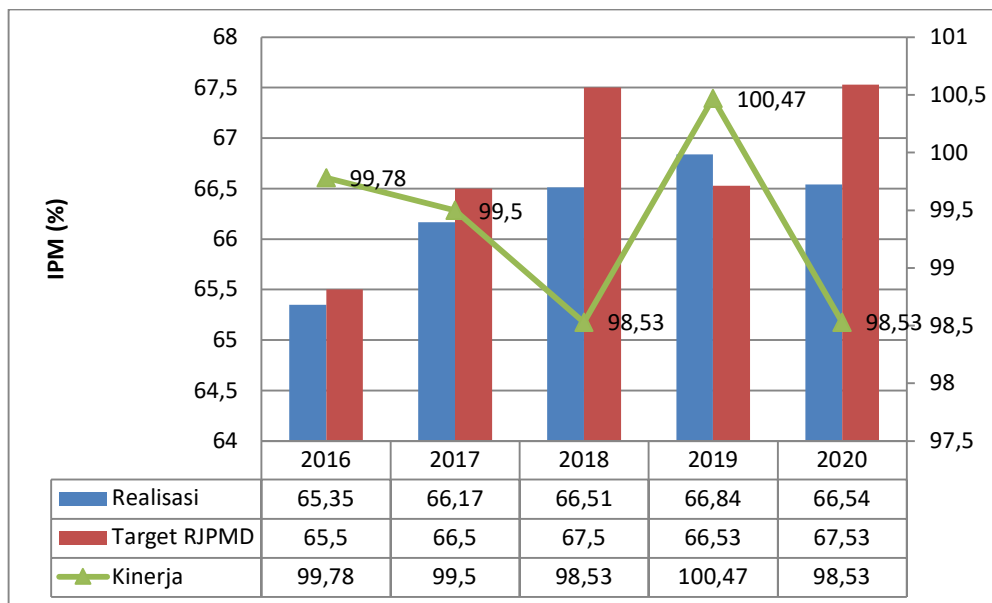
Selama periode 2016 - 2020 perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020, untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2-15 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan capaian IPM yaitu sebesar 65,50 pada tahun 2016, meningkat menjadi 67,50 % pada tahun 2018. Selama periode, capaian IPM Indragiri Hilir mendekati target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga realisasi kinerjanya berkisar antara 99,50% - 100,47% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, capaian IPM Indragiri Hilir sebesar 66,54% sehingga kinerjanya sebesar 98,53% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja IPM ini harus dilanjutkan pada periode pembangunan berikutnya.

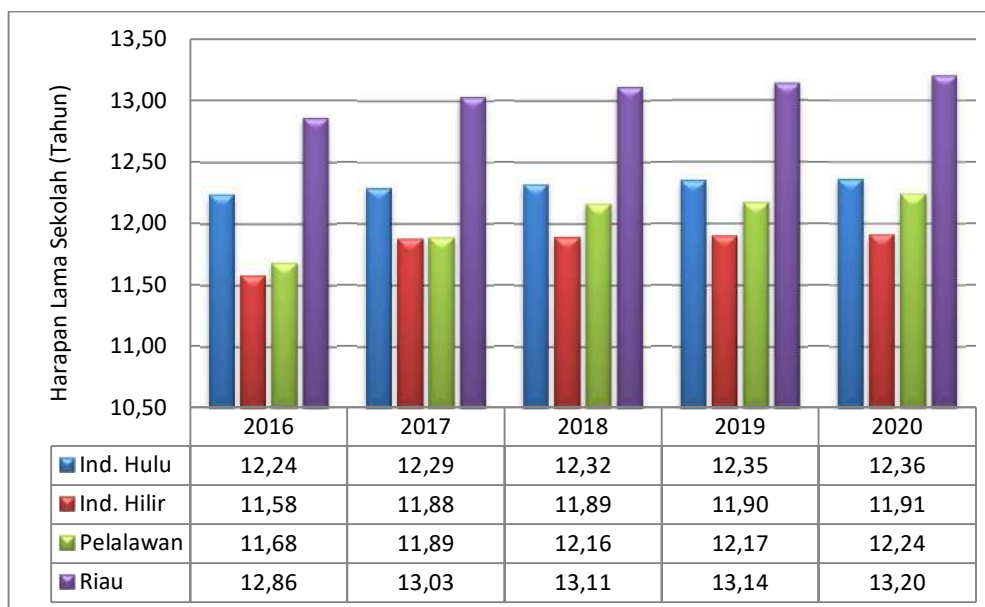


Gambar 2-16 Kinerja Indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.2.2. Harapan lama Sekolah

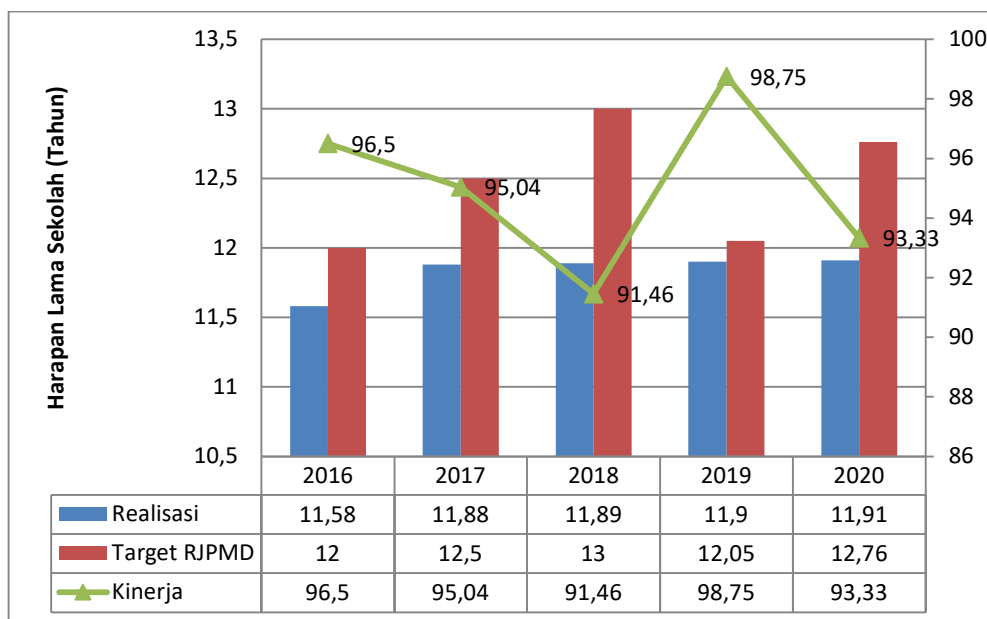
Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lama sekolah (tahun) yang diharapkan akan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Selama periode 2016 - 2020, HLS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yang menggambarkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir terus meningkat. Namun bila dibandingkan dengan kondisi pembangunan pendidikan dengan Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau memperlihatkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir adalah yang terendah sehingga perlu dilakukan percepatan dimasa yang akan datang. Selama periode 2016 - 2020, rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0.99% per tahun.



Gambar 2-17 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan HLS dengan trend meningkat target dari 12 tahun pada tahun 2016 menjadi 13 tahun pada tahun 2018. Realisasi HLS trendnya meningkat meski dengan slope yang lebih rendah dibanding slope target. Ditambah dengan target yang terus meningkat maka capaian kinerja menurun dari 96,50% pada tahun 2016 dengan kategori sangat tinggi menurun capaian kinerjanya menjadi 95,04% tahun pada tahun 2017 dan 98,75% yang kategorinya masih sangat tinggi pada periode 2019. Pada tahun 2020 capaian kinerjanya sebesar 93,33% dengan kategori masih sangat tinggi. Capaian kinerja HLS yang terus menurun perlu mendapat perhatian untuk senantiasa ditingkatkan.

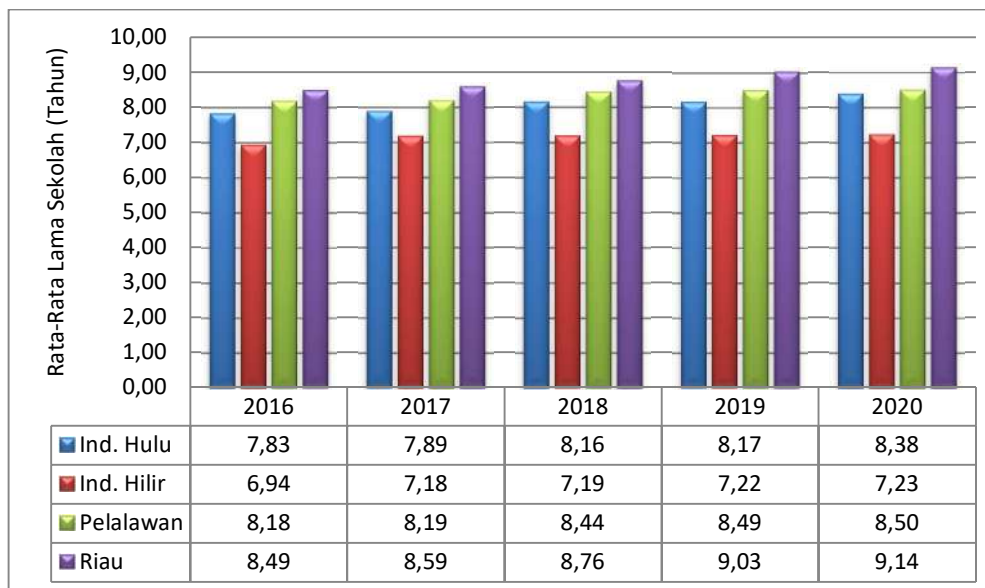


Gambar 2-18 Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah

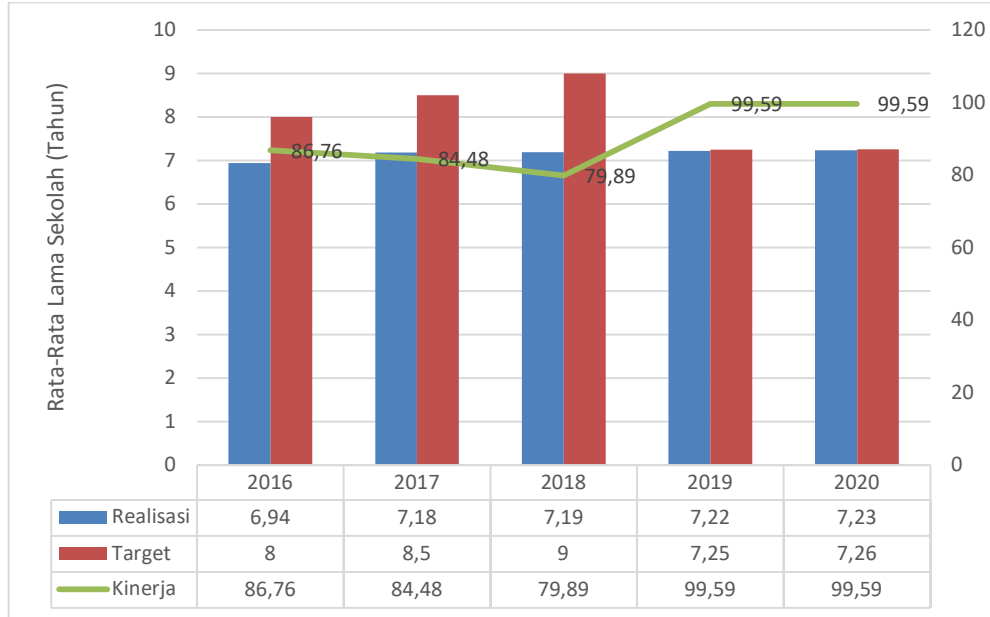
Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Selama period APK e 2016 – 2020, RLS kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat meski dengan slope yang hampir datar. Posisi RLS kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi yang terendah dibandingkan dengan RLS kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau, sehingga kondisi ini perlu dilakukan percepatan dalam pembangunan bidang pendidikan periode berikutnya. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan RLS kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,44% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan RLS kabupaten tetangga (Indragiri Hulu 1,10% per tahun dan Pelalawan 0,97% per tahun), meski lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan RLS Provinsi Riau (1,61% per tahun).



Gambar 2-19 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan bahwa RLS terus meningkat dari 8,00 pada tahun 2016 menjadi 9,00 pada tahun 2018. Realisasi RLS meningkat dari 6,94 tahun pada tahun 2016 menjadi 7,18 tahun pada tahun 2017 dan diperkirakan capaiannya menjadi 7,23 tahun 2020. Capaian RLS tahun 2020 ini masih dibawah Wajib Belajar 9 tahun. Capaian kinerja RLS kabupaten Indragiri Hilir trendnya terus menurun. Pada tahun 2016, realisasi kinerja sebesar 86,76% yang terkategori tinggi. Namun pada periode 2019-2020, realisasi kinerjanya berkisar 99,59% dengan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2020, realisasi kinerja sebesar 99,59% yang masih terkategori sangat tinggi. Relatif rendahnya RLS dan masih dibawah wajib belajar 9 tahun, harus menjadi perhatian dan prioritas pada pembangunan periode berikutnya.



Gambar 2-20 Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

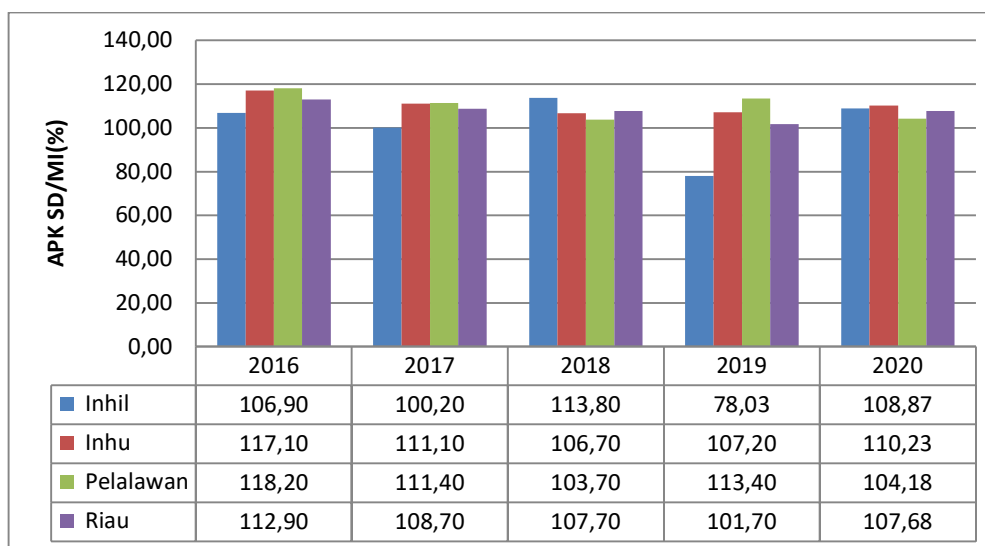
2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK yang dibahas terdiri dari APK SD/MI dan APK SMP/MTs

a. APK SD/MI

Selama periode 2016 - 2020, APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend menurun. Pada tahun 2016, APK SD/MI Indragiri Hilir sebesar 106,90% menurun menjadi 100,20% tahun 2017 dan menurun lagi menjadi 78,03% pada tahun 2020. Capaian APK SD/MI Indragiri Hilir adalah yang terendah dibandingkan capaian APK SD/MI kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APK SD/MI menurun sebesar 1,45% per tahun. Penurunan rata-rata pertumbuhan APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir adalah yang tertinggi setelah Kabupaten Indragiri Hulu (-1,87% per tahun). Rata-rata

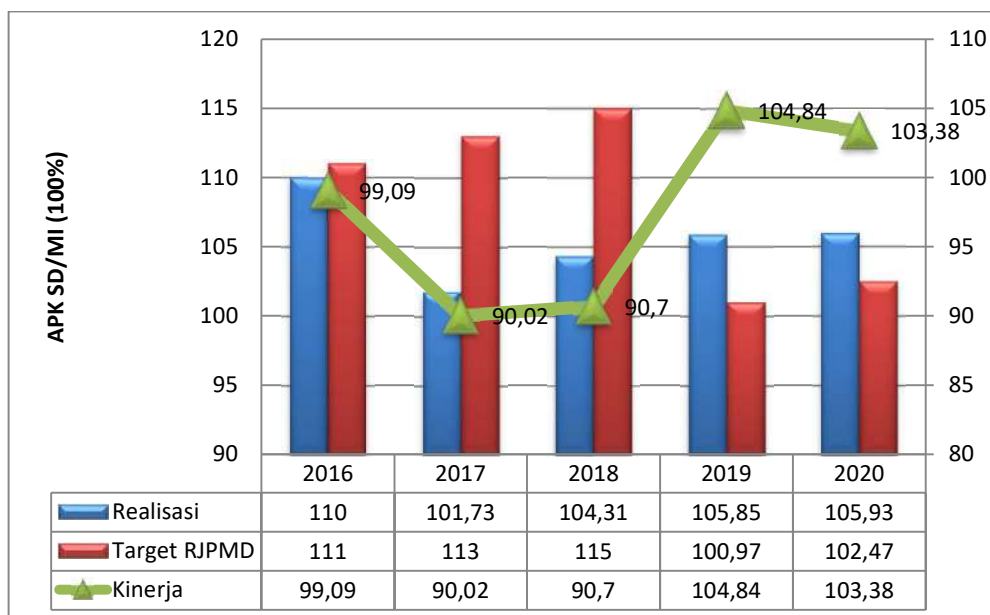
pertumbuhan APK SD/MI Kabupaten Pelalawan sebesar -1,11 dan Provinsi Riau sebesar -0,76%.



Gambar 2-21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

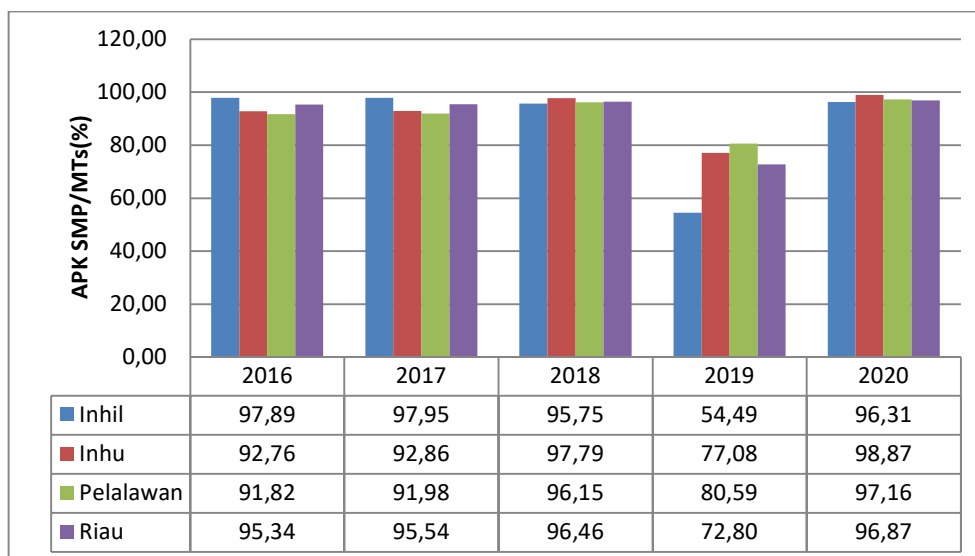
Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan bahwa APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2014 - 2018, trendnya terus meningkat dari 111% pada tahun 2016 menjadi 115% pada tahun 2018. Realisasi APK SD SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun sehingga realisasi kinerja menjadi turun. Pada tahun 2016-2017, realisasi kinerja menurun dari 110% menjadi 101,73% terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2017, realisasi kinerja menurun sebagai konsekwensi menurunnya capaian APKSD/SM dan meningkatnya target sehingga capaian kinerja menjadi turun menjadi 90,02% yang terkategori capaian kinerja Tinggi. Pada tahun 2020, diperkirakan capaian APK SD/MI kembali menurun sehingga capaian kinerja juga turun menjadi 103,38% yang terkategori sangat Tinggi.



Gambar 2-22 Kinerja Indikator APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir
 Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. APK SMP/MTs

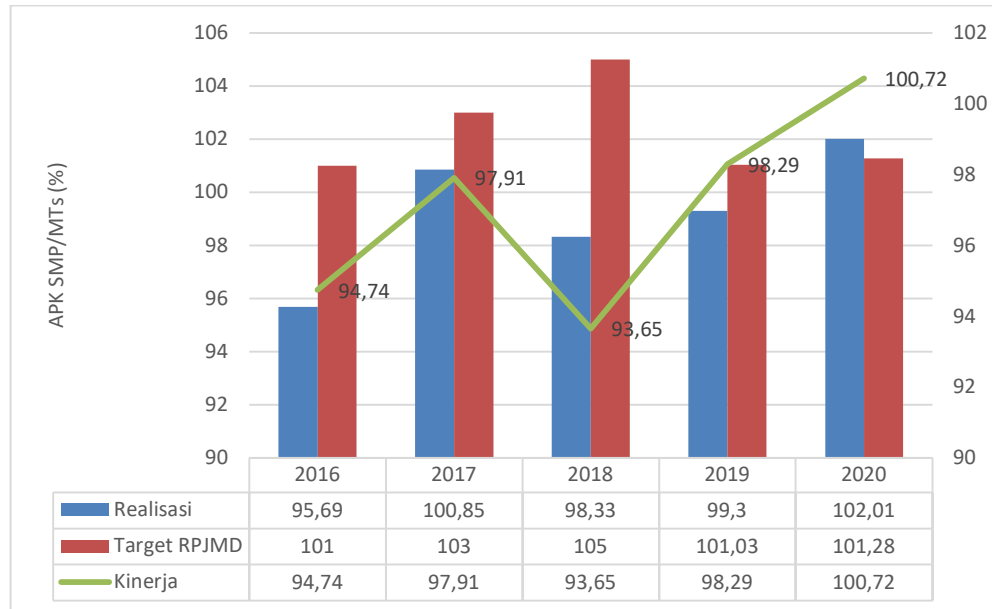
Selama periode 2016 - 2020, APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir trendnya meningkat yaitu dari 97,89% pada tahun 2016 menjadi 97,95% pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan capaian APK SD/SMP, maka capaian APK SMP/MTs relatif lebih rendah. Hal yang menonjol dibanding indikator-indikator sebelumnya, indikator APK SMP/MTs inilah yang nilainya lebih tinggi dibanding semua kabupaten sekitarnya bahkan juga dengan Provinsi Riau. Selama periode 2016 - 2020, rata-rata pertumbuhan APK SMP/MTs Indragiri Hilir meningkat 1,76% per tahun. Capaian rata-rata pertumbuhan APK SMP/MTs Indragiri Hilir (1,76% per tahun) adalah yang tertinggi dibanding capaian APK SMP/MTs Indragiri Hulu dan Pelalawan serta Provinsi Riau dengan rata-rata pertumbuhan menurun.



Gambar 2-23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan APK SMP/MTs trendnya meningkat dari 101% pada tahun 2016 menjadi 105% pada tahun 2018. Realisasi capaian APK SMP/MTs Indragiri Hilir trendnya berfluktuatif meningkat. Selama periode 2016-2018, realisasi kinerja APK SMP/MTs bekisar antara 93,65% - 97,91% yang semua capaian terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2020, capaian APK SMP/MTs sebesar 102,01 dengan capaian kinerja sebesar 100,72 % dan terkategori sangat tinggi. Capaian kinerja SMP/MTs perlu dipertahankan dan bahkan ditingkat pada pembangunan periode berikut agar upaya pencapaian wajib belajar 9 tahun dan rata-rata lama sekolah pada IPM terus meningkat sehingga IPM Kabupaten Indragiri Hilir naik lebih tinggi lagi.

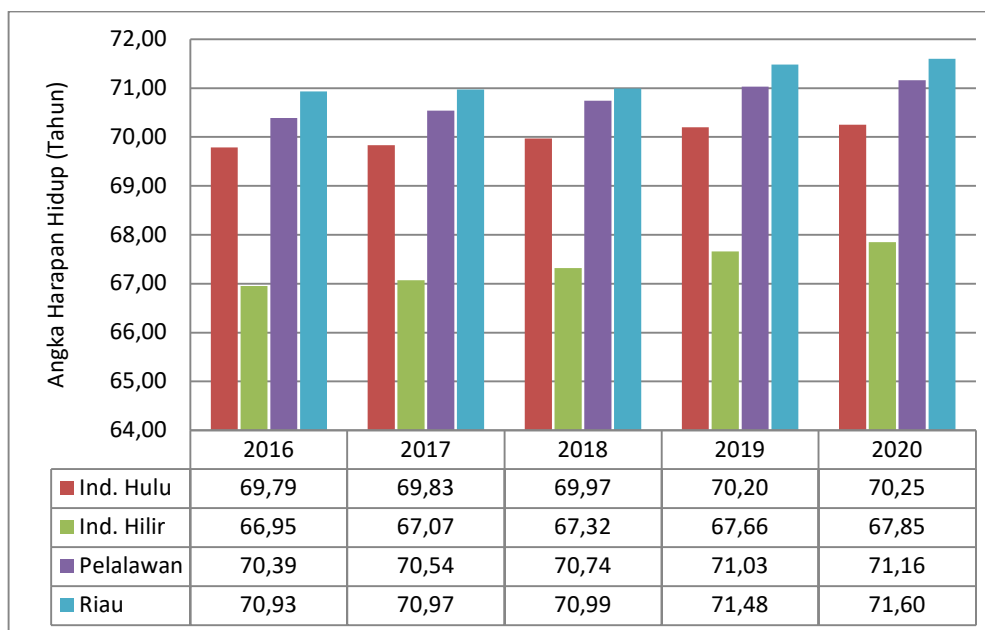


Gambar 2-24 Kinerja Indikator APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.2.5. Angka Harapan Hidup

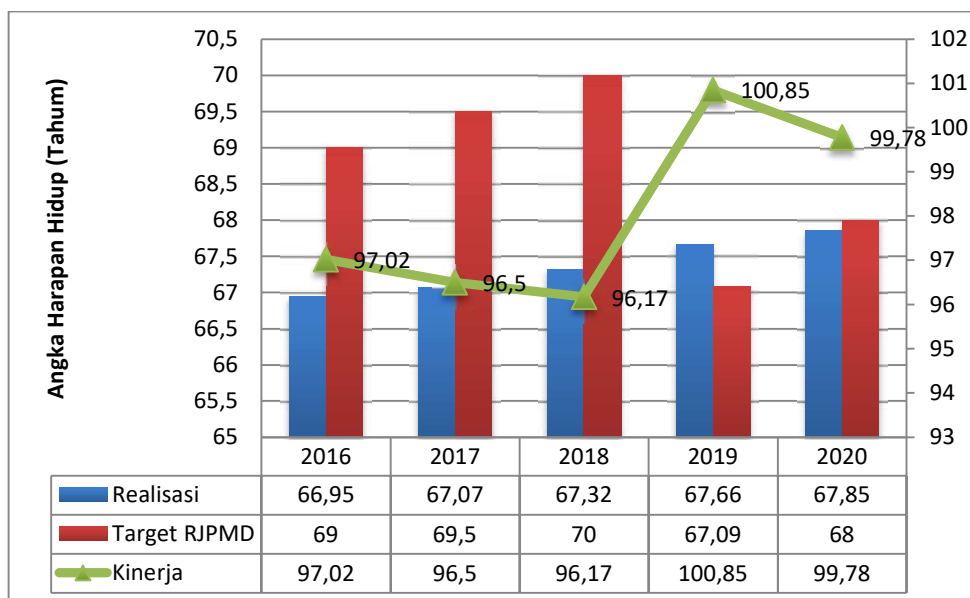
Angka harapan hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Selama periode 2016 – 2020, AHH kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yaitu dari 66,95 tahun pada tahun 2016 menjadi 67,85 tahun pada tahun 2020. Capaian AHH kabupaten Indragiri Hilir ini adalah yang terendah dibanding capaian AHH Kabupaten Indragiri Hulu (70,25 tahun) dan Pelalawan (71,16 tahun) serta Provinsi Riau (71,60 tahun). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan AHH kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,24% per tahun, tertinggi dibanding rata-rata pertumbuhan UHH Kabupaten Indragiri Hulu (0,13% per tahun) dan Pelalawan (0,23% per tahun) serta Provinsi Riau (0,20% per tahun). Posisi AHH Kabupaten Indragiri Hilir yang terendah dibanding capaian AHH kabupaten sekitarnya perlu menjadi dorongan untuk dilakukan percepatan pada pembangunan bidang kesehatan pada periode berikutnya.



Gambar 2-25 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016-2020 telah ditetapkan AHH dengan trend meningkat yaitu dari 69 tahun pada tahun 2016 menjadi 70 tahun pada tahun 2018. Meski realisasi capaian AHH terus meningkat yaitu dari 69 tahun pada tahun 2016 menjadi 70 tahun 2018, namun peningkatan target jauh lebih tinggi sehingga realisasi kinerja terus menurun. Pada tahun 2016 , realisasi kinerja sebesar 97,02% yang terkategori sangat tinggi, menurun realisasi kinerja menjadi 96,50% pada tahun 2017 yang kategori capaiannya masih sangat tinggi. Pada tahun 2020 capaian AHH sebesar 67,85% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 99,78% dan terkategori sangat tinggi. Meski capaian kinerja terkategori tinggi namun dengan posisi AHH yang terendah dibanding AHH kabupaten sekitarnya yang menggambarkan bahwa derajat kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir masih rendah sehingga perlu menjadi perhatian serius pada pembangunan periode berikutnya.

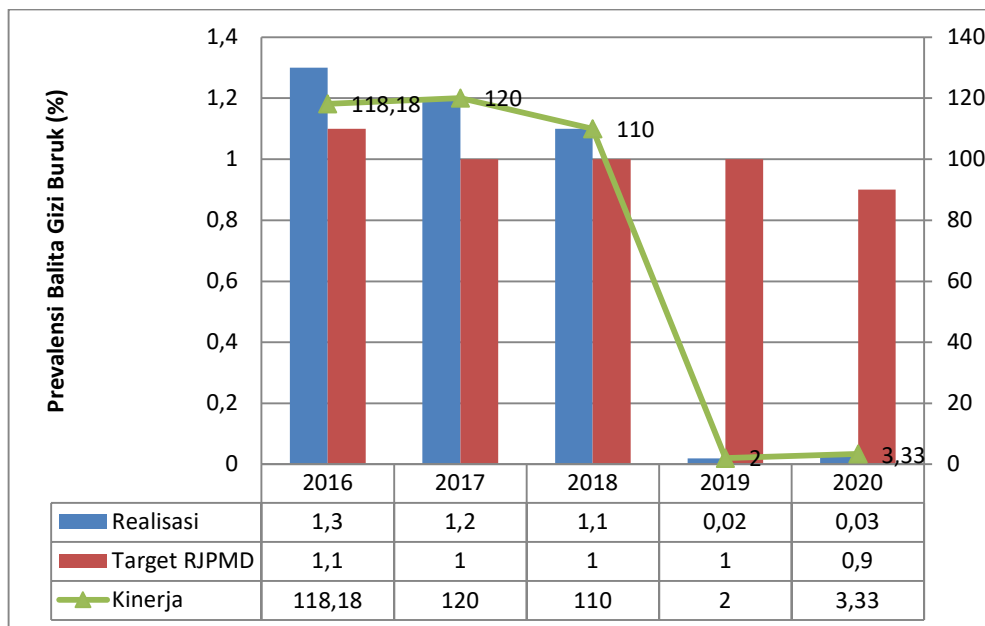


Gambar 2-26 Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.2.6. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016-2020 telah ditetapkan bahwa target prevalensi balita gizi buruk menurun dari 1,10% menjadi 1,00% pada tahun 2018. Realisasi capaian prevalensi balita gizi buruk berfluktuatif menurun dari 1,10% pada tahun 2016 menjadi 1% pada tahun 2017 dengan realisasi kinerja berkisar antara 118,18% - 120% yang terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan prevalensi balita gizi buruk sebesar 1% sehingga realisasi kinerja masing-masingnya sebesar 120% dan 110% yang keduanya terkategori Tinggi.

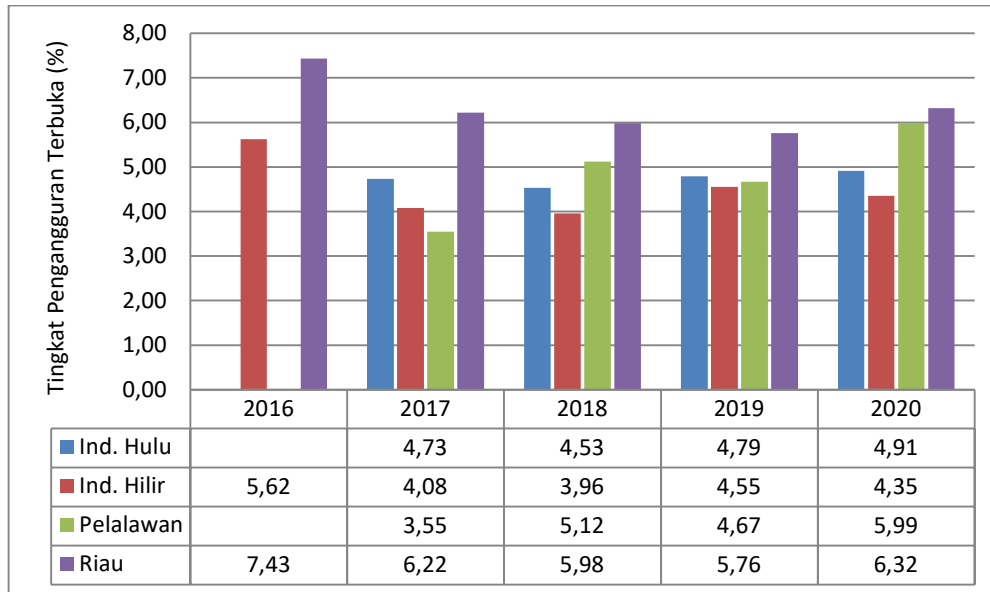


Gambar 2-27 Kinerja Indikator Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

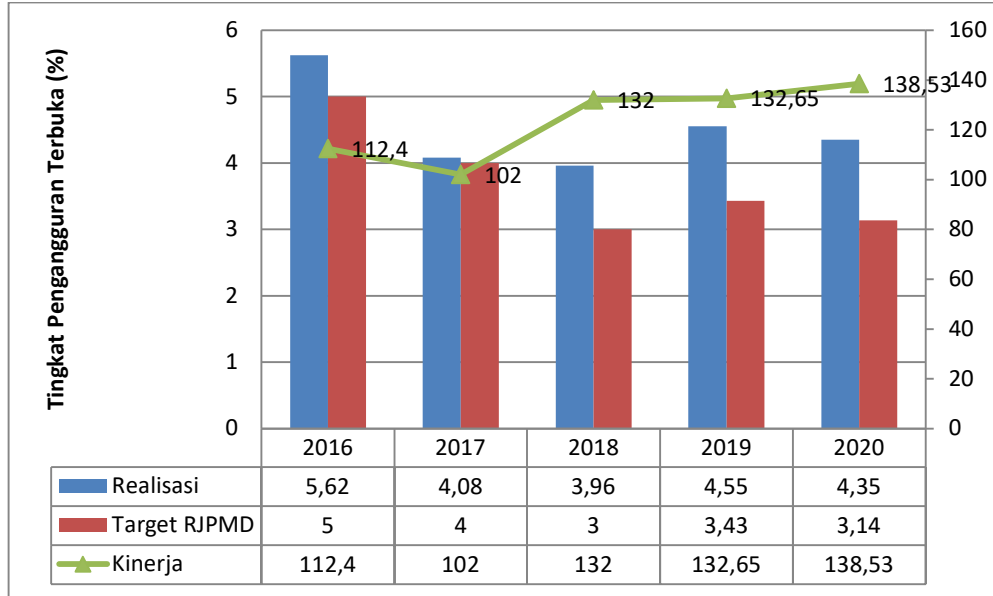
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Selama periode 2016 - 2020, TPT Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun yang bermakna kuantitas dan tingkat pengangguran menurun. Pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka di Indragiri Hilir sebesar 5,62%, meningkat menjadi 3,96% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 4,55% pada tahun 2019, kemudian kembali menurun menjadi 4,35% pada tahun 2020. Pada tahun 2018, capaian TPT Kabupaten Indragiri Hilir (4,08%) adalah yang terendah dibanding TPT Provinsi Riau (6,20%) dan Indragiri Hulu (4,70%) serta Pelalawan (5,30%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan TPT Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,86% per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan TPT kabupaten Indragiri Hulu sebesar 3,86% per tahun. Namun, Provinsi Riau lebih baik dengan TPT yang terus mengalami penurunan rata - rata sebesar 1,59% per tahun.



Gambar 2-28 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Indragiri Hilir dan kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilir.kab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan TPT Kabupaten Indragiri Hilir dengan trend menurun yaitu dari 5,00% pada tahun 2016 menjadi 4,0% pada tahun 2017. Realisasi TPT yang berfluktuatif meningkat dan target yang semakin menurun menjadikan realisasi kinerja memiliki trend menurun. Pada tahun 2016 dengan realisasi kinerja sebesar 112,4% dan terkategori Sangat Tinggi, menurun menjadi 102% pada tahun 2017, yang terkategori sangat Tinggi. Pada tahun 2017, realisasi TPT Kabupaten Indragiri Hilir meningkat menjadi 4,08% dengan kinerja sebesar 102% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, capaian TPT Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,35% dengan realisasi kinerja sebesar 138,53% yang terkategori sangat tinggi. Kondisi TPT yang berfluktuatif meningkat dengan capaian kinerja yang cenderung menurun ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan periode berikutnya.



Gambar 2-29 Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

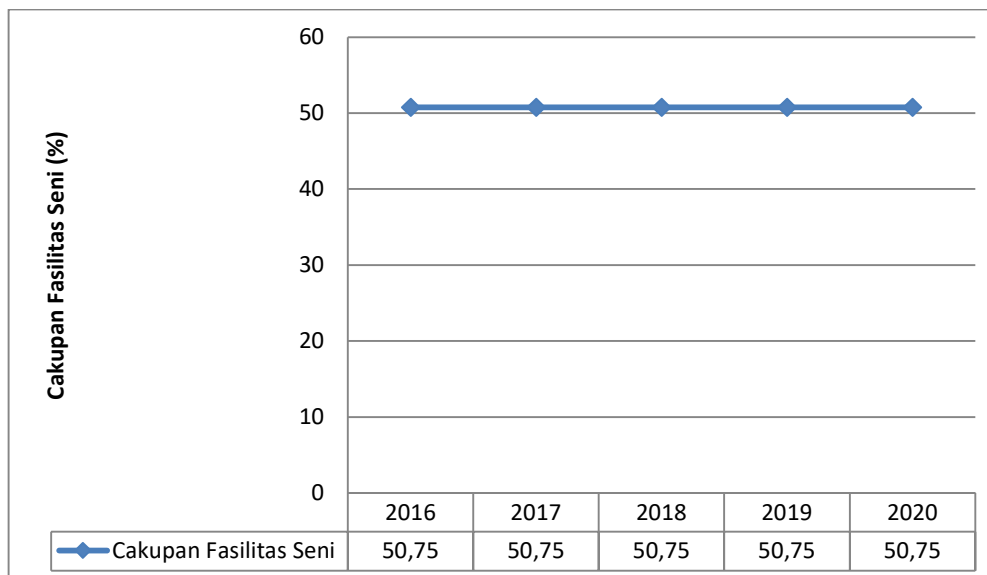
Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

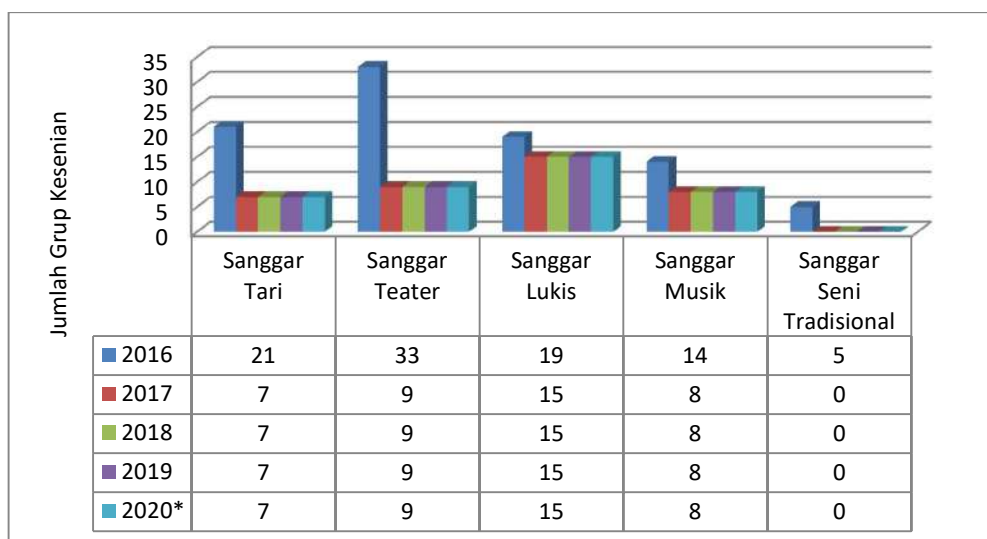
Fokus seni budaya dan olahraga terdiri dari seni budaya yang direpsentasikan dari cakupan fasilitasi seni dan olahraga yang direpresentasikan dari jumlah lapangan olahraga.

2.2.3.1. Seni Budaya

Selama periode 2016-2020, perkembangan fasilitasi seni budaya oleh pihak terkait relatif tidak mengalami perkembangan yang berarti. Fasilitasi seni budaya yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan-kegiatan seni budaya yang telah dilakukan sebelumnya seperti festival bakaroh, sampan, menongkah, seribu telur dan karnaval budaya. Padahal masih banyak seni-budaya indragiri hilir yang perlu diangkat sehingga akan dapat menjadi daya tarik wisata ke Indragiri Hilir.



Gambar 2-30 Perkembangan Cakupan Fasilitas Seni Budaya di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

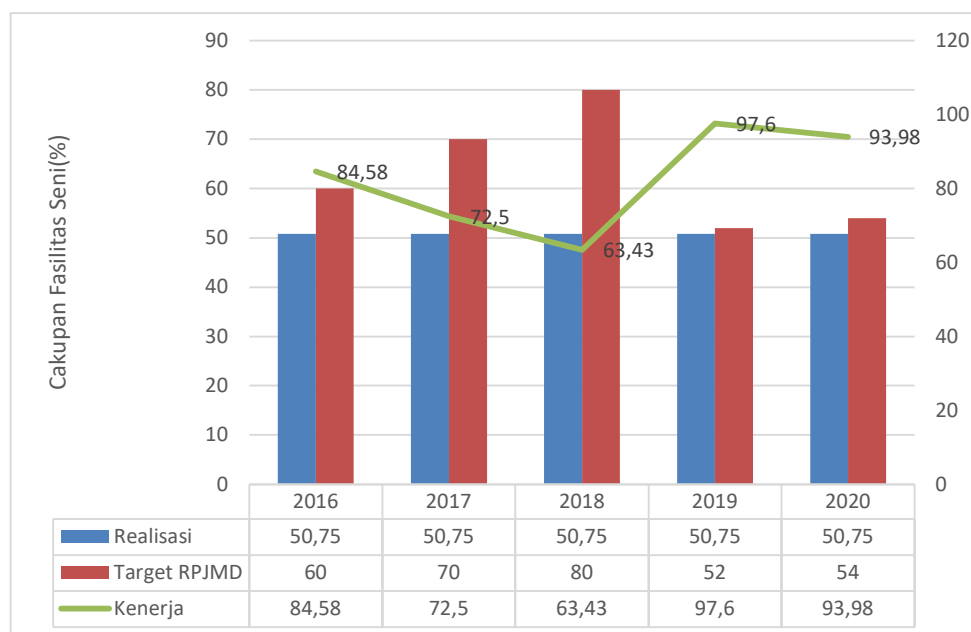


Gambar 2-31 Perkembangan Group kesenian di kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan bahwa cakupan fasilitas seni pada tahun 2016 sebesar 60% meningkat menjadi 80% pada tahun 2018. Realisasi cakupan fasilitas seni stagnan sebesar 50,75%. Target RPJMD terhadap cakupan fasilitas seni terus meningkat dan disisi lain realisasi tetap sebesar 50,75% maka realisasi kinerja terus

menurun. Pada tahun 2016 sebesar 84,58% dan terkategori tinggi. Pada tahun 2017-2018 menurun menjadi 72,5% dan 63,43 terkategori sedang. Pada tahun 2019 dan 2020 realisasi meningkat menjadi 97,6% - 93,98% dan terkategori sangat tinggi. Alasan tidak tersedianya dana untuk fasilitasi cakupan seni adalah hal yang paling menonjol disampaing alasan lain seperti keterbatasan sumberdaya manusianya. Kedepan, dalam upaya menarik wisatawan ke Indragiri Hilir dan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir, perlu upaya peningkatan kinerja cakupan fasilitasi seni di Kabupaten Indragiri Hilir.



Gambar 2-32 Kinerja Indikator Cakupan Fasilitasi Seni Budaya

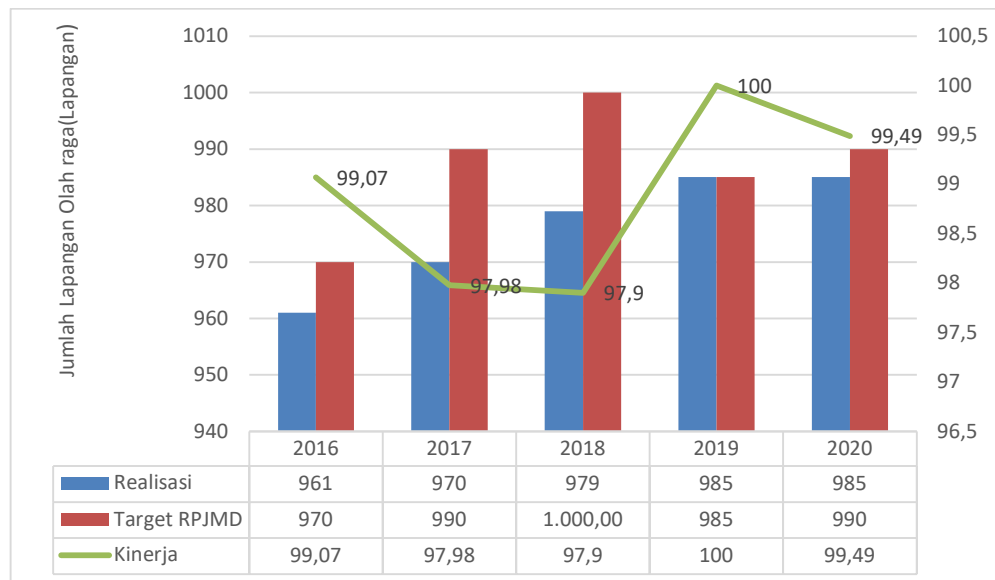
Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.2.3.2. Olahraga

Selama periode 2016 - 2020, perkembangan penyediaan lapangan olahraga sebagai representasi perkembangan pembinaan olahraga di Indragiri Hilir memiliki trend terus meningkat. Pada tahun 2016, jumlah lapangan olahraga (sepakbola, volly, badminton, tenis, takraw, futsal dan lainnya) meningkat dari 961 unit menjadi 985 unit pada tahun 2020. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan jumlah lapangan olahraga meningkat

sebesar 1,18% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Indragiri Hilir 0,66% per tahun. Kondisi ini cukup menggembirakan yang menggambarkan bahwa penduduk Indragiri Hilir memiliki animo yang tinggi berolahraga. Namun hal yang penting dalam pembinaan olahraga adalah melakukan olahraga prestasi yang menghasilkan atlit-atlit berkaliber juara Provinsi Riau dan Nasional atau bahkan juara internasional.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa jumlah lapangan olahraga menjadi indikator kinerja daerah. Pada tahun 2016 telah ditargetkan jumlah lapangan olahraga sebanyak 970 unit, meningkat menjadi 1000 unit pada tahun 2018. Realisasi jumlah lapangan olahraga sedikit dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 97,90% - 100% yang semuanya terkategori sangat tinggi. Pencapaian kinerja indikator ini seharusnya diikuti dengan pembinaan yang mengarah kepada pembinaan atlet-atlet berprestasi di tingkat provinsi, nasional maun internasional. Upaya pembinaan atlet-atlet berprestasi ini perlu menjadi perhatian pada pembangunan ke depan.



Gambar 2-33 Kinerja Indikator Jumlah Lapangan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri 4 layanan yaitu (i) layanan urusan wajib dasar, (ii) layanan urusan wajib non dasar, (iii) layanan urusan pilihan dan (iv) urusan penunjang.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar terdiri dari 6 urusan dasar yaitu (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum dan penataan ruang, (iv) perumahan rakyat dan pemukiman, (v) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan (vi) sosial.

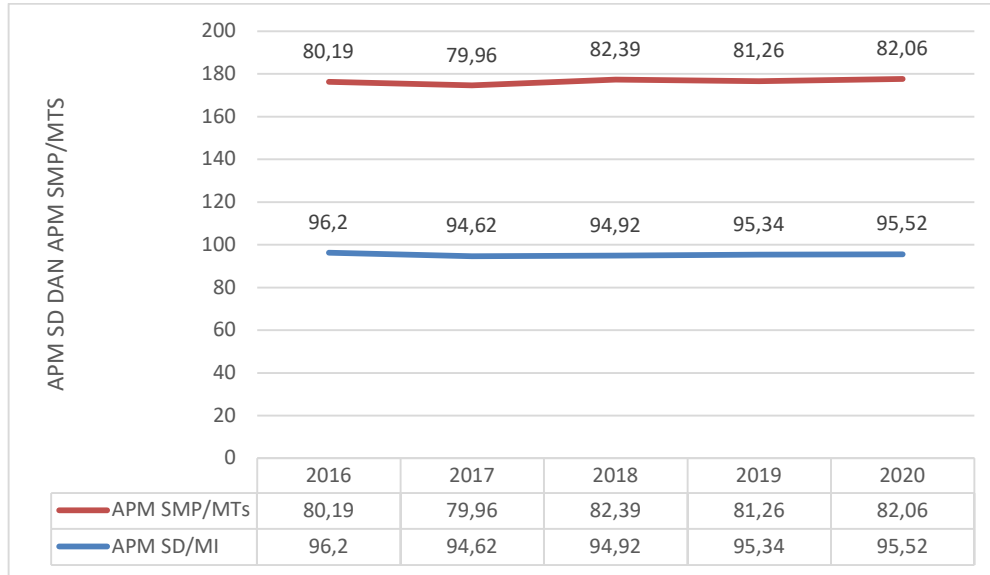
2.3.1.1. Pendidikan

Layanan urusan wajib dasar bidang urusan pendidikan dianalisis meliputi indikator kinerja (a) Angka partisipasi murni (APM), (b) Angka partisipasi sekolah (APS), (c) Angka putus sekolah, (d) Rasio ketersediaan sekolah, (e) Rasio guru terhadap Murid dan (f) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu. Selama periode 2016 - 2020, APM SD/MI Indragiri Hilir memiliki meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 96,20% menurun menjadi 94,62% pada tahun 2017, kemudian mengalami peningkatan menjadi 95,52% pada tahun 2020. Selama periode ini terdapat 3,80% - 4,48% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian APM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2019 sebesar 95,34%, lebih rendah dibanding APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 98,44% dan 97,32%. Oleh karena itu, upaya meningkatkan APM SD/MI hingga mencapai 100% perlu terus

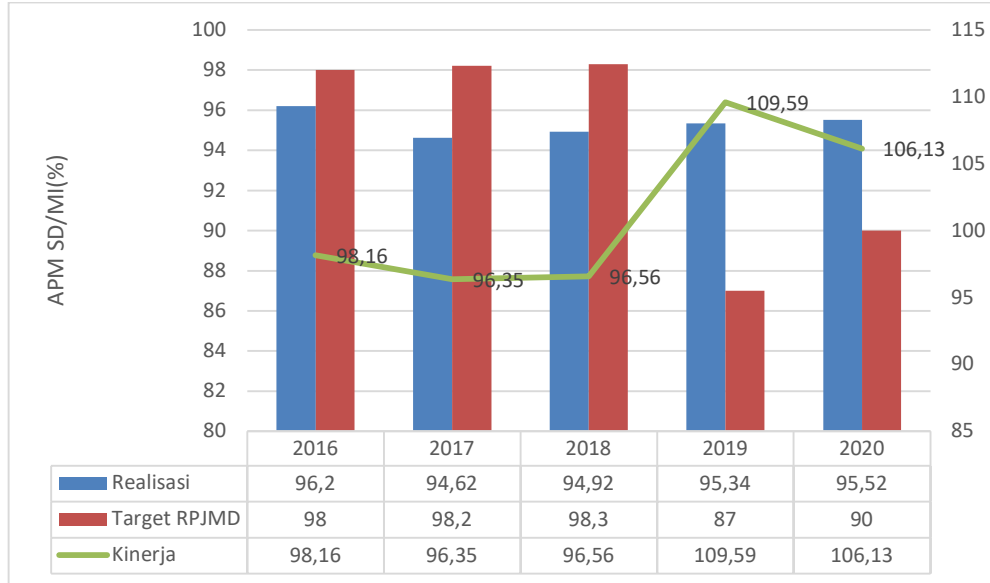
dilakukan agar semua penduduk umur SD/MI dapat bersekolah sehingga juga mendorong terhadap pencapaian wajib belajar dan IPM Indragiri Hilir. Selama periode 2016 – 2020, rata-rata pertumbuhan APM SD/MI Indragiri Hilir menurun sebesar 0,31% per tahun.



Gambar 2-34 Perkembangan APM SD/MTs dan APM SMP/MTs

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

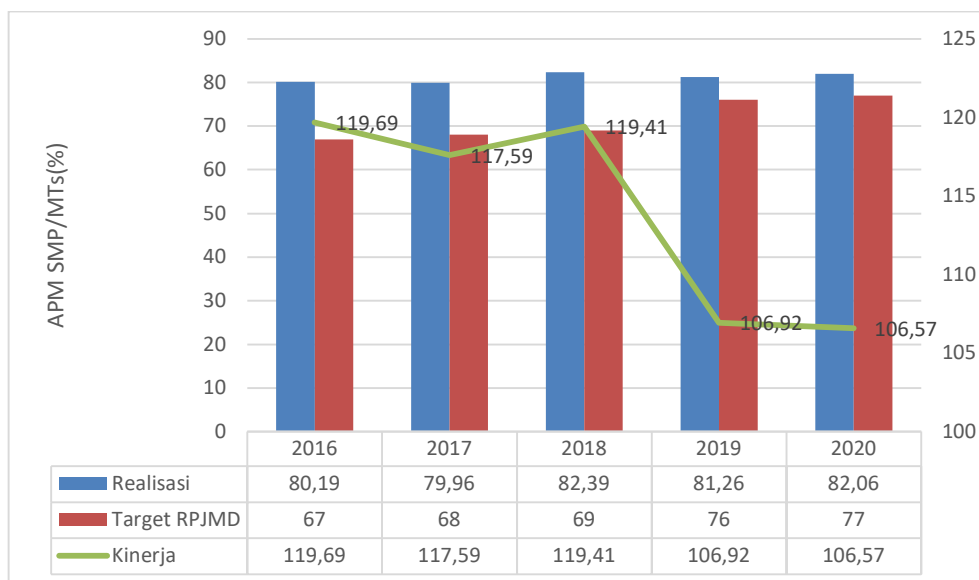
Pada periode yang sama, APM SMP/MTs memiliki trend meningkat yaitu dari 80,19% menjadi 82,06%. Meski trend APM SMP/MTs memiliki trend yang meningkat namun nilai APM SMP/MTs jauh lebih rendah dibanding APM SD/MI. Selama periode 2016-2020 ini, terdapat 17,94% - 19,81% penduduk umur sekolah SMP/MTs yang belum sekolah. Upaya mengesa peningkatan APM SMP/MTs menjadi 100% sehingga wajib belajar 9 tahun tercapai dan IPM meningkat lebih cepat. Capaian APM SMP/MTs Indragiri Hilir tahun 2020, lebih tinggi dibanding capaian APM SMP/MTs Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 76,53% dan 78,87%. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APM SMP/MTs Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,04% per tahun



Gambar 2-35 Kinerja Indikator APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Pada RPJMD Indragiri Hilir tahun 2016-2020 telah ditargetkan APM SD/MI meningkat dari 98,16 pada tahun 2016 menjadi 106,13% pada tahun 2020. Selama periode 2016-2020, realisasi APM SD/MI memiliki trend menurun, dari 96,2% menjadi 95,52% dan diperkirakan pada tahun 2021 sebesar 95,30%. Selama periode 2016-2020, capaian realiasi kinerja berkisar antara 94,92%-96,20% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja terkategori Sangat Tinggi, namun upaya pencapaian APM SD/MI mencapai 100% harus terus diupayakan agar pencapaian wajib belajar dan percepatan peningkatan nilai IPM .



Gambar 2-36 Kinerja Indikator APM SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir

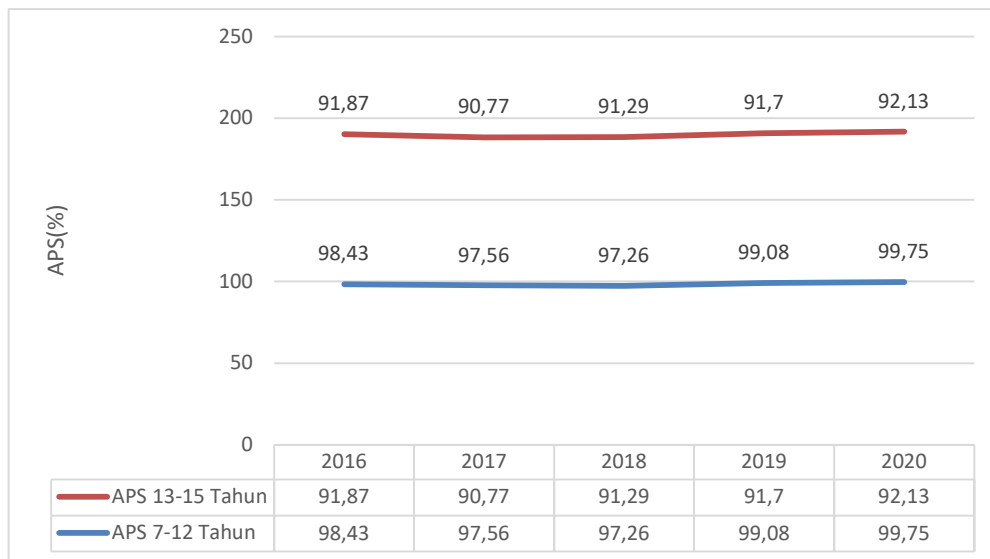
Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Pada RPJMD juga telah ditarget APM SMP/MTs dengan trend meningkat yaitu dari 67% pada tahun 2016 menjadi 68% pada tahun 2017. Realisasi capaian APM SMP/MTs melebihi target yaitu sebesar 79,96% pada tahun 2020 meningkat menjadi 82,06% pada tahun 2020. Realisasi kinerja APM SMP/MTs berkisar antara 106,92% - 119,69% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja APM SMP/MTs Sangat Tinggi, namun untuk mencapai APM SMP/MTs Indragiri Hilir dengan nilai 100% perlu dilakukan dengan usaha yang lebih terencana baik.

b. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Selama periode 2016-2020, APS 7 - 12 tahun kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, nilai APS 7 - 12 tahun Indragiri Hilir sebesar 98,43% menurun menjadi 97,56% pada tahun 2017. Capaian APS 7 - 12 tahun selama periode ini sekaligus

menggambarkan bahwa terdapat sebesar 1,49% hingga 2,44% penduduk usia 7 - 12 tahun yang tidak sedang sekolah di SD/MI. Pada tahun 2016, jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang tidak berpartisipasi di sekolah SD/MI cukup besar, mencapai 1.434 orang. Oleh karena itu upaya mencapai APS dengan nilai 100% perlu terus diupayakan. Capaian APS 7 - 12 tahun Indragiri Hilir tahun 2016 adalah yang terendah dibanding capaian APS 7 - 12 tahun kabupaten Pelalawan (97,89%) dan Indragiri Hulu (96,36%) serta Provinsi Riau (95,28%). Selama periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan APS 7 - 12 tahun menurun sebesar -0,24% per tahun.

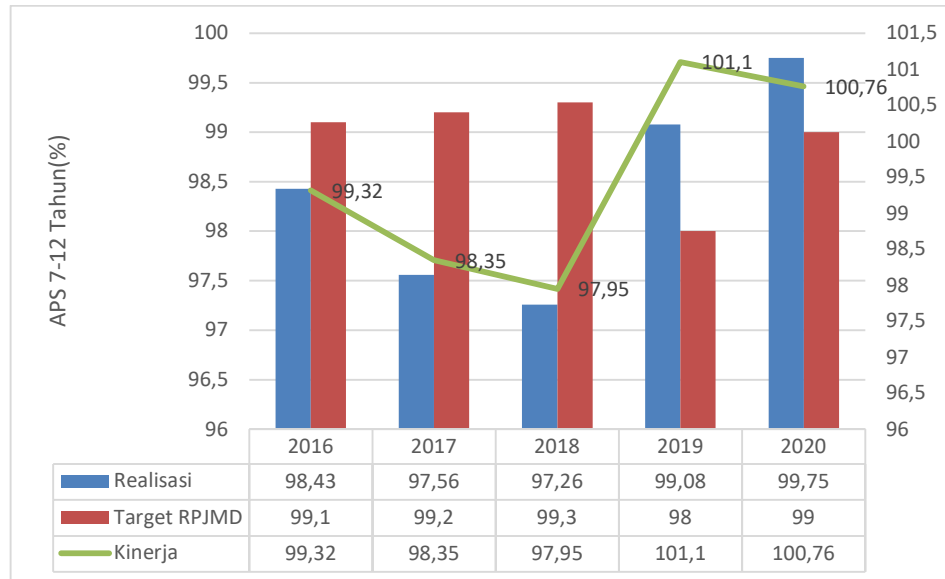


Gambar 2-37 Perkembangan APS 7 - 12 Tahun dan APS 13 - 15 Tahun

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

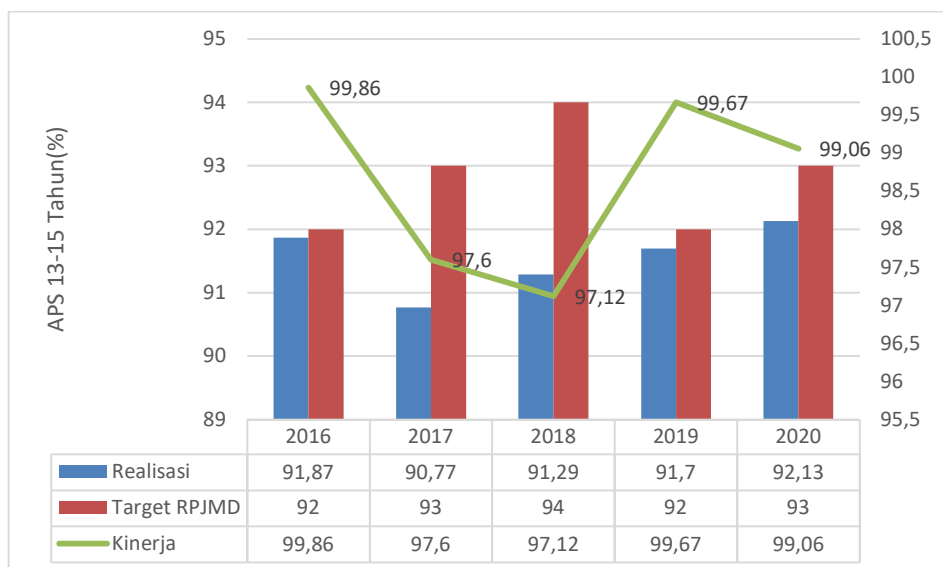
Pada periode yang sama, APS 13 - 15 tahun Kabupaten Indragiri Hilir justru trendnya meningkat yaitu dari 90,77% pada tahun 2017 menjadi 91,70% pada tahun 2019. Meski capaian APS 13 - 15 tahun Indragiri Hilir meningkat namun nilainya lebih rendah dibanding APS 7 - 13 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk umur 13 - 15 tahun yang tidak berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs jauh lebih besar yaitu 8,30%-9,23% dari total penduduk usia 13 - 15 tahun (37.757 orang tahun 2016). Oleh karena itu, upaya peningkatan APS 13 - 15 tahun harus menjadi perhatian dalam pembanguna pendidikan Indragiri Hilir ke depan.

Capaian APS 13 - 15 tahun Indragiri Hilir ini adalah yang tertinggi dibanding Kabupaten sekitarnya (Pelalawan 69,85% dan Indragiri Hulu 68,99%) dan Provinsi Riau (72,87%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APS 13 - 15 tahun meningkat sebesar 0,48% per tahun.



Gambar 2-38 Kinerja Indikator APS 7 - 12 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2020 telah ditetapkan target APS 7 - 12 tahun Indragiri Hilir yaitu sebesar 98,00% pada tahun 2019 meningkat menjadi 99,00% pada tahun 2020. Selama periode 2016-2018, capaian realisasi APS 7 - 12 tahun berfluktuatif menurun dan umumnya dibawah target. Realisasi kinerja berkisara antara 97,26% - 99,75% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, diperkirakan APS 7 - 12 tahun sebesar 99,00% dengan realisasi kinerja sebesar 99,75% dan terkategori Sangat Tinggi.



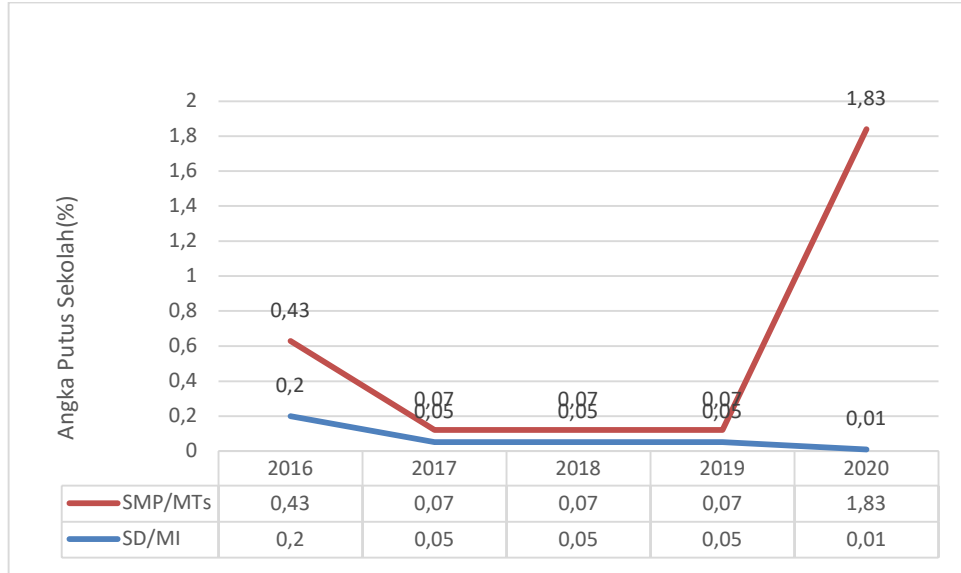
Gambar 2-39 Kinerja Indikator APS 13 – 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2016-2020 telah ditargetkan APS 13-15 tahun sebesar 90% - 94%. Realisasi APS SMP/MTs berfluktuatif meningkat dan umumnya dibawah target RPJMD. Meski capaian APS 13 – 15 tahun dibawah target namun realisasi kerjanya terkategori Sangat Tinggi dengan rentang realisasi kinerja antara 97,60% - 99,86%.

c. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia (7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun) yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selama periode 2016-2020, APTS SD/MI memiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 0,2% pada tahun 2016 menjadi 0,05% pada tahun 2017. Meski APT SD/MI sudah terkategori rendah, namun upaya menurunkan APTS SD/MI per terus dilanjutkan. Pada tahun 2020, Capaian APTS SD/MI ini sedikit lebih rendah dibanding capaian APTS Provinsi Riau (0,042%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APTS SD/MI menurun sebesar -46,92% per tahun.

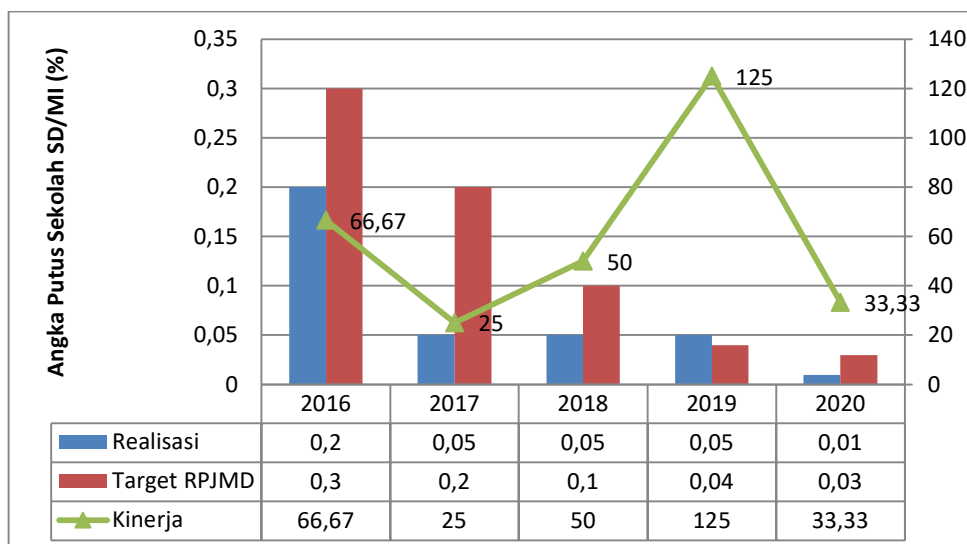


Gambar 2-40 Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Pada periode yang sama, APTS SMP/MTs memiliki trend yang sama dengan APTS yang memiliki trend berfluktuatif menurun, namun dengan nilai yang lebih besar. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat putus sekolah di SMP/MTs lebih tinggi dibanding ditingkat SD/MI. Pada tahun 2017, capaian APTS SMP/MTs Indragiri Hilir (0,07%) relatif sama dengan APTS SMP/MTs Provinsi Riau (0,07%). Selama periode 2016-2020 ini, rata-rata pertumbuhan APTS SMP/MTs menurun sebesar -41,31% per tahun.

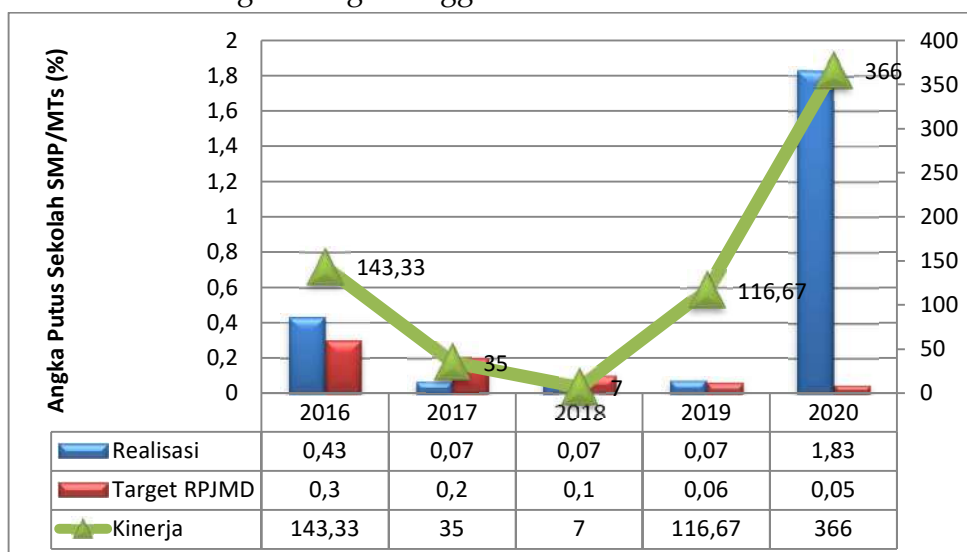
Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa APTS SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 0,2% pada tahun 2016 menjadi 0,05% pada tahun 2018. Realisasi APTS SD/MI 2017 - 2018 masih dibawah target dengan realisasi kinerja sebesar 10% - 50% yang terkagori rendah dan sedang.. Pada tahun 2020, realisasi APTS SD/MI sudah diatas target sehingga relisasi kinerja berkisar antara 125% dan terkategori Sangat Tinggi.



Gambar 2-41 Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 – 2020 telah ditetapkan bahwa APTS SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan menurun dari 0,30% pada tahun 2016 menjadi 0,10% pada tahun 2018. Realisasi APTS SMP/MTs tahun 2017-2018 dibawah target sehingga realisasi kinerja berkisar antara 7%-35% yang terkagori rendah. Pada tahun 2019-2020, realisasi APTS SMP/MTs melebihi target dan kondiisi yang sama diperkirakan pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja sebesar 116,67% - 366% dan terkategori Sangat Tinggi.

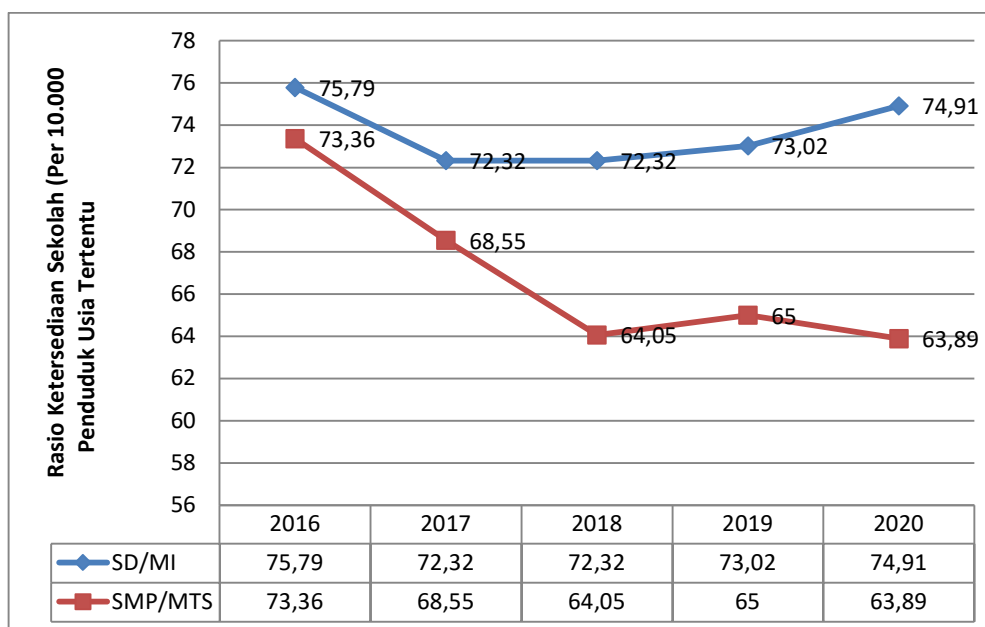


Gambar 2-42 Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

d. Rasio Ketersediaan Sekolah

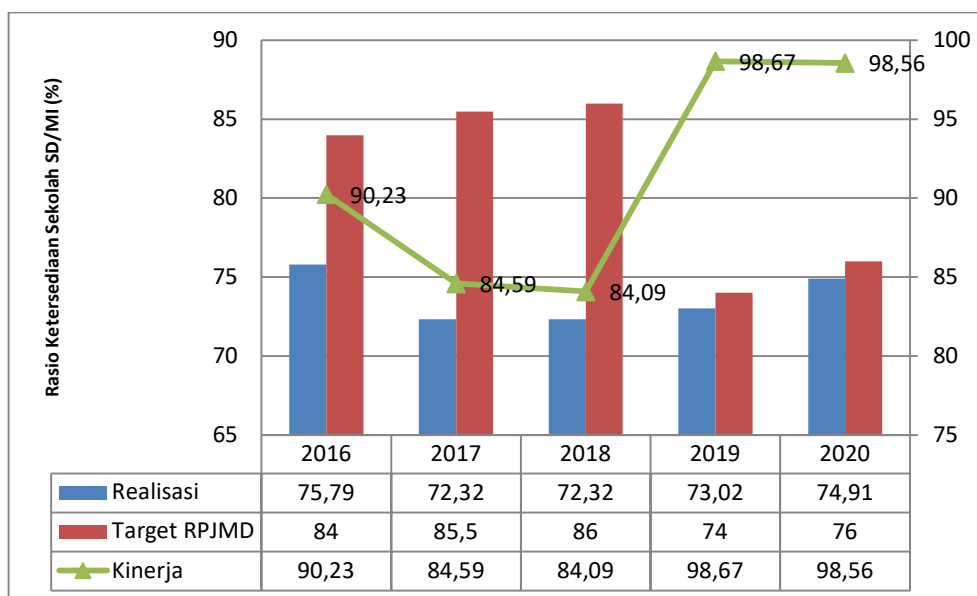
Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar (7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun). Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Selama periode 2016-2020, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun yang selanjutnya disebut tingkat SD/MI memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 75,79% menurun menjadi 72,32% pada tahun 2017 atau setiap sekolah SD/MI melayani 122,91 orang penduduk usia 7 – 12 tahun, meningkat menjadi 131,94 orang penduduk usia 7 – 12 tahun. Hal yang perlu mendapat perhatian, selain ketersediaan sekolah adalah rendahnya persentase SD/MI bangunan baik yaitu hanya sebesar 23,53% , terendah diantara kabupaten sekitarnya seperti Indragiri Hulu sebesar 28,40% dan Pelalawan sebesar 34% serta Provinsi Riau (29%). Selama periode 2016-2020, rata pertumbuhan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir menurun sebesar -1,41% per tahun.



Gambar 2-43 Perkembangan Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13 - 15 tahun yang selanjutnya disebut tingkat SMP/MTs memiliki trend sebaliknya yaitu trend menurun. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 66,52 menurun menjadi 64,05% pada tahun 2018. Namun angka rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs jauh lebih kecil dibanding dengan angka rasio ketersediaan sekolah SD/MI. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan sekolah SMP/MTs hanya mampu menampung sebesar 66,52% hingga 71,36% dari penduduk usia 13 - 15 tahun atau setiap sekolah SMP/MTs melayani sebanyak 127,37 - 150,33 orang penduduk umur 13 - 15 tahun. Sama halnya dengan permasalahan diatas adalah rendahnya persentase bangunan dengan kondisi yang baik. Pada tahun 2017, persentase bangunan sekolah SMP/MTs dengan kondisi baik di Indragiri Hilir sebesar 20,15%, lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitarnya seperti Indragiri Hulu (25,85%) dan Pelalawan (39,76%) serta Provinsi Riau (28,54%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,98% per tahun.

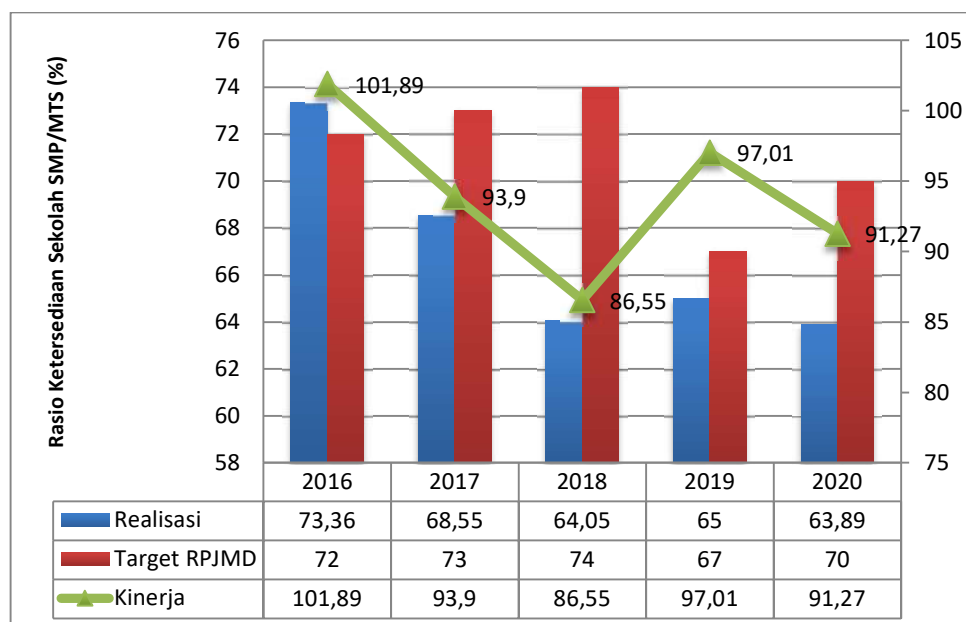


Gambar 2-44 Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 7 - 12 tahun

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa rasio ketersediaan sekolah SD/MI adanya penurunan yaitu dari 75,79% menjadi 72,32% Realisasi rasio ketersediaan sekolah SD/MI memiliki trend menurun dimana pada tahun 2016-2017. Realisasi kinerja sebesar 90,23% dan 84,59% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019-2020, realisasi kinerja menurun menjadi 73,02% dan 74,91% serta diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 72,32% yang semuanya terkategori Tinggi.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs juga terus meningkat yaitu dari 73% menjadi 74%. Realisasi capaian indikator ini selama periode 2017 dan 2018 sedikit dibawah target dan tahun 2019 - 2020 diatas target dengan capaian realisasi kinerja berkisar antara 91,27% - 97,01% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, diperkirakan realisasi rasio ketersediaan sekolah menurun menjadi 63,89% dengan realisasi kinerja sebesar 91,27% dan terkategori Tinggi.

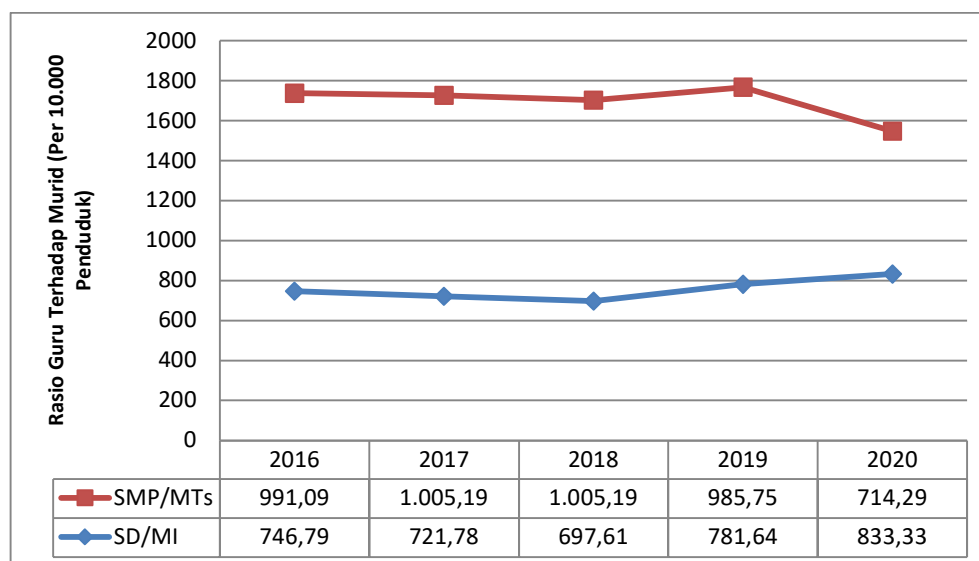


Gambar 2-45 Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 13 - 15 tahun

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

e. Rasio Guru Terhadap Murid

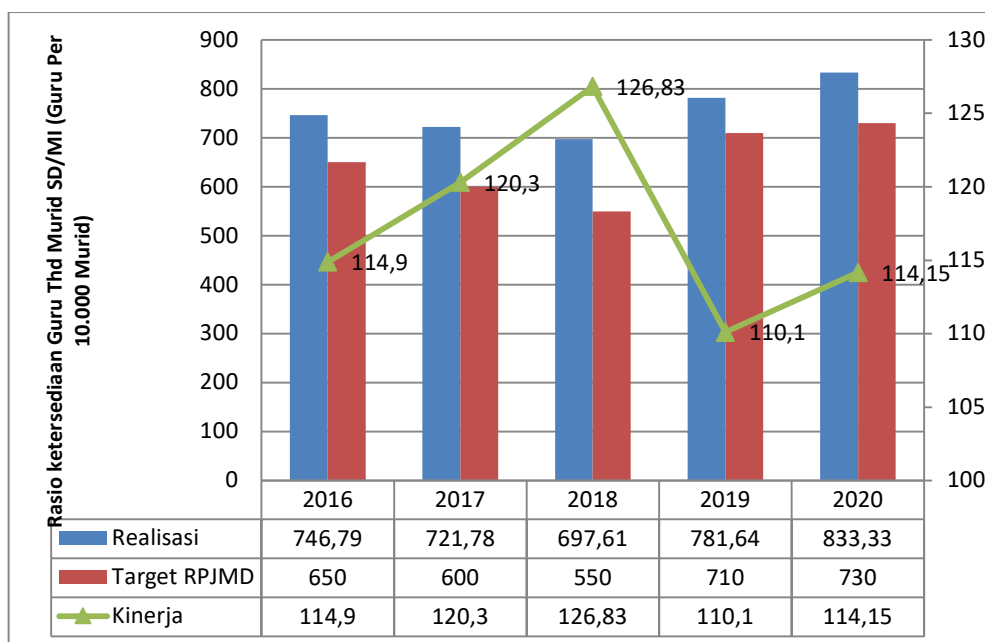
Rasio guru terhadap murid adalah rasio antara jumlah guru tingkat pendidikan dasar dengan jumlah pendudukan yang masuk kategori umur pendidikan dasar (7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun). Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar disamping mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru. Selama periode 2016-2020, rasio guru terhadap 10.000 murid SD/MI di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat yaitu dari 697,61 pada tahun 2018 menjadi 781,64 pada tahun 2019. Rasio sebesar 781,64 ini bermakna bahwa setiap 10.000 murid SD/MI dilayani oleh rata-rata sebanyak 781,64 orang guru atau setiap guru melayani 13,39 murid SD/MI. Selama periode ini, seorang guru SD/MI di Kabupaten Indragiri Hilir melayani sebanyak 13,30 - 16,20 orang murid SD/MI, yang merupakan rasio yang cukup baik. Namun permasalahan yang umum terjadi adalah rasio ini kurang baik untuk daerah sulit dan rendah atau baik didaerah perkotaan. Selama periode 2016 -2020, rata-rata pertumbuhan rasio guru terhadap murid ditingkat SD/MI meningkat sebesar 3,87% per tahun.



Gambar 2-46 Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio guru terhadap murid SD/MI (Guru per 10.000 murid SD/MI) menurun dari 650 menjadi 550 guru per 10.000 murid SD/MI. Realisasi capaian indikator rasio guru terhadap murid SD/MI pada tahun 2019 di atas target sehingga capaian kinerja sebesar 110,1% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2018, capaian indikator rasio guru SD/MI selalu di atas target RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 126,83% yang terkategori Tinggi. Pada periode 2015 -2018 realisasi indikator rasio guru terhadap 10.000 murid sudah di atas target RPJMD sehingga realisasi kinerjanya di atas 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

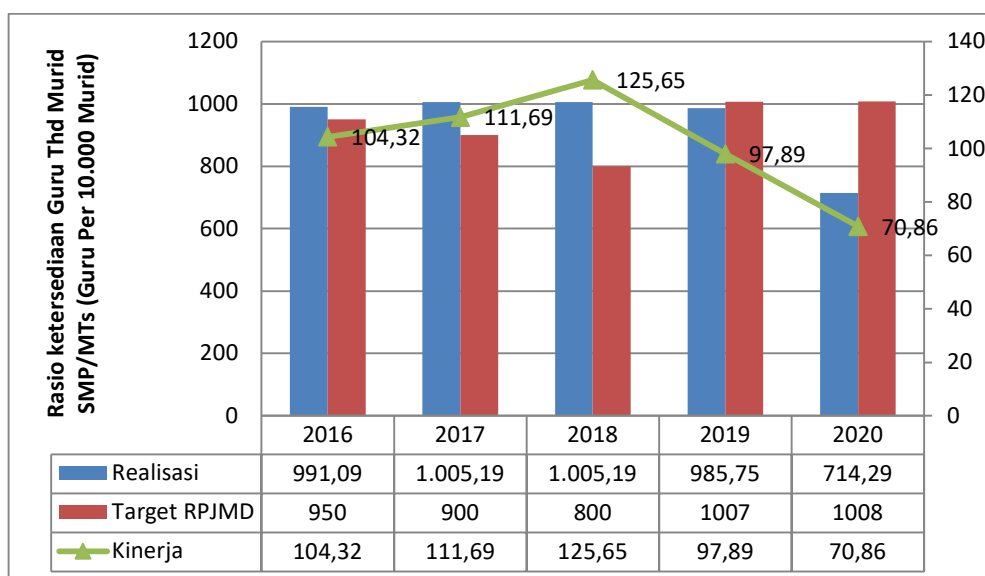


Gambar 2-47 Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio guru terhadap murid SMP/MTs (Guru per 10.000 murid SMP/MTs) menurun dari 900-800 guru per 10.000 murid SMP/MTs. Realisasi indikator guru terhadap murid SMP/MTs ini berada di bawah target pada tahun 2019-2020 dengan realisasi kinerja sebesar 70,86% - 97,89% yang terkategori Sedang - Sangat Tinggi. Pada tahun 2018, capaian

indikator rasio guru terhadap murid SMP/MTs sudah diatas target sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 125,65% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2020 ini capaian kinerja indikator rasio guru terhadap murid SMP/MTs masing-masingnya sebesar 70,86% yang terkategori sedang.

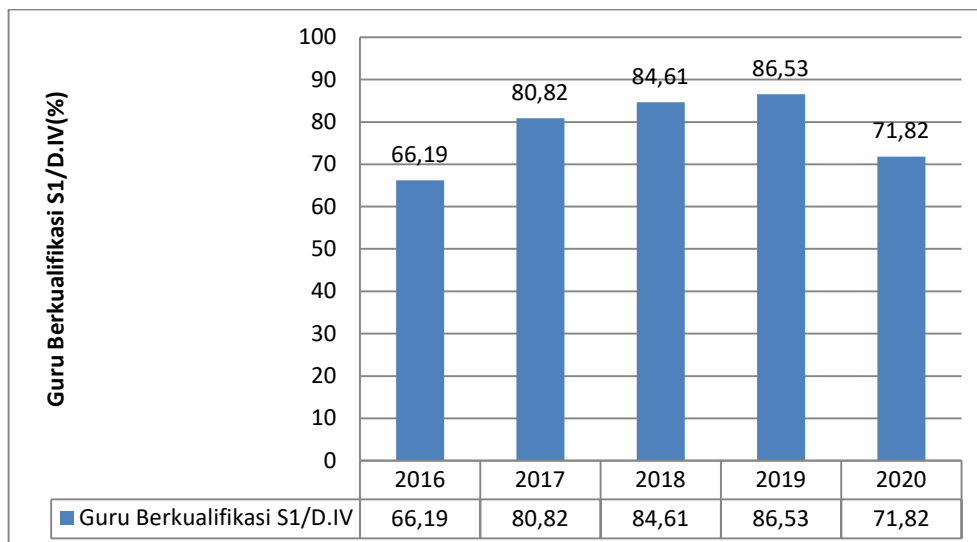


Gambar 2-48 Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

f. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV

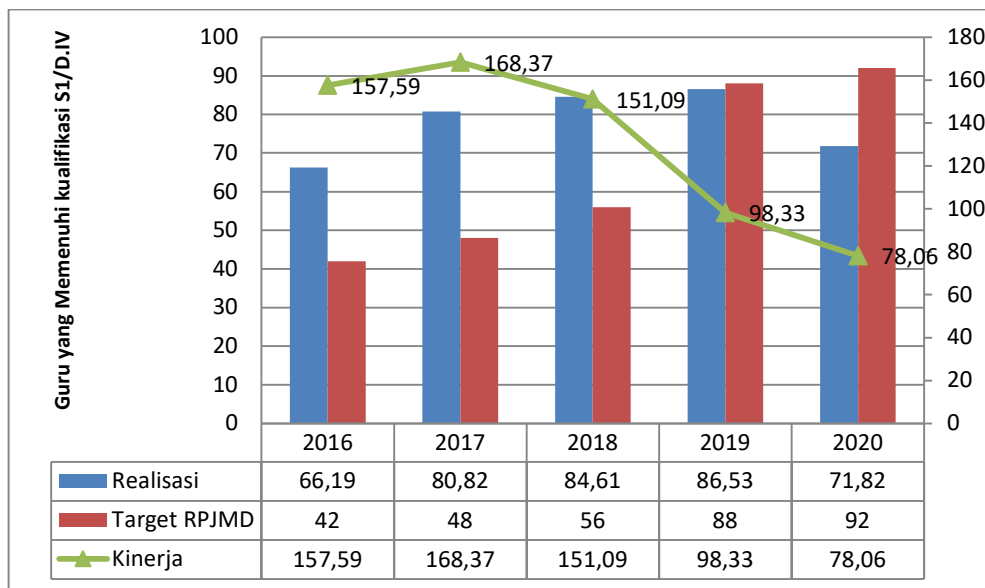
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau diploma empat (D.IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian) memiliki sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



Gambar 2-49 Perkembangan Guru Berkualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2016-2020, perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV memiliki trend terus meningkat. Pada tahun 2016 persentase guru (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang memiliki kualifikasi S1/D.IV sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 2003 dan UU No. 14 tahun 2005 serta PP No. 19 tahun 20015, sebesar 66,19%, meningkat menjadi 80,82% pada tahun 2017. Capaian persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D.IV Indragiri Hilir tahun 2017 ini lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Pelalawan (90,58%), Indragiri Hulu (87,21%), dan Kuansing (84,26%) serta Provinsi Riau (91,58%). Bila dibandingkan capaian antara guru SD/ MI dengan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa persentase capaian prosentase Guru tingkat SD/MI yang memiliki kualifikasi S1/D.IV sebesar 76,93%, adalah yang terendah diikuti guru SMP/MTs (84,36%) dan guru SMA/MA/SMK (92,54%). Selama periode 2013 - 2017, rata-rata pertumbuhan guru yang memiliki kualifikasi S1/D.IV meningkat sebesar 29,75% per tahun.



Gambar 2-50 Kinerja Indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan target bahwa indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV ditargetkan meningkat dari 42% pada tahun 2016 menjadi 56% pada tahun 2018. Pada tahun 2016 dan 2017, realisasi indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV mengalami peningkatan dibawah target dengan realisasi kinerja sebesar 157,59% - 168,37% dengan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2016 - 2017, realisasi indikator ini diatas target termasuk pada tahun 2020 yang juga diperkirakan diatas target. Realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 78,06% - 168,38% yang semuanya terkategori sangat tinggi.

g. SPM pendidikan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) Adalah Salah Satu Tolak Ukur Kinerja Pelayanan Pendidikan Dasar. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. Di dalamnya mencakup : (a) pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan; (b) pendidikan kesetaraan; (c) pendidikan anak usia dini. Batas waktu

pencapaian SPM bidang pendidikan dasar adalah setiap tahun. Rincian mengenai jenis pelayanan dasar dan indikator SPM bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2-9 Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Kinerja dan Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN			Batas waktu capaian
			2018	2019	2020	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 % Setiap Tahun S D/Mi, SMP/MTs)	106.675	108.143	105.356	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	345	742	2.344	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	47.196	7.568	21.070	

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama Periode 2018 - 2020, pencapaian SPM pendidikan dasar Kabupaten Indragiri hilir ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tahun 2020, capaian indikator terhadap 3 indikator, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan 3 indikator (100%) tetapi dalam capaiannya 2 indikator diantaranya mengalami penurunan.

Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang pendidikan dasar di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dan indikator, solusinya uraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-10 Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan Serta Solusi dalam pencapai SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
1.	Perluasan Akses Pendidikan Dasar	- Persentase ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok	Kondisi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketinggian rata-rata 0-3 dpl, dengan kondisi daratan	Perlunya pendanaan pembangunan sarana prasarana sekolah yang cukup besar

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
		permukiman permanen di daerah terpencil;	merupakan lahan gambut	
2.	Rasio rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	- Persentase peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	Penyebaran penduduk usia sekolah yang tidak merata	Perlunya penyelenggaraan sekolah filial atau sekolah non induk
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	- Persentase SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	Jumlah tenaga guru mata pelajaran IPA yang masih kurang	Penerimaan guru PNS atau Non PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan jurusan IPA linier dengan
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	- Persentase SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	Ketersediaan anggaran yang belum dapat memenuhi kebutuhan ruang kepala sekolah dan ruang guru beserta perabotannya	Mengalokasikan sumber pendanaan melalui sumber pendanaan dari sumber lain seperti, Dana Alokasi Khusus, APBN, dan APBD Provinsi Riau
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	- Persentase SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Masih terdapat Kepala SD/MI yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain
11.	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Masih terdapat Kepala SMP/MTs yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain
12.	Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Masih terdapat Pengawas Sekolah yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
13.	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	- Persentase Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	Ketersediaan anggaran belum maksimal dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	Pengalokasian anggaran melalui sumber-sumber lain, seperti :DAK, APBN dan APBD Provinsi
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	- Persentase Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	Keterbatasan tenaga pengawas dan keterbatasan pendanaan bagi pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan	Pengalokasian anggaran melalui sumber-sumber lain, seperti :DAK, APBN dan APBD Provinsi

2.3.1.2. Kesehatan

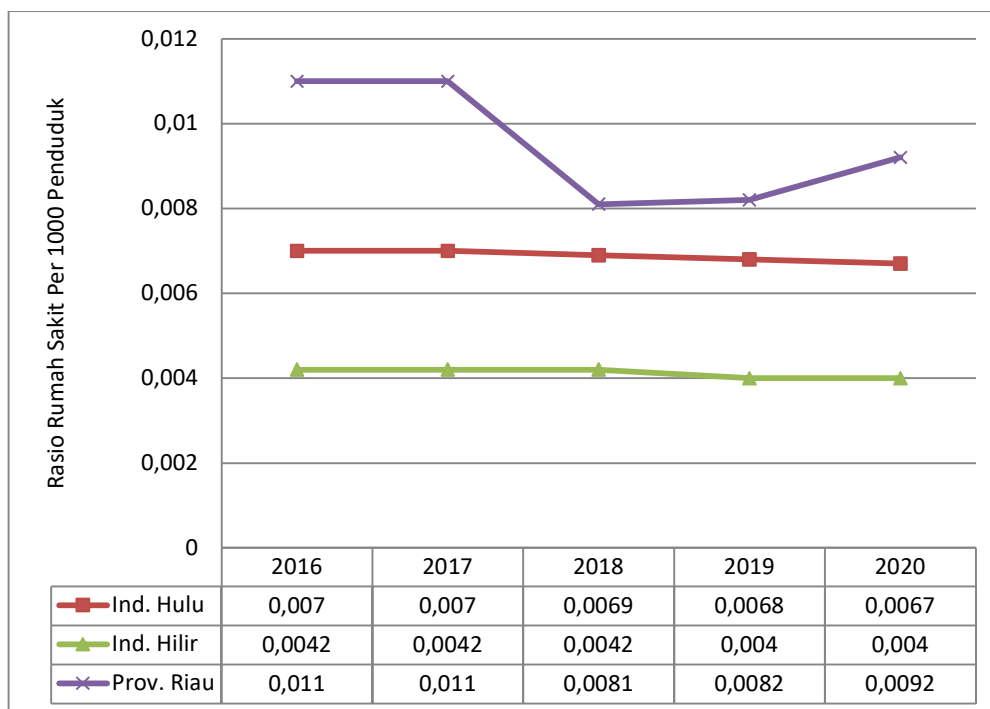
Layanan urusan wajib dasar bidang kesehatan dianalisis dari aspek (i) rumah sakit, (ii) Puskesmas, (iii) Dokter, Perawat dan Bidan, (iv) cakupan.

a. Rasio Rumah Sakit

Pada tahun 2020, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 3 rumah sakit pemerintah. Selama periode 2016 - 2020, jumlah rumah sakit tidak mengalami perubahan dan yang berubah adalah jumlah penduduk yang meningkat. Selama periode 2016 - 2020, rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Indragiri Hilir relatif tetap yaitu sebesar 0,0042 yang berarti setiap 1 rumah sakit melayani sebanyak 218.303 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2020, capaian rasio rumah sakit Indragiri Hilir lebih rendah dibanding Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 0,0067 dan 0,0092.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2020, jumlah

penduduk sebanyak 654.909 jiwa maka dibutuhkan jumlah tempat tidur sebanyak 655 tempat tidur. Total tempat tidur ketiga rumah sakit umum daerah di Indragiri Hilir sebanyak 257 tempat tidur sehingga masih kurang sebanyak 398 tempat tidur. Oleh karena itu, upaya peningkatan jumlah tempat tidur sehingga ideal 1 tempat tidur per 1.000 penduduk disamping peningkatan sarana dan prasarana layanan rumah sakit perlu mendapat perhatian pada pembangunan ke depan.

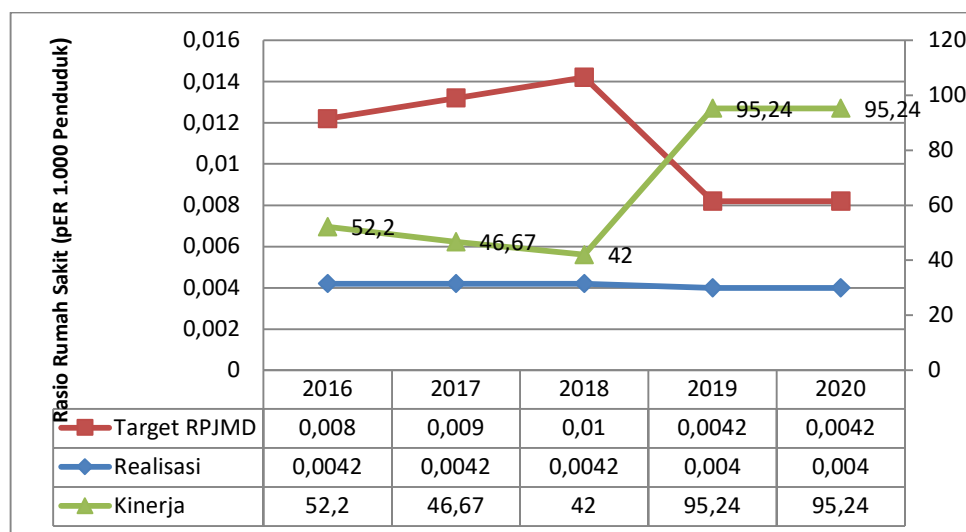


Gambar 2-51 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk telah ditetapkan terus meningkat meski belum ideal yaitu sebesar 0,008 tahun 2016 meningkat menjadi 0,01 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, realisasi rasio rumah sakit per 1.000 penduduk sesuai target yaitu 0,0042 sehingga realisasi kinerja sebesar 95,24% dan terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2016-2018,

realisasi dan perkiraan realisasi berada dibawah target dengan kisaran realisasi kinerja sebesar 42,00% -52,20% yang terkategori rendah.



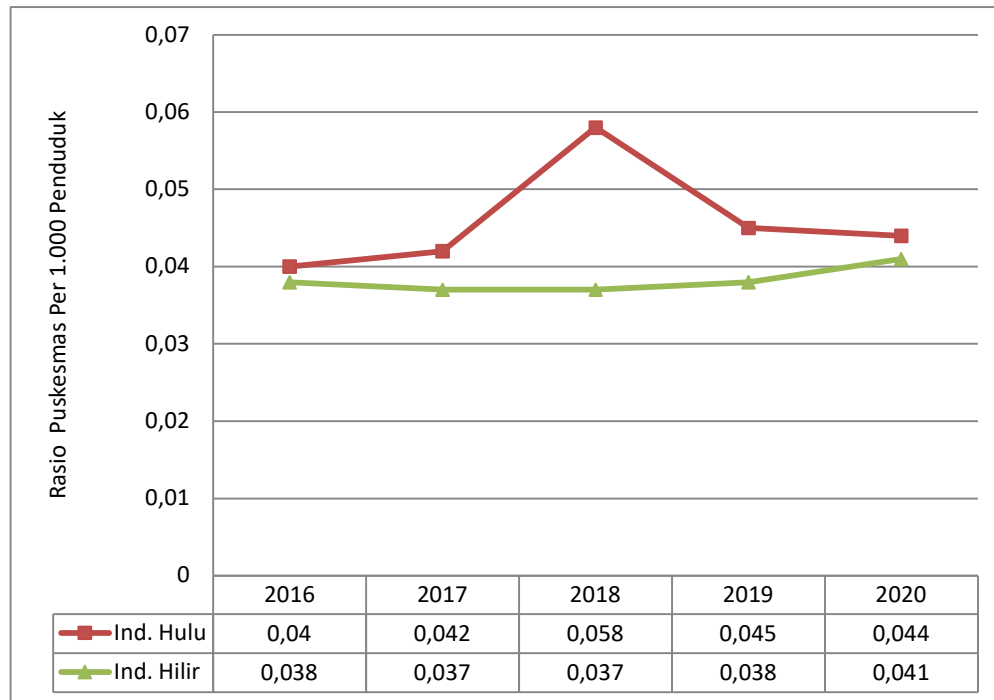
Gambar 2-52 Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

b. Rasio Puskesmas

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Selama periode 2016 - 2020, perkembangan rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2020, jumlah puskesmas di Indragiri Hilir sebanyak 31 puskesmas lebih banyak dari jumlah kecamatan (20 kecamatan). Rasio puskesmas per 1.000 penduduk sebesar 0,038 atau 1 puskesmas rata - rata melayani sebanyak 27.424 penduduk pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 0,041 atau setiap puskesmas melayani sebanyak 21.126 penduduk pada tahun 2020. Capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir ini masih dibawah capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hulu.

Rasio puskesmas Indragiri hilir sebesar 0,038 - 0,041 per 1.000 penduduk artinya setiap satu puskesmas melayani 38 - 41 dalam 1.000 penduduk. Apabila kita bagi dengan jumlah penduduk maka, rasio 1 puskesmas di

Kabupaten Indragiri Hilir melayani penduduk dengan jumlah berkisar antara 21.126 - 27.424. Rentang jumlah penduduk yang dilayani oleh puskesmas di Indragiri Hilir ini masih memenuhi standar nasional (1 puskesmas melayani 30.000 penduduk). Meski rasio puskesmas telah memenuhi standar nasional dari sisi kuantitas, namun dari segi kualitas sarana dan prasarana relatif masih belum memadai. Kondisi puskesmas, peralatan dan obat-obatan belum mampu memenuhi standar sebuah puskesmas yang baik. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas harus menjadi agenda pembangunan ke depan.

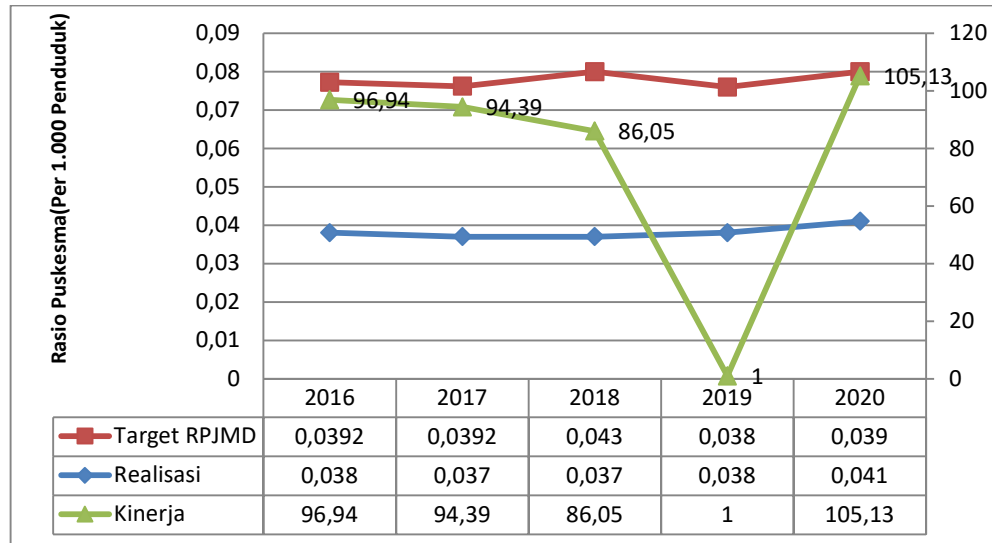


Gambar 2-53 Perkembangan Rasio puskesmas per 1.000 penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 - 2020 telah ditetapkan bahwa indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk ditargetkan terus meningkat yaitu dari 0,039 pada tahun 2016 menjadi 0,043 pada tahun 2018. Selama periode 2016 hingga 2018, capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir berada dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 86,05-96,94% dengan kategori

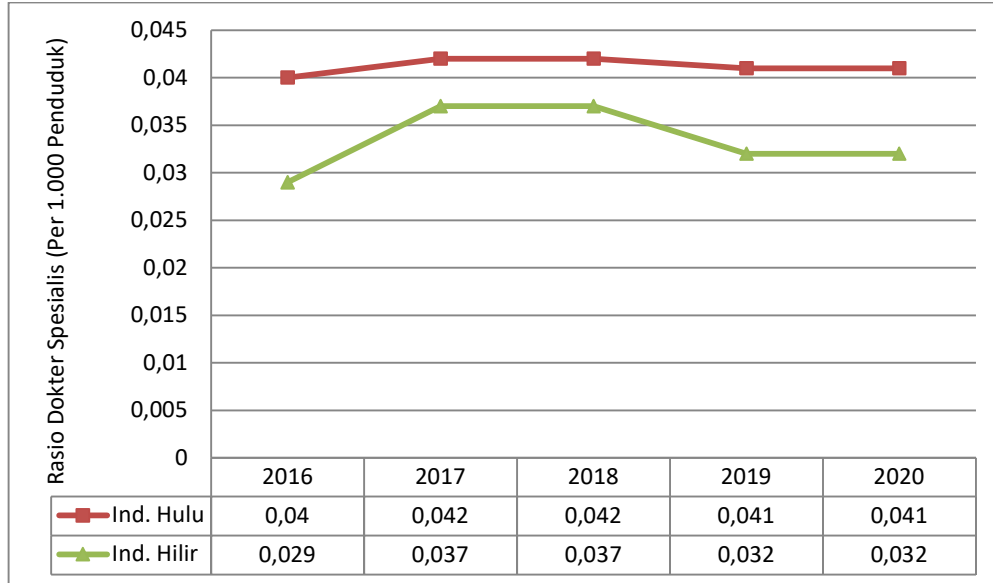
tinggi. Pada tahun 2020, capaian rasio juga diatas target dengan realisasi kinerja berkisar antara 105,13% dan terkategori Sangat Tinggi.



Gambar 2-54 Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

c. Rasio Dokter Spesialis

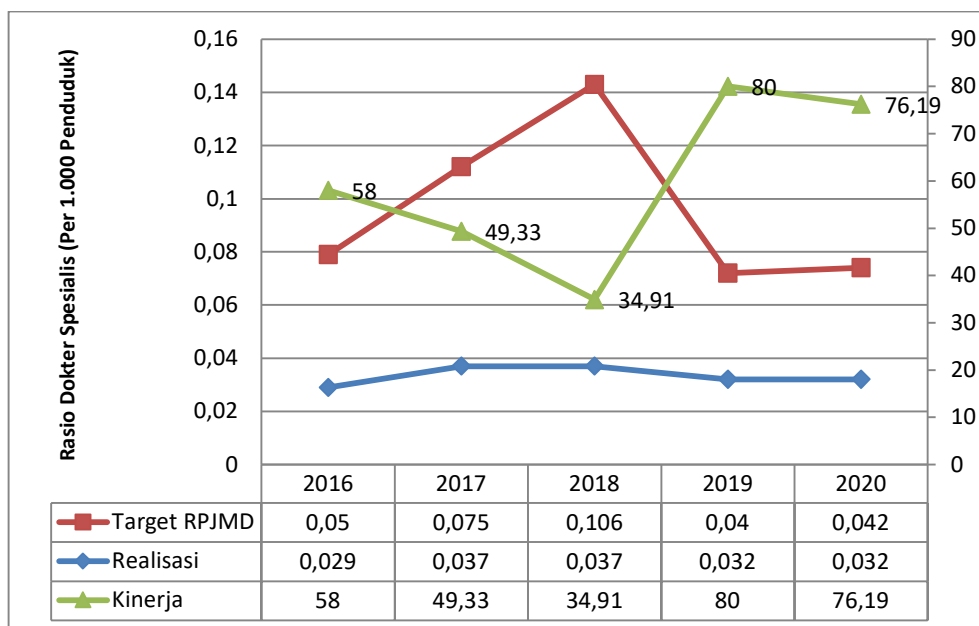
Selama periode 2016 - 2020, jumlah dokter spesialis yang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 34 - 42 orang. Selama periode ini, rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk memiliki tren berfluktuatif meningkat berkisar antara yaitu dari 0,029 pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,032 pada tahun 2020 yang bermakna bahwa setiap 1 orang dokter sepesialis melayani penduduk berkisar antara 15.593 - 20.972 penduduk. Kondisi rasio dokter spesialis Indragiri Hilir masih dibawah standar (15 dokter spesialis melayani 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis melayani 6.946 penduduk). Dibandingkan dengan capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hulu, capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hilir masih dibawah capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hulu. Agar mencapai jumlah ideal, maka jumlah dokter spesialis di Indragiri Hilir sebanyak 52 orang dokter spesialis dari berbagai keahlian. Kondisi ini perlu menjadi target pada pembangunan kesehatan ke depan.



Gambar 2-55 Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter spesialis per 1.000 sebesar terus meningkat meski jauh dari ideal yaitu sebesar 0,05 - 0,106. Selama periode 2016-2018, capaian target indikator rasio dokter spesialis terus dibawah target dimana pada tahun 2017-2018 memiliki realisasi kinerja sebesar 34,91%-49,33% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2019-2020, realisasi kinerja indikator rasio dokter spesialis diperkirakan meningkat, berkisar antara 76,19%-80,00% dan terkategori sedang.

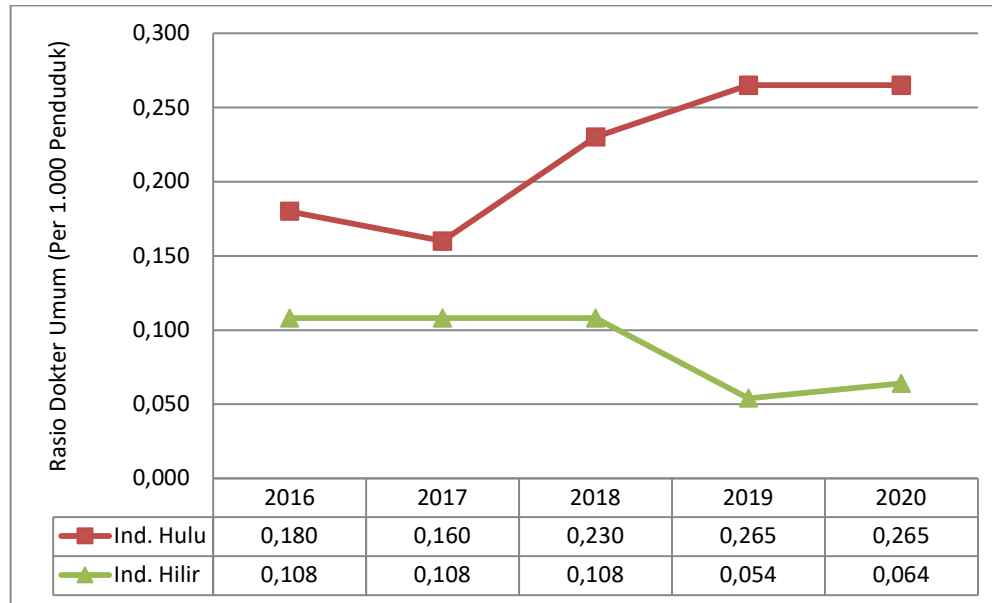


Gambar 2-56 Kinerja Indikator Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

d. Rasio Dokter Umum

Selama periode 2016 - 2020, rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, jumlah dokter umum di Indragiri Hilir sebanyak 60 orang dengan rasio dokter umum per 1.000 penduduk sebesar 0,108 yang berarti setiap 1 orang dokter melayani sebanyak 11.883 orang penduduk. Jumlah dokter umum meningkat menjadi 87 orang pada tahun 2018 atau 1 dokter melayani 8.406 orang penduduk. Capaian rasio dokter umum Indragiri Hilir dimana setiap 1 orang dokter umum melayani antara 8.289 - 11.883 orang penduduk Indragiri Hilir masih dibawah standar nasional (1 orang dokter umum melayani 2.500 orang penduduk). Capaian rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir ini pada tahun 2016 - 2020, dibawah capaian rasio Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu, upaya pencapaian rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir perlu diupayakan terus untuk dicapai. Idealnya sesuai standar nasional, jumlah

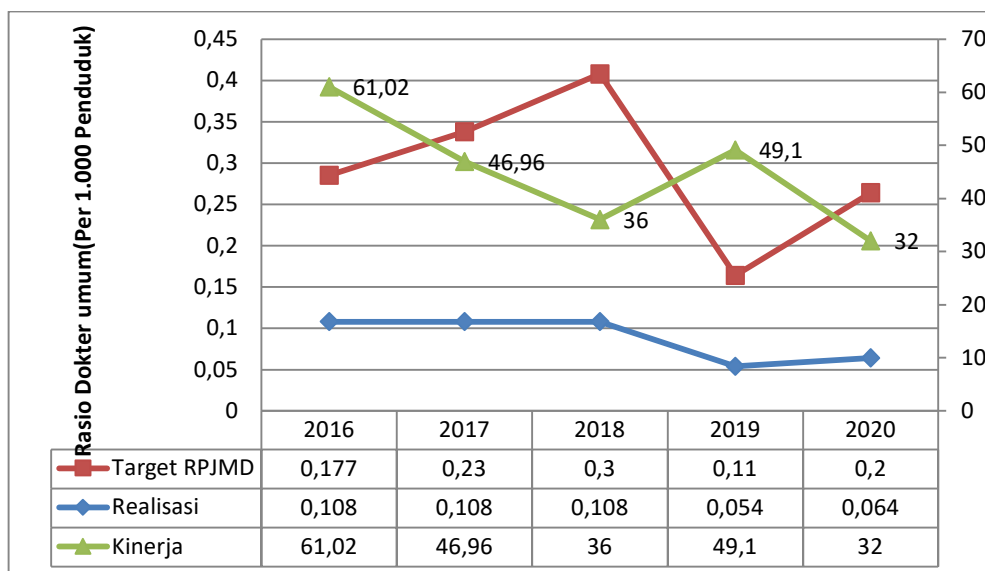
dokter umum di Indragiri Hilir tahun 2018 sebanyak 292 dokter, masih kurang sebanyak 205 orang dokter umum.



Gambar 2-57 Perkembangan Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter umum per 1.000 penduduk terus meningkat dari 0,17 meningkat menjadi 0,30. Realisasi rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir berfkuktuatif dan terus dibawah target RPJMD. Pada tahun 2016, rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,108 dengan realisasi kinerja sebesar 61,02% dan terkategori sedang. Pada tahun 2018 hingga 2020, realisasi kinerja berkisar 32,00%-49,10% dan terkategori Rendah - Sangat Rendah. Pada tahun 2020, capaian realisasi rasio dokter umum sebesar 0,064 dengan realisasi kinerja sebesar 32,00% dan terkategori Sangat rendah. Secara umum, rata-rata capaian realisasi kinerja rasio dokter umum sebesar 49,91% dan terkategori Sangat Rendah.

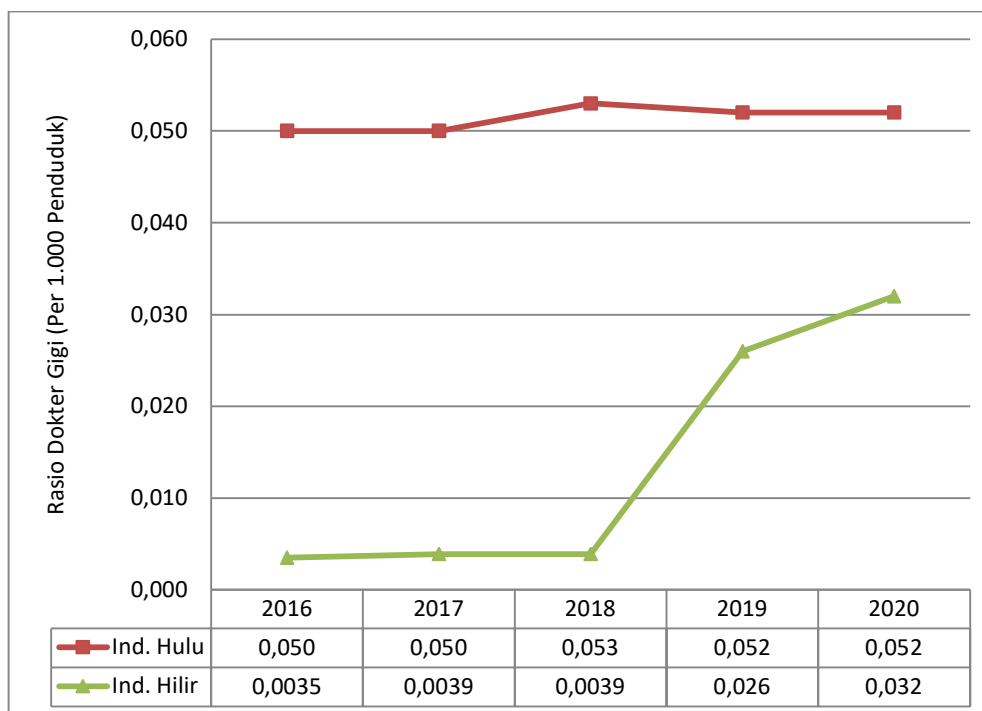


Gambar 2-58 Kinerja Indikator Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

e. Rasio Dokter Gigi

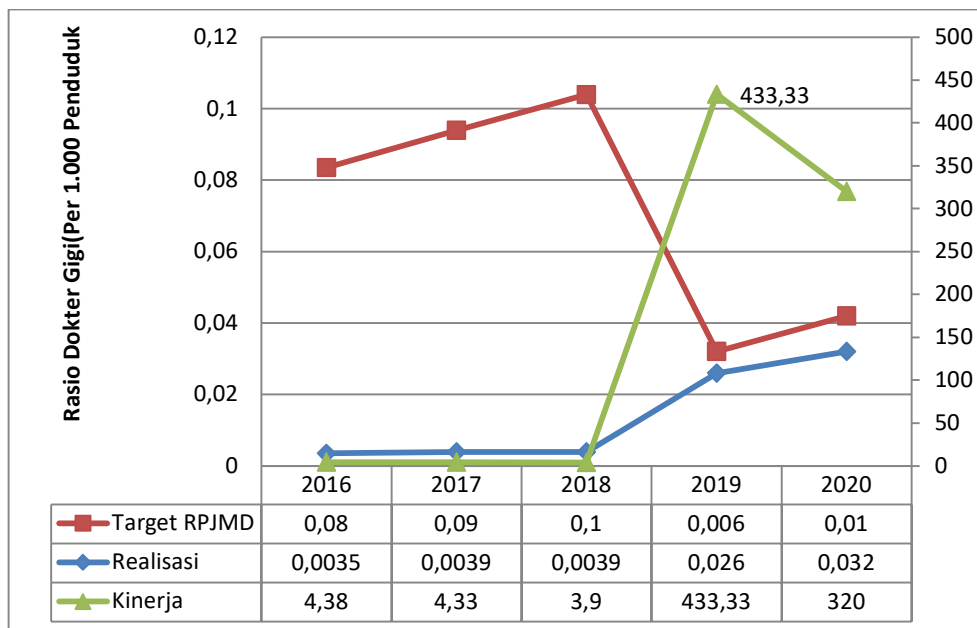
Selama periode 2016 - 2020, rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah dokter gigi di Indragiri Hilir sebanyak 17 orang dengan rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,02 atau setiap 1 orang dokter gigi melayani sebanyak 41.396 orang penduduk. Pada tahun 2018, jumlah dokter gigi meningkat menjadi 33 orang dengan rasio sebesar 0,039 atau setiap 1 orang dokter gigi melayani sebanyak 22.164 penduduk Indragiri Hilir. Capaian layanan 1 orang dokter gigi melayani 21.830 - 41.943 penduduk Indragiri Hilir masih dibawah standar nasional (1 dokter gigi untuk melayani 9.090 penduduk). Bila dibandingkan dengan Indragiri Hulu, capaian rasio dokter gigi Indragiri Hilir lebih rendah dibandingkan dengan capaian rasio dokter gigi Indragiri Hulu. Menurut standar nasional, pada tahun 2019 Indragiri Hilir masih perlu tambahan sebanyak 48 orang dokter gigi.



Gambar 2-59 Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir telah ditetapkan terus meningkat meski belum mencapai rasio ideal yaitu dari 0,08 tahun 2016 menjadi 0,10 pada tahun 2018. Realisasi rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri tahun 2016-2018 berada dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 3,9% - 4,38% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2019-2020, diperkirakan realisasi kinerja indikator dokter gigi per 1.000 penduduk berkisar sebesar 320%-433% dan terkategori Sangat Tinggi. Selama periode ini, rata-rata realisasi kinerja rasio dokter gigi per 1.000 penduduk sebesar 53,58% dan terkategori Rendah.



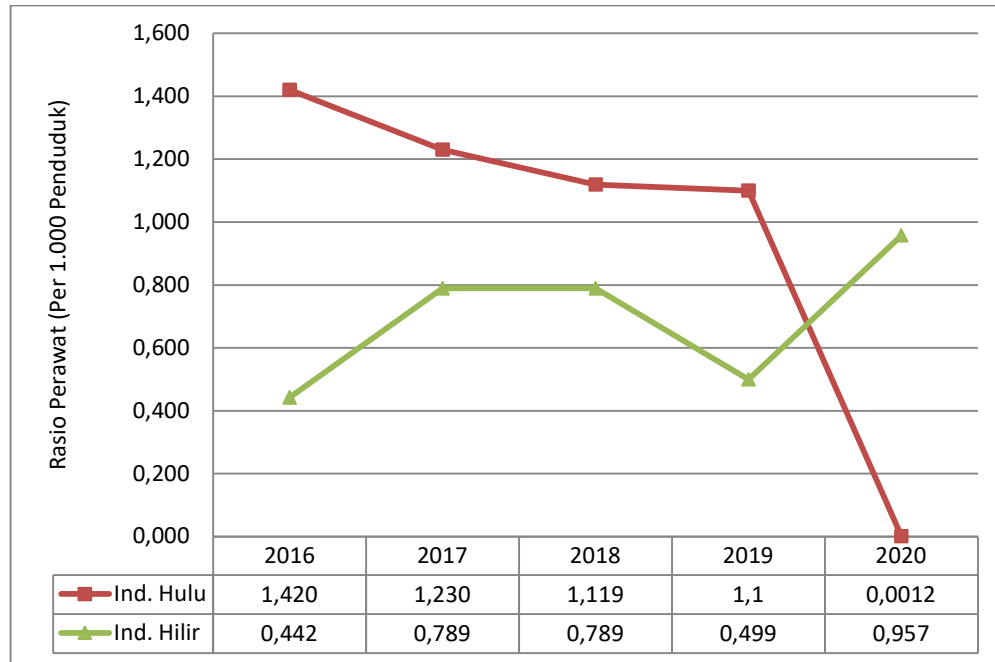
Gambar 2-60 Kinerja Indikator Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

f. Rasio Perawat

Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Selama periode 2016 - 2020, rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah perawat di Indragiri Hilir sebanyak 323 orang dengan rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,442 yang berarti 1 orang perawat melayani sebanyak 2.178 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, jumlah perawat menurun menjadi 315 orang dengan rasio sebesar 0,44 yang berarti setiap 1 orang perawat melayani sebanyak 2.292 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah perawat meningkat drastis sebanyak 887 orang dengan perkiraan rasio sebesar 0,789 yang berarti setiap 1 orang perawat melayani 825 penduduk. Hal ini sudah memenuhi standar nasional (1 perawat melayani 900,90 penduduk). Bila capaian rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir

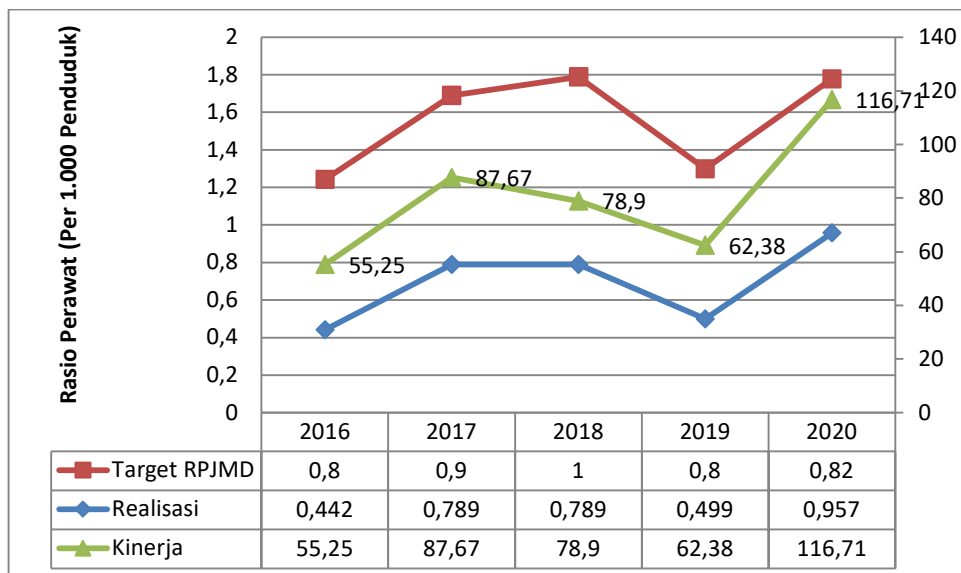
dibandingkan dengan capaian rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hulu menunjukkan bahwa capaian Indragiri Hilir relatif lebih rendah.



Gambar 2-61 Perkembangan Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dalam Angka, 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus meningkat meski belum sampai pada standar ideal yaitu dari 0,8 pada tahun 2016 menjadi 1,0 pada tahun 2018. Realisasi rasio perawat per 1.000 Indragiri Hilir selama periode ini terus dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 55,25%-87,67 yang terkategori Rendah hingga Tinggi. Rata-rata realisasi kinerja indikator rasio perawat per 1.000 penduduk sebesar 65,06% yang terkategori Rendah.



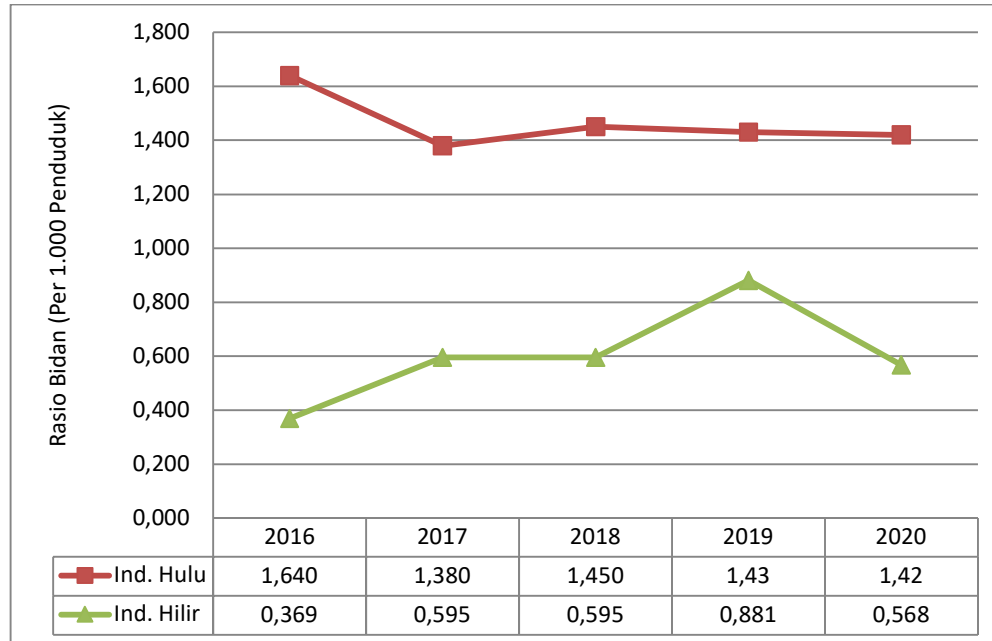
Gambar 2-62 Kinerja Indikator Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

g. Rasio Bidan

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Selama periode 2016 - 2020, rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah bidan di Indragiri Hilir sebanyak 180 orang dengan rasio sebesar 0,369 atau setiap 1 orang bidan melayani sebanyak 3.910 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, jumlah bidan meningkat menjadi 430 orang dengan rasio bidan per 1.000 penduduk sebesar 0,24 atau setiap 1 orang bidan melayani sebanyak 1.680 penduduk Indragiri Hilir. Rentang pelayanan 1 orang bidan untuk 1.680 - 3.910 penduduk Indragiri Hilir ini terkategori dibawah standar nasional (1 orang bidan melayani sebanyak 833,33 penduduk). Namun, pada tahun 2018, jumlah bidan di Indragiri Hilir meningkat sangat signifikan menjadi 1.137 orang. Hal ini berarti setiap 1 orang bidan dapat melayani 643 penduduk. Capaian ini telah memenuhi standar nasional. Capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir relatif masih dibawah capaian rasio bidan per 1.000

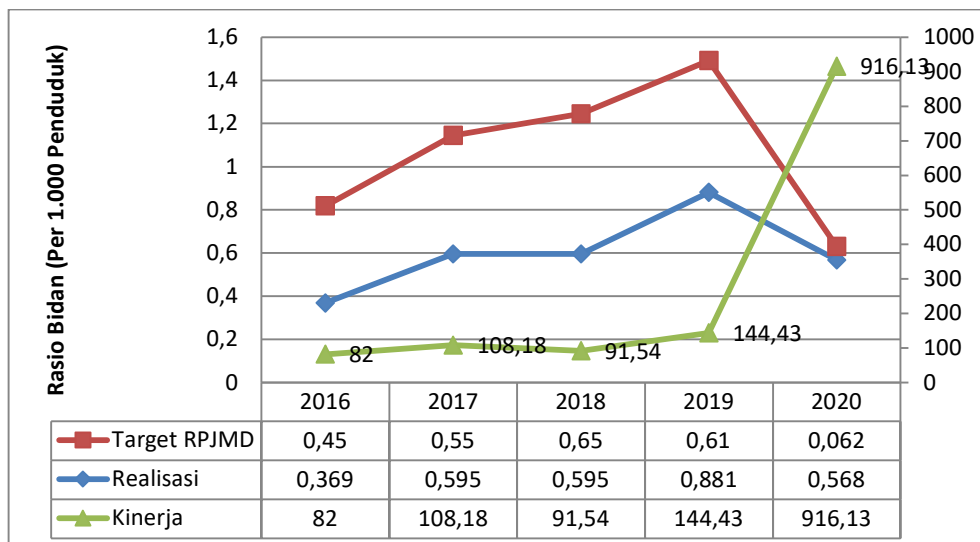
penduduk Indragiri Hulu, kecuali untuk tahun 2018, capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir diperkirakan berada diatas capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hulu.



Gambar 2-63 Perkembangan Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus meningkat meski belum akan ideal yaitu dari 0,45 pada tahun 2016 menjadi 0,65 pada tahun 2018. Realisasi indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus menurun yaitu dari 0,369 dengan realisasi kinerja sebesar 82,00% yang terkategori Tinggi pada tahun 2016, meningkat menjadi 0,881 dengan realisasi kinerja sebesar 144,43% yang terkategori Sangat tinggi Pada tahun 2019, diperkirakan ralisasi kinerja indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 37,54% dan terkategori Sangat Rendah. Selama periode 2016-2020, rata-rata realisasi kinerja rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 268,45% dan terkategori tinggi.



Gambar 2-64 Kinerja Indikator Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

h. SPM Bidang Kesehatan

Selama periode 2018-2020, SPM bidang kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Target waktu capaian SPM bidang kesehatan adalah setiap tahun dengan nilai capaian berkisar Antara 0 -100%. Rincian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2-11 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN (orang)			Batas waktu capaian
			2018	2019	2020	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	12287	11931	11641	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	11792	10901	11340	

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	11754	11610	11608
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	32551	29972	35635
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	28718	13089	30423
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	28907	38441	17271
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	24973	20792	1674
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	11718	22995	7318
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	5760	4135	1398
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	910	593	977
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	2670	1140	1790

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	3700	4085	5701	
----	--	---	------	------	------	--

Pada tahun 2018-2020, dari 12 indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 12 indikator (100%). Namun demikian, belum semua pelayan tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dari 12 indikator, baru 5 indikator (22,73%) yang telah memenuhi target nasional, selebihnya belum mencapai target nasional.

SPM bidang kesehatan menurut Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008 direvisi menjadi Permenkes Nomor 43/MENKES/PER/VIII/2016. Dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa terdapat 12 jenis layanan dasar dengan 12 indikator kinerja yang menjadi kewajiban dan tanggung yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Target waktu capaian SPM bidang kesehatan adalah tahun 2016-2020 dengan nilai capaian berkisar Antara 0 -100%. Dalam pelaksanaan, mulai tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengacu ke Permenkes Nomor 43/MENKES/PER/VIII/2016. Rincian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2-12 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Berdasarkan Permenkes No : 43/MENKES/PER/VIII/2016

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Kinerja Kabupaten	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Batas Waktu Pencapaian	Satker Penanggung Jawab
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	2020	Dinkes Kab/Kota
2		Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	Sesuai standar pelayanan peralihan	Ibu bersalin	2020	Dinkes Kab/Kota
3		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Bayi baru lahir	2020	Dinkes Kab/Kota
4		Pelayanan kesehatan balita	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	2020	Dinkes Kab/Kota
5		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidkn usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	2020	Dinkes Kab/Kota
6		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	2020	Dinkes Kab/Kota
7		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas	2020	Dinkes Kab/Kota
8		Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	2020	Dinkes Kab/Kota
9		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	2020	Dinkes Kab/Kota
10		Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	2020	Dinkes Kab/Kota

11		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	Sesuai standar skrining kesehatan dengan TB	Orang dengan TB	2020	Dinkes Kab/Kota
12		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	2020	Dinkes Kab/Kota

Selama periode 2018 - 2020, capaian ke 12 indikator bidang kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.13. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 12 indikator (100%). Namun demikian, belum semua indikator tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Dari 12 indikator, baru 4 indikator (30%) yang telah memenuhi target nasional.

Tabel 2-13 Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2015 - 2020

No.	Indikator SPM	Capaian SPM					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73,96	71	77	80	77	77,68
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	68	76	80	48	60,28
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	71,14	79	72	71	79	76,33
4	Pelayanan kesehatan balita	73,46	48	55	58	58	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	28,53	93	81	88	97	-
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	61,47	100	100	91	10	5,75
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	29,06	100	100	90	59	12,00
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	45,78	100	35	6	14	4,63
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100,00	100	12	59	88	41,16
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	33,21	100	100	73	79	100

11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	46,65	100	100	100	30	69,32
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	-	45	38	22	14	24,54

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan Antara lain yaitu (i) masih kurangnya ketersediaan Anggaran untuk masing-masing program. (ii) penyebaran Sumber Daya Manusia belum merata di Sarana dan Prasarana Kesehatan sehingga masih minimnya pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil. (iii) belum terintegrasinya SPM ke dalam renstra SKPD. Solusi dari permasalahan diatas adalah penerapan 10% APBD untuk kesehatan dan menerapkan SPM secara maksimal dan terintegrasi ke dalam renstra SKPD terkait.

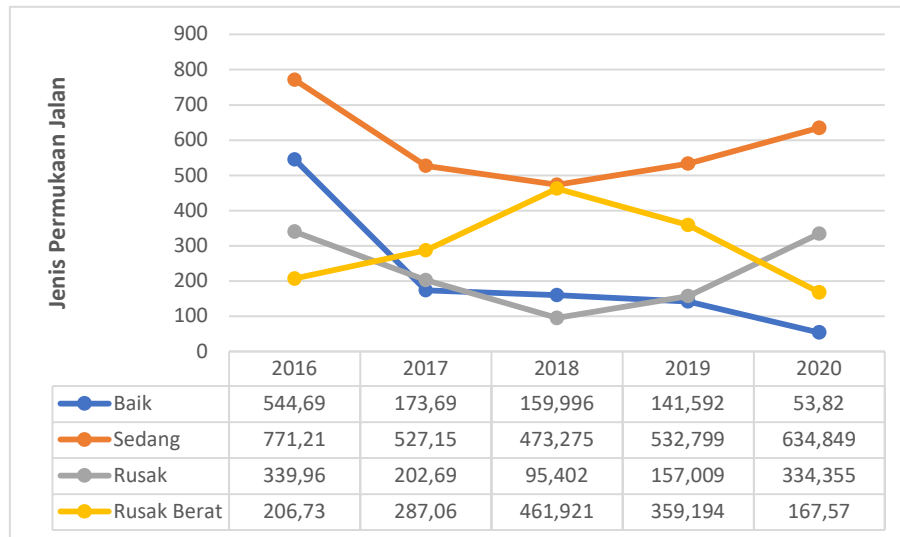
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan urusan wajib dasar bidang Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang dianalisis dengan beberapa aspek yaitu (i) Kondisi jalan Kabupaten, (ii) Jembatan, (iii) irigasi dan (iv) RuangTerbuka Hijau.

a. Jalan Kabupaten

Jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air. Pada tahun 2020, panjang jalan di Kabupaten Indragiri Hilir sepanjang 1.872,05 Km yang terdiri dari 214,23 Km jalan Negara, 467,23 Km jalan Provinsi dan 1.190,59 Km jalan Kabupaten. Perkembangan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 sebesar 53,82 Km², ini menurun cukup drastis dari tahun 2019 sebesar 141,59 Km², di tahun 2018 sebesar 159,99 Km², tahun 2017 kondisi jalan baik di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 173,69 Km², akan tetapi bila

dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah jalan dalam kondisi baik sebesar 544,69 Km².

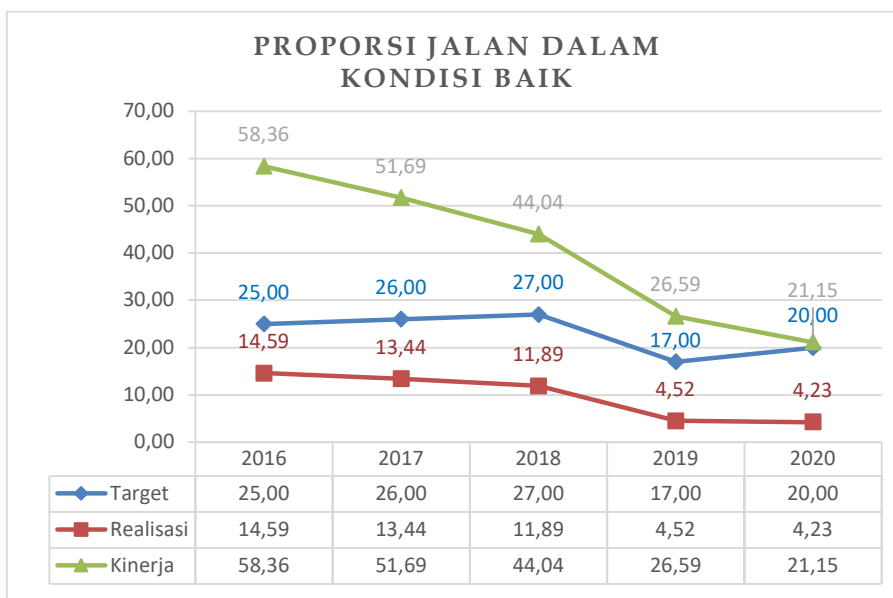


Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2-65 Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Indragiri Hilir

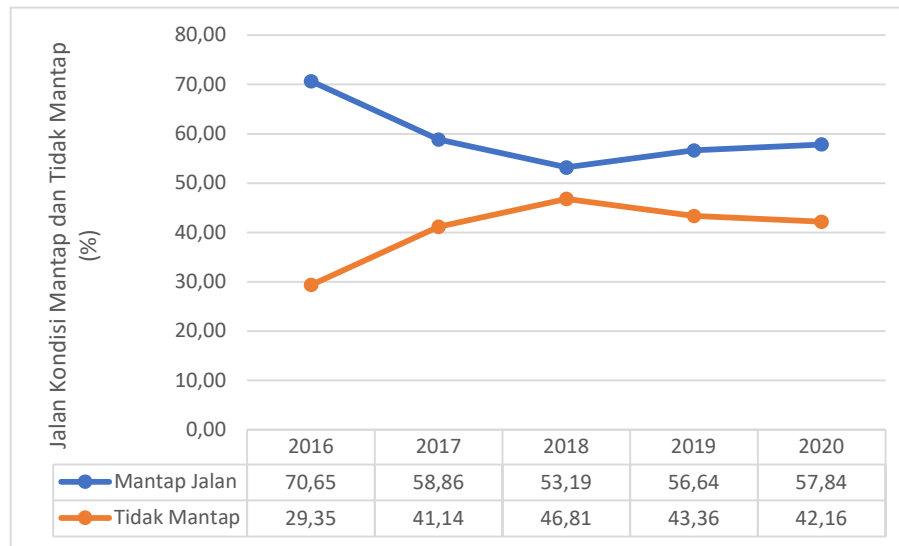
Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio jalan Kabupaten dengan kondisi baik proporsinya ditargetkan terus meningkat dari 25% pada tahun 2016 menjadi 27% pada tahun 2018. Selama periode 2016 – 2018, realisasi proporsi jalan kabupaten dengan kondisi baik terus dibawah target yaitu sebesar 14,22% pada tahun 2016 dan terus menurun menjadi 11,89 % pada tahun 2018. Kemudian ditahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 4,23%. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi baik berkisar antara 21,15% - 58,36% dengan kategori Sangat Rendah – Rendah. Rata-rata nilai realisasi kinerja sebesar 40,37% dengan kategori Rendah.



Gambar 2-66 Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

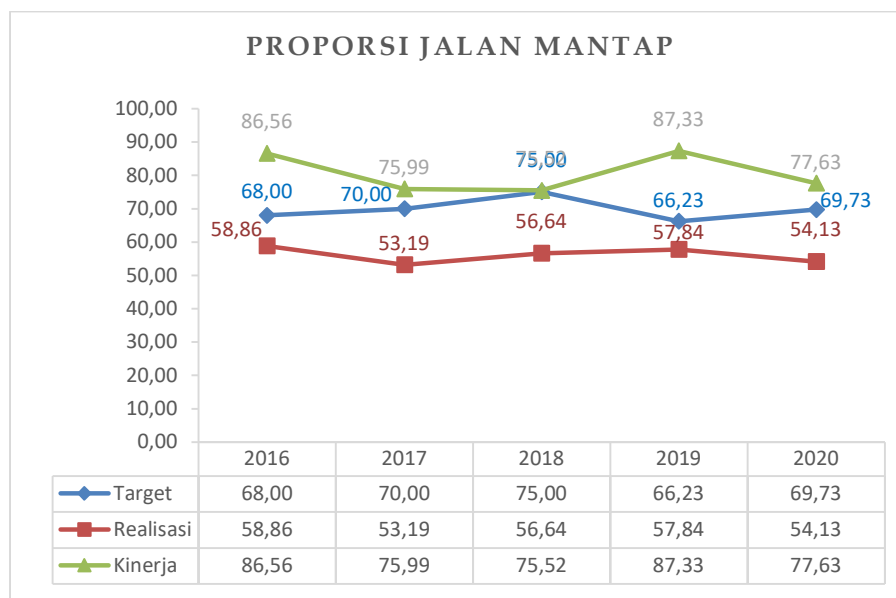
Pada periode yang sama (2016 – 2020), ruas jalan dengan kondisi mantap yakni ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu untuk seluruh status di Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif yaitu dengan proporsi sebesar 116,97% pada tahun 2016, menurun menjadi sebesar 22% pada tahun 2020. Capaian kondisi seluruh status jalan ini lebih tinggi dibanding dengan capaian panjang jalan Kabupaten dengan kondisi mantap. Pada tahun 2017, panjang jalan Kabupaten dengan kondisi mantap dengan persentase sebesar 53,19%. Meningkat sebesar 56,64% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 57,81% pada tahun 2019. Secara keseluruhan, jalan dengan kondisi mantap, baik pada jalan kabupaten masih dibawah standar yang ditetapkan secara nasional yaitu 80% jalan dengan kondisi mantap. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan kondisi jalan dengan status mantap dengan proporsi sekitar 80% perlu terus diupayakan.



Gambar 2-67 Perkembangan Jalan dengan Kondisi Mantap dan Tidak Mantap Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

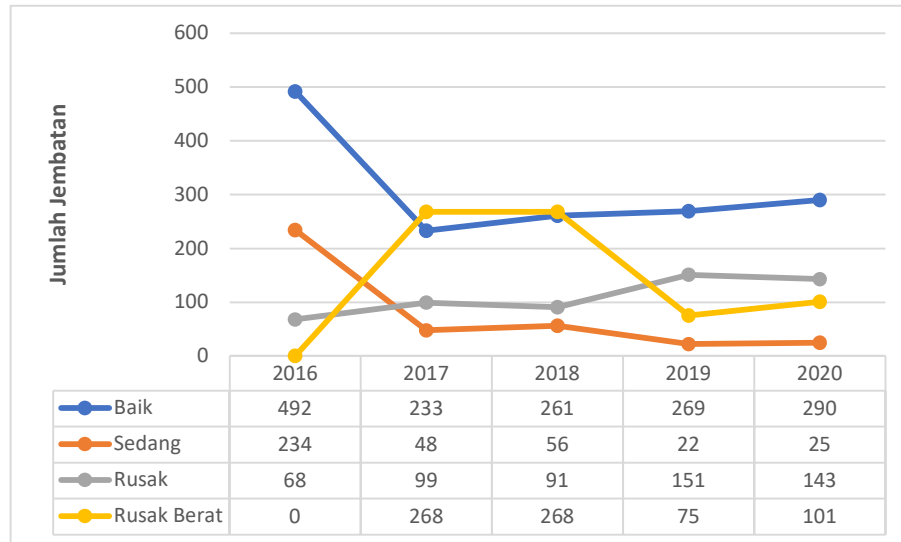
Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio jalan Kabupaten dengan kondisi mantap, mengalami fluktuasi yaitu dari 68,75% pada tahun 2016 menjadi 75,00% pada tahun 2018, kemudian 69,73% pada tahun 2020. Pada periode 2016 - 2020, realisasi indikator jalan kabupaten dengan kondisi mantap berada pada kategori Rendah-Sedang dengan realisasi kinerja berkisar antara 53,19% - 58,86% dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target sebesar 80,60% terkategori Tinggi.



Gambar 2-68 Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

b. Jembatan

Secara umum, jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Selama periode 2016 – 2020, jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan kondisi baik memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, proporsi jembatan dengan kondisi baik sebesar 61,96% menurun menjadi 35,96% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, proporsi jembatan dengan kondisi baik meningkat menjadi 58,32%. Selama periode 2016 – 2020, rata-rata pertumbuhan proporsi jembatan dengan kondisi baik menurun sebesar -9,05% per tahun. Penurunan proporsi jembatan dengan kondisi baik dan mantap harus menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya agar transportasi dari dan menuju Indragiri Hilir dapat terus lancar.



Gambar 2-69 Perkembangan Jembatan dengan Kondisi Baik dan Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

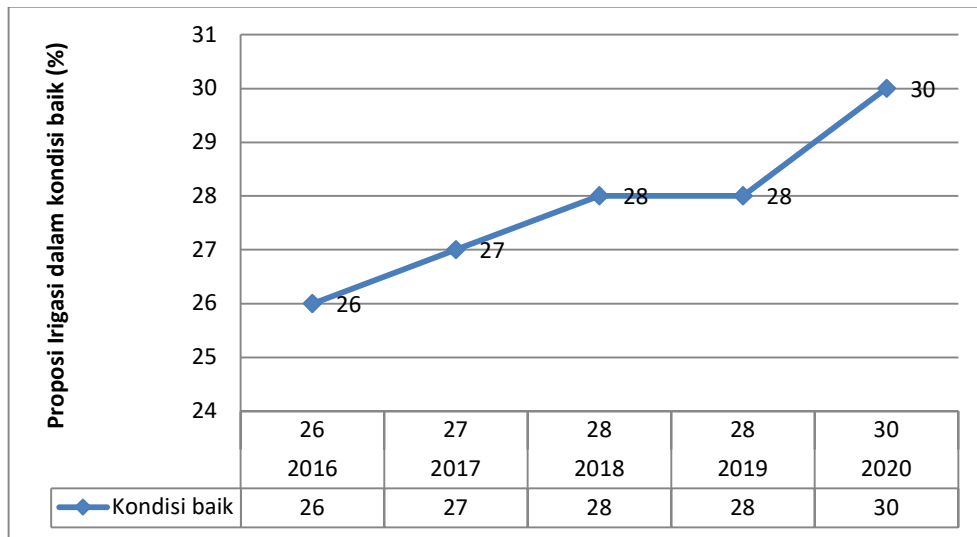
Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Indragiri Hilir

Pada periode yang sama, jembatan dengan kondisi baik memiliki trend yang berfluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah jembatan dalam kondisi baik sebesar 492 dengan proporsinya sebesar 67,21%, menurun menjadi 233 pada tahun 2017 dengan proporsi 31,83%. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 261 dengan proporsi 35,66%. Pada tahun 2019 meningkat sebesar 269 dengan proporsi sebesar 36,75% dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 290 dengan proporsi sebesar 39,62%. Peningkatan kondisi baik yang meningkat dengan persentase yang tidak begitu tinggi harus menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya agar transportasi dari dan menuju Indragiri Hilir dapat terus lancar.

c. Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Selama periode 2016-2020, irigasi di Indragiri Hilir dengan kondisi baik proporsinya berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, proporsinya sebesar 26% meningkat menjadi

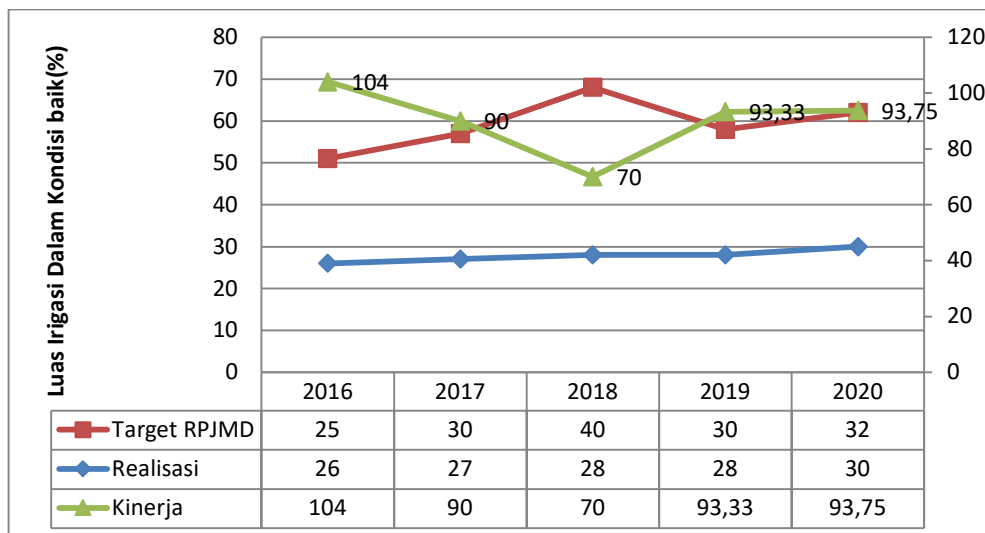
28% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 28% pada tahun 2019 dan secara perlahan meningkat menjadi 30% pada tahun 2020. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indikator luas irigasi dengan kondisi baik meningkat sebesar 10,66% per tahun. Rendahnya proporsi luas irigasi dengan kondisi baik dan penurunannya yang tajam perlu mendapat perhatian dalam pembangunan agar produksi padi dapat terus ditingkatkan



Gambar 2-70 Perkembangan Kondisi Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2016 - 2020) dan LKPJ (2016 - 2020)

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator luas irigasi dalam kondisi baik telah ditetapkan meningkat dari 25% pada tahun 2016 menjadi 40% pada tahun 2018. Realisasi indikator luas irigasi dengan kondisi baik memiliki trend meningkat meski umumnya masih dibawah target keculai untuk tahun 2016 yang capainnya diatas target. Kecuali kinerja tahun 2016 yang capaian realiasi kinerja sebesar 104,00% yang terkategori Sangat Tinggi, capaian realisasi kinerja 2016-2020 berkisar antara 70% - 104% yang terkatgeori sedang - sangat Tinggi. Rata-rata realisasi kinerja indikator luas irigasi dengan kondisi baik sebesar 83,37% dan terkategori Tinggi.

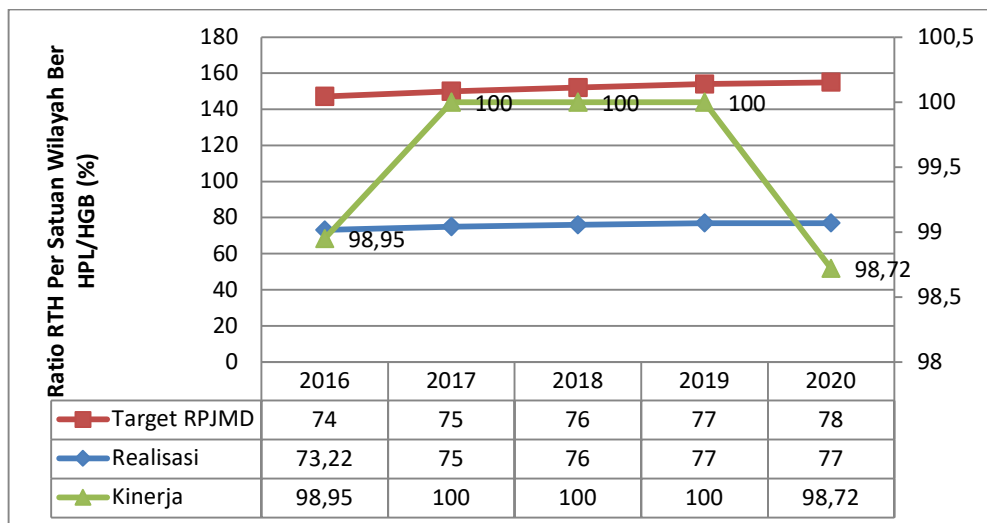


Gambar 2-71 Kinerja Indikator Luas Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

d. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria (a) Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, (b) berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan (c) didominasi komunitas tumbuhan.

Selama periode 2016-2020, rasio RTH per satuan wilayah ber HPL/HGB di Indragiri Hilir memiliki trend meningkat yaitu sebesar 74% pada tahun 2016 menjadi 76% pada tahun 2018 dan diperkirakan sebesar 78% pada tahun 2020. Selama periode 2017 - 2019, rata-rata pertumbuhan rasio RTH per satuan wilayah ber HPL/HGB di Indragiri Hilir meningkat dan mencapai target sebesar 1,25% per tahun.



Gambar 2-72 Kinerja Indikator Ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2016 - 2020) dan LKPJ (2016 - 2020)

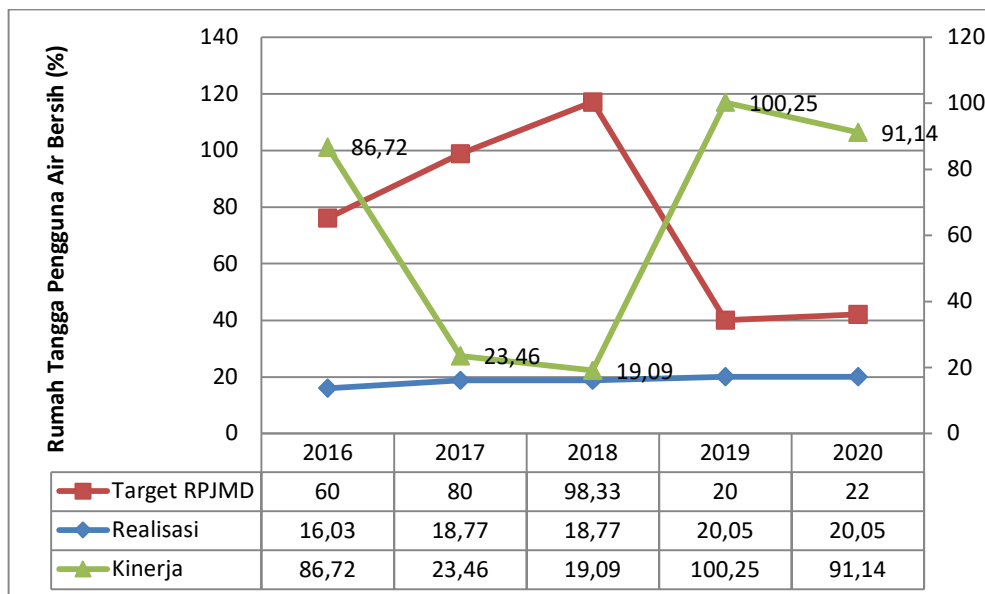
Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 74% pada tahun 2016 menjadi 76% pada tahun 2018. Realisasi capaian indikator ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB terus mencapai target dan realtif sama dengan target pada tahun 2017-2019. Selama periode ini, realisasi kinerja ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Indragiri Hilir berkisar antara 98,72% - 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator yang tinggi ini harus terus dipertahankan.

e. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum dan untuk treatment air sanitasi. Persyaratan disini ditinjau dari persyaratan kandungan kimia, fisika dan biologis. Pengertian air bersih secara umum adalah air yang aman dan sehat yang bisa dikonsumsi manusia. Secara fisik air tersebut

tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Secara Kimia adalah (a) PH netral (bukan asam/basa) dan (b) tidak mengandung racun dan logam berat berbahaya. Selama periode 2014 – 2018, persentase rumah tangga pengguna air bersih di Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2014, rumah tangga pengguna air bersih sebesar 26% m3nurun menjadi 13,28% pada tahun 2015 dan meningkat persentase hingga tahun 2018 menjadi 21,06%. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna air bersih menurun sebesar -4,12% per tahun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu upaya peningkatan persentase rumahtangga pengguna air bersih sehingga tingkat kesehatan masyarakat Indragiri Hilir dapat terus meningkat.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rumah tangga pengguna air bersih terus meningkat dari 60% pada tahun 2016 menjadi 98,33% pada tahun 2018. Realisasi indikator rumah tangga penggunaan air bersih di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2017-2018 terus dibawah target. Pada tahun 2020, capaian indikator rumah tangga pengguna air bersih sebesar 22% dengan realisasi kinerja sebesar 91,14%. Pada tahun 2019-2020, target yang terus meningkat menjadikan realisasi kinerja terus menurun yaitu dari 20,05% yang terkategori Sangat Rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap penggunaan air bersih perlu mendapat prioritas pada pembangunan ke depan.



Gambar 2-73 Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2016 - 2020) dan LKPJ (2016-2020)

f. SPM PU-PR

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan bahwa SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM PU-PR terdiri dari 2 indikator, dengan batas waktu pencapaian tahun setiap tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.14 dibawah ini.

Tabel 2-14 Jenis Pelayanan Dasar, Indikator, dan capaian SPM Bidang PU-PR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN			Batas waktu capaian
			2018	2019	2020	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87402	75690	741358	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	N/A	N/A	N/A	

Pencapaian indikator SPM bidang PU-PR Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2018 – 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.16. Pada tahun 2018-2020, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 2 indikator (100%).

Permasalahan/hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM hingga tahun 2017 menurut jenis pelayanan dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.15 dibawah ini.

Tabel 2-15 Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang PU-PR di Kabupaten Indragiri Hilir

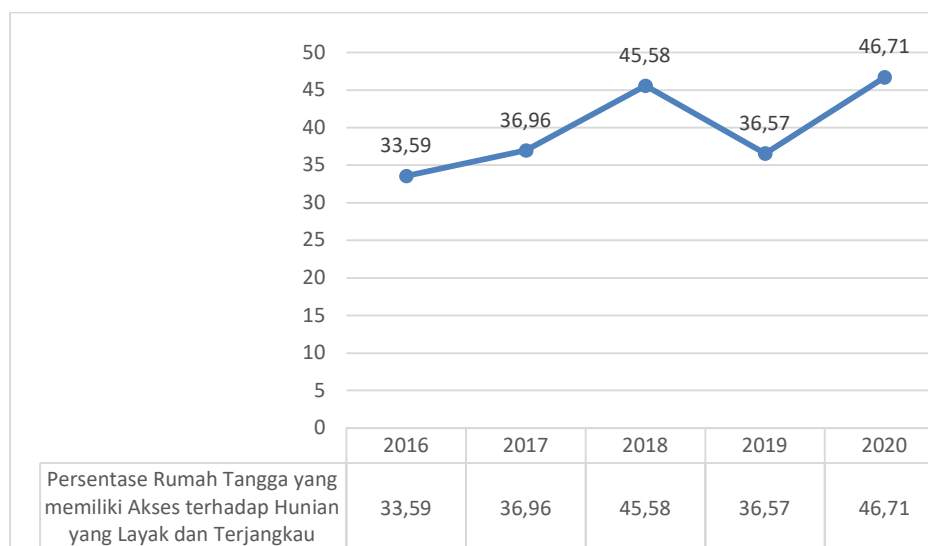
JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	HAMBATAN	SOLUSI
1 Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat	1 Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	-	-
	2 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Sidementasi yang terlalu cepat sehingga terjadi pendangkalan saluran irigasi	Operasional dan pemeliharaan saluran irigasi secara berkala dan tersedianya dana operasional dan pemeliharaan
2 Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	3 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Anggaran kurang memadai dan kondisi geografis yang sulit serta proses lelang yang selalu lambat, sehingga pengerjaan selalu dipenghujung waktu.	meningkatkan jumlah anggaran serta mempercepat proses lelang, sehingga bisa dikerjakan tepat waktu.
	4 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	Pembebasan Lahan pada Penyediaan Jalan	Tersedianya Lahan sebelum Pembangunan jalan
3 Penyediaan air minum	5 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	-	-
4 Penyediaan sanitasi	6 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	-
	7 Persentase pengurangan sampah di perkotaan	-	-
	8 Persentase pengangkutan sampah	-	-
	9 Persentase pengoperasian TPA	-	-
	10 Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	-	-
5 Penataan Bangunan dan Lingkungan	11 Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW
6 Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	12 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-
7 Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	13 Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	-
	14 Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	-	-
8 Informasi Penataan Ruang	15 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW
9 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	16 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Layanan urusan wajib dasar bidang Perumahan dan Pemukiman dianalisis dari tiga indikator utamanya yaitu (i) Rumah tidak layak huni dan (ii) Rumah tangga pelanggan listrik PLN.

a. Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP). Dalam hal ini indikator untuk mengukur Rumah layak huni menggunakan Indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau. Adapun Kinerja indikator dimaksud dapat dilihat pada gambar 2-74 Berikut :



Sumber : Dinas Perkim Kab. Inhil

Gambar 2-74 : Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

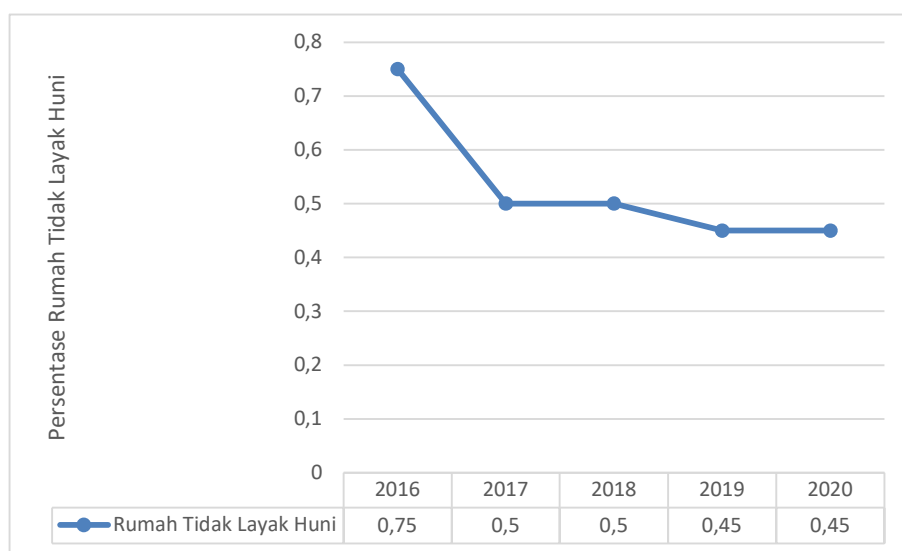
Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau berfluktuatif meningkat, dari tahun 2016 sebesar 33,59% persen meningkat menjadi 46,71% persen pada tahun 2020,

sementara pada tahun 2019 menurun menjadi 36,57% dari tahun 2018 sebesar 45,58%.

b. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Selama periode 2016 – 2020, jumlah persentase rumah tidak layak huni (RTLH) di Indragiri Hilir bervariasi. Selama periode ini, persentase RTLH pada tahun 2016 sebesar 0,75% selanjutnya menurun pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 0,5%, kemudian kembali menurun pada angka 0,45% di tahun 2019 dan 2020.

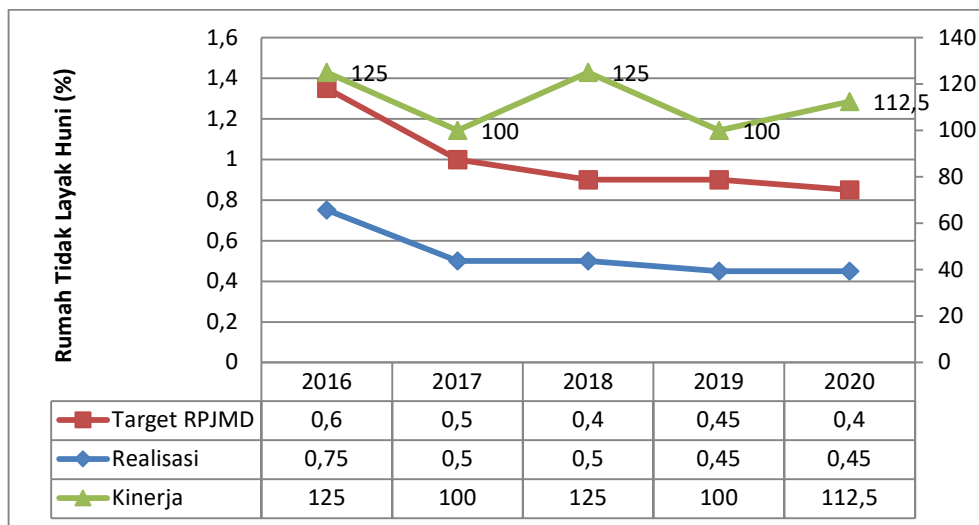


Gambar 2-75 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir 2016-2020

Sumber : Dinas Perkim, 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rumah tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun yaitu dari 0,60% pada tahun 2016 menjadi 0,40% pada tahun 2018. Realisasi capaian indikator rumah tidak layak huni lebih tinggi dan/atau sama dengan target. Pada tahun 2017 – 2018, capaian realisasi indikator rumah tidak layak huni yang tersisa relatif diatas target yaitu sebesar

0,5% dengan capaian realisasi kinerja berkisar antara 100% - 125% yang terkategori sangat Tinggi. Pada tahun 2019, capaian indikator rumah tidak layak huni relatif sama dengan target sehingga realisasi kinerja sekitar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Selama periode ini, rata-rata realisasi kinerja indikator rumah tidak layak huni sebesar 86,67% dengan kategori Tinggi.



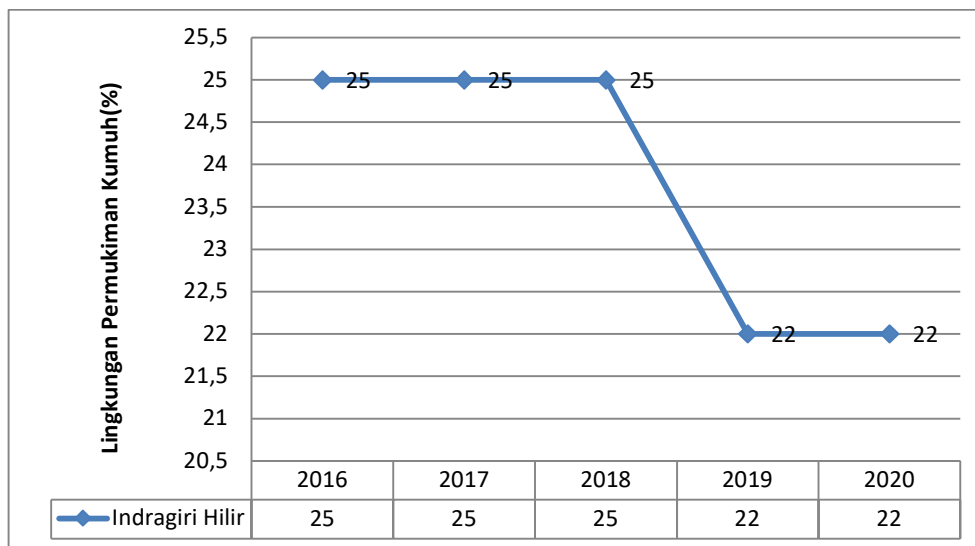
Gambar 2-76 Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perkim, 2021

c. Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. ciri permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah.

Selama periode 2016-2020, Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Indragiri Hilir mengalami penurunan. Pada tahun 2018 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh 25,00% dan pada tahun 2019-2020 turun menjadi 22,00%



Gambar 2-77 Kinerja Indikator Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

d. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Di wilayah perkotaan kawasan kumuh timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah, kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, sebagai akibat keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Tabel 2-16 Jumlah Dan Luas Kawasan Kumuh di kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Berdasarkan Kewenangan Penanganan

NO	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Kawasan Kumuh					
			Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1.	Indragiri Hilir	176,26	5	126,94	2	24,94	4	24,38

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir

Pada tabel di atas terlihat bahwa Jumlah Kawasan kumuh pada kewenangan pemerintah pusat lebih banyak dibanding kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota yaitu sebanyak 5 Lokasi dengan luas 176 Ha, disusul oleh Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 4 Lokasi dengan luas 24,38 Ha dan terakhir Kewenangan provinsi sebanyak 2 Lokasi dengan luas 24,94 Ha.

Tabel 2-17 Jumlah Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan SK Bupati Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indragiri Hilir	45,12	176,26	176,26	176,26	176,26

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa penanganan infrastruktur permukiman dan pembangunan rumah layak huni tidak berbanding lurus dengan penanganan kawasan kumuh. Kawasan kumuh dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara pembangunan RSLH dan penanganan kawasan kumuh belum signifikan.

e. PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan/permukiman merupakan fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang masih dikategorikan dalam prasarana, yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan

seperti jalan lingkungan, saluran drainase, ruang terbuka publik, taman, sekolah, fasilitas kesehatan, Rumah ibadah air bersih dan listrik adalah bagian tak terpisahkan dari perencanaan tata permukiman yang berkualitas.

Sampai dengan tahun 2021 pencapaian kinerja PSU ((Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU sebesar 63,93 % dari target 70 %. Artinya kinerja pencapaian sebesar 85,24 %.

f. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 2 indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.18

Tabel 2-18 Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN				Batas waktu capaian
			2018	2019	2020	2021	
1	Penyediaan & rehatiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	30	35	-	20	Setiap Tahun

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	NA		
---	---	---	----	----	----	--	--

Pencapaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.20. Pada tahun 2018, dari 2 indikator pelayanan dasar bidang perumahan, seluruhnya telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Capaian semua indikator masih dibawah target nasional.

Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian SPM Perumahan Rakyat beserta solusi ditunjukkan pada Tabel 2.19.

Tabel 2-19 Permasalahan Dalam Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Masalah	Sub Masalah	Solusi
1	Perumahan Rakyat belum memenuhi standar layak huni	Mahalnya bahan konstruksi di daerah pedesaan sehingga masyarakat kesulitan membangun rumah berstandar	Membantu masyarakat membangun rumah layak huni berstandar
		Struktur tanah yang tidak memungkinkan membangun beton atau semenisasi rumah	Diupayakan membangun rumah dengan penimbunan sabut dan pasir curug
2	Sulitnya akses jalan	Sulitnya akses cepat jalan lingkungan pemukiman	Membangun jalan lingkungan dan menunjang keberhasilan distribusi dan perekonomian masyarakat
3	Tidak adanya jamban (toilet)	Dekatnya sumber air sungai	Membuat kesadaran hidup bersih dan sehat
			Membuat tempat mandi cuci kakus (MCK)
4	Sulitnya air bersih	Jenis air di Kabupaten Indragiri Hilir adalah payau (berlumpur)	Membangun pipa air bersih dengan sumur bor
			Membantu masyarakat membuat penampungan air hujan
5.	Lemahnya administrasi pembangunan tempat pemakaman umum	Tidak adanya pembatas tanah bangunan tempat pemakaman umum	Membuat pagar pembatas antar wilayah penguburan jenazah dengan batas tanah masyarakat

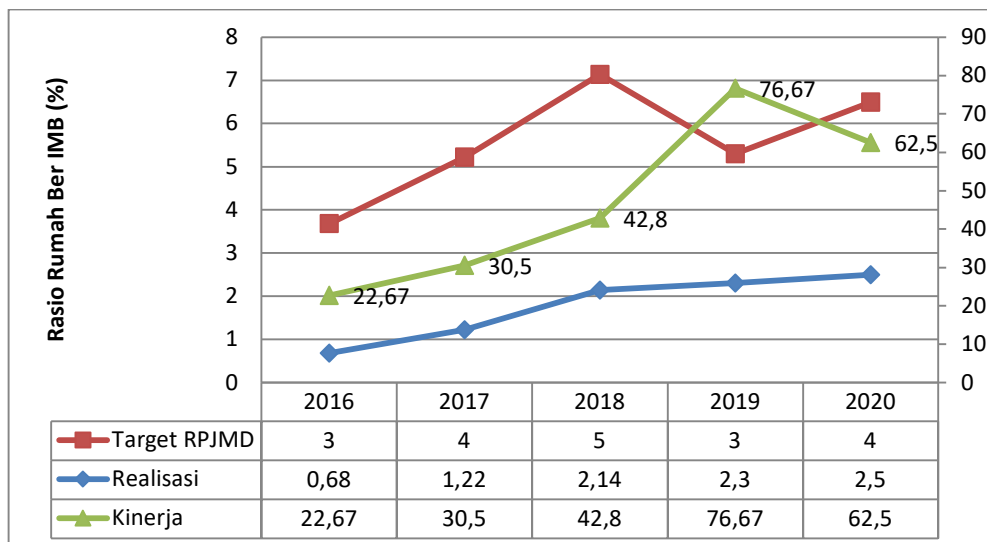
No	Masalah	Sub Masalah	Solusi
6.	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkotaan kecamatan di wilayah pedesaan	Partisipasi Rekreasi pada masyarakat di Kecamatan tertentu	Terbuka Hijau dengan mementingkan aspek pertumbuhan perdagangan dan jasa transportasi
			Membuat Taman Rekreasi di Kawasan Perkotaan dan Ibu Kota Kecamatan

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Layanan urusan wajib dasar bidang sosial dianalisis dari empat indikator penting yaitu ((i) Rasio rumah ber IMB, (iii) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, (iii) Cakupan penegakan daerah dan peraturan kepala daerah, dan (iv) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

a. Rasio Rumah Ber IMB

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio rumah ber IMB terus meningkat yaitu dari 1% pada tahun 2014 menjadi 5% pada tahun 2018.



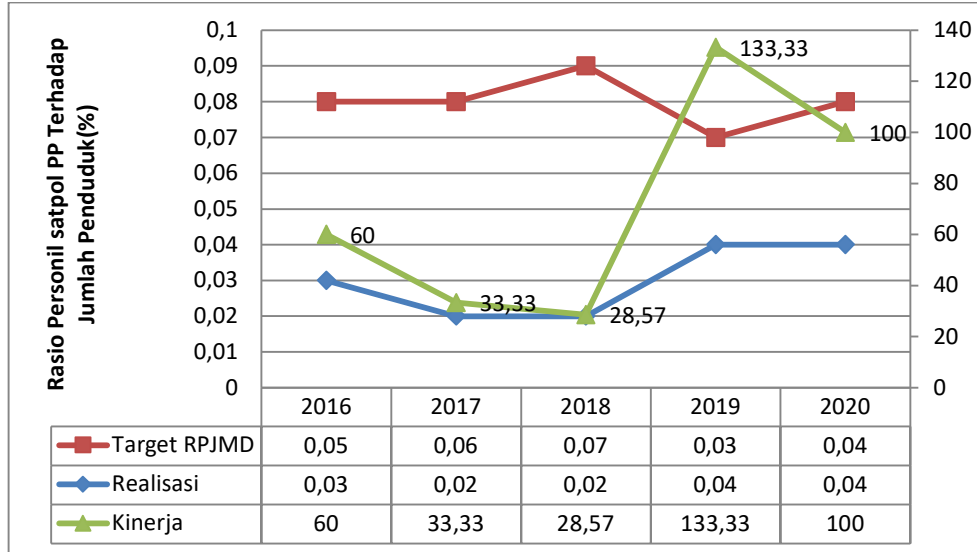
Gambar 2-78 Kinerja Indikator Rasio Rumah Ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2016-2020, capaian indikator rasio rumah ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir terus dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada periode ini, realisasi kinerja indikator rasio rumah ber IMB berkisar antara 22,67% - 76,76% yang terkategori rendah-sedang. Upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan periode mendatang.

b. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio target personil satpol PP per 10.000 penduduk terus meningkat dari 0,03 tahun 2016 menjadi 0,07 tahun 2018.

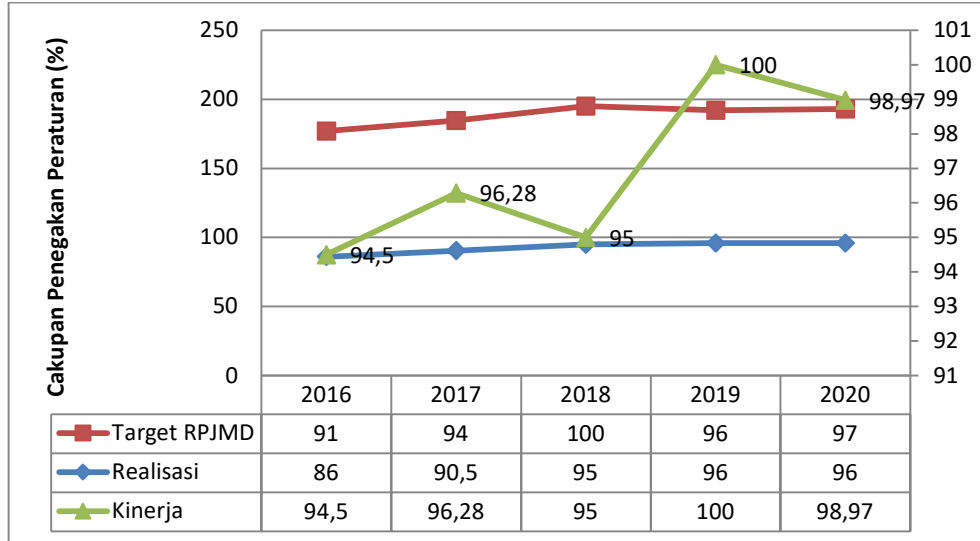


Gambar 2-79 Kinerja Indikator Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Realisasi indikator rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk Indragiri Hilir selama periode 2016-2020 terus dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2016-2018, realisasi kinerja indikator rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk Indragiri Hilir berkisar antara 28,57% - 60,00% yang terkategori Rendah - Sedang. Pada tahun 2019-2020, realisasi kinerja indikator ini meningkat menjadi 100% - 133,33% yang terkategori Sangat tinggi. Rendahnya, realisasi indikator ini karena jumlah anggota Satpol PP yang belum mengacu kepada Permendagri No. 60 tahun 2012. Upaya pencapaian rasio ideal untuk Satpol PP per 10.000 penduduk perlu terus diupayakan.

c. Cakupan Penegakan Peraturan

Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilakukan oleh Satpol PP sebagai perangkat Pemerintahan Daerah kabupaten Indragiri Hilir. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 91% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018.



Gambar 2-80 Kinerja Indikator Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

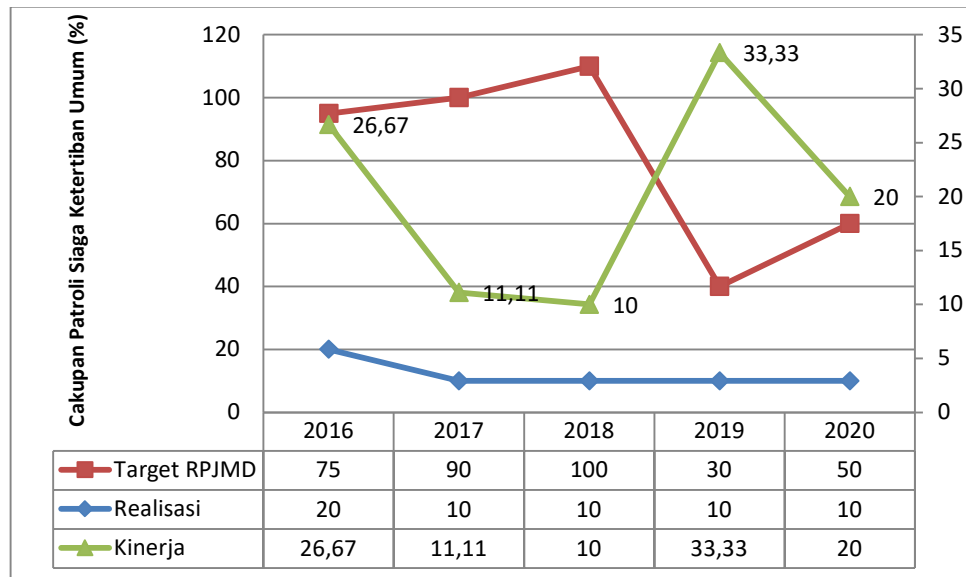
Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2016 - 2020) dan LKPJ (2016 - 2020)

Selama periode 2016-2020, capaian indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir relatif mendekati target yang telah ditetapkan. Meski capaian indikator ini terus meningkat namun peningkatannya lebih rendah dibanding target sehingga realisasi kinerja memiliki trend menurun. Pada periode 2016-2020, realisasi kinerja berkisar antara 94,50% - 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah yang Sangat Tinggi harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

d. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok satuan polisi pamong praja disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan antara lain (a) tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, (b) antar batas wilayah

dan (c) tempat keramaian/hiburan. Apabila telah tercipta kondisi 3 kali patroli dalam sehari diseluruh kecamatan pada Kabupaten maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi. PP sebagai perangkat Pemerintahan Daerah kabupaten Indragiri Hilir. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terus meningkat yaitu dari 75% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018.



Gambar 2-81 Kinerja Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2016 - 2020) dan LKPJ (2016 - 2020)

Selama periode 2016-2020, capaian indikator cakupan patroli siaga

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terus dibawah target yang ditetapkan dan bahkan semakin membesar gapnya. Pada tahun 2016, realisasi indikator patroli siaga ketertiban di Indragiri Hilir sebesar 20% dengan realisasi kinerja sebesar 26,67% dan terkategori sangat rendah. Pada tahun-tahun berikutnya realisasi indikator terus menurun sehingga realisasi kinerja juga terus menurun yaitu dari 11,11% yang terkategori Sangat rendah menjadi 10,00% yang terkategori Sangat Rendah. Secara umum, realiasi kinerja sebesar 43,85% dan terkategori Sangat Rendah. Rendahnya capaian indikator ini sangat terkait erat dengan ju,alh satpol PP

yang jauh dari ideal sebagaimana diatur dalam permendagri No. 60 tahun 2012.

e. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdapat 2 jenis pelayanan dasar dengan total indikator berjumlah 4 indikator Batas waktu pencapaian target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah setiap tahun. Daftar jenis layanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditunjukkan pada Tabel 2.20.

Tabel 2-20 Jenis Layanan Dasar, Indikator Kinerja dan Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam negeri

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN			Batas waktu capaian
			2018	2019	2020	
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	17,78	18,47	42,08	Setiap Tahun
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	70,04	63,47	78,25	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	0	
4.	Pemukiman Yang Terbakar di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0	6	0	

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2018 - 2020, capaian indikator SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.23. Dari 4 indikator kinerja SPM Bidang pemerintahan Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan seluruh indikator (100%) Tugs pelayanan bidang Pemerintahan Dalam negeri dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

Permasalahan /hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam negeri di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dasar dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.21.

Tabel 2-21 Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Operasi Pengamanan dan Pengawasan	Belum terpenuhinya standar kesejahteraan petugas khusus nya yang masih berstatus Non PNS	Peningkatan Alokasi Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan honorer Satpol.PP / Banpol.PP
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Masih lambat nya respon menanggapi laporan masyarakat tentang gangguan Tibumtranmas	Pembentukan Unit Reaksi Cepat Satpol.PP
	Cakupan Penegakan PERDA / PERKADA	Penegakan masih sebatas Surat Peringatan tanpa belum sampai pemberian sanksi	Pembentukan Sekretariat PPNS agar dapat menindaklanjuti pelanggaran PERDA sampai gelar Sidang Tipiring

2.3.1.6. Sosial

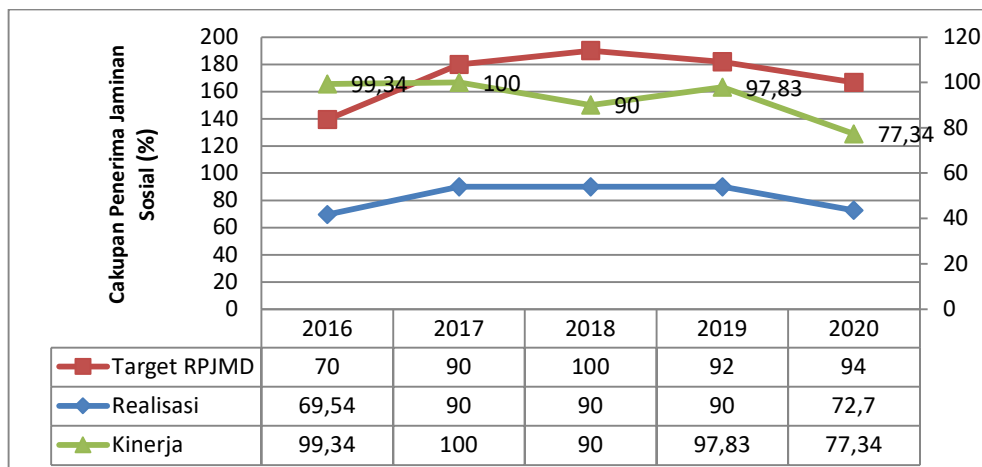
Layanan urusan wajib dasar bidang sosial dianalisis dari dua indikator penting yaitu (i) Penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dan (ii) PMKS yang menerima bantuan sosial.

a. Penerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk

memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terus meningkat yaitu dari 70% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018. Indikator ini ditetapkan agar menjamin indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial di Kabupaten Indragiri Hilir menerima jaminan sosial .

Selama periode 2016-2020, realisasi capaian indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016, realisasi kinerja indikator ini sebesar 99,34% dan terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2017 - 2019, realisasi kinerja indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial berkisar antara 90,00% - 100% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja indikator ini sebesar 93,55% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja telah Sangat tinggi, namun upaya terus mempertahankan jinerja harus terus dilakukan agar penyandang cacat mendapat perlindungan sosial.



Gambar 2-82 Kinerja Indikator Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

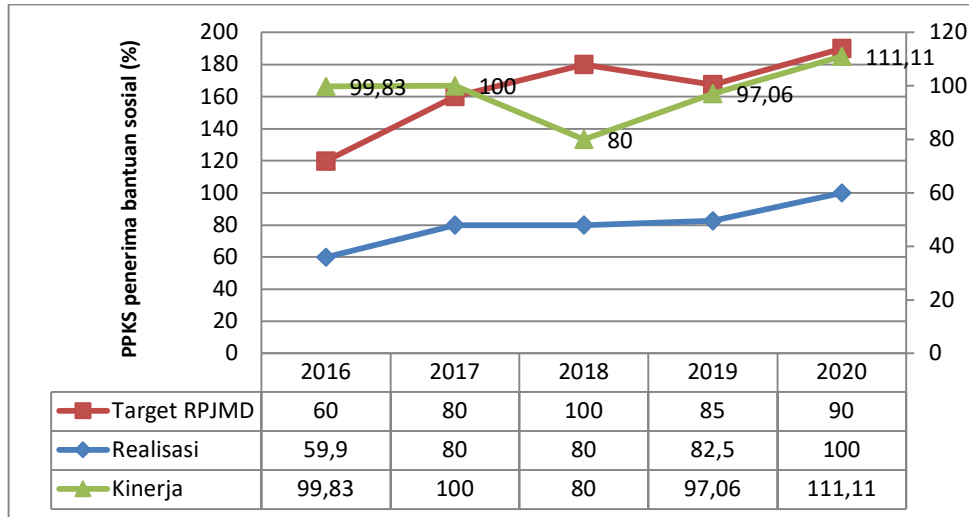
Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka,2016-2020) dan LKPJ (2016-2020)

b. PPKS yang Menerima Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator PPKS yang menerima bantuan sosial terus meningkat yaitu dari 60% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018. Indikator ini ditetapkan dan dimasukkan dalam RPJMD untuk menjamin agar PPKS yang ada di Indragiri Hilir mendapat pembinaan dan bantuan sosial.

Selama periode 2016-2020, realisasi capaian indikator di Indragiri Hilir hampir sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2017-2019, realisasi kinerja indikator ini sebesar 80 - 82,50% yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2020 realisasi indikator sebesar 100% namun karena target meningkat sehingga realisasi kinerja meningkat menjadi 111,11% dan terkategori sangat Tinggi. Selama periode ini, rata-rata realisasi kinerja indikator PPKS penerima bantuan sosial sebesar 97,60% yang terkategori

Sangat Tinggi. Capaian indikator PPKS penerima bantuan sosial yang tinggi selama periode 2016-2020 perlu terus dipertahankan pada periode berikutnya.



Gambar 2-83 Kinerja Indikator PPKS Yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

c. SPM Bidang Sosial

SPM Bidang Sosial merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal. Hal ini tertuang dalam Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan bahwa yang dimaksud Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Daftar jenis layanan dan indikator SPM Bidang Sosial ditunjukkan pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2-22 Jenis Pelayanan, Indikator dan Capaian Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	CAPAIAN				Batas waktu capaian
				2018	2019	2020	2021	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	2	96	8	40	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi anak terlantar di luar panti sosial diluar panti	orang	28	22	25	30	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	100	100	100	100	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	orang	5	8	5	10	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	jiwa	1025	136	330	439	

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2018 – 2020, capaian indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.26. Pada tahun 2018-2020, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan 5 indikator (100%) pada SPM bidang social.

Permasalahan /hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.23 dibawah ini.

Tabel 2-23 Permasalahan/hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang			
a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Letak Daerah pada Perairan Pasang Surut satu kendala lambatnya distribusi Bansos kepada PMKS	Menignkatnya Koordinasi dengan pihak kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)

b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Pemberdayaan Sosial masyarakat melalui KUBE belum berjalan secara maksimal karena belum serius Kecamatan ada Pendamping KUBE	Meningkatkan Koordinasi kerja dengan pihak Kecamatan dan membentuk petugas Pendamping KUBE
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				
a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Menyacu kepada isu no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Panti yang dikelola oleh pemerintah merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bantuan Sosial bagi Panti-panti swasta
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Belum terbentuknya wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKSB)	Mengupayakan Secepatnya melalui Koordinasi dengan pihak kecamatan membentuk WKSBM
3. Penanggulangan korban Bencana:				
a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Sulitnya Proses Administrasi untuk Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana pada BPKAD Kab. Inhil menyebabkan Bantuan Sosial tidak maksimal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaporan Bencana secara berkala
b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Sulitnya proses pencairan dana tanggap darurat Bencana, walaupun Evakuasi Korban sudah dilaksanakan oleh Tim	Meningkatkan Koordinasi kerja dengan Tim penanggulangan bencana alam proses bantuan Tanggap darurat Bencana

			Penanggulangan Bencana daerah	berjalan dengan yang diharapkan	
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:				
-	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Masih Banyaknya PMKS yang belum menerima jaminan sosial terutama yang berada di daerah terpencil, kesulitan peralatan e-KTP, sehingga tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait agar masyarakat yang belum dapat menerima Jaminan Sosial dapat masih data Nasional Penerima bantuan iuran Jaminan Kesejahteraan nasional (PBI-JKN)

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Layanan urusan wajib non dasar terdiri dari 18 layanan yaitu (i) Tenaga Kerja, (ii) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (iii) Pangan, (iv) Pertanahan, (v) Lingkungan Hidup, (vi) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (vii) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (viii) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (ix) Perhubungan, (x) Komunikasi dan Informatika, (xi) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (xii) Penanaman Modal, (xiii) Kepemudaan dan Olahraga, (xiv) Statistik, (xv) Persandiaan, (xvi) Kebudayaan, (xvii) Perpustakaan dan (xviii) Kearsipan

2.3.2.1 Tenaga Kerja

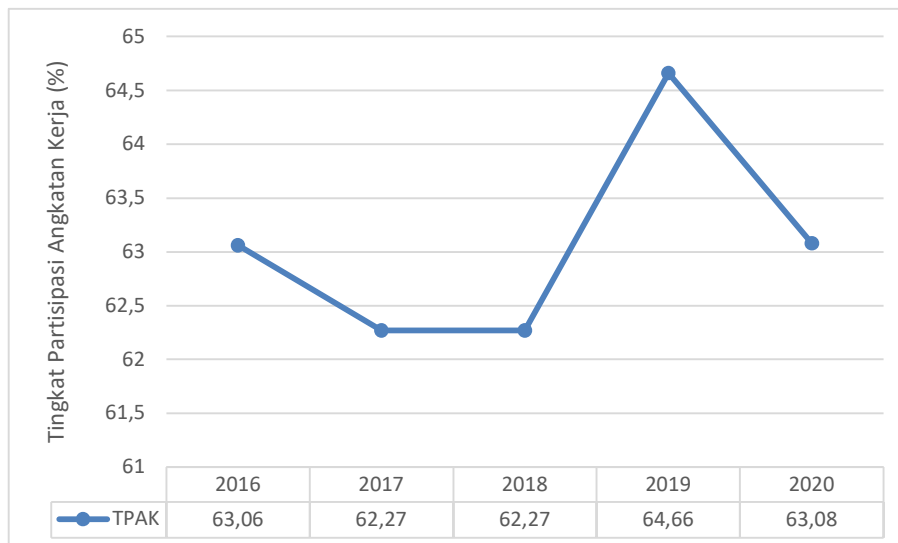
Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja, (ii) Pencari kerja yang

ditempatkan dan (iii) Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Selama periode 2016 - 2020, TPAK Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif. Pada tahun 2016 TPAK Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 63,06% yang berarti, dari 100 orang penduduk Indragiri Hilir berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 63,06% tersedia untuk memproduksi. Pada tahun 2017 tahun 2018, TPAK menurun menjadi 62,27% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 64,66% yang kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar 63,08%.

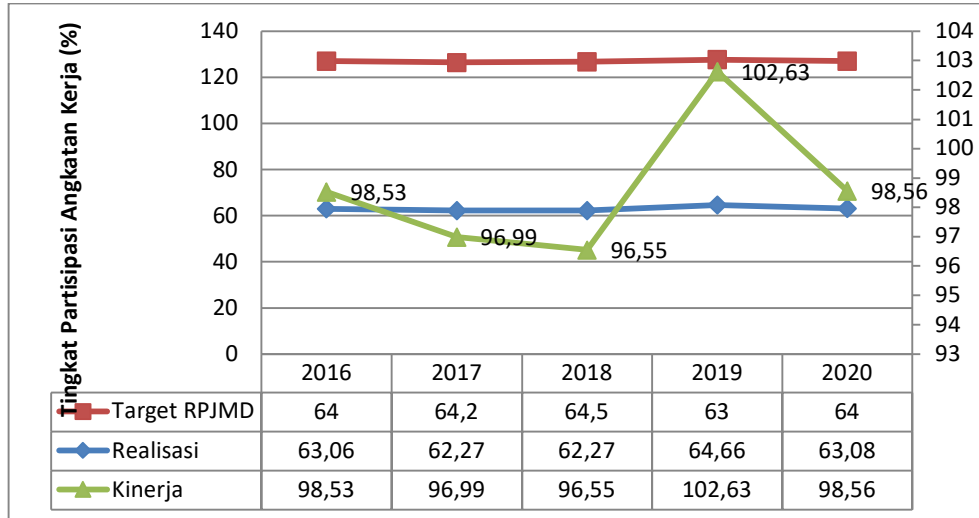


Gambar 2-84 Perkembangan TPAK Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa target indikator TPAK telah ditetapkan terus meningkat dari 64,00% pada tahun 2016 menjadi 64,50% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, realisasi TPAK Indragiri Hilir berada diatas target sehingga realisasi kinerja sebesar

102,63% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2016-2018, realisasi TPAK Indragiri Hilir sedikit berada dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 96,55% - 98,53% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Pencapaian TPAK dan kinerja yang Sangat Tinggi ini perlu dipertahankan.



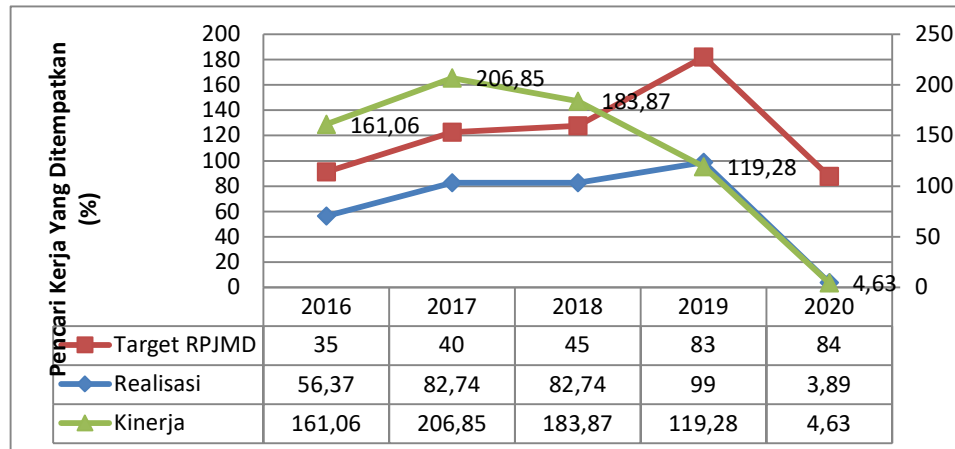
Gambar 2-85 Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Pencari kerja yang ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan (Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER.07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja). Selama periode 2016-2020, pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat dari

56,37% pada tahun 2016 meningkat menjadi 82,74% pada tahun 2017.



Gambar 2-86 Kinerja Indikator Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

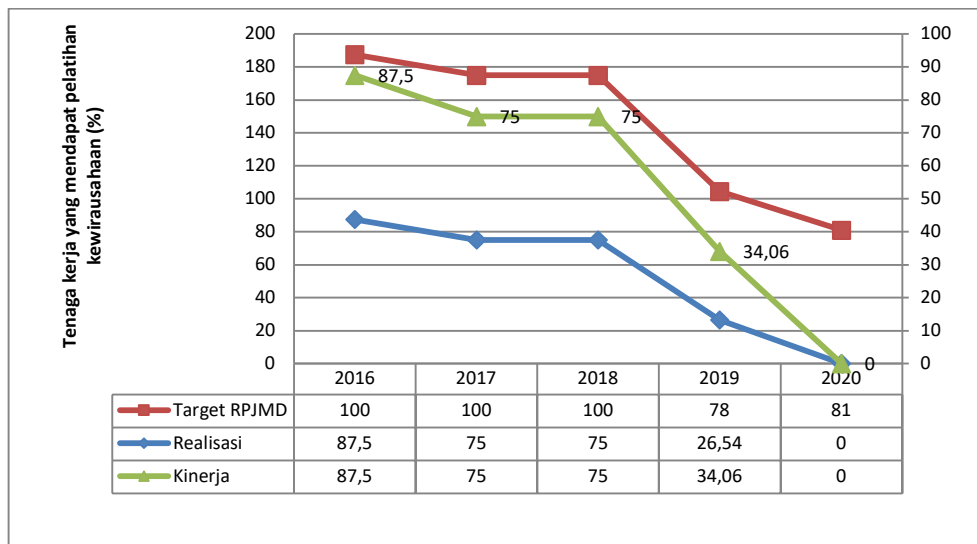
Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan target indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir terus meningkat dari 35% pada tahun 2016 menjadi 50% pada tahun 2018. Realisasi indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir ini, capainnya umumnya diatas target kecuali pada tahun 2020 yang dibawah target. Pada periode 2016 – 2020, realisasi indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir berada sama dan/atau diatas target dengan realisasi kinerja berkisar antara 119,28% – 206,85% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja indikator yang tinggi ini perlu terus dipertahankan.

c. Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan

Selama periode 2016-2020, realisasi indikator tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan memiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 100% pada tahun 2016 sama 100% pada tahun 2018 dan terus

menurun menjadi 78% pada tahun 2019. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2016 dari 87,50% menurun menjadi 75,00% pada tahun 2017 dengan kategori sedang. Pada tahun 2016 – 2018, realisasi kinerja indikator tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan terus menurun dari 87,50% menjadi 75% dengan kategori Tinggi – Sedang. Upaya untuk meningkatkan indikator ini perlu senantiasa dilakukan sehingga tenaga yang dilatih dapat membuka lapangan usaha mandiri.



Gambar 2-87 Kinerja Indikator Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

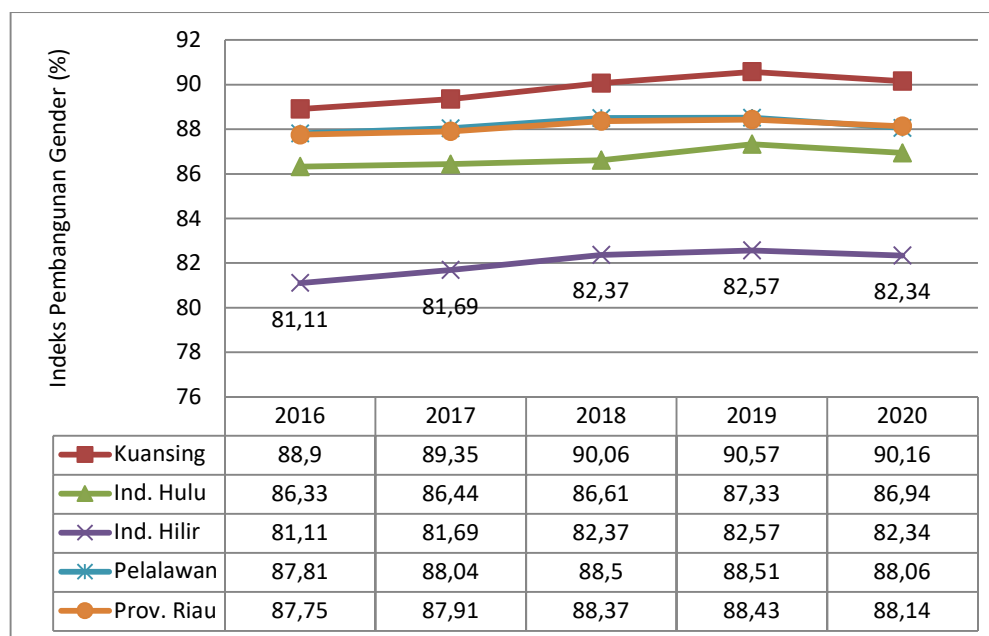
Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) Indeks Pembangunan Gender, (ii) Indeks Pemberdayaan Gender dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

a. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang

sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen.

Selama periode 2016 - 2020, IPG Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yaitu dari 81,11% pada tahun 2016 meningkat menjadi 82,34% pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan IPG Kabupaten sekitarnya serta IPG Provinsi Riau memperlihatkan bahwa IPG Indragiri Hilir adalah yang terendah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pembangunan perempuan di Indragiri Hilir dari bidang ekonomi dan non ekonomi perlu terus ditingkatkan khususnya dalam peran serta perempuan dalam bekerja.

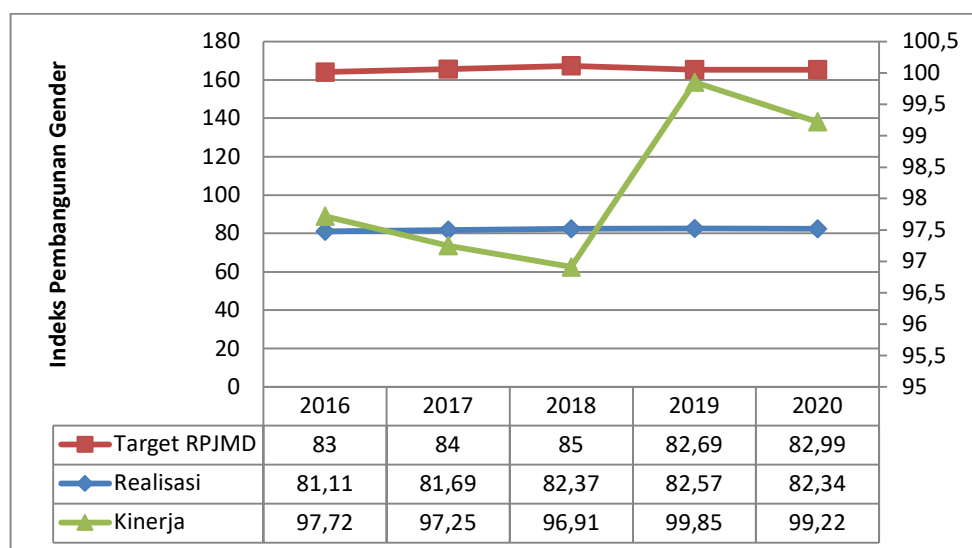


Gambar 2-88 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator IPG Kabupaten Indragiri Hilir dari 83,00% pada tahun 2016, meningkat menjadi 85% pada tahun 2018. Selama periode ini, capaian indikator IPG Indragiri Hilir berada dibawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2017-2018, capaian indikator IPG sebesar 81,69% dan 82,37% dengan realisasi kinerja sebesar 97,25% - 96,91% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun

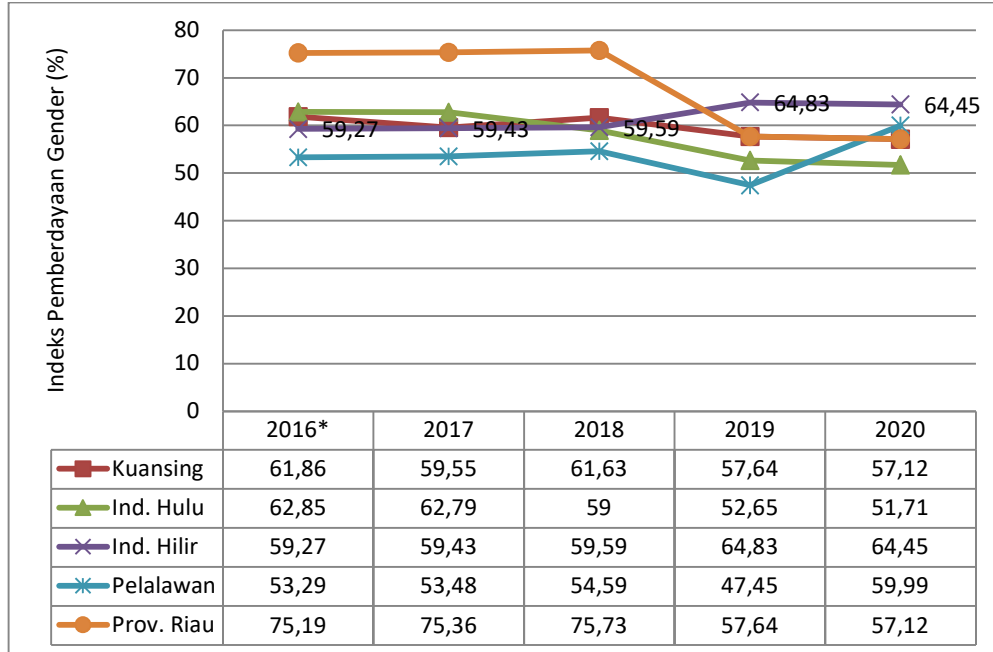
2016 - 2018, realisasi meningkat lambat dan disisi lain target meningkat lebih tinggi sehingga realisasi kinerja menurun dari 97,72% menjadi 96,91% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian realisasi kinerja IPG Indragiri Hilir selama periode ini harus terus dipertahankan dan ditingkat nilainya sehingga dapat melampaui IPG Kabupaten Sekitarnya.



Gambar 2-89 Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

b. Indeks Pemberdayaan Gender

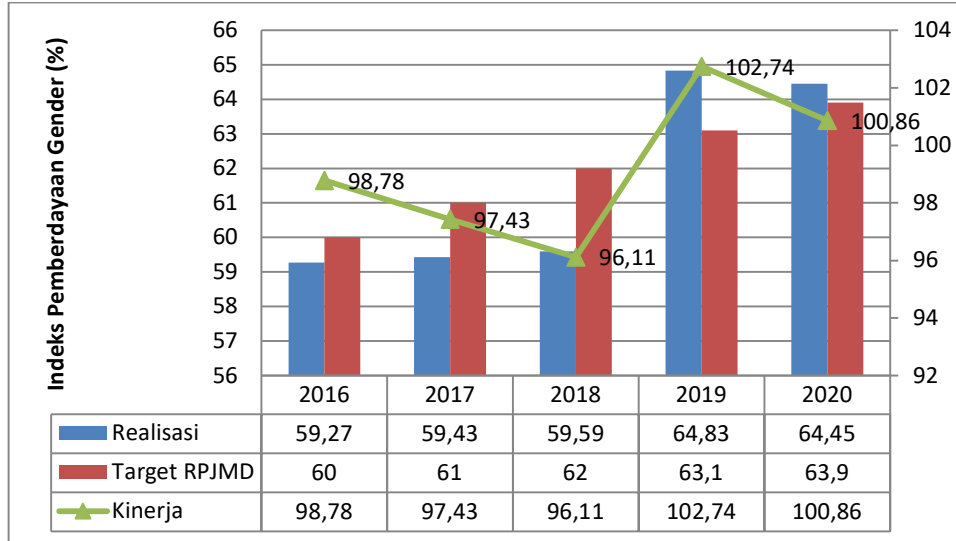
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama periode 2016 - 2020, IDG Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat yaitu dari 59,27% pada tahun 2016, meningkat menjadi 64,45 pada tahun 2020. Bila capaian IDG Indragiri Hilir ini dibandingkan dengan capaian IDG Kabupaten sekitarnya menunjukkan bahwa IDG Indragiri Hilir lebih tinggi dari IDG Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, bahkan Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indikator IDG Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 2,53% per tahun.



Gambar 2-90 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator IDG Indragiri Hilir meningkat dari 60% pada tahun 2016 menjadi 62% pada tahun 2018. Realisasi Indikator IDG Kabupaten Indragiri Hilir sedikit dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator IDG Indragiri Hilir berkisar antara 96,11% - 102,74% dan terkategori Sangat Tinggi. Tingginya capaian kinerja indikator IDG ini perlu terus dipertahankan sehingga IDG Indragiri Hilir dapat terus meningkat melebihi IDG Kabupaten Sekitarnya.



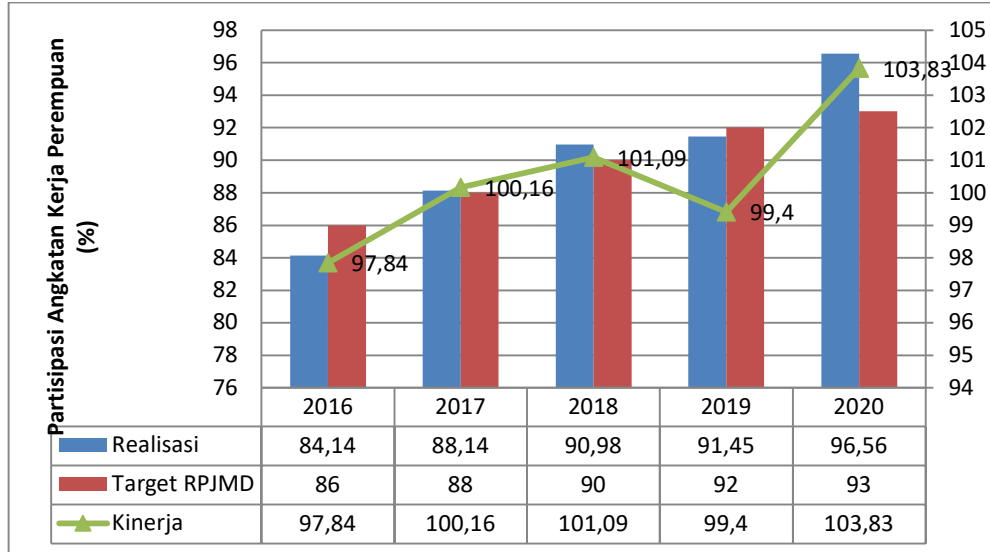
Gambar 2-91 Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Bank Dunia menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih rendah. Masih rendahnya partisipasi itu karena terhambat masih kurangnya layanan pengasuhan anak baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Hanya sekitar 53,5 persen perempuan usia kerja di Indonesia yang menjadi bagian dari angkatan kerja atau jauh di bawah rata-rata 67,7 persen untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik.

Selama periode 2016-2020, indikator partisipasi angkatan kerja perempuan di Indragiri Hilir terus meningkat meski dibawah target RPJMD Indragiri Hilir. Selama periode ini realisasi kinerja indikator partisipasi angkatan kerja perempuan berkisar antara 97,84% - 103,83% dan terkategori pencapaian yang Sangat Tinggi. Capaian kinerja ini perlu terus ditingkatkan agar IPG dan IDG Kabupaten Indragiri Hilir meningkat lebih cepat lagi dan melampaui IDG dan IPG Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau



Gambar 2-92 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

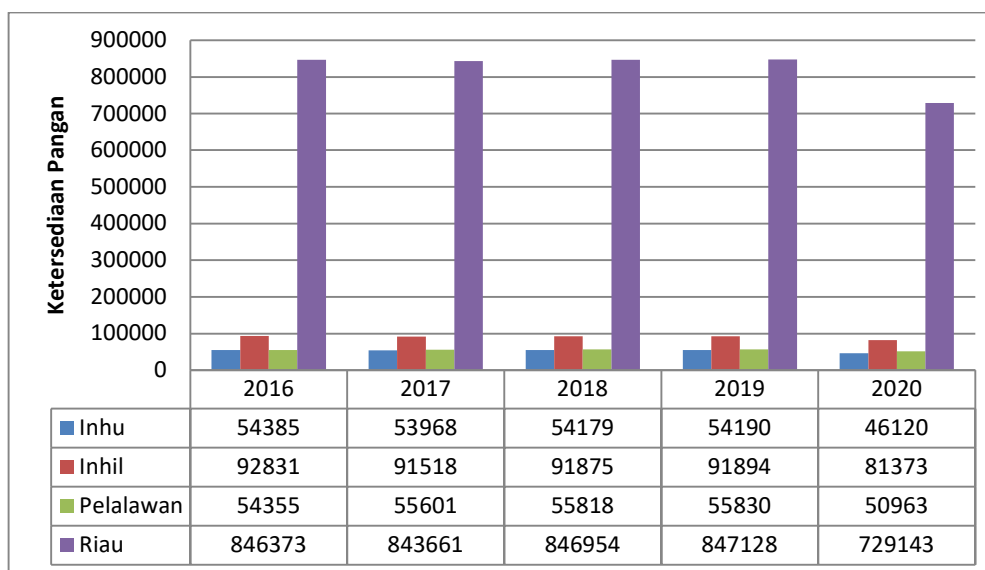
2.3.2.3 Pangan

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) ketersediaan pangan utama dan (ii) skor Pola Pangan Harapan (PPH)

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Indragiri Hilir, selama periode 2016 – 2020, trendnya berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 92,381% menurun menjadi 91,518% pada tahun 2017 dan seterusnya menurun menjadi 81,373% pada tahun 2020. Bila indikator ketersediaan pangan utama beras Kabupaten Indragiri Hilir dibandingkan dengan Kabupaten tetangga menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama beras di Indragiri Hilir adalah yang tertinggi. Hal ini dimungkinkan karena produksi beras di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terbesar di Riau dengan rasio produksi terhadap konsumsi sebesar 0,85% yang berarti bahwa produksi beras Indragiri Hilir baru mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras di Indragiri Hilir sebesar 85%. Kekurangannya disuplai oleh Bulog dan Provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, dan Sumatera

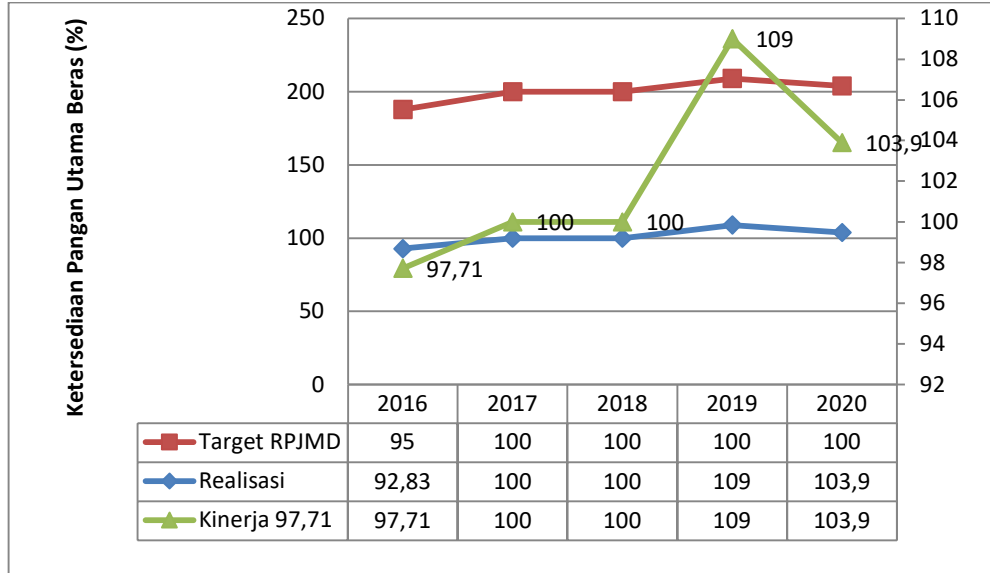
Selatan. Upaya untuk berswasembada pangan di Indragiri Hilir perlu terus diupayakan agar ketersediaan pangan inidapat terus terjamin.



Gambar 2-93 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator ketersediaan pangan utama beras terus meningkat dari 95% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2020. Selama periode ini, capaian indikator ini umumnya sama atau diatas target RPJMD kecuali pada tahun 2016 sehingga realisasi kinerja berkisar antara 97,71% - 103,9% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator ketersediaan pangan utama beras ini Sangat Tinggi, namun upaya untuk terus berupaya untuk meningkatkan produksi sehingga rasio produksi sama atau lebih tinggi dibanding konsumsi perlu terus diupayakan.



Gambar 2-94 Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

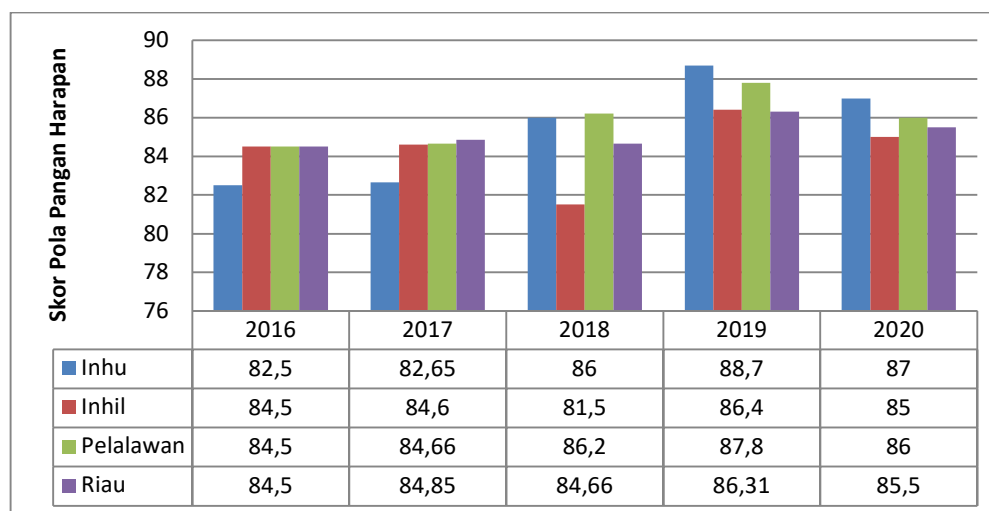
Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Selama periode 2016 -2020, skor PPH indragiri memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2019 - 2020, posisi skor PPH Indragiri Hilir adalah doiposisi tengah dibanding skor PPH kabupaten tetangga. Pada tahun 2016 - 2017, skor PPH Indragiri Hilir bergerak dengan percepatan yang lebih tinggi sehingga pada tahun 2016/2017 , skornya

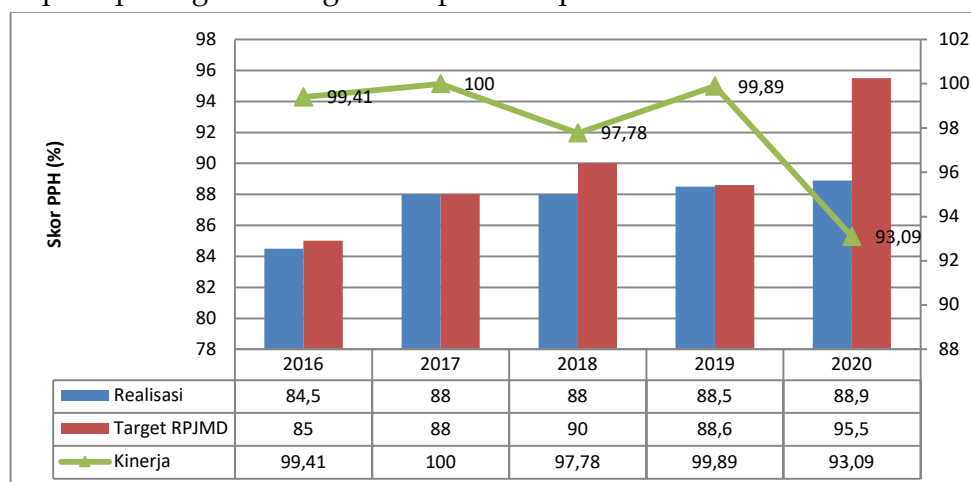
tertinggi dibanding skor PPH kabupaten tetangga. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan skor PPH Kabupaten Indragiri Hilir 2,52% per tahun.



Gambar 2-95 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir , indikator Skor PPH ini telah ditetapkan meningkat yaitu dari 85,00% pada tahun 2016 meningkat menjadi 90,00% pada tahun 2020. Realisasi skor PPH pada periode ini berfluktuatif meningkat dengan realisasi kinerja berkisar antara 93,09% - 100,00% yang terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator skor PPH yang Sangat Tinggi ini perlu terus ditingkatkan sehingga akan mendorong kepada peningkatan angka harapan hidup.

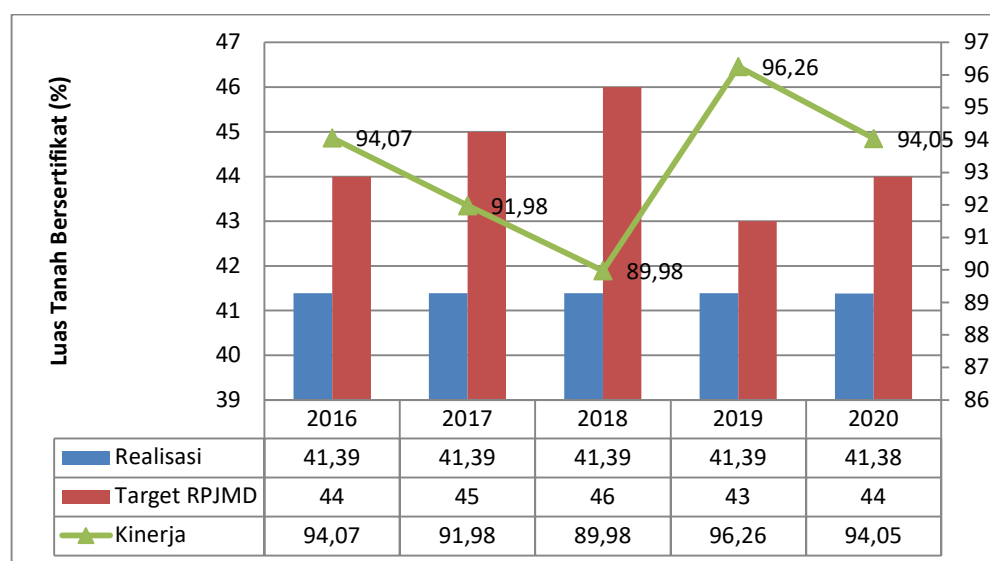


Gambar 2-96 Kinerja Indikator Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3.2.4 Pertanian

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator persentase luas tanah bersertifikat. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator persentase luas tanah bersertifikat di kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 44% pada tahun 2016 menjadi 46% pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi capaian indikator persentase luas tanah bersertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir relatif konstan. Target yang terus meningkat dengan capaian yang konstan maka realisasi kinerja terus menurun yaitu dari 94,07% menjadi 89,98% yang terkategori dari Sangat Tinggi hingga Tinggi. Upaya peningkatan indikator luas tanah bersertifikat perlu terus ditingkatkan lebih baik melalui Prona maupun program daerah karena indikator ini merupakan surat tanda bukti pemegang hak tanah bagi masyarakat.



Gambar 2-97 Kinerja Indikator Luas Tanah bersertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : LKPJ Inhil (2016-2020)

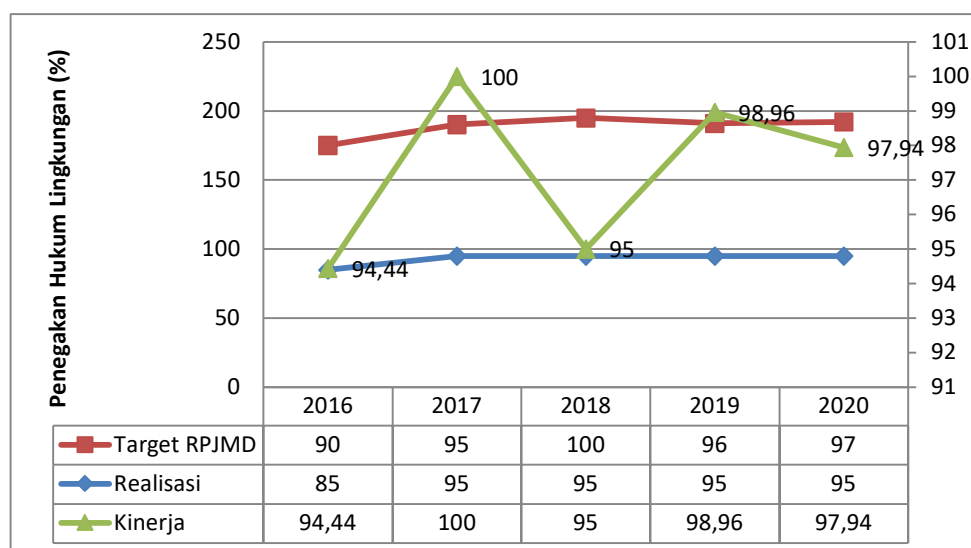
2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Layanan urusan wajib non dasar bidang Lingkungan Hidup dianalisis dari indikator (i) penegakan hukum lingkungan dan (ii) penanganan sampah.

a. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator penegakan hukum lingkungan terus meningkat yaitu dari 85% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2016 – 2020, realisasi indikator penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dan berada dibawah target kecuali pada tahun 2017 yang relatif sama dengan target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator penegakan hukum berkisar antara 94,44% - 100,00% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian penegakan hukum lingkungan rata-ratanya terkategori Sangat Tinggi, namun upaya penegakan hukum lingkungan ini harus terus dilakukan meski dengan keterbatasan tenaga fungsional pengawas lingkungan daerah. Upaya menambah kuantitas tenaga fungsional pengawas lingkungan perlu mendapat perhatian kedepannya.



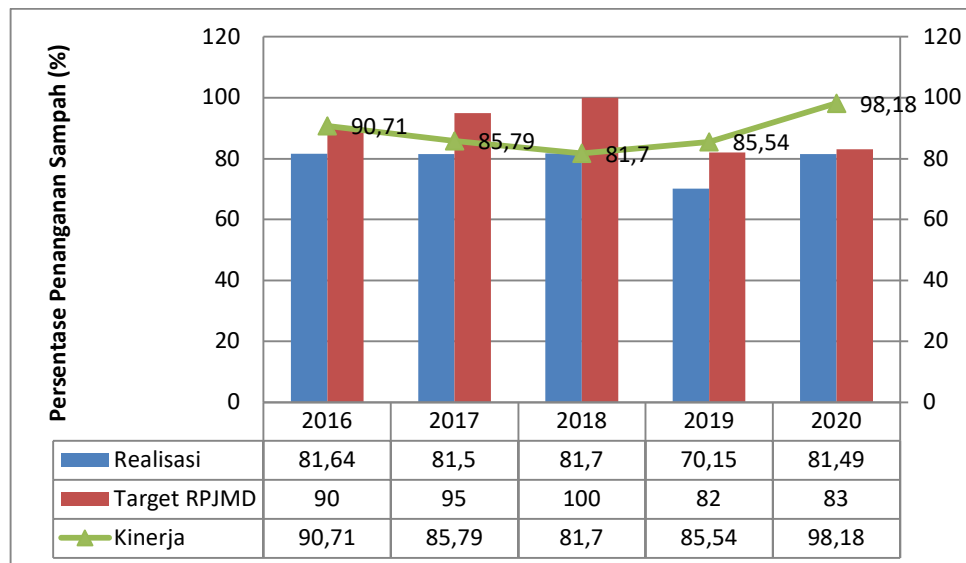
Gambar 2-98 Kinerja Indikator Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Penanganan Sampah

Sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kurangnya TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) atau pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan dapat mengakibatkan (i) tempat berkembang dan bersarang serangga dan tikus, (ii) menjadi sumber polusi dan bencana alam, seperti tanah, air, dan udara, dan (iii) menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator persentase penanganan sampah terus meningkat yaitu dari 90% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018. Pada periode 2017 - 2018, realisasi indikator persentase penangan sampah trendnya sedikit menurun dan posisinya terus dibawah target yang ditetapkan. Realisasi kinerja persentase penanganan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 81,70% - 98,18% yang terkategori Tinggi. Masih rendahnya pencapaian indikator penanganan sampah ini dibanding target perlu menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya.



Gambar 2-99 Kinerja Indikator Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

c. Kebakaran Hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan berskala besar menyebabkan bencana asap yang berdampak pada beragam masalah ekologi, sosial dan ekonomi. Bencana ini disebabkan oleh kebakaran atau pembakaran biomassa, baik di kawasan hutan, lahan perkebunan, ladang, maupun semak belukar/ilalang. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang hampir setiap tahun menghadapi bencana kebakaran dan asap, termasuk bencana kebakaran hutan/lahan dan asap yang cukup luas awal tahun 2014.

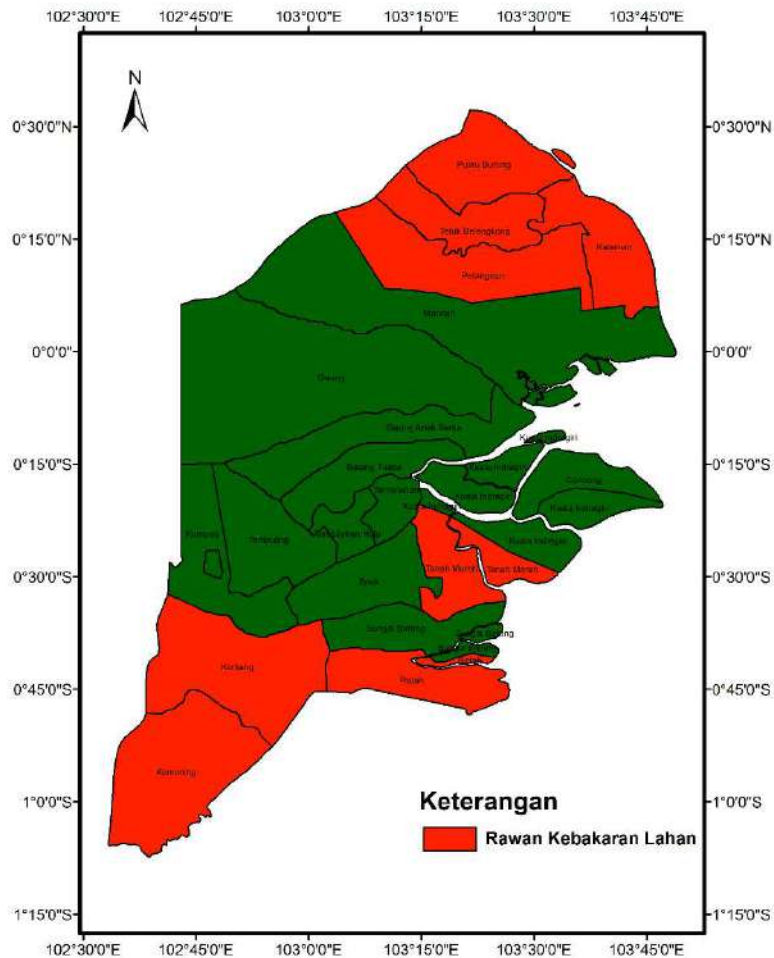
Berdasarkan tipologi lahan, Kab. Indragiri Hilir pada umumnya merupakan lahan gambut yang cukup luas, terdiri atas: 1.267.237 ha kawasan hidrologis gambut/KHG, 222.706 ha kawasan lindung gambut (KLG) dan 1.044.531 ha kawasan budidaya gambut (KBG). Degradasi hutan dan deforestasi yang terjadi di Kab. Indragiri Hilir telah menyebabkan suatu ekosistem yang tahan kebakaran (seperti ekosistem lahan gambut) menjadi ekosistem yang rentan terhadap kebakaran (KLH, 2009).

Hutan alam primer memiliki resiliensi yang lebih tinggi terhadap kebakaran dibandingkan dengan hutan sekunder atau hutan yang telah terdegradasi. Sehingga pada umumnya, hutan alam ini hanya akan terbakar setelah mengalami musim kering yang berkepanjangan dan adanya faktor pemicu api yang sangat kuat, misalnya karena rembetan api dari lahan perkebunan atau hutan tanaman yang bersebelahan. Namun sebaliknya, areal hutan yang telah terdegradasi dan ditumbuhi semak belukar, pada saat musim kemarau jauh lebih rentan terhadap kebakaran karena ketersediaan biomasa yang kering sebagai bahan bakar.

Hasil analisis data sekunder dan data distribusi hotspot, diperoleh hasil bahwa areal hutan/lahan terbakar, termasuk perkebunan rakyat, tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kec. Pulau Burung, Kecamatan Enok, Kecamatan Kempas, Kecamatan Gaung, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Teluk

Belengkong, Kecamatan Keritang, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kemuning, dan Kecamatan Gaung Anak Serka.

Jumlah titik Hotspot di kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 312 titik hotspot menjadi 26 titik hotspot pada tahun 2017.



Gambar 2-100 Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir

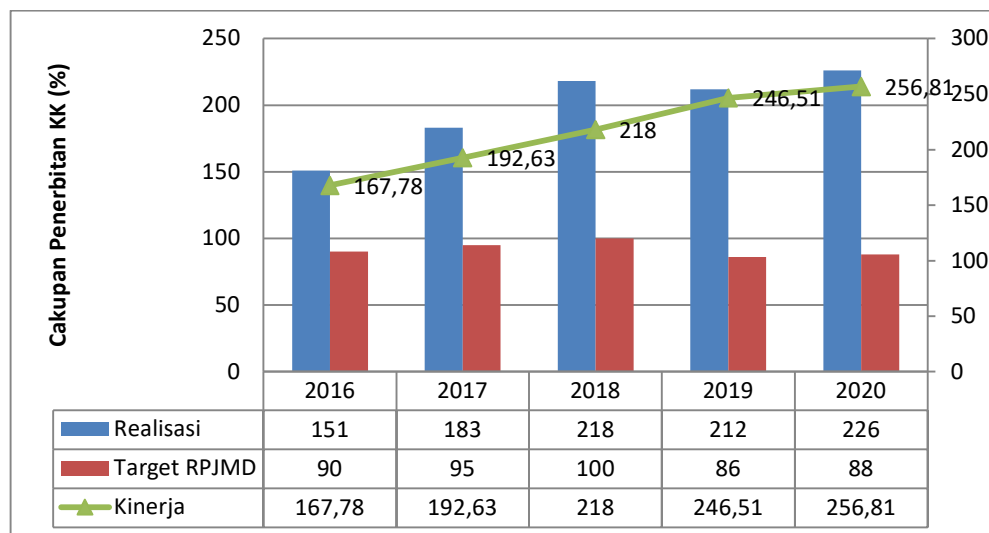
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan urusan wajib non dasar bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianalisis dari indikator (i) Cakupan

penerbitan kartu keluarga, (ii) Kepemilikan KTP dan (iii) Kepemilikan Akta kelahiran.

a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator cakupan penerbitan kartu keluarga secara bertahap dimiliki dari 90% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018.



Gambar 2-101 Kinerja Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

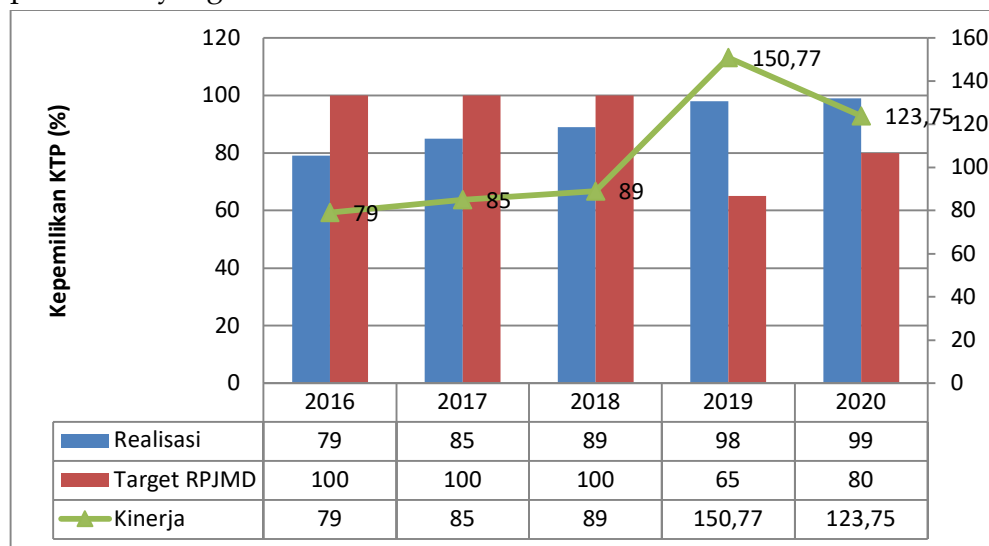
Sumber : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil (2020) dan LKPJ Inhil (2016 - 2020)

Realisasi capaian indikator cakupan penerbitan kartu keluarga di Indragiri Hilir selama periode 2016 - 2020 memiliki trend meningkat namun dibawah target yang ditetapkan RPJMD. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2017 - 2018 berkisar antara 192,63% - 218% dan terkategori pencapaian kinerja Sangat Tinggi. Pada tahun 2019- 2020, setiap penduduk harus memiliki NIK dan kartu keluarga nasional maka

capaian indikator ini relatif meningkat cakupannya sejak tahun 2016. Realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 246,51% - 256,81% dengan kategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini sudah Sangat Tinggi, namun upaya pencapaian indikator ini sebesar 100% perlu terus untuk diwujudkan.

b. Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia setidaknya telah menerbitkan 3 versi KTP. KTP lama atau KTP Kabupaten (1978), KTP dari blangko kertas dan laminasi plastik, photo di lem, tanda tangan/cap jempol dan data tercetak di komputer serta berlaku di tiap Kabupaten/Kota. Versi kedua adalah KTP nasional tahun 2004 dengan karakteristik photo dicetak pada kartu, tanda tangan/cap jempol, data dicetak dengan komputer, berlaku nasional. Versi ketiga dan terbaru adalah KTP Elektronik (2011) dimana photo dicetak dikartu, data tercetak di komputer, berlaku secara nasional, mampu menyimpan data dan data dapat dibaca/ditulis dengan *Card Reader*. Namun kenyataan pelaksanaan KTP elektronik ini hingga saat ini masih bermasalah sehingga banyak penduduk yang belum memiliki KTP elektronik ini.



Gambar 2-102 Kinerja Indikator Kepemilikan KTP di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil (2020) dan LKPJ Inhil (2016-2020)

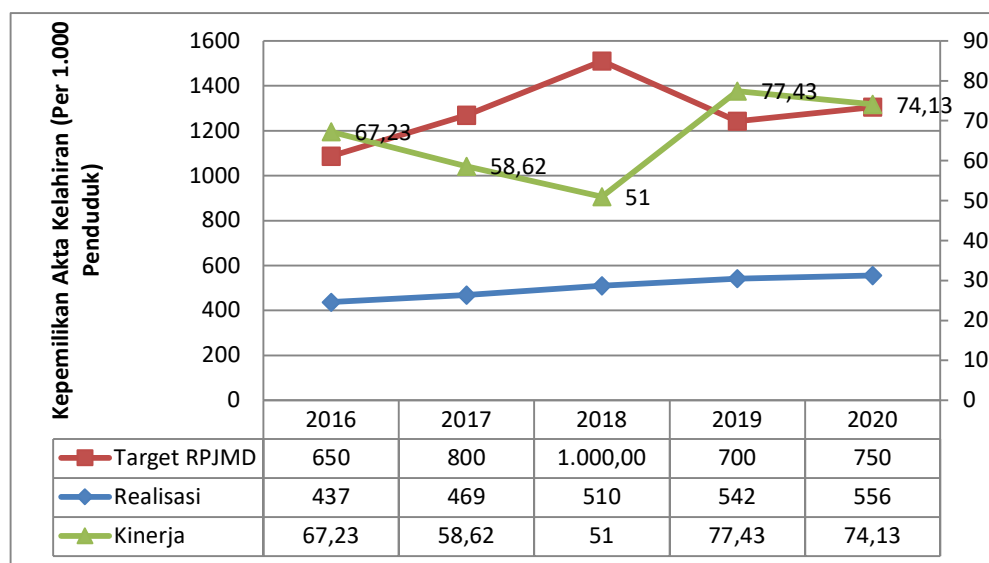
Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator kepemilikan KTP ditargetkan 100% mulai dari tahun 2016 - 2018. Realisasi indikator kepemilikan KTP tahun 2016 - 2018, masih dikategorikan sedang yaitu sebesar 79,00% - 89,00% karena penduduk disamping menggunakan KTP versi KTP Nasional dan KTP Kabupaten serta KTP elektronik. Mulai 2016 - 2020, pemberlakuan KTP elektronik disemua institusi menjadikan KTP versi sebelumnya tidak lagi digunakan. Disisi lain, penerbitan KTP elektronik mengalami kendala seperti ketiadaan blangko KTP. Kondisi ini menjadikan persentase kepemilikan KTP di Indragiri Hilir sebagaimana kabupaten lainnya di Indonesia menurun menjadi 65% dan terkategori Rendah. Upaya untuk terus memfasilitasi masyarakat untuk dapat akses memiliki KTP elektronik perlu terus dilakukan meski menghadapi masalah-masalah yang sukar diterobos oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Manfaat Akta Kelahiran: (i) Identitas Anak, (ii) Administrasi Kependudukan untuk KTP dan KK, (iii) Keperluan Sekolah, (iii) Pendaftaran Pernikahan di KUA, (iv) Mendaftar Pekerjaan, (v) Persyaratan Pembuatan Paspor, (vi) Mengurus Hak Ahli Waris, (viii) Mengurus Asuransi, (ix) Mengurus Tunjangan Keluarga, (x) Mengurus Hak Dana Pensiun dan (xi) Melaksanakan Ibadah Haji.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 - 2020 telah ditetapkan bahwa indikator kepemilikan akte kelahiran ditetapkan terus meningkat yaitu dari 650 akte kelahiran per 1.000 penduduk meningkat

menjadi 1.000 akte per 1.000 penduduk yang berarti setiap penduduk mempunyai akte kelahiran. Selama periode 2016 - 2020, realisasi indikator kepemilikan akte kelahiran memiliki trend meningkat akan tetapi dibawah target RPJMD. Realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 51,00% pada tahun 2018 yang terkategori Rendah. Pada kondisi ini, kepemilikan akte kelahiran di Indragiri Hilir sebesar 510 per 1.000 penduduk, masih terdapat sekitar 490 penduduk dari setiap 1.000 penduduk yang belum mempunyai akte kelahiran. Mengingat pentingnya akte kelahiran bagi setiap penduduk maka upaya peningkatan kinerja indikator ini perlu terus dilakukan.



Gambar 2-103 Kinerja Indikator Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil (2020) dan LKPJ Inhil (2016 - 2020)

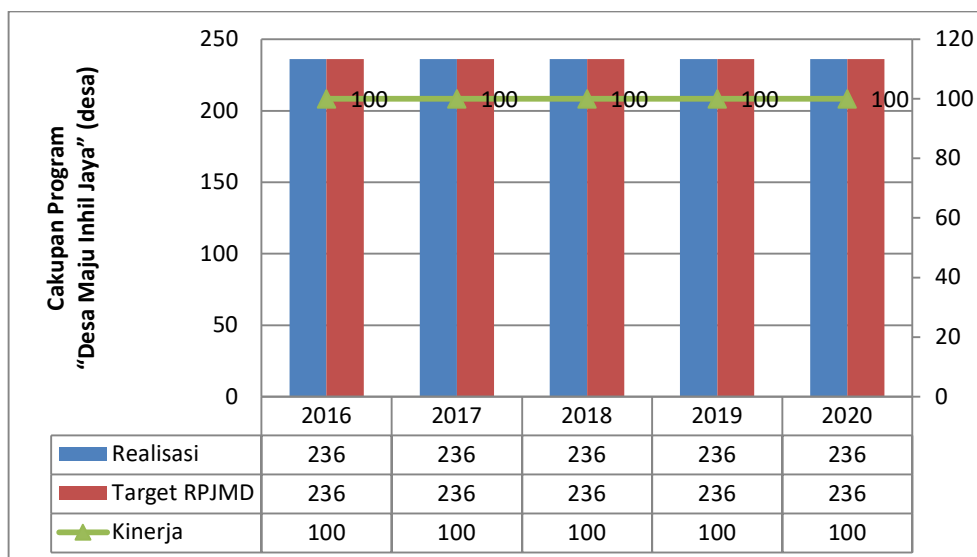
2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Layanan urusan wajib non dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dianalisis dari indikator (i) Cakupan program ‘desa Maju Inhil jaya’, (ii) Jumlah desa ‘maju’, (iii) PKK aktif dan (iv) Posyandu aktif.

a. Cakupan Program “Desa Maju Inhil Jaya”

Program Desa maju Inhil Jaya merupakan program inisiasi Pemerintah Indragiri Hilir untuk mensiasati permasalahan pembangunan infrastruktur pedesaan di Indragiri Hilir yang dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan Masyarakat. Program ini sebenarnya juga merupakan

kelanjutan dari Program Desa Mandiri yang mulai dilaksanakan tahun 2006 di Indragiri Hilir. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator cakupan program desa maju inhil jaya sebanyak desa dan kelurahan yang ada di indragiri Hilir yaitu sebanyak 236 desa/kelurahan. Realisasi indikator cakupan desa maju inhil jaya mencakup semua desa kelurahan dengan realisasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Setelah lebih dari 12 tahun berjalannya program ini di Indragiri Hilir, hampir sebagian infrastruktur pedesaan telah terbangun. Namun demikian perlu sadari bahwa dengan kondisi alam indragiri Hilir yang keras menjadikan umur ekonomis infrastruktur yang dibangun tidaklah terlalu lama sehingga program seperti ini masih tetap dibutuhkan masyarakat pedesaan. Program ini dipandang juga perlu pengembangan untuk porsi pengembang ekonomi masyarakat dengan mendorong industri di pedesaan.

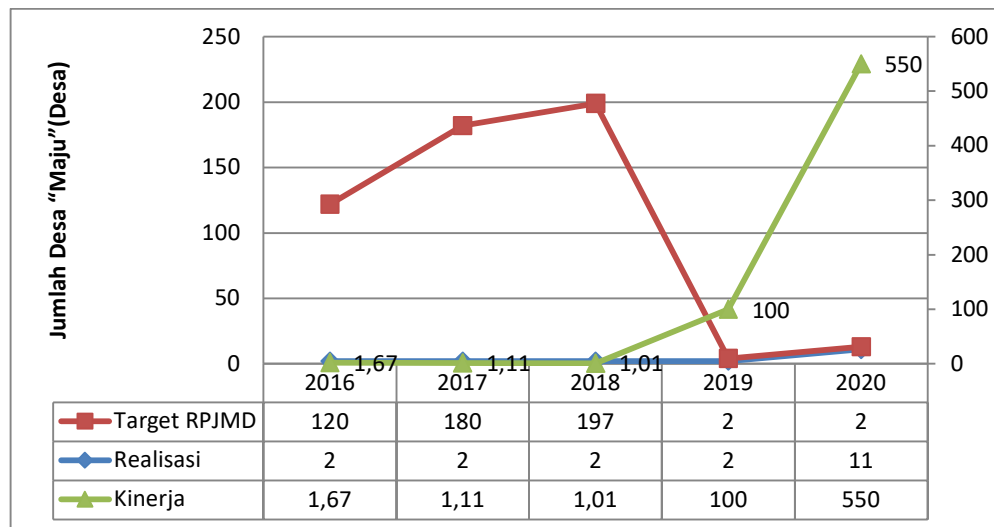


Gambar 2-104 Kinerja Indikator Cakupan Program “Desa Maju Inhil Jaya” di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Inhil (2020) dan LKPJ Inhil (2016-2020)

b. Jumlah Desa “Maju”

Sejalan dengan pelaksanaan program desa maju inhil maju denga pendekatan pemberdayaan akan membawa desa kearah kemajuan dari semua aspek. Program Desa Mandiri yang mulai dilaksanakan tahun 2006 di Indragiri Hilir. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator jumlah desa ‘maju’ meningkat dari 120 desa pada tahun 2016 menjadi 2 desa pada tahun 2019. Selama periode ini, realisasi indikator jumlah desa maju di Indragiri Hilir memiliki trend meningkat namun masih dibawah target yang ditetapkan. Realisasi kinerja indikator ini terus menurun sepanjang periode 2016-2020 yaitu dari 1,11% menurun menjadi 1,01% yang terkategori Sangat Rendah. Tidak tercapainya kinerja indikator ini karena belum tersedianya program yang handal untuk menghantar ke desa maju. Program yang ada baru mampu menghantar desa untuk penyediaan infrastruktur, belum ke desa maju. Oleh karena itu, program desa maju inhil jaya perlu dilakukan penguatan-penguatan sehingga bukan saja cakupan desa tetapi juga desa maju.



Gambar 2-105 Kinerja Indikator Jumlah Desa “Maju” di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 – 2017)

c. PKK Aktif

Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 – 2020 telah ditetapkan bahwa PKK aktif di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu 100% pada tahun 2016-2020.

Selama periode ini, realisasi indikator persentase pkk aktif relatif sama dengan target RPJMD sebesar 100% terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini Sangat Tinggi, upaya-upaya peningkatan kualitas kegiatan PKK aktif perlu dilakukan sehingga akan mampu mendorong pencapaian indikator Desa Maju.



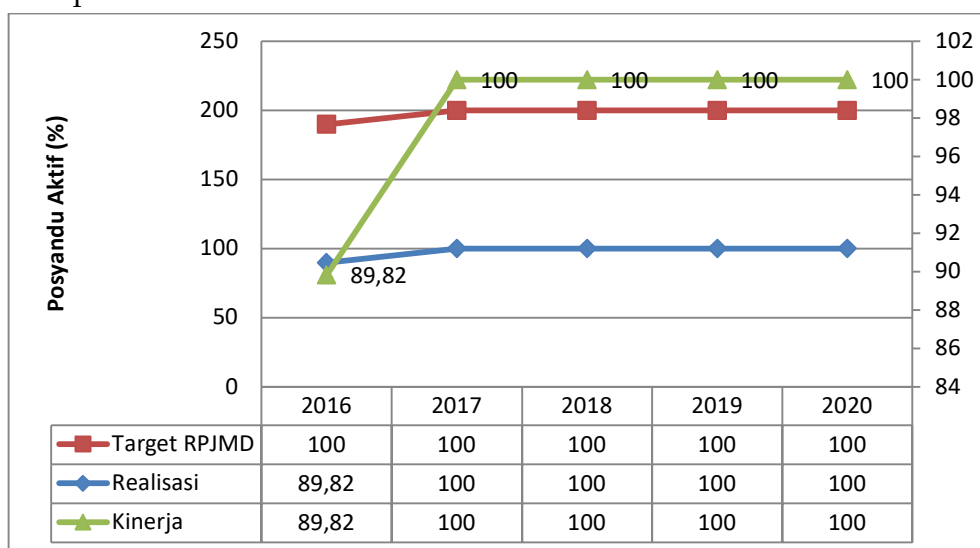
Gambar 2-106 Kinerja Indikator PKK Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

d. Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Keluarga berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu antara lain (i) Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, (ii) Membudayakan NKBS, (iii) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan (iv) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Mengingat pentingnya peran Posyandu yang aktif maka dalam Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator posyandu aktif terus meningkat yaitu 100% pada tahun 2016-2020.

Selama periode 2016-2020, realisasi capaian indikator posyandu aktif Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dan mulai tahun 2017 sudah sesuai target RPJMD. Selama periode 2016-2020, realisasi kinerja sebesar 89,82%-100% yang terkategori Tinggi – Sangat Tinggi. Pada tahun 2017-2019 realisasi indikator ini mencapai 100% dan tahun 2020 juga 100% yang capaiannya terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator dan kinerjanya sangat tinggi namun upaya meningkatkan kualitas kegiatan posyandu perlu dilakukan sehingga tujuan sebenar posyandu lebih tercapai.



Gambar 2-107 Kinerja Indikator Posyandu Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

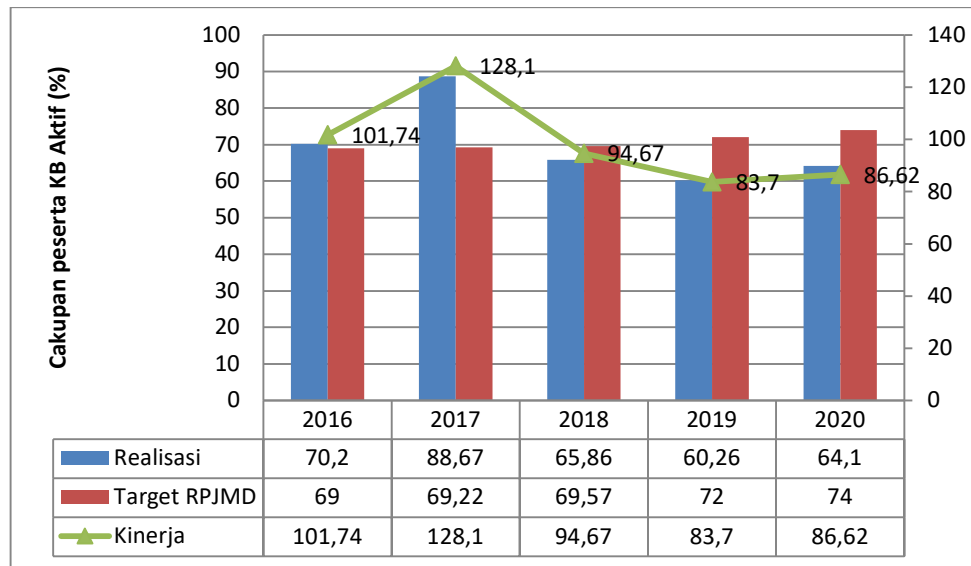
Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Layanan urusan wajib non dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianalisis dari indikator (i) Cakupan peserta KB aktif, (ii) Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri, dan (iii) Ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan.

a. Cakupan Peserta KB Aktif

Pengertian program keluarga Berencana menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Oleh karena pentingnya KB maka Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan Indikator cakupan peserta KB aktif yang terus meningkat dari 69% pada tahun 2016 menjadi 69,57% pada tahun 2018.



Gambar 2-108 Kinerja Indikator Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Inhil (2021)

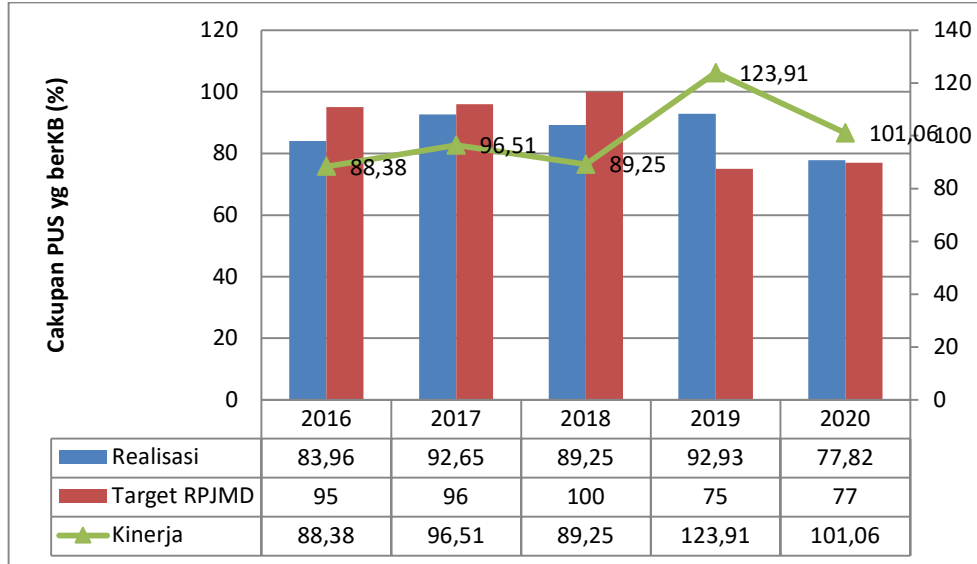
Selama periode 2016 - 2020, realisasi capaian indikator cakupan peserta KB aktif di Indragiri Hilir berfluktuatif meningkat dan relatif sesuai

target. Pada tahun 2016 - 2018, capaian indikator berkisar antara 69% - 69,57% dengan realiasi kinerja berkisar antara 94,67% - 128,1% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski kinerja indikator ini terkategori Sangat Tinggi, namun upaya meningkatkan cakupan peserta KB aktif di Indragiri Hilir perlu terus dilanjutkan agar tujuan keluarga berencana dapat terus tercapai.

b. Cakupan Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber KB

Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang belum ber KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Tujuan UPPKS adalah (i) mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, (ii) mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, (iii) meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan (iv) mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 - 2020 telah ditetapkan indikator cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB terus meningkat yaitu dari 95% pada tahun 2016 menjai 100% pada tahun 2018. Selama periode 2016-2020, realisasi indikator ini mempunyai trend berfluktuatif meningkat dan sama dan diatas target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB menurun dari 96,51% yang terkategori Sangat Tinggi menjadi 89,25 yang terkategori Tinggi. Upaya untuk terus meningkat cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB perlu terus ditingkat agar pencapaian desa maju dapat diwujudkan.



Gambar 2-109 Kinerja Indikator PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber KB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

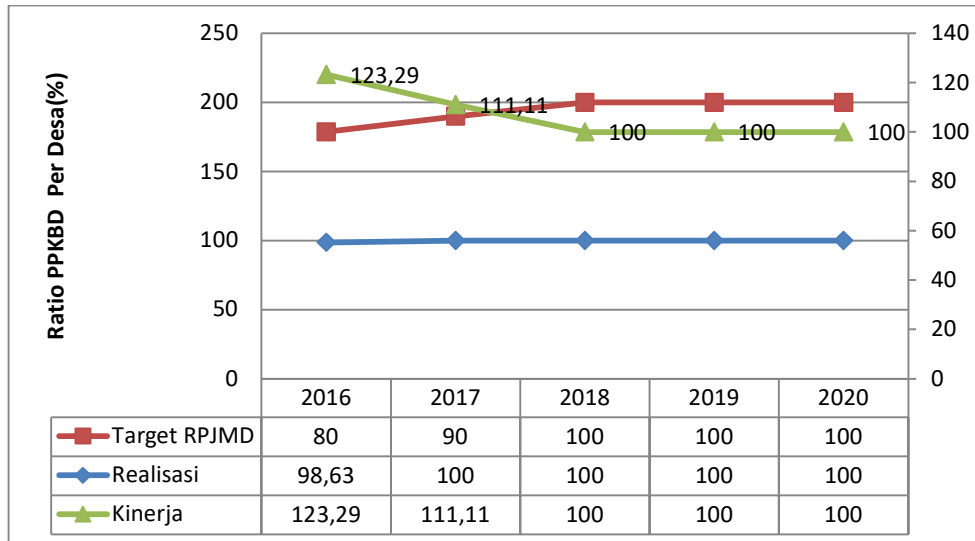
Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

c. Ratio PPKBD Per Desa/Kelurahan

Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seseorang atau beberapa kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB ditingkat Desa/Kelurahan. Peran dan fungsi PPKBD adalah (i) Kepengurusan, (ii) Penyuluhan, motivasi dan konseling, (iii) pelayanan ulang/rujukan, (iv) pendataan dan pencatatan, (v) pertemuan rutin, (vi) kegiatan program KB dan (vii) kegiatan mandiri. Dalam rangka mensukseskan program KB sekaligus mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dilapangan maka memberadayaan PPKBD per desa/kelurahan penting untuk dilakukan. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan terus meningkat dari 80% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018-2020.

Selama periode 2016-2020, realisasi kinerja indikator ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan memiliki trend yang meningkat dan sama dan/atau diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD. Selama

periode ini, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 100% - 123,29% yang terkategori Sangat Tinggi.



Gambar 2-110 Kinerja Indikator Ratio PPKBD Satu Petugas Di Setiap Desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

d. Bonus Demografi

Bonus demografi didefinisikan sebagai sebuah penambahan penduduk pada kelompok usia kerja yang walaupun meningkatkan jumlah penduduk total, dipandang sebagai sebuah keuntungan yang tidak terelakkan. Momentum bonus demografi menggambarkan suatu kondisi di mana jumlah angkatan kerja meningkat dan angka ketergantungan menurun.

Pembangunan ekonomi yang berperan besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk seringkali diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dan penurunan angka pertumbuhan ekonomi terkait dengan aspek kependudukan terutama struktur umur penduduk karena komposisi penduduk berdasarkan umur secara tidak langsung dapat menggambarkan performa ekonomi suatu daerah. Kondisi dimana komposisi jumlah penduduk yang produktif jauh melebihi jumlah

penduduk yang tidak produktif apabila dimanfaatkan secara penuh akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Trend kependudukan Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan penurunan angka ketergantungan (dependency ratio) yaitu 48,33 % pada tahun 2016 menurun menjadi 44,10 % pada tahun 2020, hal ini mengantarkan terbukanya jendela peluang (window opportunity) yang pada saatnya akan mencapai level dimana akan terjadi bonus demografi. Bonus demografi ini bisa menjadi beban bagi pemerintah bila tidak tersedia lapangan kerja dan di lain pihak bisa memberi dampak positif bila bisa dimanfaatkan secara optimum.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sekitar 69,39% terkategori umur produktif dan 30,61% terkategori tidak produktif. Hal yang harus mendapat perhatian adalah bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai mendapat 'baby boom' yang ditunjukkan dari porsi penduduk usia muda (0 - 14 tahun) yang saat ini sedang sekolah yaitu sebesar 26,23%.

Program pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir mempengaruhi struktur umur penduduk, dimana proporsi kelompok umur produktif usia 15-65 tahun cenderung bertambah besar sehingga angka ketergantungan penduduk semakin kecil, yang secara tidak langsung menciptakan Bonus Demografi yang artinya penduduk Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak terdiri dari kelompok usia muda.

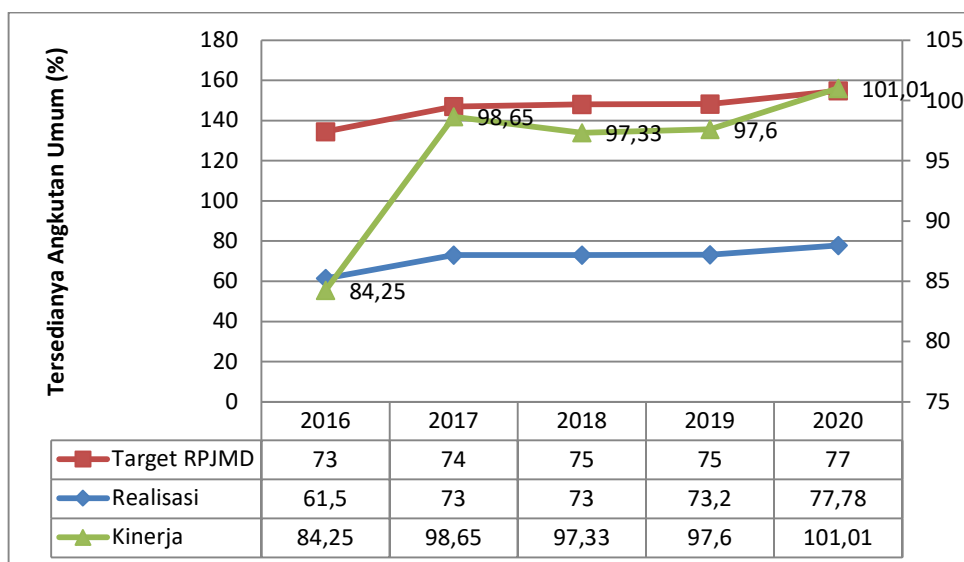
2.3.2.9 Perhubungan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Perhubungan dianalisis dari indikator (i) Tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota, (ii) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota, dan (iii) Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah

tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

a. Angkutan Umum

Angkutan Umum atau transportasi umum adalah sebuah layanan angkutan penumpang yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 - 2020 telah ditetapkan indikator tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota terus meningkat dari 73% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2018.



Gambar 2-111 Kinerja Indikator Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang telah tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Inhil (2020) dan LKPJ Inhil (2016-2020)

Selama periode 2016-2020, realisasi indikator tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota terus meningkat meski masih dibawah target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator ini terus meningkat dari 73% pada tahun 2016 menjadi 74% pada tahun 2017 dan menjadi 75% pada tahun 2018. Selama periode 2016-2017, realisasi kinerja berkisar antara 84,25%-98,65% yang terkategori Tinggi-sangat Tinggi. Pada

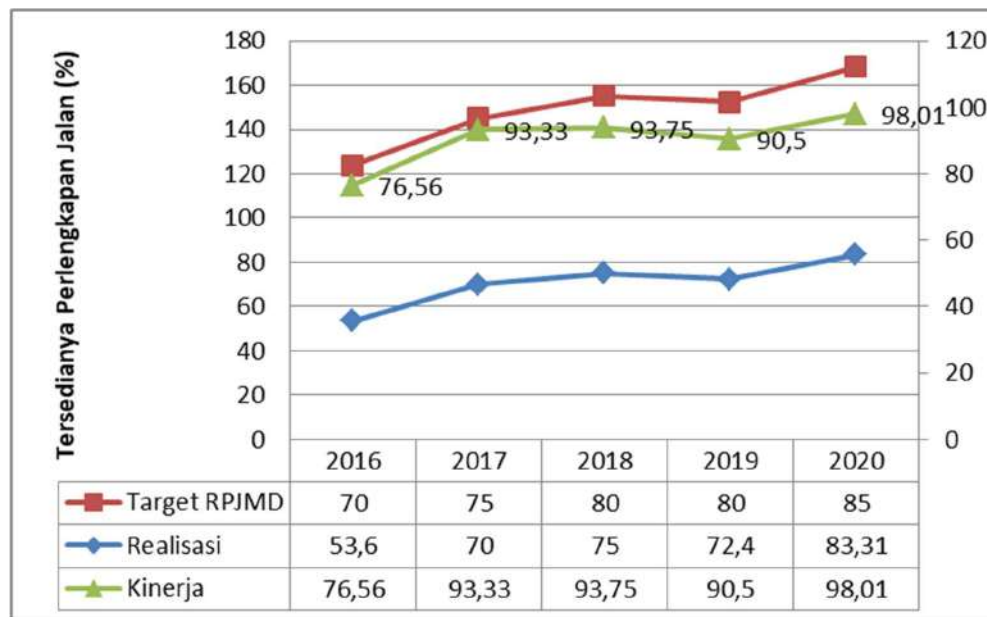
periode 2019-2020, realisasi kinerja meningkat menjadi 97,60% - 101,1% yang terkategori Sangat Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota harus terus ditingkatkan sebagai wujud pembangunan yang berkeadilan di Indragiri Hilir.

b. Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum

Menurut peraturan pemerintah No. 26 tahun 1985 tentang jalan, pada Pasal 15 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlengkapan jalan ialah rambu-rambu lalu lintas dan marka serta yang tidak berkaitan langsung dengan pemakai jalan seperti rambu, marka, patok KM, dan pagar pengaman (*guard rail*) serta penghalang lalu lintas (*traffic barrier*). Penerangan jalan umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 70% pada tahun 2016 menjadi 80% pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten Indragiri Hilir berfluktuatif meningkat dan dibawah target RPJMD, yaitu dari 53,60% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2018. Pada tahun 2016 - 2017, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 76,56% - 93,33% yang terkategori sedang hingga sangat Tinggi. Pada tahun 2018 - 2019, realisasi kinerja sebesar 90,50% - 93,75% dan terkategori Sangat Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota perlu untuk terus dilakukan agar kenyamanan dan keselamatan di jalan Kabupaten Indragiri Hilir meningkat.



Gambar 2-112 Kinerja Indikator Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

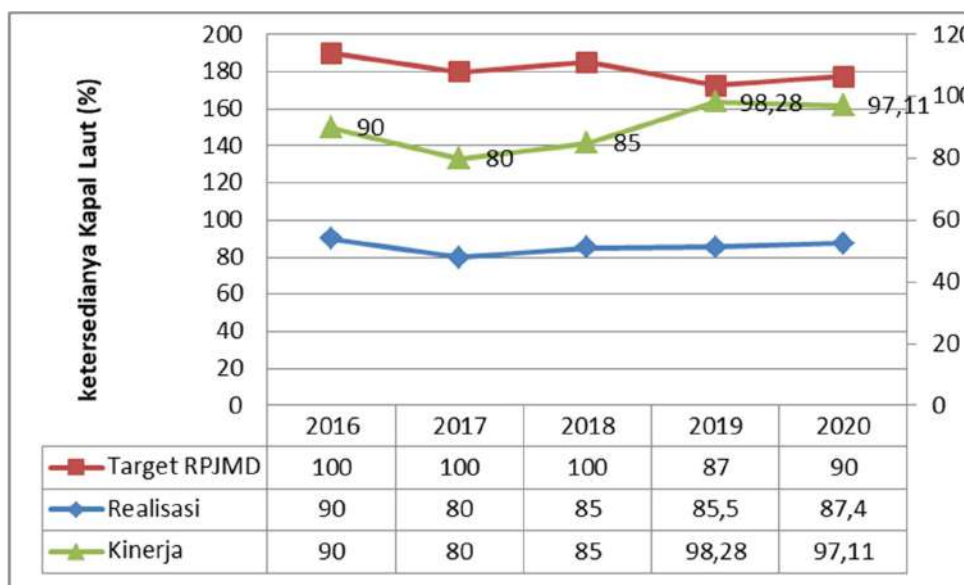
Sumber : Dinas Perhubungan Inhil (2020) dan LKPJ Inhil (2016-2020)

c. Kapal laut

Indragiri Hilir yang sebagian besar wilayahnya perairan dan laut maka indikator tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan menjadi sangat penting. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator ini terus meningkat yaitu dari 100% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2016-2020, realisasi indikator tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak

ada alternatif angkutan jalan memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, capaian indikator ini sebesar 90,00% dengan realisasi kinerja sebesar 90,00% yang terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2017-2018, capaian indikator ini menurun menjadi 80%-85% dan selanjutnya dengan realisasi kinerja berkisar antara 80% - 85% yang terkategori Tinggi. Upaya terus meningkatkan tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan harus terus ditingkatkan dalam upaya membuka isolasi daerah.



Gambar 2-113 Kinerja Indikator Tersedianya Kapal Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Atau Trayek Dalam Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Inhil (2020) dan LKPJ Inhil (2016-2020)

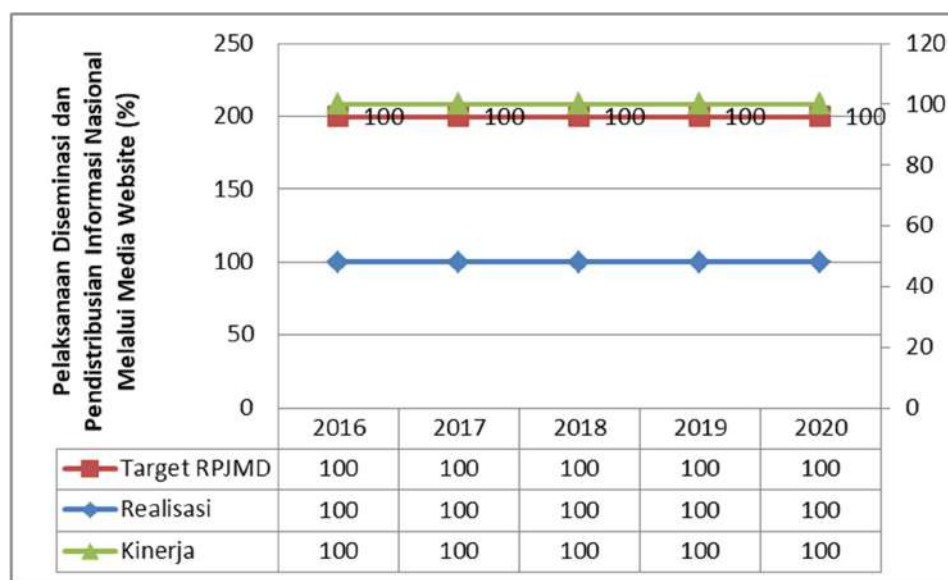
2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Layanan urusan wajib non dasar bidang Komunikasi dan Informatika dianalisis dari indikator (i) pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online) dan (ii) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

a. Diseminasi dan Distribusi Informasi

Diseminasi (*dissmenination*) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Sedangkan distribusi nformasi adalah proses dimana informasi yang telah disampaikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang diinginkan. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator pelaksanaan dan pendistribusian informasi nasional melalui web di Indragiri Hilir ditargetkan terlaksana 100%

Selama periode 2016 - 2020, realisasi indikator pelaksanaan dan pendistribusian informasi nasional melalui web terlaksana 100% sehingga realisasi kinerja nya juga sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi.



Gambar 2-114 Kinerja Indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Website di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

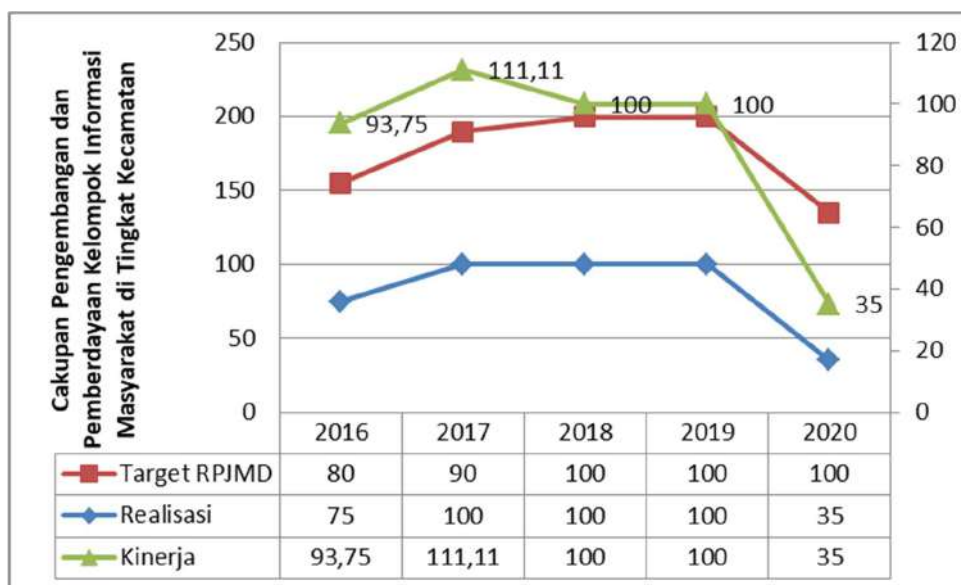
Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Inhil (2020) dan LKPJ Inhil (2016-2020)

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan sebagai indikator penting yang

ditargetkan terlaksana sebesar 80% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2016-2020, realisasi indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan memiliki trend meningkat. Pada tahun 2016 - 2017, realisasi indikator ini dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 93,75% - 111,11% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada periode 2018-2019, realisasi indikator ini sesuai target RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Dan pada tahun 2020 realisasi kinerjanya menurun sebesar 35%.



Gambar 2-115 Kinerja Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Inhil (2020) dan LKPJ Inhil (2016-2020)

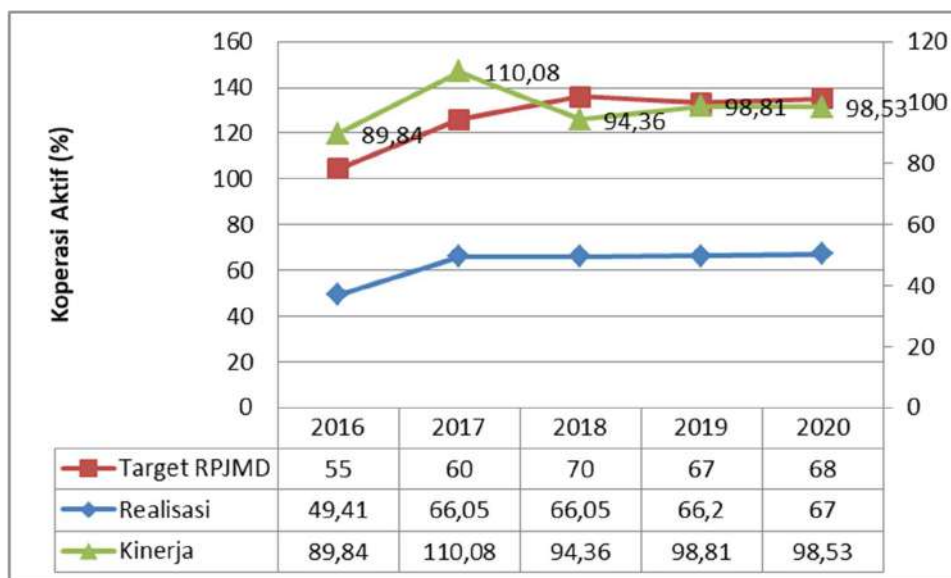
2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan urusan wajib non dasar bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianalisis dari indikator (i) Koperasi Aktif dan (ii) Usaha Mikro dan Kecil.

a. Koperasi Aktif

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 25/Per/M.KUKN/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi menyatakan bahwa koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut mengadakan rapat RAT (Rapat Tahunan Anggora) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota). Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 - 2020 telah ditetapkan indikator koperasi aktif sebagai indikator yang terus meningkat prosentasenya di Indragiri Hilir. Pada tahun 2016, persentase koperasi aktif ditargetkan sebesar 55%, meningkat menjadi 70% pada tahun 2018.

Selama periode 2018 -2019, realisasi indikator persentase koperasi aktif dibawah target RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 94,36% - 98,81% yang terkategori sangat Tinggi. Pada periode 2017, realisasi indikator ini sudah diatas target RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 110,08% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada periode pembangunan berikutnya diupayakan untuk mendorong semua koperasi di Indragiri Hilir menjadi koperasi aktif.

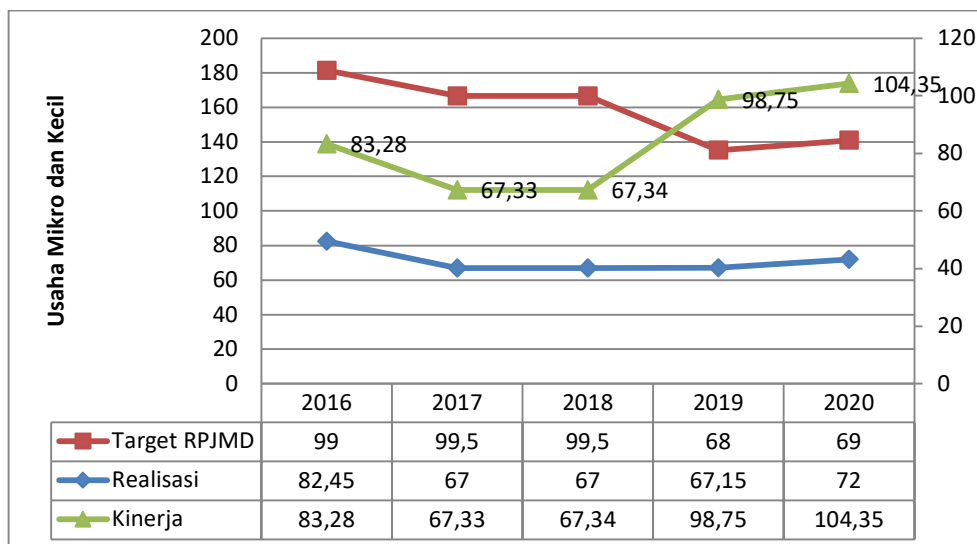


Gambar 2-116 Kinerja Koperasi Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan kriteria aset maksimal Rp 50 juta dan kriteria omset maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil adalah yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang, memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta dan omset maksimal Rp 1 miliar. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 - 2020 telah ditetapkan indikator persentase Usaha Mikro dan Kecil penting dalam pembangunan di Indragiri Hilir. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 99% meningkat menjadi 99,50% pada tahun 2018.



Gambar 2-117 Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2020, realisasi indikator persentase usaha mikro dan kecil lebih tinggi dan/atau sama dengan target RPJMD sehingga realisasi kinerja sebesar 104,35% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2016 hingga 2018, realisasi indikator ini cenderung menurun yaitu dari 82,45% pada tahun 2016 menjadi 67% pada tahun 2018 sehingga realisasi kinerja sebesar 67,33% - 83,28% yang terkategori Sedang - Tinggi. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi kinerja indikator persentase usaha mikro

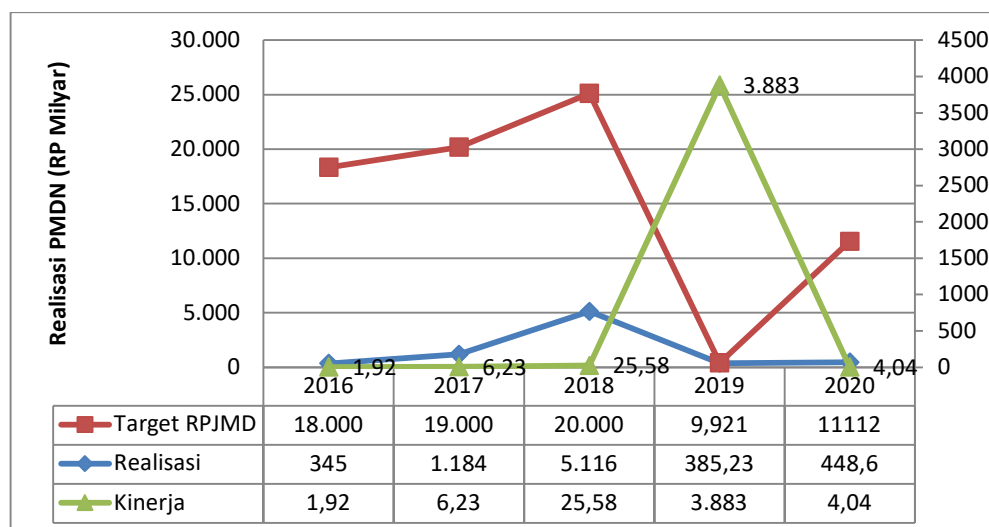
dan kecil sebesar 84,12% yang terkategori Tinggi. Meski persentase usaha mikro dan kecil capaian kinerjanya terkategori tinggi namun upaya pembinaan UMK menjadi usaha yang lebih berdaya saing perlu terus dilakukan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Layanan urusan wajib non dasar bidang Penanaman Modal dianalisis dari indikator (i) Realisasi PMDN dan (ii) Realisasi PMA.

a. Realisasi PMDN

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. Untuk penanaman modal dalam negeri tidak ada ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi. memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta dan omset maksimal Rp 1 miliar. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator penanaman modal dalam negeri terus meningkat yaitu dari Rp 18.000 (milyar) pada tahun 2016 menjadi Rp 20.000 (milyar) pada tahun 2018.



Gambar 2-118 Kinerja Indikator Realisasi PMDN di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

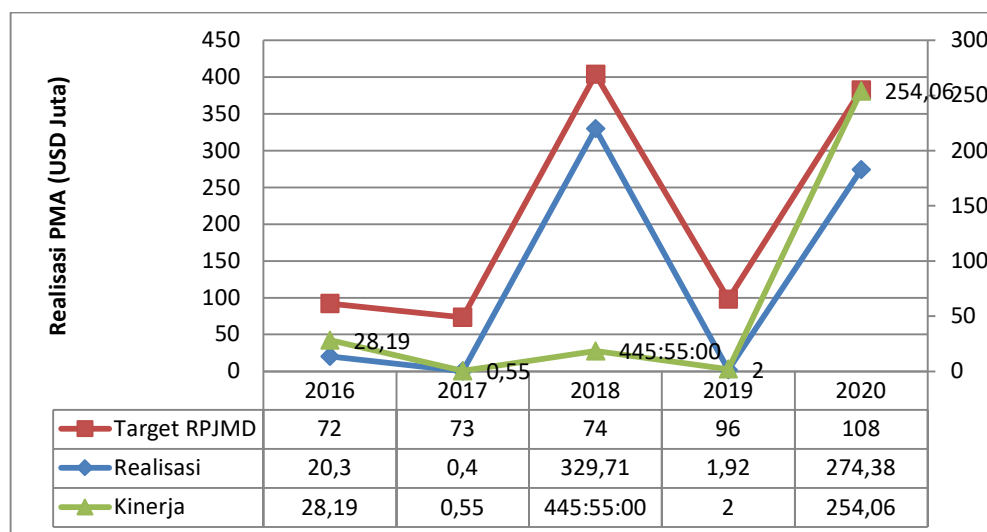
Selama periode 2017 – 2018, realisasi indikator penanaman modal dalam negeri relatif cukup tinggi meski masih dibawah target RPJMD yaitu Rp. 1.184 milyar dan Rp 5.116 milyar dengan realisasi kinerja sebesar 6,23% dan 25,58% yang masing-masing terkategori rendah dan sangat rendah. Pada tahun 2016 hingga 2017, realisasi indikator ini menurun tajam dengan realisasi kinerja sebesar 1,92% - 6,23% yang terkategori Sangat Rendah. Kondisi ini terjadi karena bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda Riau khususnya Indragiri Hilir tahun 2016 dan disertai melemahnya perkenomian dunia sehingga banyak investor yang melakukan 'wait and see". Upaya untuk terus menarik investasi PMDN harus terus dilakukan sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indragiri Hilir.

b. Realisasi PMA

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun sebagian dengan penanaman modal dalam negeri. Total nilai investasi lebih besar dari Rp 10 milyar diluar tanah dan bangunan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 – 2020 telah ditetapkan indikator realisasi PMA meningkat dari USD 72 juta pada tahun 2016 menjadi USD 74 juta pada tahun 2018.

Hampir sejalan dengan PMDN, realisasi PMA hanya relatif tinggi pada tahun 2018 saja yaitu sebesar USD 329,71 juta dengan realisasi kinerja sebesar 4455,5% yang terkategori sangat Tinggi. Pada tahun 2017 dan selanjutnya jumlah realisasi PMA terjenu bebas seiring dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang disertai dengan kelembaban ekonomi dunia. Selama periode 2017 dan 2019, realisasi PMA menurun dari USD 0,4 juta pada tahun 2017 menjadi USD 1,92 juta pada tahun 2019. Realisasi kinerja indikator ini selama periode ini berkisar antara 2% - 4455,5% yang terkategori Sangat Rendah – Sangat Tinggi. Upaya untuk terus

meningkatkan PMA perlu terus dilakukan sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir.



Gambar 2-119 Kinerja Indikator PMA di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Layanan urusan wajib non dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga seharusnya diukur dengan indikator persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase wirausaha muda, cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikat, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga. Namun seluruh indikator ini belum tersedia datanya, hanya pada tahun 2017 tercatat beberapa indikator yang tersedia.

Pada tahun 2017, jumlah prestasi olahraga Indragiri Hilir sebanyak 6 prestasi yaitu (i) Juara III bolavoli putri pada pejuaraan piala Gubernur Riau, (ii) Juara 1 futsal Putra pada kejuaraan tingkat pelajar se Provinsi Riau, (iii) juara 1 Futsal Putra pada kejuaraan tingkat mahasiswa se Provinsi Riau, (iv) Juara umum pada kejuaraan Lemkari se Sumatera, (v) Juara III lomba presenting putri pada perlombaan English Festival tingkat Provinsi dan (vi) Juara III Singging Contest Putra pada perlombaan Englis festival tingkat Provinsi. Secara umum kondisim lapangan, persentase oragnisasi

yang aktif, cakupan pembinaan olahraga cakupan pelatih yang bersertifikat persentase wirausaha muda, cakupan pembinaan atlet mudah dan jumlah atlet berprestasi di Indragiri Hilir relatif masih minim. Upaya untuk meningkatkan capaian indikator kepemudaan dan olahraga diatas perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga indragiri Hilir ke depan.

2.3.2.14 Statistik

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Buku “Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka” dan (ii) Kecamatan Dalam Angka.

a. Buku Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan buku Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka menjadi indikator dalam bidang statistik. Selama periode 2016-2020, Buku Indragiri Hilir dalam angka selalu terbit dalam edisi cetak dan online sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan cepat dan murah. Setiap tahunnya, BPS bekerjasama pemerintah indragiri hilir juga mempublikasikan Statistik Daerah, Indikator kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir dan PDRB Indragiri Hilir serta publikasi-publikasi lainnya.



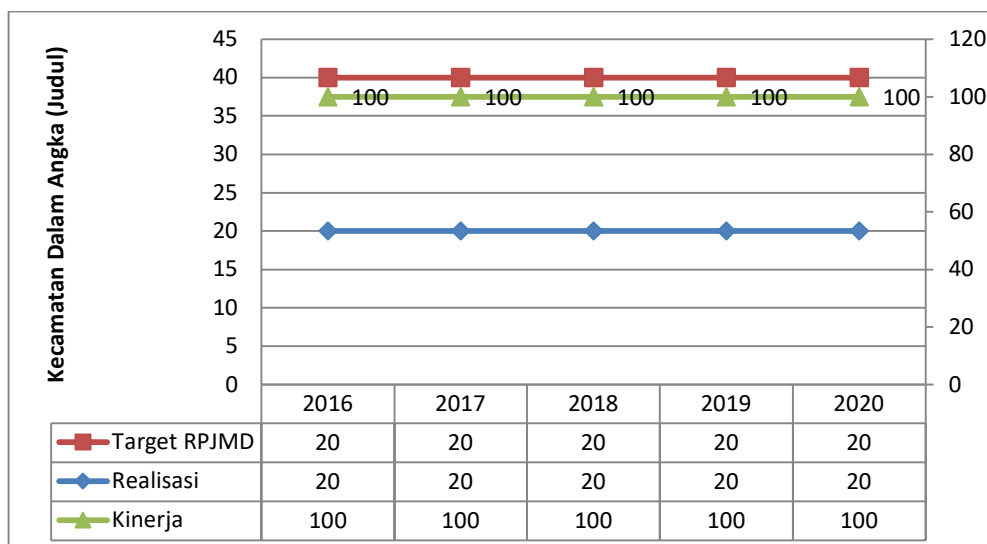
Gambar 2-120 Kinerja Indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka sebagai indikator dalam bidang Statistik. Selama periode ini, realisasi indikator buku Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Agar evaluasi RPJMD dapat dilakukan dengan baik setiap tahunnya, perlu dilakukan kerjasama dengan BPS untuk pengukuran beberapa indikator penting sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017.

b. Kecamatan Dalam Angka

Sejalan dengan penerbitan Buku Indragiri Hilir Dalam Angka, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bekerjasama dengan BPS Indragiri hilir juga menerbitkan dan mempublikasikan buku Kecamatan dalam Angka untuk ke 20 kecamatan di Indragiri Hilir. Buku Kecamatan Dalam Angka ini diikuti dengan buku Statistik Daerah Kecamatan sebanyak 20 judul. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator penerbitan dan publikasi 20 judul buku kecamatan dalam angka sebagai indikator penting dalam bidang Statistik.



Gambar 2-121 Kinerja Indikator Kecamatan Dalam Angka di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : LKPJ Inhil (2016 - 2020)

Realisasi indikator penerbitan dan publikasi ke 20 buku kecamatan dalam angka terealisasi penuh sehingga realisasi kinerja 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Kedepan, statistik tingkat kecamatan juga menyediakan data-data yang terkait dengan indikator yang diperlukan dalam evaluasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 86 tahun 2017.

2.3.2.15 Persandian

Persandian atau juga dikenal dengan sebutan kriptologi adalah ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Bidang urusan persandian diukur menggunakan indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Indikator ini relatif kurang digunakan dan tidak tersedia data yang dimaksud.

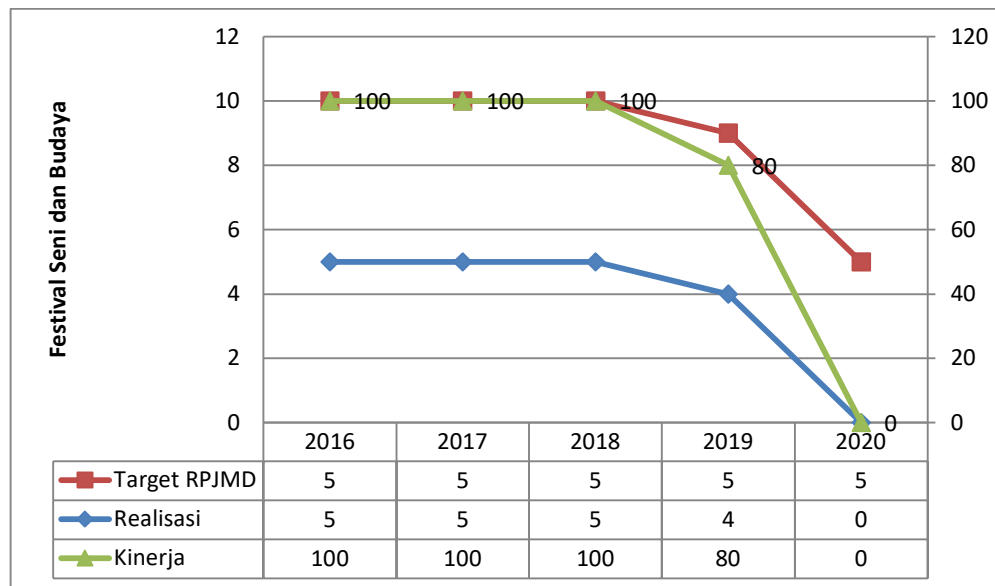
2.3.2.16 Kebudayaan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan (ii) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya.

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Setiap tahun, pemerintah Indragiri Hilir melaksanakan berbagai festival seni dan budaya seperti (i) festival bumi gemilang, (ii) festival berdah, (iii) penampilan sanggar seni tari Citra Sehati di Taman Mini Indonesia, (iv) lomba seni teater klasik dan (vi) lomba kagu bupati Singer, musik gebyar merdeka serta panggung hiburan rakyat Penyelenggaraan festival seni dan budaya ini menjadi indikator dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2016-2020.

Realisasi capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya di Indragiri Hilir pada tahun 2016-2018 sesuai dengan target sehingga realisasi kinerjanya sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan realisasi indikator berkisar antara 0-4, dengan realisasi kinerjanya 0-80% di akibatkan pandemic Covid-19 sehingga tidak terlaksananya Penyelenggaraan festival seni dan budaya indragiri Hilir, tetapi perlu terus dilakukan secara berkala sehingga akan dapat menjadidaya tarik wisatawan datang ke Indragiri Hilir.

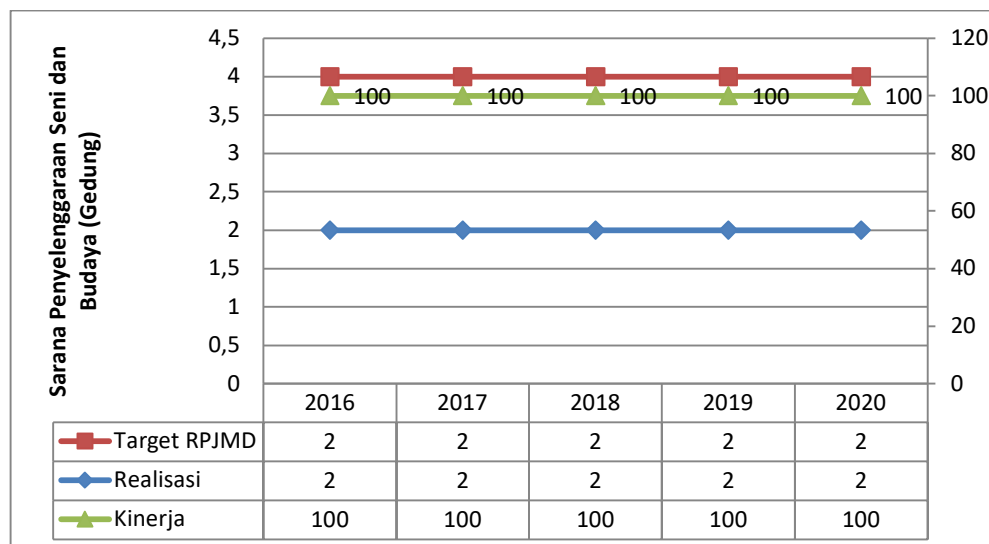


Gambar 2-122 Kinerja Indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebagai indikator penting yang diukur setiap tahun tingkat pencapaian kinerjanya. Selama periode 2016-2020, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Indragiri Hilir sebanyak dua unit dan realisasinya juga dua unit sehingga realisasi kinerjanya 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja indikator ini terkategori Sangat Tinggi namun pemanfaat sarana seni dan budaya untuk pertunjukan masih sangat terbatas. Oleh karena itu pembinaan terhadap seni dan budaya perlu ditingkatkan dan dipertunjukkan kepada masyarakat.



Gambar 2-123 Kinerja Indikator Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

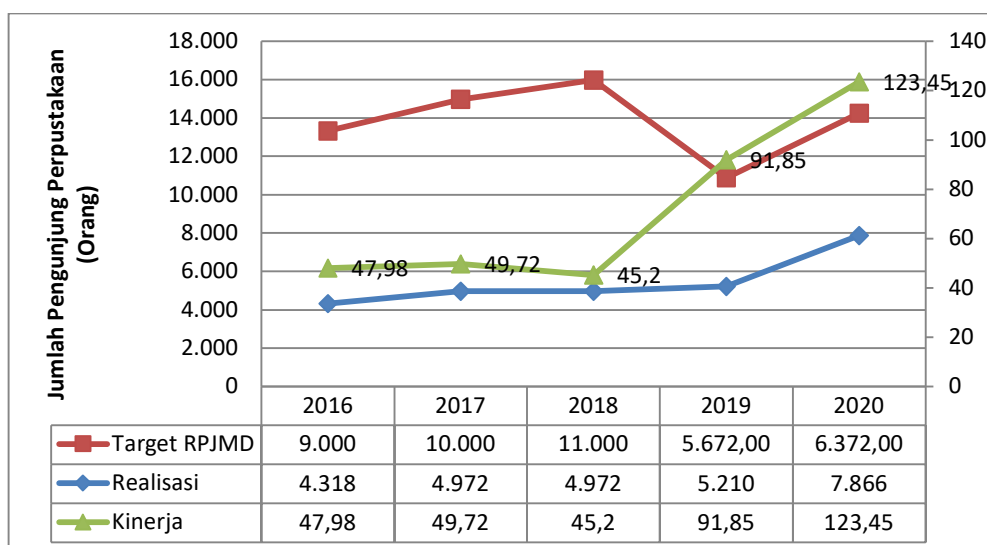
2.3.2.17 Perpustakaan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan (ii) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Indragiri Hilir meningkat

dari 9000 pengunjung pada tahun 2016 menjadi 11.000 pengunjung pada tahun 2018. Selama periode 2017 - 2018, realisasi indikator jumlah pengunjung perpustakaan cenderung menurun. Pada tahun 2020 tercatat jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 7.866 pengunjung, diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga realisasi kinerja sebesar 123,45% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2017 - 2018, jumlah pengunjung menurun menjadi 4.972 pengunjung pertahun dengan realisasi kinerja sebesar 45,20% - 49,72% yang terkategori Rendah. Menurun tajamnya pengunjung perpustakaan Indragiri Hilir dimungkinkan karena kurang menariknya koleksi buku yang tersedia disamping fasilitas yang terbatas. Pengembangan perpustakaan digital yang terkoneksi dengan perpustakaan lainnya adalah salah strategi yang dapat menarik minat pengunjung ke perpustakaan Indragiri Hilir.



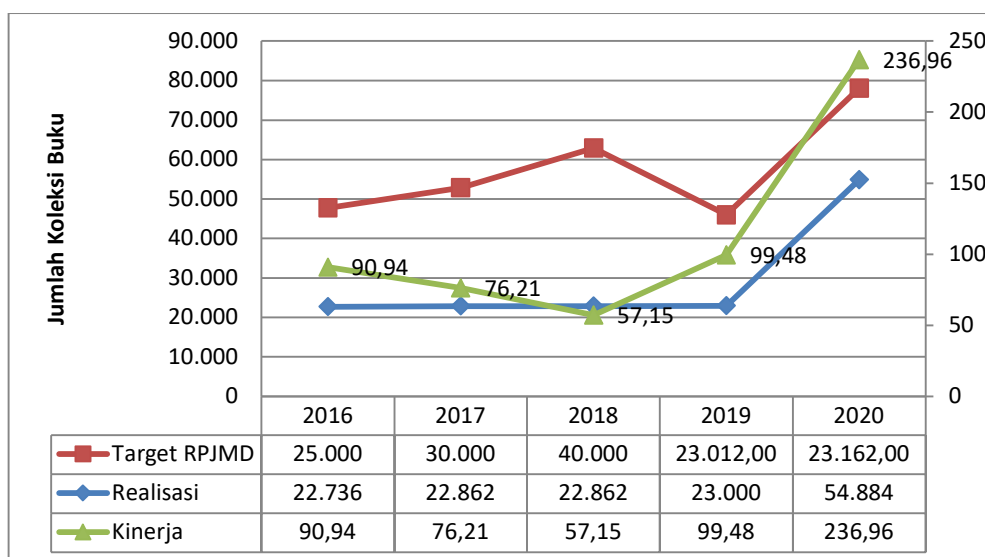
Gambar 2-124 Kinerja Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator jumlah buku yang tersedia di perpustakaan Indragiri Hilir meningkat dari 25.000 buku menjadi 40.000 buku. Selama periode 2016 - 2018, jumlah koleksi buku berjumlah 22.736 buku pada tahun 2016 meningkat menjadi

22.862 buku. Selama periode ini, telah terjadi kenaikan jumlah buku hampir 4 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan jumlah buku meningkat sebesar 29,99% per tahun. Meski peningkatan jumlah buku cukup tinggi, namun masih dibawah target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2020 yang jumlahnya diatas target. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Indragiri Hilir berkisar antara 57,15% - 236,96% yang terkategori Rendah hingga Sangat Tinggi dengan rata-rata terkategori Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja terkategori Tinggi namun jumlah pengunjung perpustakaan relatif sepi. Oleh karena itu upaya menarik minat pengunjung melalui peningkatan pelayan seperti perpustakaan digital dan terkoneksi dengan perpustakaan lain perlu diupayakan.



Gambar 2-125 Kinerja Indikator Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

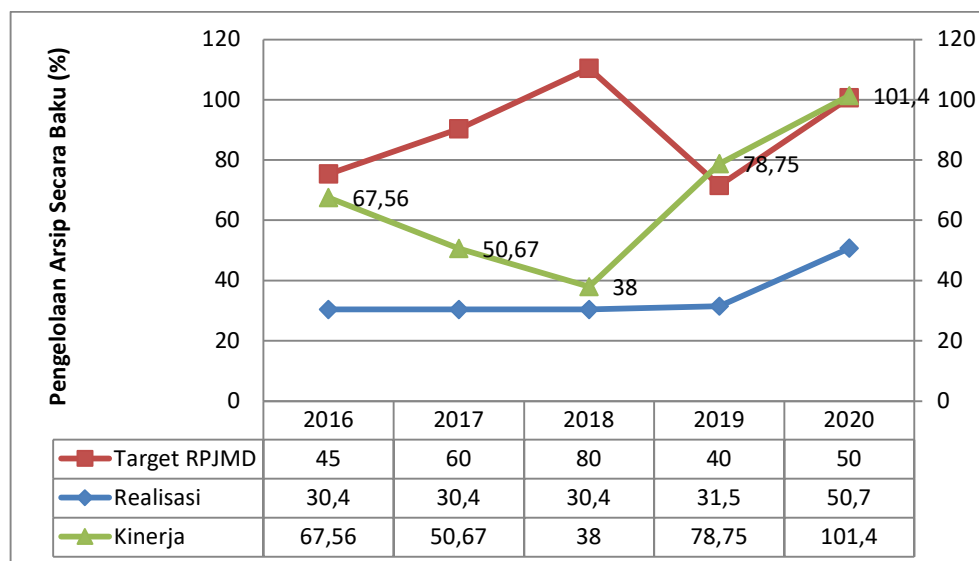
Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3.2.18 Kearsipan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Pengelolaan arsip secara baku dan (ii) Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan adalah suatu proses penyimpanan arsip secara sistematis agar mudah ditemukan kembali, yang meliputi penciptaan (pembuatan dan penerimaan), penyimpanan (filling) dan penemuan kembali (finding), penyelamatan (pengamanan, pemeliharaan, dan perawatan), dan penyusutan arsip (pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan). Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator pengelolaan arsip secara baku meningkat dari 45% pada tahun 2016 menjadi 80% pada tahun 2018. Selama periode 2016-2020, realisasi indikator ini berada dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga realisasi kinerjanya sebesar 38% - 101,4% yang terkategori Sangat Rendah hingga Tinggi dengan rata-rata kinerja terkategori Sedang. Upaya peningkatan realisasi kinerja indikator ini perlu terus dilakukan pada periode yang akan datang.



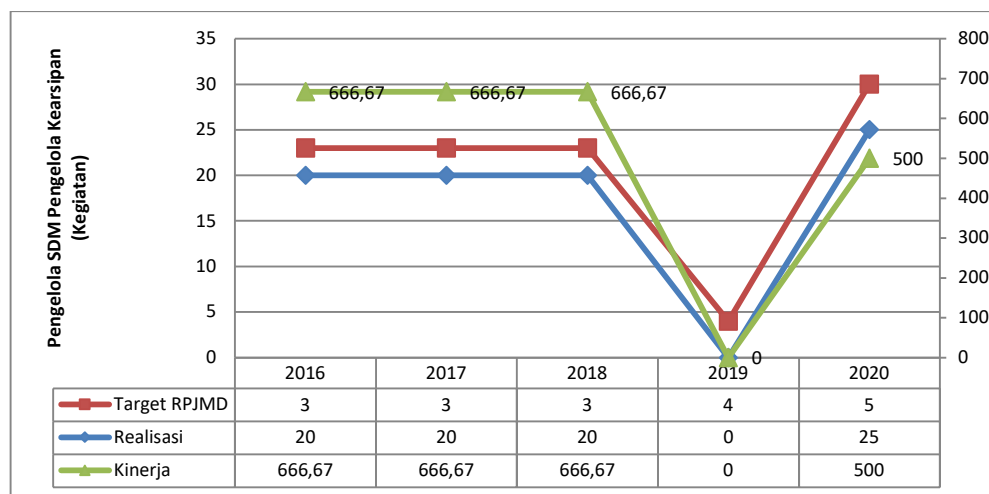
Gambar 2-126 Kinerja Indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 3 orang. Realisasi indikator ini pada tahun 2016-2018 sebanyak 20 orang sehingga realisasi

kinerja sebesar 666,67% dan terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2020, realisasi kinerja sebesar 500% yang terkategori Sangat Tinggi. Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan dapat dilakukan dengan fungsional kearsipan buka sekedar pegawai pengelola kearsipan.



Gambar 2-127 Kinerja Indikator Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

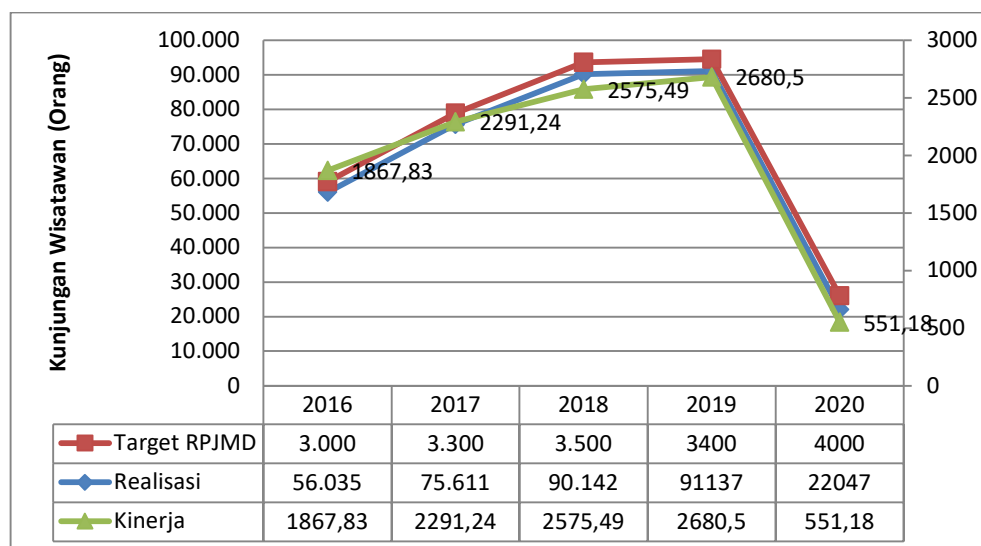
2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan terdiri dari (i) Pariwisata, (ii) Pertanian, (iii) Perdagangan, (iv) Perindustrian, (v) Transmigrasi, dan (vi) Kelautan dan Perikanan.

2.3.3.1 Pariwisata

Layanan urusan pilihan bidang pariwisata digambarkan dari indikator Kunjungan Wisatawan. Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) Ekowisata Pantai Solop, Hutan Mangrove seperti Hutan Mangrove Sungai Bela (ii) Perbukitan dalam kawasan Bukit tiga puluh seperti Bukit Condong (iii) Air Terjun seperti Air Terjun 86, Air Terjun Tembulon Ruso (iv) Danau Seperti Danau mablu (v) Wisata Religi seperti Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari dan masih banyak lagi potensi wisata di Indragiri Hilir yang

telah ditetapkan dalam Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kepariwisata.



Gambar 2-128 Kinerja Indikator Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2016-2020 telah ditetapkan bahwa indikator kunjungan wisatawan ke Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 3.000 wisatawan pada tahun 2016 menjadi 3.500 wisatawan pada tahun 2018. Realisasi indikator memiliki tren berfluktuatif meningkat, dimana pada tahun 2016-2020, capaiannya diatas target dan realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 551,18% - 2575,49% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator kunjungan wisatawan terkategori Sangat Tinggi, namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai. Masih jauh kalah bila dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga seperti Pelalawan yang mempunyai objek wisatawan yang dikenal dan dikunjungi wisatawan manca negara seperti Ombak Bono dan Taman Nasional Tesso Nilo. Begitu juga dengan Indragiri Hulu dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

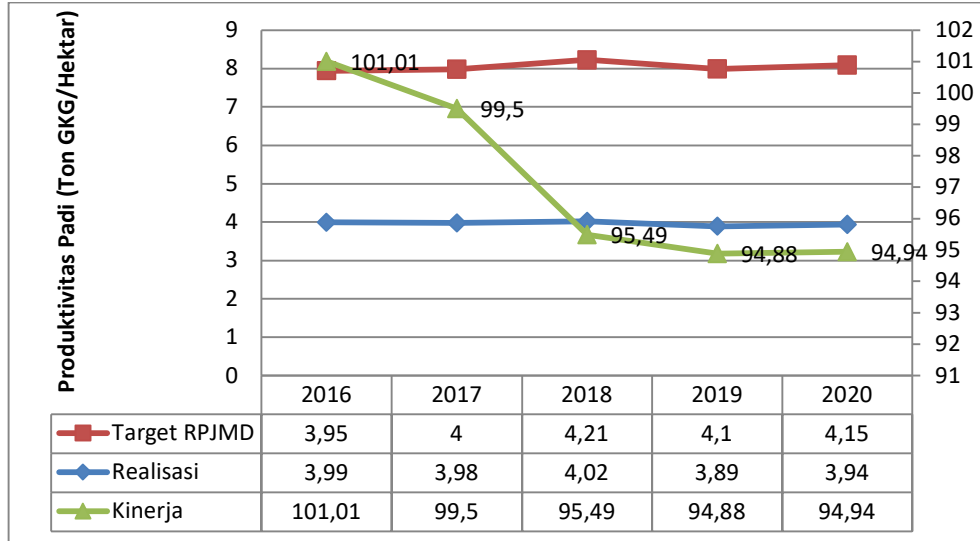
2.3.3.2 Pertanian

Layanan urusan pilihan bidang pertanian digambarkan dari indikator (i) Produktivitas Padi, (ii) Produksi beras, (iii) Produktivitas Kelapa, (iv) Produktivitas kelapa sawit dan (v) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

a. Produktivitas Padi

Indragiri Hilir merupakan sentra tanaman padi di Provinsi Riau. Pada tahun 2016, luas panen padi sawah di Indragiri Hilir seluas 24.988,9 hektar dengan kontribusi sebesar 34,44% dari total luas tanam Provinsi Riau. Luas panen padi sawah Indragiri Hilir jauh lebih luas dibanding Kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu dan pelalawan yang masing-masing hanya seluas 1.895,5 hektar dan 6.458 hektar. Produksi gabah Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 100.383 ton dengan kontribusi terhadap produksi gabah Provinsi Riau sebesar 30,81%, jauh lebih tinggi dibanding Indragiri Hulu dan Pelalawan yang masing-masingnya sebesar 7.174 ton dan 29.819 ton. Namun dari segi produktivitas, produktivitas padi sawah Indragiri Hilir sebesar 40,17 kwintal/hektar masih dibawah produktivitas padi sawah Pelalawan yang sebesar 44,87 kwintal/hektar, meski lebih tinggi dibanding Indragiri Hulu yang sebesar 37,17 kwintal/hektar.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator produktivitas padi sawah Kabupaten Indragiri Hilir meningkat dari 3,95 ton/hektar tahun 2016 menjadi 4,21 ton pada tahun 2018. Realisasi indikator produktivitas padi sawah di kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2017 - 2020, produktivitas padi sawah di Indragiri Hilir masih dibawah target RPJMD capaian indikatornya berkisar diantara 3,89-4,02, dengan capaian rialisasi kinerjanya berkisar diantara 94,88%-99,50% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini Sangat Tinggi, namun perlu disadari bahwa produktivitas target relatif jauh lebih rendah dibanding potensi disamping produksi yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, upaya menggenjot lagi produktivitas dengan revitalisasi irigasi dan penerapan teknologi perlu terus dilakukan sehingga produktivitas padi sawah dapat mencapai produktivitas potensinya.

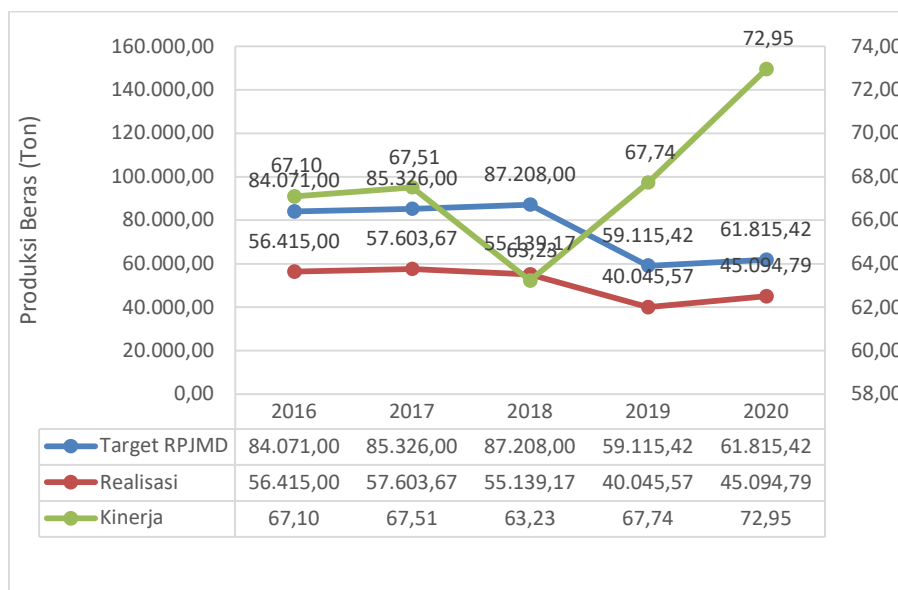


Gambar 2-129 Kinerja Indikator Produktivitas Padi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Produksi Beras

Meski indragiri hilir merupakan sentra padi terbesar di Provinsi Riau dengan produksi beras terbesar di Riau, namun produksi berasnya belum mampu mencukupi kebutuhan beras penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2016, jumlah penduduk sebesar 713.034 jiwa dibutuhkan beras sebanyak 70.661,7 ton. Sementara kemampuan produksi beras Indragiri Hilir sebesar 56.415 ton, dan kekurangan sebesar 14.246,7 ton atau defisit sebesar -20,12%. Capaian ini lebih baik dibanding Indragiri Hulu yang defisit sebesar -080,20% dan Pelalawan defisit sebesar -54,43%.



Gambar 2-130 Kinerja Indikator Produksi Beras di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Statistik Daerah Indragiri Hilir 2016– 2020) dan LKPJ Inhil (2016-2020)

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2016-2020 telah ditetapkan bahwa produksi beras Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 84.071 ton pada tahun 2016 menjadi 87.208 ton pada tahun 2018 dan sampai 2020 menjadi 61.815,42 Ton. Realisasi indikator produksi beras Indragiri Hilir berfluktuatif meningkat namun berada dibawah target. Realisasi kinerja indikator ini selama 2016 - 2018 berkisar antara 63,23% - 67,10% yang terkategori Sedang dan sementara pada tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar 67,74 % - 72,95% yang terkategori tinggi. Selama periode ini, rata-rata capaian kinerja indikator produksi beras di Idnragiri Hilir terkategori Sedang. Upaya terus meningkatkan produksi beras harus terus dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga kedepan Indragiri Hilir dapat berswasembada beras.

c. Peternakan

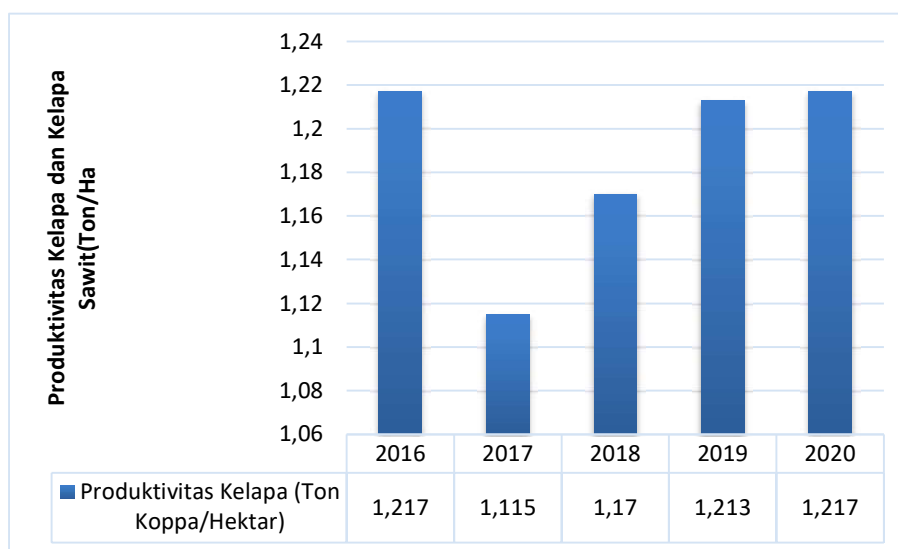
Indragiri Hilir merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dan kelapa yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan Peternakan sapi sebab Industri perkebunan kelapa sawit dan kelapa menyimpan

potensi sumber daya pakan yang besar untuk pengembangan ternak ruminansia khususnya sapi. Integrasi sapi dengan kelapa sawit memunculkan tiga kegiatan terpadu sekaligus, yaitu 1) industri pakan ternak berbasis hasil samping perkebunan kelapa sawit, 2) usaha perkembangbiakan sapi (cow calf operation), dan 3) penggemukan sapi potong. Pada tahun 2017, populasi sapi di Indragiri Hilir sebanyak 7.394 ekor. Populasi ternak sapi Indragiri Hilir ini relatif sangat rendah dibanding potensi sumberdaya alam yang dimiliki dan kalah jauh dibanding Kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu yang mencapai 50.000 ekor.

Populasi Ternak sapi Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 7.394 ekor, jumlah betina produktif dari jumlah suatu data kegiatan 3.000 ekor yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir yang di batasi aliran parit-parit (sungai). Menyulitkan peternak untuk melakukan kawin alam ternak sapinya. Sehingga angka kelahiran ternak sapi di Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai 28% dari betina produktif. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau angka kelahiran ternak di Indragiri Hilir sangat jauh tertinggal dengan Kabupaten lain yang Sarana dan Prasarana pendukungnya yang lebih memadai. Untuk peningkatan angka kelahiran tersebut pula dilakukan berbagai upaya: (i) pengadaan pejantan untuk wilayah - wilayah yang sulit untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan, (ii) perluasan wilayah Inseminasi Buatan (IB) dengan dukungan petugas, Sarana dan Prasarana IB yang memadai dan (iii) mengoptimalkan kinerja petugas pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)

d. Kelapa

Indragiri Hilir merupakan sentra kelapa Indonesia, bahkan dunia. Pada tahun 2020, produktivitas lahan kelapa di Indragiri Hilir sebesar 1,217 Ton CPO/Hektar, perkembangan produktivitas kelapa ini relatif sama sejak tahun 2016 dimana pada tahun tersebut produktivitas kelapa sebesar 1,115 Ton Koppa/Hektar. Luas lahan kelapa Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020, memiliki porsi sebesar 84,76% dari total luas areal kelapa Provinsi Riau dengan kontribusi produksi sebesar 86,41%. Perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam di Kabupaten Indragiri Hilir mencakup hampir seluruh kecamatan kecuali di kecamatan Kemuning yang luasan dan produksinya relatif kecil. Perkebunan kelapa ini telah menjadi urat perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir.

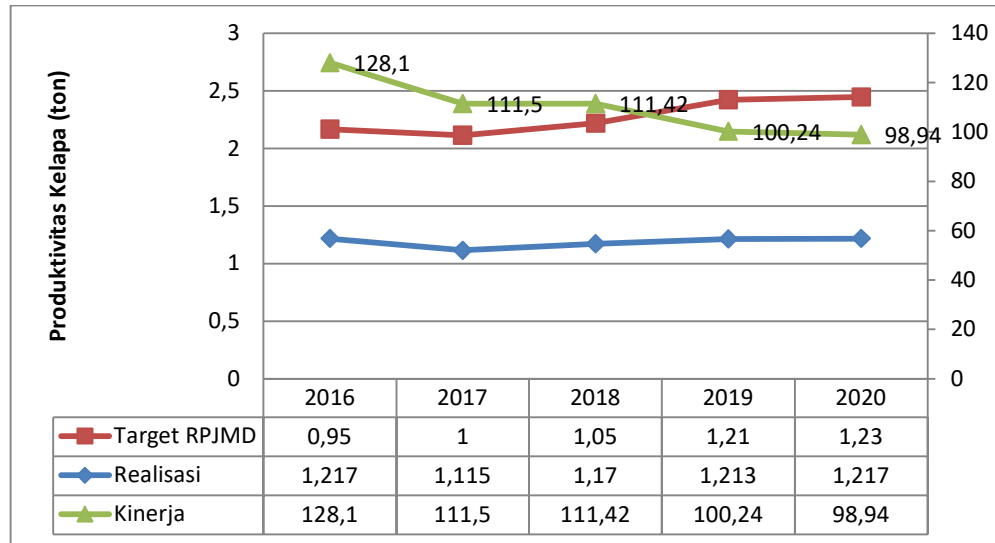


Gambar 2-131 Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020.

Sumber : LPPD, 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 0,95 ton/ha/tahun pada tahun 2016 menjadi 1 ton/ha/tahun pada tahun 2017 dan diperkirakan pada tahun 2018 juga sebesar 1,05 ton/ha/tahun. Realisasi indikator produktivitas kelapa diatas target pada tahun 2016 -

2019. Realisasi kinerja indikator produktivitas kelapa indragiri Hilir ini berkisar antara 100,24% - 128,10% yang terkategori Sangat Tinggi.



Gambar 2-132 Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Statistik Daerah Indragiri Hilir 2021)

Sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel diatas bahwa perkebunan kelapa merupakan urat nadi perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang diusahakan hampir diseluruh kecamatan dan desa. Meski data statistik menunjukkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas meningkat sebesar 1,88% per tahun, namun capaian produktivitas saat ini masih dibawah potensinya yaitu sebanyak 9000 - 11.000 butir atau 1,5 - 2,0 ton kopra/hektar/tahun. Rendahnya produktivitas kelapa Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi petani kelapa antara (i) luasnya tanaman tua dan rusak - TTR, (ii) banyaknya tanggul yang rusak sehingga banyak tanaman kelapa sawit yang terancam rusak, dan (iii) serangan hama.

Pada masa yang hampir bersamaan, perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam dihadapkan kepada banyak tanggul-tanggul yang sudah rusak sehingga mengancam tidak kurang dari 100. 000 hektar tanaman

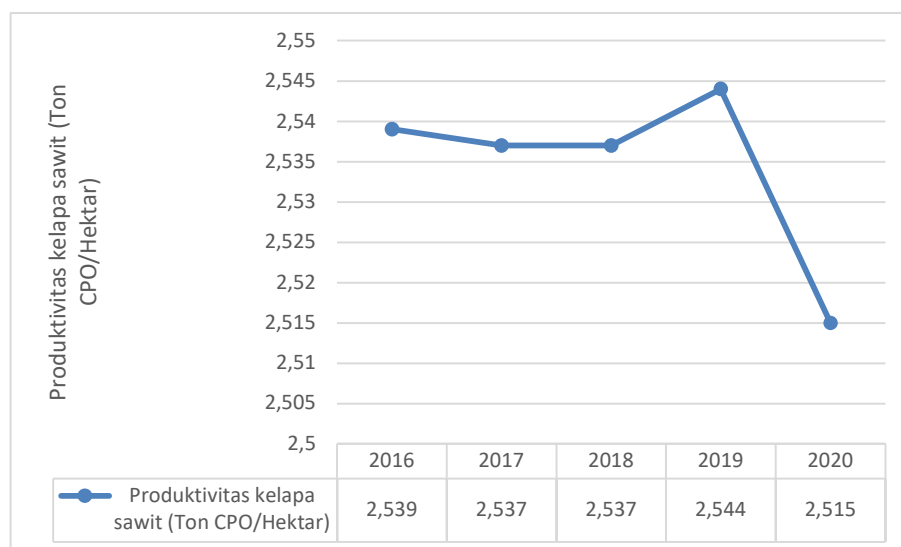
kelapa terinstruksi air laut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperbaiki tanggul dan trio tata airnya. Pada tahun 2017, sekitar 60.000 hektar perkebunan kelapa dalam rakyat masih memerlukan perbaikan tanggul dan trio tata air yang rusak dan kurang berfungsi.

Relatif rendahnya produktivitas kelapa juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya serangan hama kelapa khususnya serangan hama kumbang tanduk. Kondisi cuaca yang cenderung lembab dan semakin luas replating kelapa sawit, dimana dalam pembenaman batang kelapa kurang sesuai SOP, maka batang kelapa sawit sisa replanting ini menjadikan media yang baik untuk berkembang biaknya kumbang tanduk. Hama kumbang tanduk inilah yang menyerang tanaman kelapa dalam rakyat.

Hal yang terus menjadi perbincangan adalah harga jual kelapa bulat petani yang cenderung rendah. Akibat tekanan harga beli kelapa yang sudah lama rendah, menjadikan kebun-kebun kelapa kurang mendapat perhatian oleh petani. Kondisi harga jual kelapa rakyat yang rendah karena pasar kelapa bulat di Indragiri Hilir yang Monopsoni dan akan mengarah ke Monopoli. Campur tangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar posisi tawar petani menjadi lebih baik perlu dilakukan antara melalui resi gudang. Upaya mendorong industri mikro/kecil berbasis kelapa di pedesaan adalah bentuk lainnya mendorong berkembang dan berjayanya kembali industri kelapa Indragiri Hilir. Selain itu peluang terkait dengan pengembangan potensi perkebunan kelapa dapat di laksanakan dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan pedesaan, dimana di Kabupaten Indragiri Hilir desa - desa yang memiliki potensi perkebunan kelapa dapat di tetapkan sebagai Kaswasan Perdesaan Perkebunan Kelapa Indragiri Hilir.

e. Kelapa Sawit

Provinsi Riau telah menjadi barometer industri kelapa sawit Indonesia. Luas areal kelapa sawit Provinsi Riau seluas 2.493.176 hektar atau 20,26% dari total luas areal kelapa sawit Indonesia dengan produksi sebesar 8.721.148 ton atau 24,66% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Luas dan produksi kelapa sawit di Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa areal kelapa sawit Indragiri Hilir seluas 227.806 hektar atau 9,49 % dari total luas areal kelapa sawit Provinsi Riau dengan produksi sebesar 721.084 atau 9,29% dari total produksi minyak sawit Provinsi Riau. Luas areal dan produksi kelapa sawit Indragiri Hilir ini diatas Indragiri Hulu (117.820 hektar dan 424.022 ton), namun masih jauh dibawah luas areal dan produksi minyak sawit Pelalawan (306.977 hektar dan 1.249.219 ton).

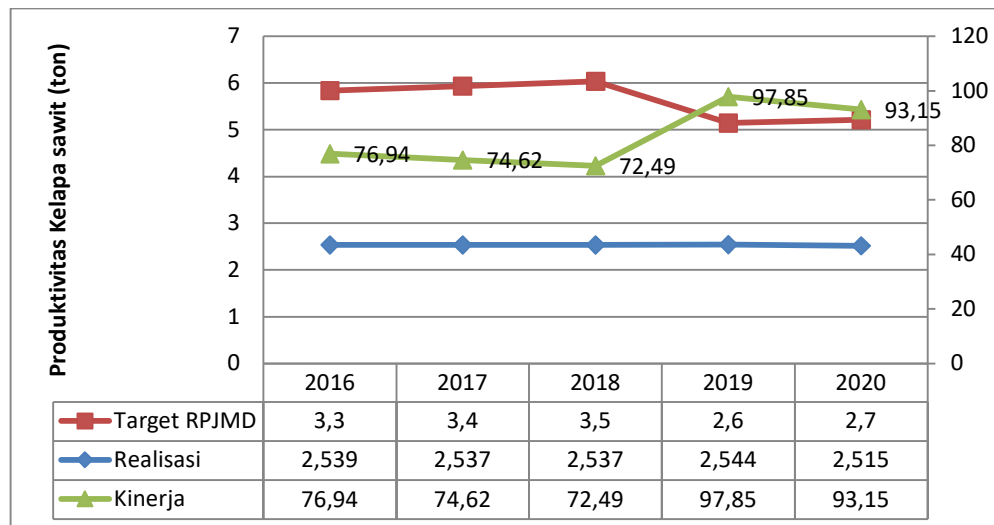


Gambar 2.133 Produktivitas Kelapa Sawit (Ton CPO/Hektar) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Pada tabel diatas terlihat bahwa produktivitas kelapa masih cenderung lebih sedikit dengan produktivitas kelapa sawit, dimana produktivitas kelapa sawit Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 2,539 Ton CPO/Hektar, hingga tahun 2020 produktivitas kelapa sawit

Kabupaten Indragiri Hilir relatif sama dimana pada tahun 2020 produktivitas kelapa sawit diangka 2,515 Ton CPO/Hektar.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa produktivitas kelapa sawit di Indragiri Hilir didorong meningkat yaitu dari 3,30 ton/hektar pada tahun 2016 menjadi 3,50 ton/hektar tahun 2018. Realisasi capaian indikator produktivitas kelapa sawit ini umumnya dibawah target. Selama periode ini, realisasi kinerja produktivitas kelapa sawit berkisar antara 72,49% - 97,85% yang terkategori sedang-sangat Tinggi. Namun perlu dicatat bahwa capaian produktivitas kelapa sawit Indragiri Hilir khususnya diperkebunan rakyat tahun 2016 yaitu sebesar 3,34 ton per hektar, masih jauh rendah bila dibanding dengan capaian produktivitas perkebunan besar di Indragiri Hilir sendiri yaitu sebesar 4,24 ton, bahkan di Pelalawan sudah mencapai 4,42 ton per hektar. Oleh karena itu, upaya replanting perkebunan kelapa sawit rakyat di Indragiri perlu direncanakan sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit.



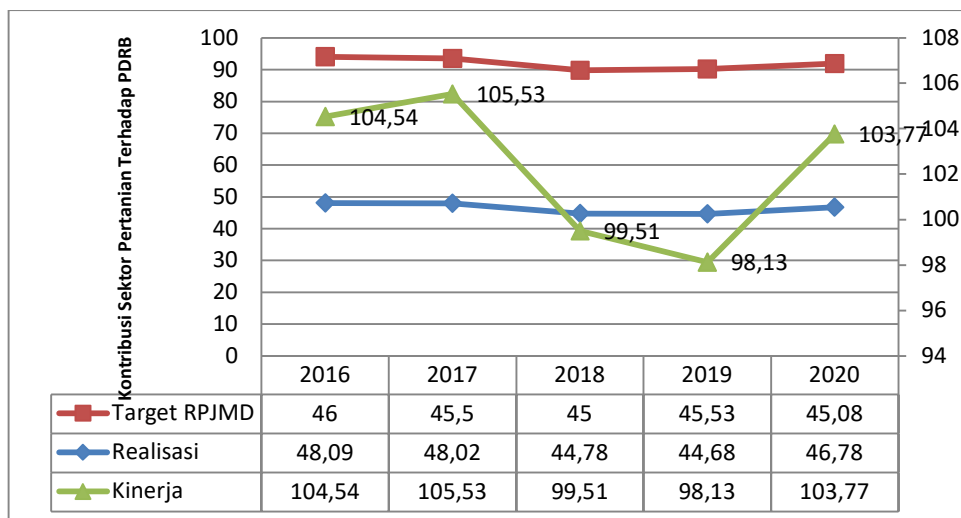
Gambar 2-134 Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Statistik Daerah Indragiri Hilir 2016-2020) dan LKPJ Inhil (2016-2020)

f. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Indragiri Hilir menurut lapangan usaha dengan trend menurun. Kontribusi sektor pertanian menurut sub sektor menunjukkan bahwa subsektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 57% diikuti perikanan (24%), kehutanan (11%), tanaman pangan (4%), tanaman hortikultura (1%) dan peternakan (1%) serta jasa peternakan dan perburuan (1%).

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB menurun dari 46% pada tahun 2016 menjadi 45% pada tahun 2018. Realisasi indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Indragiri Hilir memiliki trend yang relatif sama dengan target yaitu menurun dengan capaian yang masih diatas target. Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Indragiri Hilir ini berkisar antara 98,13% - 105,53% yang terkategori Sangat Tinggi. Masih tingginya kontribusi sektor pertanian khususnya dari sub sektor perkebunan naka sudah seharusnya sub sektor ini mendapat perhatian yang cukup dalam pembangunan dan didorong untuk berkembangnya industri hilir.



Gambar 2-135 Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3.3.3 Perdagangan

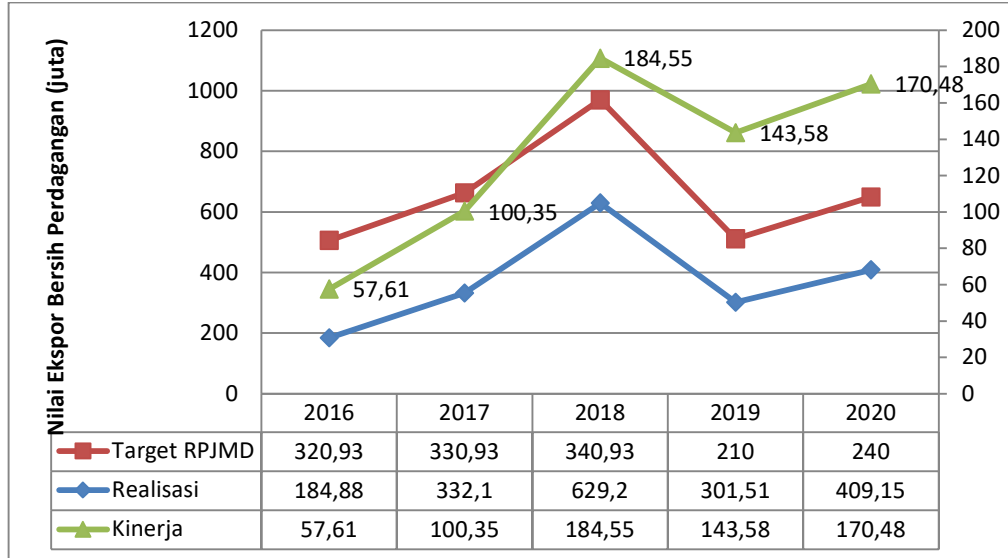
Layanan urusan pilihan bidang pertanian diwakili oleh indikator (i) Nilai ekspor bersih perdagangan dan (ii) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

a. Eskpor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan atau disebut juga neraca perdagangan adalah nilai ekspor dikurangi nilai impor. Volume dan nilai ekspor Indragiri Hilir selama periode 2014 hingga 2016 cenderung semakin menurun yaitu dari 826.749.270 ton dengan nilai USD 346.711.340 pada tahun 2014 menurun menjadi 435.685.750 ton dengan nilai USD 255.139.100 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, volume ekspor menurun lagi menjadi 414.186.430 ton dengan nilai USD 253.417.600. Disisi lain volume dan nilai impor cenderung meningkat sehingga ekspor bersih cenderung menurun.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir adalah terus meningkat atau surplus yaitu dari USD 320.93 pada tahun 2016 menjadi USD 330.93.

Selama periode 2018 - 2019, realisasi indikator ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir memiliki trend menurun dan diatas target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, dengan realisasi indikator diatas target maka realisasi kinerja menjadi 629,2% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada periode 2018-2019, realisasi kinerja indikator ekspor bersih perdagangan menurun menjadi 143,58% - 184,55% yang terkategori Rendah. Semakin menurunnya ekspor bersih perdagangan atau neraca perdagangan Indragiri Hilir ini harus segera diantisipasi melalui program-program pembangunan yang mendorong tumbuh dan berkembang industri yang memberi nilai tambah pada output pertanian yang berorientasi ekspor.



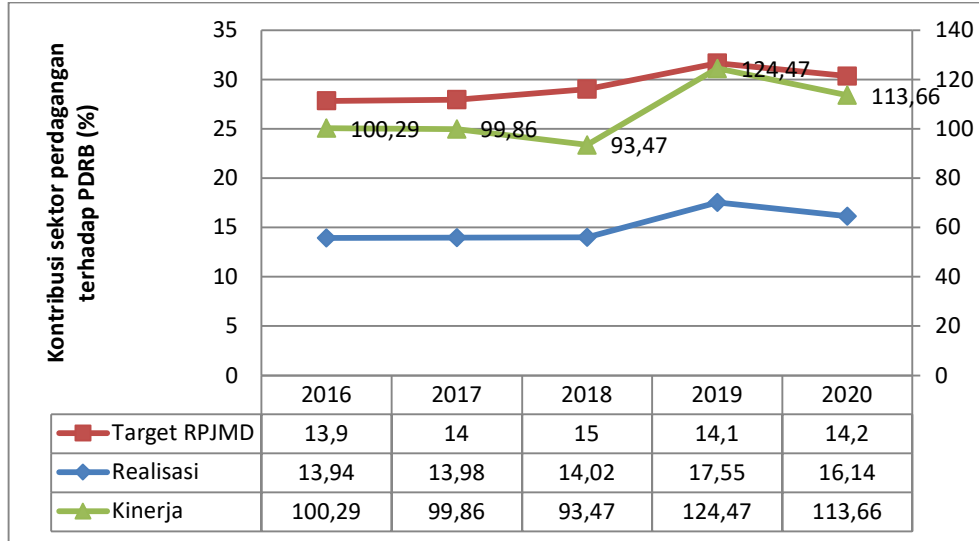
Gambar 2-136 Kinerja Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000 = 100) menggunakan klasifikasi usaha indonesia 1990 (KLUI 1990) yang terdiri dari 9 lapangan usaha. PDRB tahun dasar 2010 = 100 menggunakan KBLI 2009 yang terdiri dari 17 lapangan usaha. Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran pada KLUI 1990 dipecah menjadi 2 lapangan usaha pada KBLI 2009 yang terdiri dari (i) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan (ii) transportasi dan pergudangan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator kontribusi perdagangan terus meningkat dari 13,90% pada tahun 2016 menjadi 15% pada tahun 2018. Realisasi indikator ini memiliki trend meningkat yaitu dari 14,02% pada tahun 2018 meningkat menjadi 17,55% pada tahun 2019 dan Realisasi kinerja indikator ini selama periode 2019 – 2020 berada diatas target dengan realisasi kinerja sebesar 113,66% - 124,47% yang terkategori Sangat Tinggi.



Gambar 2-137 Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

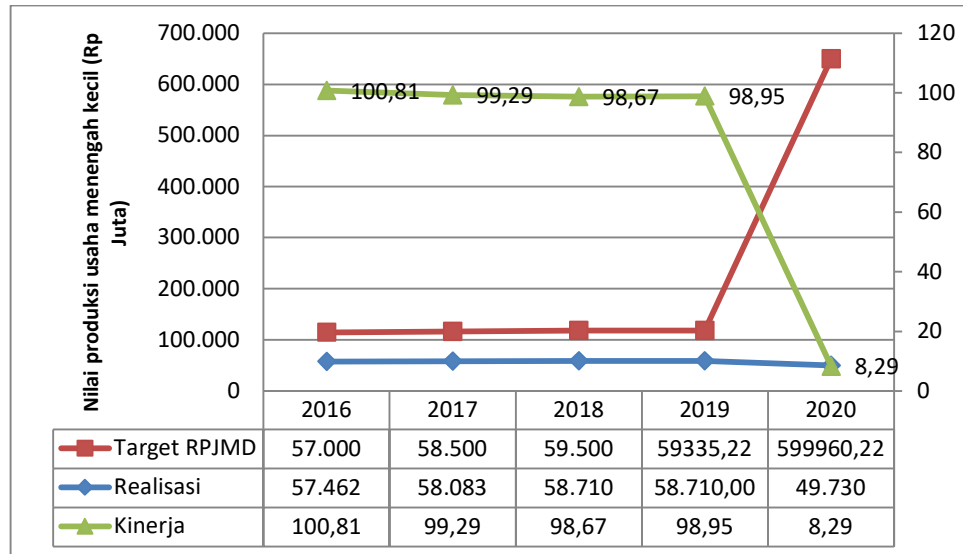
2.3.3.4 Perindustrian

Layanan urusan pilihan bidang industri diwakili oleh indikator (i) Nilai produksi usaha menengah kecil dan (ii) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

a. Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil

Selama periode 2016-2020, nilai produksi usaha industri menengah dan kecil Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, nilai produksi usaha industri menengah kecil sebesar Rp 57.000 (juta) meningkat menjadi Rp 59.500 (juta) pada tahun 2018. Selaman periode ini, rata-rata pertumbuhan nilai produksi usaha industri menengah keci Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,80% per tahun. Capaian nilai produksi usaha menengah kecil Indragiri Hilir lebih kecil dari Kuantan Singingi meski lebih tinggi nilainya dibanding Indragiri Hulu dan Pelalawan. Upaya untuk meningkatkan nilai produksi usaha menengah kecil Indragiri Hilir perlu mendapat perhatian karena potensi yang ada saat ini belum terkelola dengan baik. Upaya menggerakkan usaha menengah kecil

melalui program Desa Maju Inhil Jaya adalah suatu strategi terbaik dilakukan.

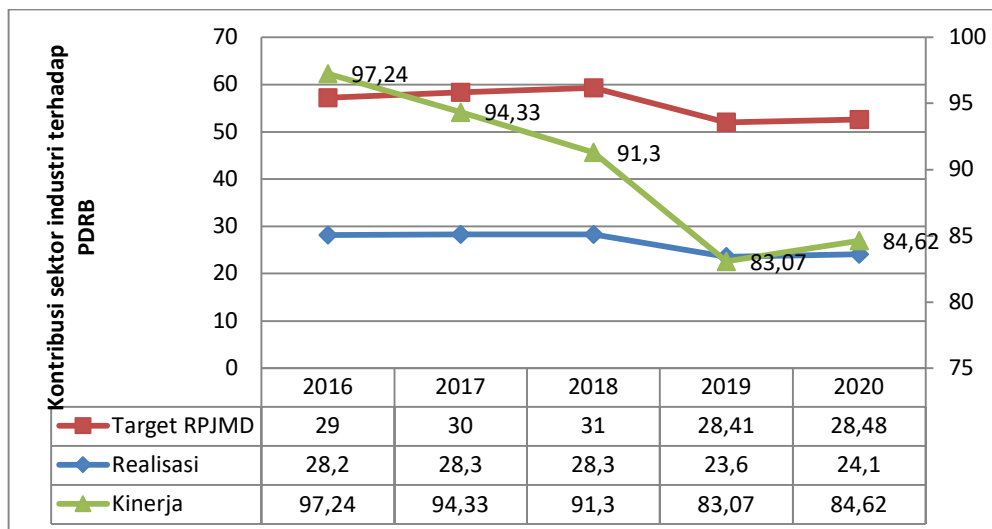


Gambar 2-138 Perkembangan Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Riau Dalam Angka , 2020)

b. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

sektor industri yang dalam KLUI 1990 yang dimaksud adalah sektor industri pengolahan yang dalam KBLI dipecah menjadi menjadi 4 yaitu (i) Industri pengolahan, (ii) pengadaan listrik dan gas, (iii) pengadaan air dan (iv) informasi dan komunikasi. Kontribusi Sektor industri ini dalam PDRB indragiri Hilir menempati posisi kedua setelah sektor pertanian. Dalam RPJMD Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa kontribusi sektor indsutri terhadap PDRB Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 29% pada tahun 2016 menjadi 31% pada tahun 2018. Target ini menandakan bahwa Indragiri Hilir bertransformasi dari pertanian ke industri pertanian.



Gambar 2-139 Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2016-2020, realisasi indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB memiliki trend berfluktuatif meningkat yaitu dari 28,2% pada tahun 2016 meningkat menjadi 28,3% pada tahun 2017 dan meningkat/sama menjadi 28,3 pada tahun 2018. Selaras dengan peningkatan capaian indikator dan target, maka realisasi kinerja cenderung menurun yaitu dari 91,3% pada tahun 2018 menjadi 83,07% pada tahun 2019 yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2017 dan 2018, capaian kinerja indikator kontribusi sektor industri berkisar antara 91,3% - 94,33% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski kontribusi sektor industri Sangat Tinggi, namun pencapaian ini dapat jauh lebih tinggi karena sumberdaya yang tersedia masih banyak diekspor dengan nilai tambah rendah seperti kelapa bulat dan CPO. Upaya mewujudkan kawasan industri yang saat ini masih terbengkalai perlu terus diupayakan.

2.3.3.5 Transmigrasi

Indikator yang biasa digunakan untuk bidang transmigrasi adalah kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Data ini relatif tidak tersedia dalam penyajian PDRB. Pada tahun 2016, tercatat di dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi sebuah kegiatan yaitu Transmigrasi Lokal dengan nilai sebesar Rp 46.913.500 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 90,40%.

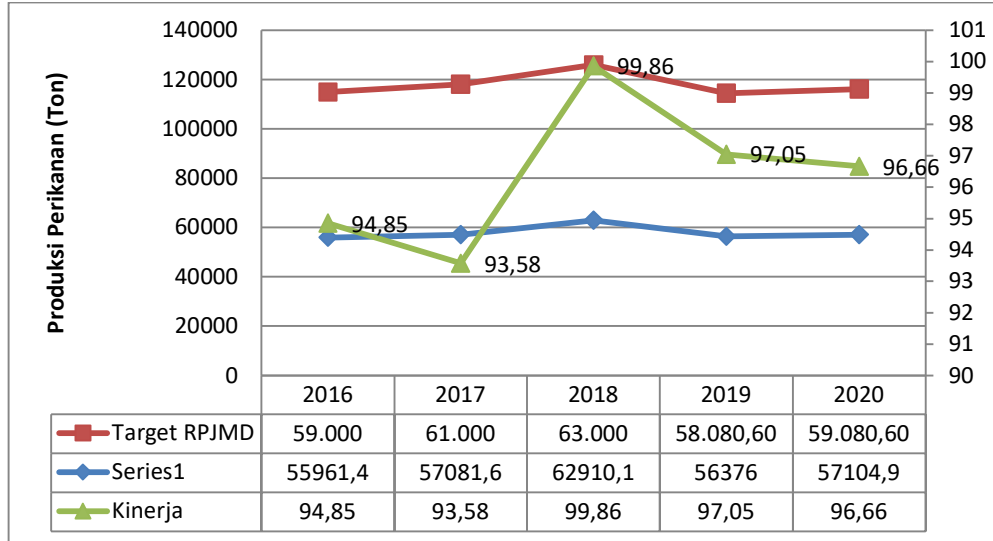
2.3.3.6 Kelautan dan Perikanan

Layanan urusan pilihan bidang pertanian diwakili oleh indikator (i) produksi perikanan dan (ii) Konsumsi ikan.

a. Produksi Perikanan

Indragiri Hilir merupakan salah satu produsen ikan di Provinsi Riau setelah Rokan Hilir. Produksi ikan Indragiri Hilir jauh diatas Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan. Sumber produksi ikan Indragiri Hilir berasal dari perikanan laut dan perairan umum. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator produksi ikan Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 59.000 ton pada tahun 2016 menjadi 63.000 ton pada tahun 2018.

Selama periode 2016-2020, realisasi indikator produksi ikan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Selama periode ini, capaian indikator produksi ikan Indragiri Hilir dibawah target RPJMD. Capaian kinerja indikator ini berkisar antara 93,58% - 99,86% yang terkategori Sangat Tinggi. terkategori Sangat Tinggi namun untuk terus meningkatkan produksi dari tangkap dilaut dan perairan umum akan sulit terus dilakukan. Oleh karena itu, upaya pengembangan perikanan budidaya harus menjadi agenda pembangunan ke depan sehingga produksi ikan dapat terus meningkat dan kesejahteraan nelayan tetap terjamin.



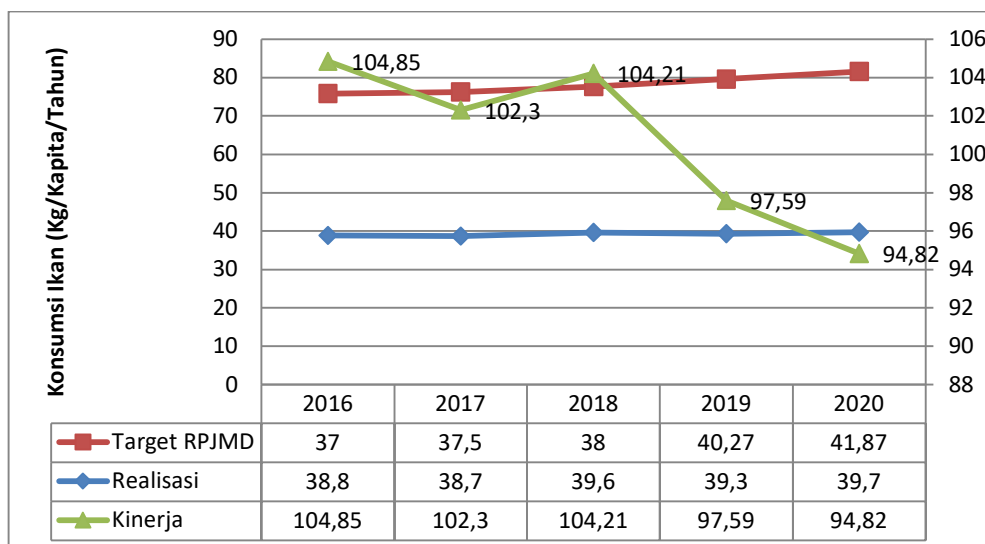
Gambar 2-140 Kinerja Indikator Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

b. Konsumsi Ikan

Indragiri Hilir yang merupakan produsen ikan di Provinsi Riau sehingga suplai ikan ke masyarakat selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga murah. Ketersediaan protein per kapita Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 95,52 gram/kapita, dimana ketersediaan ini lebih besar dari ketersediaan protein per kapita di Indragiri Hulu (93,42 gram/kapita) dan Pelalawan (94,31 gram/kapita). Ketersediaan protein per kapita sebesar 95,52 gram, sebesar 37,15 gram berasal dari ikan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator konsumsi ikan di Indragiri Hilir meningkat dari 34,50 gram per kapita menjadi 38 gram per kapita. Pada periode 2016-2020, Realisasi indikator konsumsi ikan Indragiri Hilir masih dibawah target RPJMD, namun pada periode 2016 - 2018 sudah diatas target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator konsumsi ikan berkisar antara 94,82% - 104,85% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator ini sudah Sangat Tinggi namun capaian indikator ini harus terus ditingkat sehingga konsumsi protein dari ikan dapat meningkat.



Gambar 2-141 Kinerja Indikator Konsumsi Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3.4 Urusan Penunjang

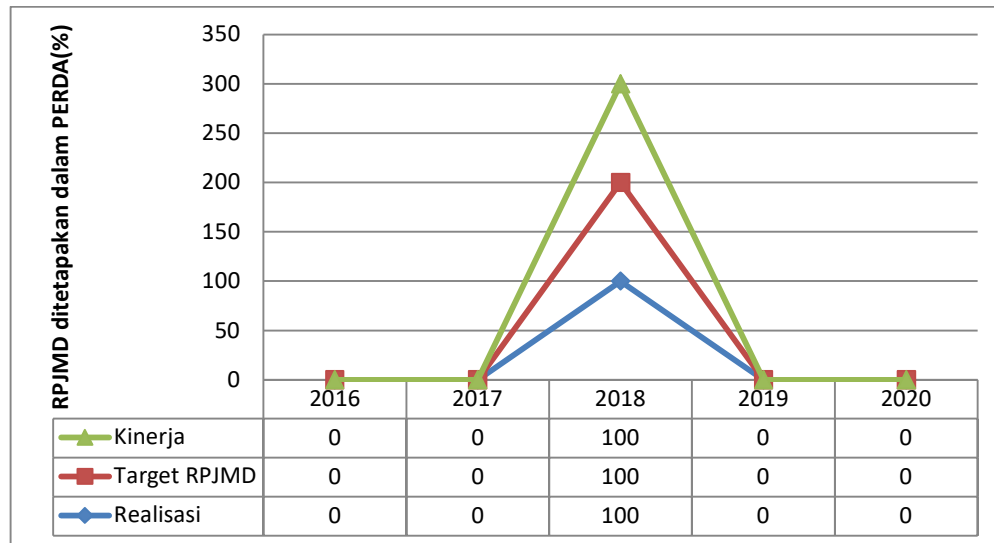
2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Layanan urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan diwakili dari indikator (i) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, (ii) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan (iii) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.

a. RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (olima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/perkada telah ditetapkan dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2014 - 2018 sebagai indikator dalam bidang Perencanaan Pembangunan. RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2014. Pada tanggal 20 September 2017, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indragiri Hilir mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Indragiri Hilir Tahun 2016-2020



Gambar 2-142 Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2016-2020, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki RPJMD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Realisasi kinerja indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada sebesar 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski pencapaian kinerja indikator ini sangat tinggi namun disadari bahwa dalam penyusunan dokumen RPJMD, Bappeda Indragiri Hilir masih sangat tergantung sepenuhnya dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsional penelitian bidang perencanaan perlu menjadi perhatian dalam periode berikutnya.

b. RKPD

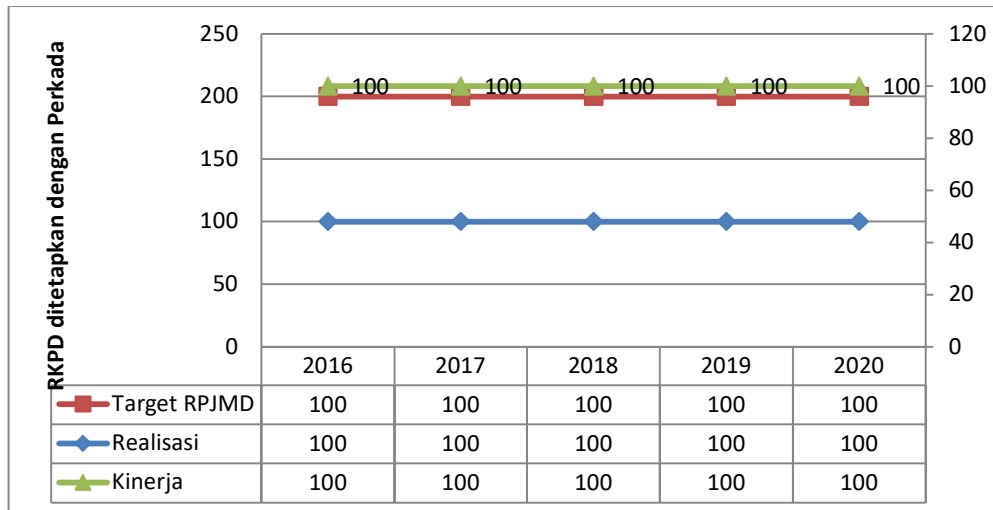
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain (i) merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD, (ii) menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan, (iii) mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD, (iv) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD dan (v) menjadi bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa Indikator tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada menjadi salah satu indikator dalam bidang perencanaan pembangunan. Selama periode 2016 - 2020, Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang berkaitan dengan RKPD sebagai berikut

1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 18 tahun 2013 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014.
2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 19 tahun 2014 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015.
3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 20 tahun 2015 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016.
4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 27 tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017.
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 16 tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018.
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 18 tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019.

7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 46 tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020.

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada Realisasi kinerja indikator menjadikan realisasi kinerja indikator ini sebesar 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski pencapaian indikator ini sangat tinggi dan RKPD Indragiri Hilir mendapat penghargaan di tingkat Provinsi Riau, namun dalam penyusunan RKPD masih banyak tergantung dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, kedepan perlu diperbanyak fungsional perencana yang berkualitas dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan.



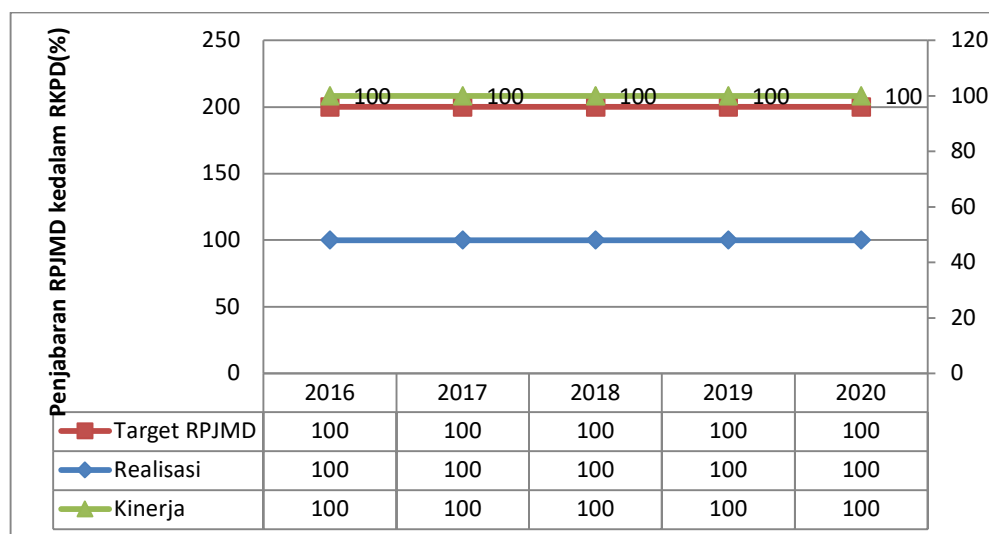
Gambar 2-143 Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

c. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Dalam pedoman penyusunan RKPD telah digariskan bahwa program dalam RKPD harus merupakan mengacu kepada program dalam RPJMD. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa bahwa indikator penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dilaksanakan 100% dalam artian program yang dilaksanakan dalam RKPD harus ada dalam RPJMD. Realisasi capaian indikator ini selama periode 2016-2020 adalah sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja

indikator penjabaran RPJMD ke dalam RKPD terlaksana 100% dan terkategori Sangat Tinggi.



Gambar 2-144 Kinerja Indikator Penjabaran RPJMD kedalam RKPD Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3.4.2 Keuangan

Layanan urusan Penunjang Bidang Keuangan diwakili dari Opini BPK. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksian mengenai kewajaran informasi keuangan yang didasarkan pada empat kriteris yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap oeraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Jenis Opini BPK adalah (i) Wajar tanpa pengecualian atau WTP (*unqualified opinion*), (ii) Wajar Dengan Pengecualian atau WDP (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*advised opinion*) dan Tidak Menyatakan pendapat (*disclamer of opinion*)

Pada tahun 2016,opini BPK yang diterima adalah WDP atau wajar Dengan pengecualian.Namun Pada Tahun 2017 - 2020 sudah meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi

pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Tabel 2-24 Perkembangan Realisasi, target dan capaian kinerja indikator Opini BPK Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kinerja	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Layanan urusan penunjang Bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diwakili oleh indikator Indeks profesionalitas ASN dan Indikator Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, dari 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, pada Area Perubahan yang ke 5 (lima) yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Hasil penilaian terhadap Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit menjadi bagian komponen pengungkit dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Penilaian terhadap Indeks Profesionalitas ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

sedangkan Penilaian terhadap Indeks Sistem Merit diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir baru dimulai tahun 2019 sampai sekarang dengan kinerja dilihat pada table berikut

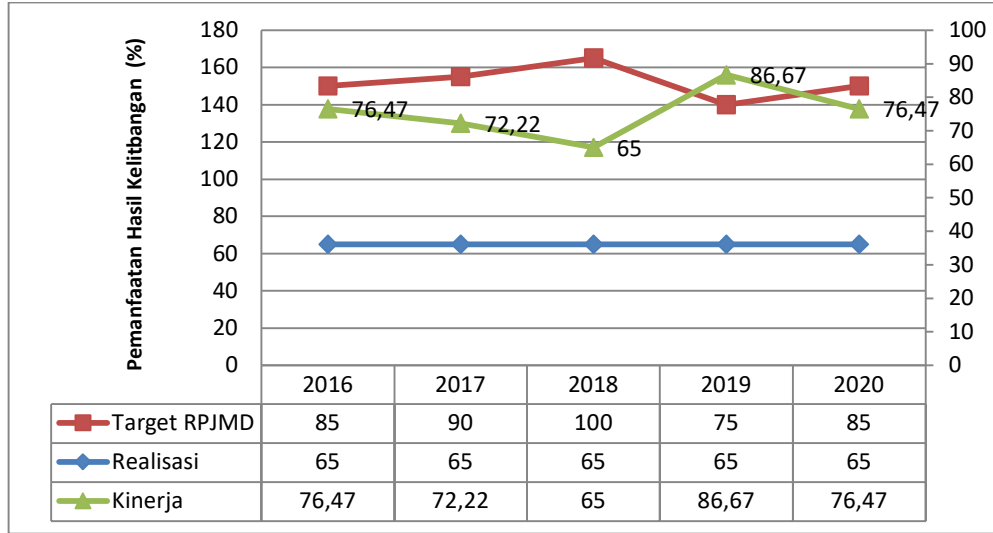
Tabel 2-25 Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2020

Uraian	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks Sistem Merit	
	2019	2020	2019	2020
Target	50	53	218	225
Realisasi	52,52	51,57	218	270
Kinerja	105,04	97,30	100	120

Sumber : BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

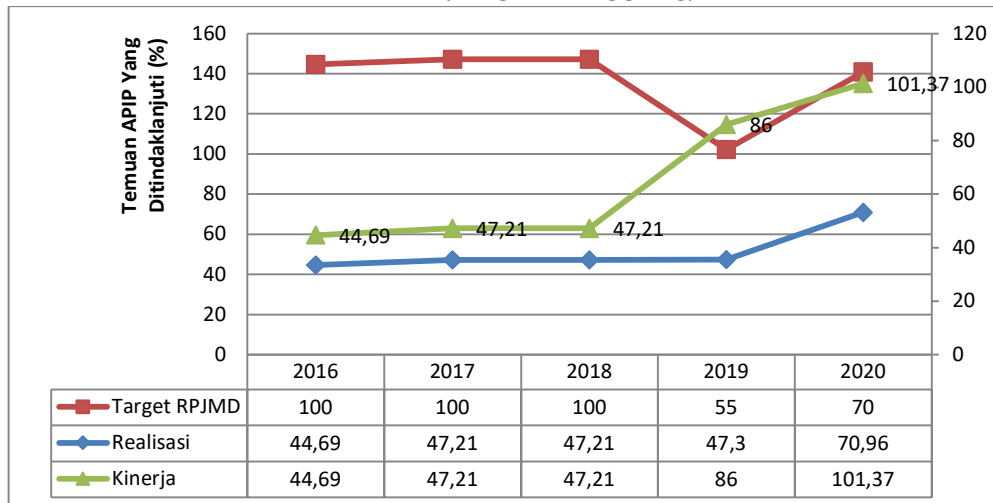
Layanan urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan diwakili oleh indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Selama periode 2016-2020, diestimasi indikator pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Indragiri Hilir relatif masih dibawah yang ditargetkan yaitu semua hasil kelitbangan dimanfaatkan untuk pembangunan. Realisasi kinerja pemanfaatan hasil kelitbangan berkisar antara 65% - 86,67% yang terkategori Rendah. Periode pembangunan kedepan, hasil penelitian harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan sehingga hasil pembangunan akan lebih optimal dan lebih berdaya guna.



Gambar 2-145 Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

2.3.4.5 Pengawasan

Layanan urusan Penunjang Bidang Pengawasan diwakili oleh indikator Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Bupati.

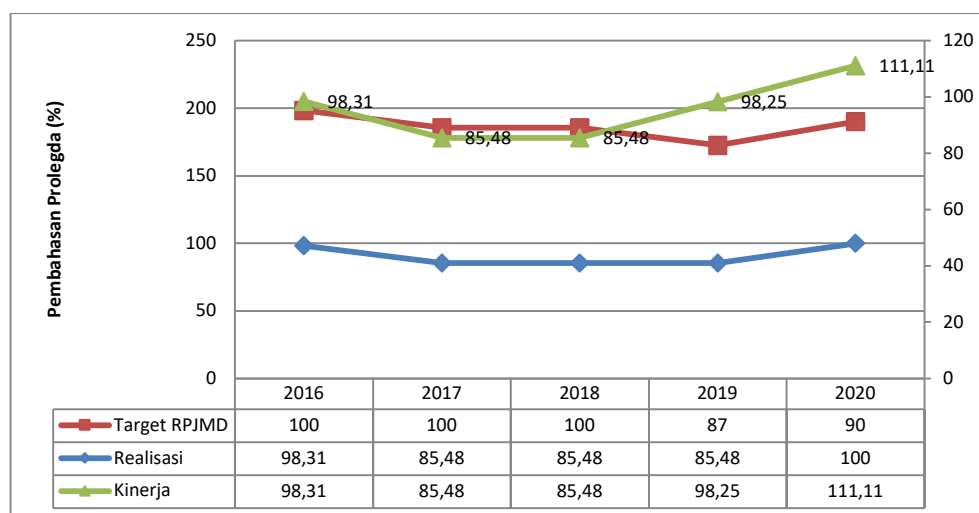


Gambar 2-146 Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Persentase Temuan APIP Yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020
 Sumber : LKPJ Inhil (2016 - 2020)

Selama periode 2016-2020, persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti memiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 100% pada tahun 2016 menurun menjadi 47,21% pada tahun 2017 dan 2018 dan menurun lagi menjadi 83,68% pada tahun 2017. Sebagaimana target umumnya, seharusnya persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti adalah 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja indikator temuan APIP yang ditindaklanjuti memiliki trend menurun yaitu dari 100 pada tahun 2016-2018 yang terkategori Sangat Tinggi menurun menjadi 83,68 - 87,63% yang terkategori Tinggi. Permasalahan menurunnya kinerja indikator temuan APIP yang ditindaklanjuti disebabkan oleh beberapa hal seperti (i) terbatasnya jumlah personil aparatur APIP yang hanya sebanyak 12 orang. Jumlah ideal aparatur fungsional APIP sebanyak 45 orang dan (ii) lemahnya penegakan hasil temuan APIP sehingga temuan berulang terjadi di OPD yang sama.

2.3.4.6 Sekretariat Dewan

Layanan urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan diwakili oleh indikator Rasio Pembahasan Prolegda. Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.



Gambar 2-147 Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Rasio Pembahasan Prolegda di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber : LKPJ Inhil (2016- 2020)

Selama periode 2016-2020, perkembangan indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, realisasi pembahasan progda Indragiri hilir capainya 100%, menurun menjadi 87% pada tahun 2019 dan capainya menjadi 85,48% pada tahun 2017. Seharusnya, prolegda yang telah diagendakan dapat dibahas pada tahun berkenaan. Selama priode 2016 - 2020, realisasi kinerja indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir sebesar 85,48% - 111,11% dan terkategori tinggi. Pada tahun 2017, realisasi kinerja indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir sebesar 85,48 dan diperkirakan pada tahun 2018 capaiannya diperkirakan sama yaitu sebesar 85,48 dan terkategori Tinggi. Meski capaian indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir terkategori tinggi pada tahun 2017, namun trend indikator ini yang menurun perlu diantisipasi lebih awal dengan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan DPRD. Bila rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir terus menurun persentasenya akan menghambat kinerja pemerintah.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah antara lain terdiri dari fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

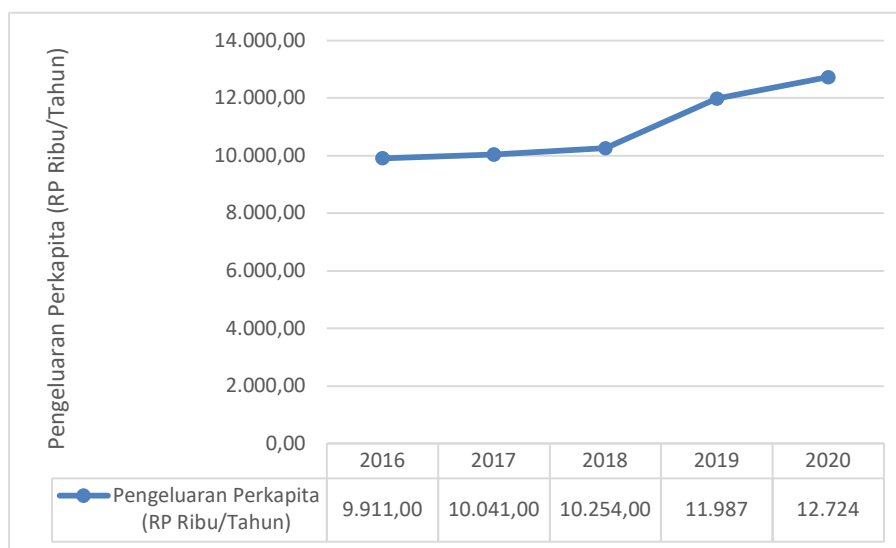
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah ddianalisis melalui pengeluaran per kapita dan nilai tukar petani (NTP).

2.4.1.1 Pengeluaran Per Kapita

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan. BPS dalam mengitung standar

hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Selama periode 2016-2020, pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat yaitu dari Rp 9.911.000 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 10.041.000 pada tahun 2017. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,73% per tahun. Capaian pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2016 – 2020 mencapai pengeluaran perkapita tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 12.724.000 dengan rata – rata pengeluar perkapita pada peride 2016-2020 yakni sebesar Rp. 10.983.000.

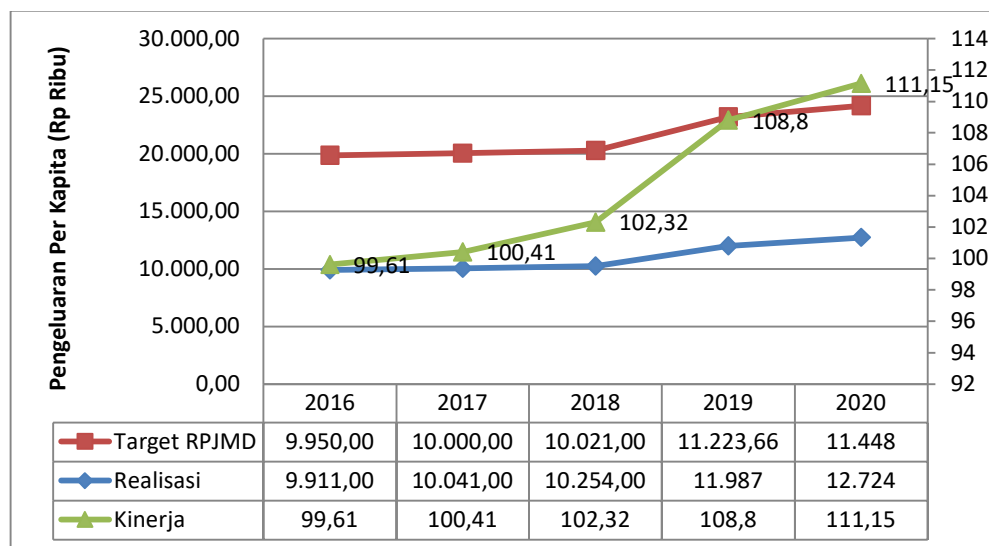


Gambar 2-148 Perkembangan Pengeluaran Per kapita Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS, 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan meningkat dari Rp 9.950.000 pada tahun 2016, meningkat menjadi R0 10.021.000 pada tahun 2018. Selama periode 2016 realisasi indikator

pengeluaran per kapita dibawah target dengan capaian kinerja sebesar 99,61% yang terkategori sangat tinggi. Pada periode 2017-2020, realisasi pengeluaran per kapita diatas target dengan capaian kinerja sebesar 100,41-111,15%. Pada tahun 2020 realisasinya juga diatas terget RPJMD sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,15%. Selama periode ini, rata-rata kinerja indikator pengeluaran per kapita sebesar 99,95% yang terkategori Sangat Tinggi.

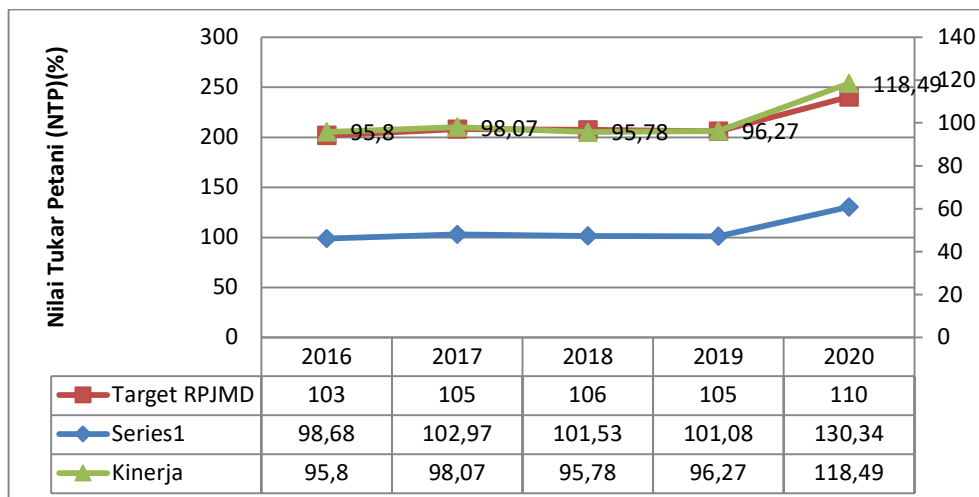


Gambar 2-149 Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, 2021

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayar oleh petani dalam melaksanakan usahatani. NTP mencerminkan efisiensi usahatani dan daya beli petani. Oleh karena NTP Kabupaten Indragiri Hilir tidak tersedia, maka NTP Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan proxy NTP Provinsi Riau.



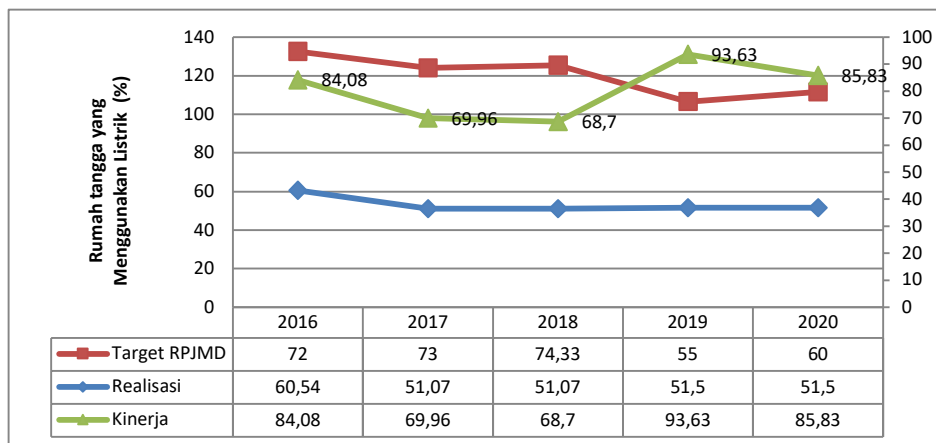
Gambar 2-150 Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator NTP terus meningkat yaitu dari 103,00 pada tahun 2016 menjadi 106,00 pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi indikator NTP meningkat secara berfluktuatif dan dibawah target. Meski realisasi indikator NTP selalu dibawah target namun capaian kinerja berkisar antara 95,78% - 118,49% yang terkategori Sangat Tinggi.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan menggunakan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.



Gambar 2-151 Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

2.4.3 Iklim Investasi

Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan menggunakan indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (2) Jumlah investor berskala nasional (PMA). Sampai dengan tahun 2018 Jumlah investor yang melaksanakan kegiatan atau usaha di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 103 Investor, Investor berskala Nasional (PMDM) Berjumlah 99 Investor sementara berskala Nasional (PMA) berjumlah 4 Investor yang tersebar di beberapa Kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir sebagai mana tercantum dalam table 2.26 berikut:

Tabel 2.26 Daftar Investor PMA Dan PMDM Masih Beroperasi Berdasarkan IP Yang Bernvetasi Di kabupaten Indragiri Hilir s/d Tahun 2018

NO	LOKASI PROYEK	JUMLAH PERUSAHAAN	BIDANG USAHA
1	2		5
1	KEC. PLANGIRAN - Desa Tanjung Simpang - Simpang Kanan - Simpang Kanan - Desa Saka Rotan - Lubuk Kempas	2 PMA 5 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS - Perkebunan kelapa Hibrida & Kelapa Sawit - Hutan Tanaman Industri (HTI) - Perkebunan kelapa Hibrida & Kelapa Sawit - Industri Pati Palma
2	PULAU BURUNG - Desa Pulau Burung	2 PMDM	- Perkebunan Kelapa Hibrida, Nenas dan pengolahannya - Perkebunan Kelapa Hibrida & Sawit.
3	KEC. MANDAH - Bente, Belaras,C.Baru,	2 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit
4	KEC. KETAMAN - Bandar Sei. Gemilang	4 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit - Industri kelapa terpadu - Hotel melati - Baching plant / Beton siap pakai
5	KEC. T. MERAH - Desa Tanah Merah	2 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit - Pengolahan Kelapa
6	KEC. RETEH - Seb. Pulau Kijang	4 PMDM	- Perdagangan Eceran BBM - Rice Milling

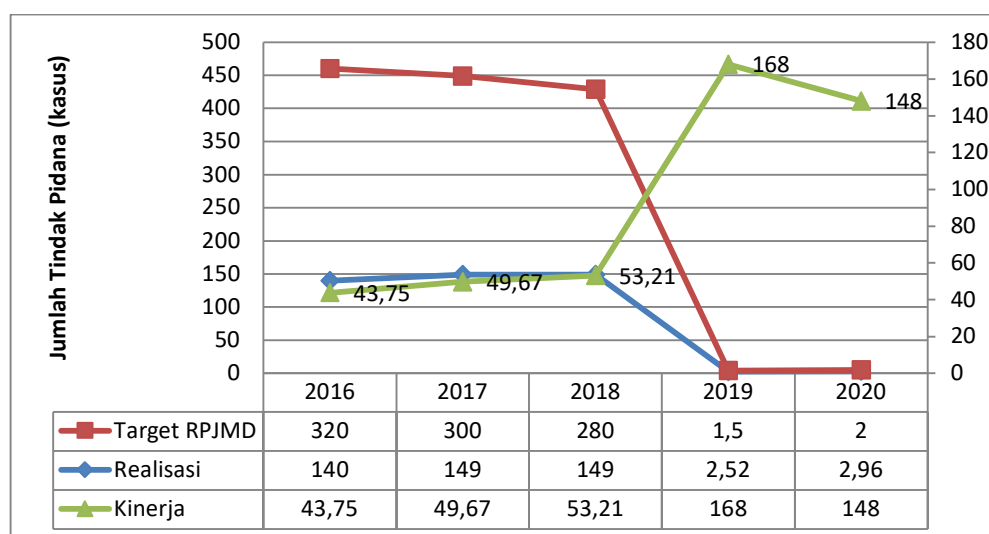
	- Seb. Sangalar - Pulau Kijang KEC.SUNGAI BATANG		- Perdagangan Buah Yg mengandung minyak - Pedagang Pinang
7	- Desa Pesangrahan	1 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit
8	KEC. KEMUNING - Desa Keritang - Desa Tuk Jimun - Desa Batu Ampar	10 PMDM	- Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) - Pertambangan Batu Bara - Perkebunan Kelapa Sawit - Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
9	- Desa, Selensen - Desa Sekara KEC. KUINDRA	1 PMDM	- Pengolahan Kelapa Sawit (PKS)
10	KEC. CONCONG - Desa Panglima Raja	2 PMDM	
11	KEC. GAUNG ANAK SERKA - Desa Pintasan	21 PMDM	- Industri pati Palm (Sagu basah) - Perkebunan Kelapa Sawit
	- Tl. Sungka - Kel. Sei. Empat - Desa Beringin - Lubuk kempas - Desa Idaman - Rambaian - Teluk Pantaian - Desa Harapan Makmur		
12	KEC. GAUNG - Desa Pungkat - Soren - Belantara	6 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS - Perkebunan Kelapa Sawit - Hutan Tanaman Industri (HTI) - Industri Pati Palma (Sagu) - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) - Hutan Tanaman Industri (HTI)
13	KEC. BATANG TUAKA	1 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit & PKS
14	KEC. KERITANG - Desa Sencalang - Desa Pengalihan	2 PMDM	- Pabrik Kelapa Sawit (PKS) - Hotel melati
15	KEC. TEMPULING - Teluk Jira, Mumpa - Kel. Tempuling - Teluk Jira	3 PMDM	- Kelapa Sawit terpadu - Konstruksi - Pertambangan batu bara, Pasir
16	KEC. KEMPAS	2 PMA	

	- Desa Sungai Gantang	12 PMDM	- Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit terpadu - Industri Kelapa Terpadu - Pembangunan perumahan - Pengolahan Pinang - Kontruksi , Pelabuhan/Dermaga - Industri Kapal - Eceran BBM di SPBU - Tanki Timbun - Docking - Dermaga dan Pergudangan - Industri kimia dasar organik dari hasil pertanian - Hutan Tanaman Industri - Bacing Plant
	- Desa Pekan Tua		
	- Desa Bayas Jaya		
	- Desa Hrapan Jaya		
	- Kel. Harapan Tani.		
17	KEC. ENOK	1 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS
	Desa Bagan Jaya		
18	KEC. TEMBILAHAN HULU	7 PMDM	- Industri Mortar / Beton siap pakai - Pertambangan Pasir - Pertambangan batu bara - Perkebunan Kelapa Sawit - Telekomunikasi - Sntral Telekomunikasi - Laboratorium Farmasi dan Kesehatan
	- Kel. Tbh. Barat		
	- Desa pulau palas		
	- Kel. Tbh. Hulu		
19	KEC.TEMBILAHAN	13 PMDM	- Hotel Melati - Pertambangan batu bara, Pasir - Perhotelan - Penyediaan Tenaga Listrik
	- Kel. Tembilihan		
	- Kel. Tembilihan Hilir		
	- Tembilihan Kota		- SPBU - Industri mortal / Beton siap pakai - Hotel Melati - Klinik utama - Klinik swasta - Pembangunan Perumahan - Rumah Sakit swasta
	- Kel. Pekan Arbaa		
	INDRAGIRI HILIR		- Industri Mortar / Beton siap pakai

Sumber : <https://dpmptsp.inhilkab.go.id>

2.4.3.1 Jumlah Tindak Pidana

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator jumlah tindak pidana di Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan menurun dari 320 kasus pada tahun 2016 menjadi 280 kasus pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi indikator jumlah tindak pidana berfluktuatif menurun dan selalu dibawah target kecuali pada tahun 2019-2020. Capaian kinerja indikator jumlah tindak pidana berkisar antara 43,75% -168% yang terkategori rendah- Sangat Tinggi.



Gambar 2-152 Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

2.4.3.2 Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi

Kondisi daerah yang kondusif akan mendorong meningkatnya iklim investasi karena investor ingin modal yang telah ditanamkan dapat kembali lagi. Untuk itu diperlukan kepastian hukum dan supremasi hukum harus ditegakkan serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Kabupaten Indragiri Hilir maka disusun beberapa peraturan daerah yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Peraturan tersebut penting karena menjadi pedoman bagi aparatur maupun

masyarakat umum dalam menjalankan aktivitas usaha sehingga jelas mana yang boleh dan mana yang dilarang. Beberapa peraturan daerah tersebut antara lain sebagaimana Tabel 2.27

Tabel 2-27 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Yang Mendukung Iklim Usaha

NO	NOMOR PERDA	TENTANG
1	2 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Indragiri
2	4 Tahun 2013	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
3	7 Tahun 2013	Bangunan Gedung
4	1 Tahun 2014	Perubahan atas Perda Kab. Inhil Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5	2 Tahun 2014	Retribusi Pelayanan Pasar
6	3 Tahun 2014	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
7	8 Tahun 2014	Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
8	9 Tahun 2014	Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Puri Husada Tembilahan
9	1 Tahun 2015	Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah
10	5 Tahun 2015	Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya
11	9 Tahun 2015	Perubahan ke empat atas Perda Kab. Inhil Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
12	10 Tahun 2015	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada PT. Bank Riau Kepri
13	11 Tahun 2015	Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Indragiri
14	6 Tahun 2016	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
15	10 Tahun 2016	Pencabutan Perda Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan
16	11 Tahun 2016	Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat
17	6 Tahun 2017	Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
18	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	9 Tahun 2017	Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
20	1 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada PT. Bank Riau Kepri
21	2 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada PD. BPR Gemilang

NO	NOMOR PERDA	TENTANG
22	3 Tahun 2018	Tata Niaga Kelapa

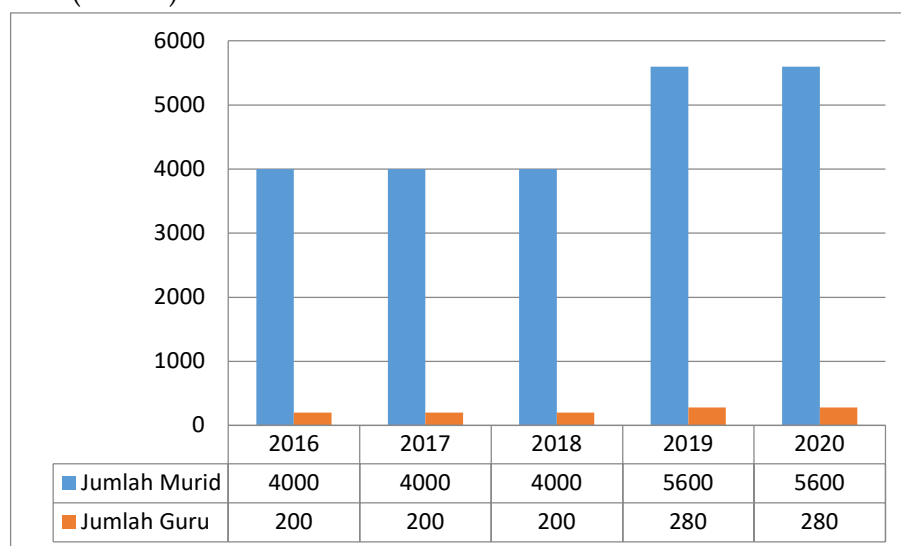
Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Indragiri Hilir (2018)

Guna percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir maka telah di-Perda-kan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya melalui Perda Nomor 5 Tahun 2015. Program ini memberikan kewenangan kepada desa sekaligus pendanaannya sehingga Pemerintahan Desa diharapkan dapat mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah desanya.

Program DMIJ bertujuan sebagai penggerak agar pembangunan/kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bercirikan daerah, artinya mengikuti khasanah Indragiri Hilir.

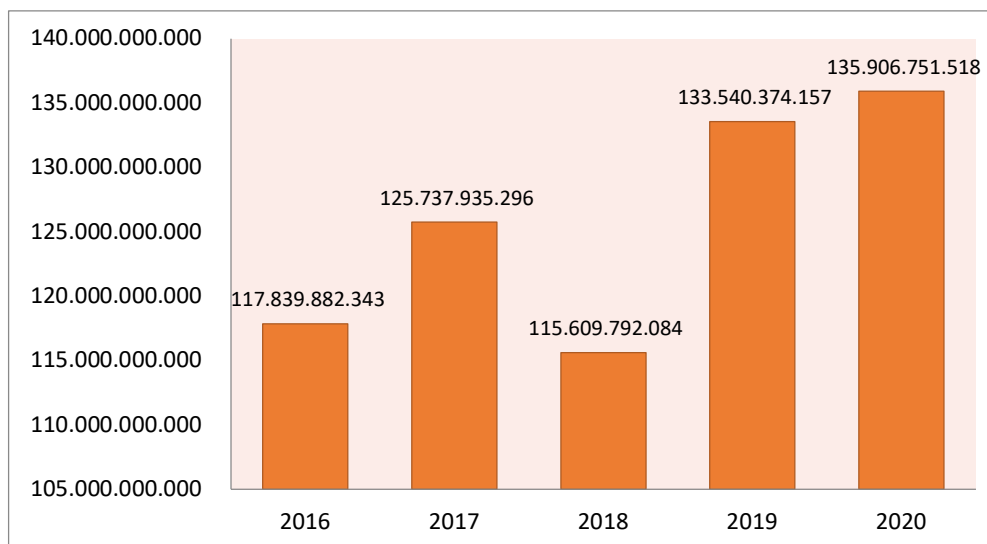
Program DMIJ dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pola Pendampingan. Pendamping Program DMIJ direkrut secara profesional terhadap pelaku-pelaku pemberdayaan masyarakat yang sudah berpengalaman dalam mendampingi masyarakat seperti Program PNPM Mandiri, RIS PNPM, PISEW, Program Pemberdayaan Desa, PAMSIMAS, anggota LSM penggerak dan pelaku Pemberdayaan, dan lain-lain

Program DMIJ tidak hanya membangun sarana infrastruktur, tapi juga memadukan arahan pembinaan yang kemudian diintegrasikan dengan program Posyandu maupun pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).



Gambar 2-153 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Magrib Mengaji melalui Program DMIJ 2016-2020

Sumber : <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

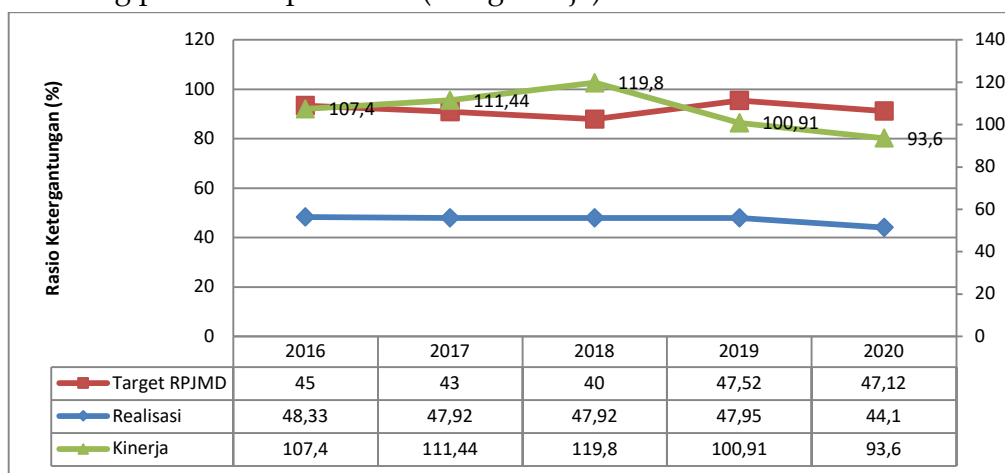


Gambar 2-154 Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan melalui Program DMIJ 2016-2020

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir (2020)

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Analisis kinerja sumberdaya manusia dilakukan menggunakan indikator rasio ketergantungan (defendency ratio). Perhitungan rasio ketergantungan diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 - 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun (angkatan kerja). Angka ketegantungan ini menunjukkan berapa banyak beban penduduk usia non produktif (bukan tenaga kerja) yang harus ditanggung oleh seorang penduduk produktif (tenaga kerja).



Gambar 2-155 Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id>

Hasil Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan capaian kinerja (target kinerja dan realisasi kinerja) penyelenggaraan urusan pemerintah selama periode 2016-2020 dirangkum dalam Tabel 2.28 berikut

Tabel 2- 28 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
I	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)	42.243	45.158	48.158	45.676,05	48.188,23	39.698	41.491	42.989	44.776	44.928	<
1.1.2.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	6,7	6,9	7	5	5,5	4,68	4,52	3,61	4,16	0,34	<
1.1.3.	Inflasi (%)	7	7	7	3,8	3,7	2,58	4,27	2,64	2,4	3,3	>
1.1.4.	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun)	58,14	61,05	61,1	60,73	62,02	55,76	57,64	58,78	60,46	68,6	>
1.1.5.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	46,33	45,84	44,08	53,69	53,36	56,82	55,4	51,42	48,29	44,29	>
1.1.6.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5	6,3	6,03	7,5	7,4	7,99	7,7	7,05	6,54	5,93	>
1.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	65,5	66,5	67,5	66,53	67,53	65,35	66,17	66,51	66,84	66,54	<
1.2.2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12	12,5	13	12,05	12,76	11,58	11,88	11,89	11,9	11,91	<
1.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8	8,5	9	7,25	7,26	6,94	7,18	7,19	7,22	7,23	<
1.2.4.	APK SD/MI (%)	111	113	115	100,97	102,47	110	101,73	104,31	105,85	105,93	>
1.2.5.	APK SMP/MTs (%)	101	103	105	101,03	101,28	95,69	100,85	98,33	99,3	102,01	<
1.2.6.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69	69,5	70	67,09	68	66,95	67,07	67,32	67,66	67,85	<

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.7.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1,1	1	1	1	0,9	1,3	1,2	1,1	0,02	0,03	>
1.2.8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	4	3	3,43	3,14	5,62	4,08	3,96	4,55	4,35	<
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga											
1.3.1.	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	60	70	80	52	54	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	<
1.3.2.	Jumlah Lapangan Olahraga (Lapangan)	970	990	1.000,00	985	990	961	970	979	985	985	<
II	Aspek Pelayanan Umum											
2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar											
2.1.1.	Pendidikan											
2.1.1.1.	APM SD/MI (%)	98	98,2	98,3	87	90	96,2	94,62	94,92	95,34	95,52	>
2.1.1.2.	APM SMP/MTs (%)	67	68	69	76	77	80,19	79,96	82,39	81,26	82,06	>
2.1.1.3.	APS 7 - 12 Tahun (%)	99,1	99,2	99,3	98	99	98,43	97,56	97,26	99,08	99,75	=
2.1.1.4.	APS 13 - 15 tahun (%)	92	93	94	92	93	91,87	90,77	91,29	91,7	92,13	=
2.1.1.5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,3	0,2	0,1	0,04	0,03	0,2	0,05	0,05	0,05	0,01	>
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,3	0,2	0,1	0,06	0,05	0,43	0,07	0,07	0,07	1,83	>
2.1.1.7.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 7 - 12 Tahun (%)	84	85,5	86	74	76	75,79	72,32	72,32	73,02	74,91	<
2.1.1.8.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 13 - 15 Tahun (%)	72	73	74	67	70	73,36	68,55	64,05	65	63,89	=

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.1.9.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SD/MI (Guru Per 10.000 Murid)	650	600	550	710	730	746,79	721,78	697,61	781,64	833,33	>
2.1.1.10.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SMP/MTs (Guru Per 10.000 Murid)	950	900	800	1007	1008	991,09	1.005,19	1.005,19	985,75	714,29	<
2.1.1.11.	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV (%)	42	48	56	88	92	66,19	80,82	84,61	86,53	71,82	<
2.1.2.	Kesehatan											
2.1.2.1.	Rasio Rumah Sakit (Per 1.000 Penduduk)	0,008	0,009	0,01	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,004	0,004	<
2.1.2.2.	Rasio Puskesmas (Per 1.000 Penduduk)	0,0392	0,0392	0,043	0,038	0,039	0,038	0,037	0,037	0,038	0,041	=
2.1.2.3.	Rasio Dokter Spesialis (Per 1.000 Penduduk)	0,05	0,075	0,106	0,04	0,042	0,029	0,037	0,037	0,032	0,032	<
2.1.2.4.	Rasio Dokter Umum (Per 1.000 Penduduk)	0,177	0,23	0,3	0,11	0,2	0,108	0,108	0,108	0,054	0,064	<
2.1.2.5.	Rasio Dokter Gigi (Per 1.000 Penduduk)	0,08	0,09	0,1	0,006	0,01	0,0035	0,0039	0,0039	0,026	0,032	>
2.1.2.6.	Rasio Perawat (Per 1.000 Penduduk)	0,8	0,9	1	0,8	0,82	0,442	0,789	0,789	0,499	0,957	>
2.1.2.7.	Rasio Bidan (Per 1.000 Penduduk)	0,45	0,55	0,65	0,61	0,062	0,369	0,595	0,595	0,881	0,568	>
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
2.1.3.1.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik (%)	25	26	27	17	20	14,59	13,44	11,89	4,52	4,23	<
2.1.3.2.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap (%)	68	70	75	66,23	69,73	58,86	53,19	56,64	57,84	54,13	<

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.3.3.	Proporsi Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	25	26	27	40	45	61,96	35,96	35,96	35,96	58,32	>
2.1.3.4.	Proporsi Irigasi Dalam kondisi Baik (%)	25	30	40	30	32	26	27	28	28	30	<
2.1.3.5.	Ratio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB (%)	74	75	76	77	78	73,22	75	76	77	77	=
2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Pemukiman											
2.1.4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	60	80	98,33	20	22	16,03	18,77	18,77	20,05	20,05	<
2.1.4.2.	Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,6	0,5	0,4	0,45	0,4	0,75	0,5	0,5	0,45	0,45	=
2.1.4.3.	Persentase luasan pemukiman kumuh diperkotaan (%)	26	24	20	20	18	25	25	25	22	22	=
2.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
2.1.5.1.	Rasio Rumah Ber IMB (%)	3	4	5	3	4	0,68	1,22	2,14	2,3	2,5	<
2.1.5.2.	Rasio Personil Satpol PP (Per 10.000 Penduduk)	0,05	0,06	0,07	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,04	0,04	>
2.1.5.3.	Cakupan Penegakan Peraturan (%)	91	94	100	96	97	86	90,5	95	96	96	<
2.1.5.4.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	75	90	100	30	50	20	10	10	10	10	<
2.1.6.	Sosial											
2.1.6.1.	Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia	70	90	100	92	94	69,54	90	90	90	72,7	<

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
	Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial (%)											
2.1.6.2.	PMKS penerima bantuan sosial (%)	60	80	100	85	90	59,9	80	80	82,5	100	=
2.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
2.2.1.	Tenaga Kerja											
2.2.1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64	64,2	64,5	63	64	63,06	62,27	62,27	64,66	63,08	=
2.2.1.2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	35	40	45	83	84	56,37	82,74	82,74	99	3,89	<
2.2.1.3.	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	100	100	100	78	81	87,5	75	75	26,54	0	<
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (%)	83	84	85	82,69	82,99	81,11	81,69	82,37	82,57	82,34	=
2.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	60	61	62	63,1	63,9	59,27	59,43	59,59	64,83	64,45	=
2.2.2.3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	86	88	90	92	93	84,14	88,14	90,98	91,45	96,56	>
2.2.3.	Pangan											
2.2.3.1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	95	100	100	100	100	92,83	100	100	109	103,9	>
2.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	85	88	90	88,6	95,5	84,5	88	88	88,5	88,9	=
2.2.4.	Pertanahan											

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	44	45	46	43	44	41,39	41,39	41,39	41,39	41,38	<
2.2.5.	Lingkungan Hidup											
2.2.5.1.	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	90	95	100	96	97	85	95	95	95	95	<
2.2.5.2.	Persentase Penanganan Sampah (%)	90	95	100	82	83	81,64	81,5	81,7	70,15	81,49	<
2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2.2.6.1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	90	95	100	86	88	151	183	218	212	226	>
2.2.6.2.	Kepemilikan KTP (%)	100	100	100	65	80	79	85	89	98	99	>
2.2.6.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	650	800	1.000,00	700	750	437	469	510	542	556	<
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2.2.7.1.	Cakupan Program Desa Maju Inhil Jaya (Desa)	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	=
2.2.7.2.	Jumlah Desa Maju (Desa)	120	180	197	2	2	2	2	2	2	11	>
2.2.7.3.	PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.2.7.4.	Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100	89,82	100	100	100	100	=
2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
2.2.8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69	69,22	69,57	72	74	70,2	88,67	65,86	60,26	64,1	<
2.2.8.2.	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	95	96	100	75	77	83,96	92,65	89,25	92,93	77,82	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.8.3.	Ratio PPKBD Satu Setiap Desa/Kelurahan (%)	80	90	100	100	100	98,63	100	100	100	100	=
2.2.9.	Perhubungan											
2.2.9.1.	Tersedianya Angkutan Umum Yang melayani Trayek Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten (%)	73	74	75	75	77	61,5	73	73	73,2	77,78	=
2.2.9.2.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota (%)	70	75	80	80	85	53,6	70	75	72,4	83,31	<
2.2.9.3.	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)	100	100	100	87	90	90	80	85	85,5	87,4	<
2.2.10	Komunikasi dan Informatika											
2.2.10.1	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.2.10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	80	90	100	100	100	75	100	100	100	35	=
2.2.11.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah											

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.11.1.	Koperasi Aktif (%)	55	60	70	67	68	49,41	66,05	66,05	66,2	67	<
2.2.11.2.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	99	99,5	99,5	68	69	82,45	67	67	67,15	72	>
2.2.12.	Penanaman Modal											
2.2.11.1.	Realisasi PMDN (Rp Milyar)	18.000	19.000	20.000	9,921	11112	345	1.184	5.116	385,23	448,6	<
2.2.11.2.	Realisasi PMA (USD Juta)	72	73	74	96	108	20,3	0,4	329,71	1,92	274,38	<
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga											
2.2.13.1.	Jumlah Prestasi olahraga (Kejuaraan)	0	0	0	5	6	0	0	4	0	0	<
2.2.14	Statistik											
2.2.14.1.	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka" (Judul)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	=
2.2.14.1.	Kecamatan Dalam Angka (Judul)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	=
2.2.15	Persandian											
2.2.16	Kebudayaan											
2.2.16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	5	5	5	5	5	5	5	5	4	0	=
2.2.16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	=
2.2.17.	Perpustakaan											
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	9.000	10.000	11.000	5.672,00	6.372,00	4.318	4.972	4.972	5.210	7.866	<
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (Buku)	25.000	30.000	40.000	23.012,00	23.162,00	22.736	22.862	22.862	23.000	54.884	=

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.18.	Kearsipan											
2.2.18.1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	45	60	80	40	50	30,4	30,4	30,4	31,5	50,7	<
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	3	3	3	4	5	20	20	20	0	25	>
2.3.	Layanan Pilihan											
2.3.1.	Pariwisata											
2.3.1.	Kunjungan Wisatawan (Orang)	3.000	3.300	3.500	3400	4000	56.035	75.611	90.142	91137	22047	>
2.3.2.	Pertanian											
2.3.2.1.	Produktivitas Padi (Ton GKG/Hektar)	3,95	4	4,21	4,1	4,15	3,99	3,98	4,02	3,89	3,94	<
2.3.2.2.	Produksi beras (Ton)	84.071	85.326	87.208	59115,42	61815,42	56.415	56.415	56.415	57.000	49.008,10	<
2.3.2.3.	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar)	0,95	1	1,05	1,21	1,23	1,217	1,115	1,17	1,213	1,217	>
2.3.2.4.	Produktivitas kelapa sawit (Ton CPO/Hektar)	3,3	3,4	3,5	2,6	2,7	2,539	2,537	2,537	2,544	2,515	<
2.3.2.5.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	46	45,5	45	45,53	45,08	48,09	48,02	44,78	44,68	46,78	<
2.3.3.	Perdagangan											
2.3.3.1.	Nilai Ekspor bersih Perdagangan (USD Juta)	320,93	330,93	340,93	210	240	184,88	332,1	629,2	301,51	409,15	>
2.3.3.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	13,9	14	15	14,1	14,2	13,94	13,98	14,02	17,55	16,14	=

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.4.	Perindustrian											
2.3.4.1.	Nilai produksi usaha menengah kecil (Rp Juta)	57.000	58.500	59.500	59335,22	599960,2	57.462	58.083	58.710	58.710,00	49.730	<
2.3.4.2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	29	30	31	28,41	28,48	28,2	28,3	28,3	23,6	24,1	<
2.3.5.	Transmigrasi											
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan											
2.3.6.1.	Produksi Perikanan (Ton)	59.000	61.000	63.000	58.080,60	59.080,60	55961,4	57081,6	62910,1	56376	57104,9	<
2.3.6.2.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	37	37,5	38	40,27	41,87	38,8	38,7	39,6	39,3	39,7	<
2.4.	Urusan Penunjang											
2.4.1.	Perencanaan Pembangunan											
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	=
2.4.1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.1.3.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2.	Keuangan											
2.4.2.1.	Opini BPK (Opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.4.3.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Latihan											
2.4.3.1.	Pembinaan PNS melalui Pemberian Hukuman Disiplin (Persen))	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.4.	Penelitian dan Pengembangan											
2.4.4.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	85	90	100	75	85	65	65	65	65	65	<
2.4.5.	Pengawasan											
2.4.5.1.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	55	70	44,69	47,21	47,21	47,3	70,96	<
2.4.6.	Sekretariat Dewan											
2.4.6.1.	Rasio Pembahasan Prolegda	100	100	100	87	90	98,31	85,48	85,48	85,48	100	<
III.	Aspek Daya Saing											
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
3.1.1.	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	9.950,00	10.000,00	10.021,00	11.223,66	11.448	9.911,00	10.041,00	10.254,00	11.987	12.724	>
3.1.2.	Nilai Tukar Petani (%)	103	105	106	105	110	98,68	102,97	101,53	101,08	130,34	=
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
3.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	72	73	74,33	55	60	60,54	51,07	51,07	51,5	51,5	<
3.3.	Fokus Iklim Investasi											
3.3.1.	Jumlah Tindak Pidana (Kasus)	320	300	280	1,5	2	140	149	149	2,52	2,96	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
3.4.	Fokus Sumberdaya Manusia											
3.4.1.	Rasio Ketergantungan (%)	45	43	40	47,52	47,12	48,33	47,92	47,92	47,95	44,1	<

BAB

3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Awal tahun 2020 seluruh negara mulai dilanda Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tersebut tidak hanya memunculkan masalah dibidang kesehatan saja, namun juga memberikan tekanan pada struktur ekonomi secara *massive* keseluruh negara. Di Indonesia COVID-19 mampu mengacak-acak struktur ekonomi nasional.

Hal ini mengharuskan pemerintah mengoreksi berbagai target ekonomi ditahun 2020. Beberapa skenario berat diputuskan dimana target pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi 2,3 persen. Padahal pada asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pertumbuhan ekonomi sebelumnya ditarget 5,3 persen. Bahkan realisasi perekonomian nasional tahun 2020 lebih buruk ketimbang skenario berat ekonomi nasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan data ekonomi yang telah rilis, ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Semua sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali sektor pertanian yang tumbuh positif 1,75%. Selain itu dari sisi pengeluaran, semua sektor mengalami kontraksi hanya sektor konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 1,94%.

Berbagai tekanan terhadap perekonomian nasional kemudian berdampak pula pada keuangan daerah (APBD) maupun perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya. Untuk mengatasi pandemi COVID-19 tersebut, berbagai pengeluaran pemerintah pusat dan daerah mulai di *refocusing* untuk penanganan dan pemulihan COVID-19. Disisi lain target-target penerimaan baik pusat maupun daerah banyak dikoreksi akibat lesunya perekonomian global hingga lokal. Penyaluran dana transfer dari pusat ke kabupaten/kota dilingkupi ketidakpastian dengan kecenderungan menurun. Ditambah lesunya perekonomian daerah yang membuat potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus dan wajib dioptimalkan. Berbagai ketidakpastian kondisi ekonomi ini diprediksi masih akan berlangsung dalam beberapa tahun kedepan. Untuk itu agar tercipta pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang realistis dan efektif, perlu dilakukan re-kalkulasi kondisi keuangan daerah sebagai dasar mengukur kemampuan pembiayaan pembangunan daerah hingga tahun 2023.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dari penerimaan dan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja (kapasitas) keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Indragiri Hilir, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016-2020. Secara berturut-turut pada sub-bagian ini akan dijelaskan tentang kinerja keuangan Kabupaten Indragiri Hilir, mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat

Sumber: Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2020) mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 DOFD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 8,37%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7,65% dan terakhir tahun 2020 meningkat menjadi 9,12%. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Indragiri Hilir yang sebesar 8,38% masih masuk kategori Sangat kurang karena nilai DOF nya antara 0,00% - 10,00%. Untuk itu agar bisa mencapai kategori yang lebih baik, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif sehingga penerimaannya tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2018-2020, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2018	157.482.353.687,31	1.880.754.742.543,55	8,37%
2019	153.746.222.014,66	2.009.010.470.891,34	7,65%
2020	180.959.693.824,89	1.984.583.102.693,70	9,12%
Rata-Rata	164.062.756.508,95	1.958.116.105.376,20	8,38%

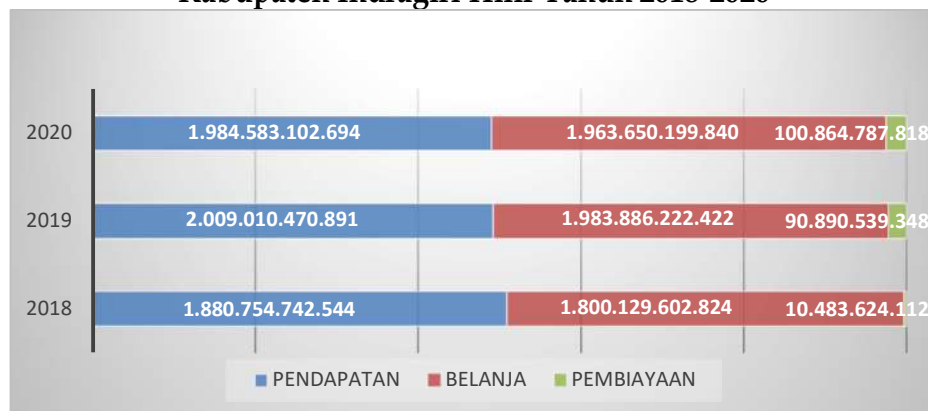
Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2021 (diolah)

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1.
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2021

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami tren relatif naik dimana pendapatan daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.880.754.742.543,55 menjadi Rp. 1.984.583.102.693,70 pada tahun 2020. Selanjutnya akan diuraikan perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2018-2020) mengalami peningkatan dari pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.880.754.742.543,55 menjadi Rp. 1.984.583.102.693,70 pada tahun 2020 (rata-rata peningkatan sebesar 1,94 % per tahun).

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah pada periode 2018-2020 sebesar 2,72% per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,20%, diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar 6,32%, sedangkan Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan sebesar 1,22%.

Walaupun dari sisi pertumbuhan, komponen PAD memperlihatkan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah daripada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Perimbangan, namun dilihat dari proporsinya, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 3.3.
Realiasi Pendapatan 2018-2020 dan
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

NO.	URAIAN	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	157.482.353.687,31	153.746.222.014,66	180.959.693.824,89	7,20%
1	Pendapatan Pajak Daerah	32.646.297.230,50	35.514.403.295,00	55.499.238.207,00	30,38%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.852.851.497,10	6.437.046.218,00	2.991.279.434,00	-33,93%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.564.290.785,00	10.363.055.176,00	9.949.705.156,00	-14,35%
4	Lain-lain PAD yang Sah	104.418.914.174,71	101.431.717.325,66	112.519.471.027,89	3,81%
B	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	1.363.810.136.635,00	1.482.961.894.630,00	1.397.259.408.747,00	1,22%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi hasil Bukan Pajak	224.148.416.514,00	216.849.359.808,00	251.474.372.813,00	5,92%
2	Dana Alokasi Umum	918.602.922.000,00	991.610.493.000,00	884.826.668.000,00	-1,86%
3	Dana Alokasi Khusus	221.058.798.121,00	274.502.041.822,00	260.958.367.934,00	8,65%
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	359.462.252.221,24	372.302.354.246,68	406.364.000.121,81	6,32%
1	Pendapatan Hibah	71.022.109.054,00	83.235.250.436,00	95.782.968.757,00	16,13%
2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	96.153.418.118,78	97.940.042.810,68	86.455.414.691,81	-5,18%
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	146.426.521.200,00	179.087.144.000,00	201.787.887.000,00	17,39%
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	45.860.203.848,46	12.039.917.000,00	22.337.729.673,00	-30,21%
6	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN		1.880.754.742.543,55	2.009.010.470.891,34	1.984.583.102.693,70	2,72%

Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020, diolah

Tabel 3.4.
Proporsi Sumber Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun Anggaran 2018-2020

NO.	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,37%	7,65%	9,12%
1	Pendapatan Pajak Daerah	1,74%	1,77%	2,80%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,36%	0,32%	0,15%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,72%	0,52%	0,50%
4	Lain-lain PAD yang Sah	5,55%	5,05%	5,67%
B.	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	72,51%	73,82%	70,41%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi hasil Bukan Pajak	11,92%	10,79%	12,67%
2	Dana Alokasi Umum	48,84%	49,36%	44,59%
3	Dana Alokasi Khusus	11,75%	13,66%	13,15%
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19,11%	18,53%	20,48%
1	Pendapatan Hibah	3,78%	4,14%	4,83%
2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	5,11%	4,88%	4,36%
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,79%	8,91%	10,17%
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,44%	0,60%	1,13%
6	Dana Insentif Daerah	0,00%	0,00%	0,00%
PERSENTASE PENDAPATAN		100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020, diolah

Selama periode 2018-2020, sumber-sumber Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir terbesar masih dari Dana Perimbangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4 dengan tren berfluktuasi cenderung menurun dengan besaran antara 72,51% - 73,82% pada tahun 2018-2019 dan pada tahun 2020 sebesar 70,41% dari total pendapatan. Kontribusi terbesar dari komponen dana perimbangan adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tren berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dengan besaran kontribusi berkisar antara 48,84%-49,36%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan pada nilai 44,59%. Diposisi kedua bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan tren kontribusi meningkat dengan besaran berkisar antara 18,53% - 20,48% dari total pendapatan.

Di posisi ketiga adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tren kontribusi meningkat dengan kisaran besaran kontribusi antara 7,65%-9,12%.

Lebih lanjut, kinerja Pendapatan Daerah dalam RPJMD 2018-2023 dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya. Selaras dengan penerapan otonomi daerah, Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami peningkatan dari Rp 1.880.754.742.543,55 pada tahun 2018 menjadi Rp 1.984.583.102.693,70 pada tahun 2020. Walaupun pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan namun penambahan alokasi pendapatan tersebut sudah memiliki peruntukan kegiatan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Lebih detail tentang perkembangan Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2020 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Target Pendapatan RPJMD (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2018	1.904.514.228.670,66	1.880.754.742.543,55	98,75%	-23.759.486.127,11	-1,25%
2019	2.137.942.076.167,04	2.009.010.470.891,34	93,97%	-128.931.605.275,70	-6,03%
2020	2.202.472.472.283,64	1.984.556.950.189,23	90,11%	-217.915.522.094,41	-9,89%
Jumlah	6.244.928.777.121,34	5.874.322.163.624,12	94,07%	-370.606.613.497,22	-5,93%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020, diolah

Dari Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa selama periode Tahun Anggaran 2018-2020, secara kumulatif Target Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada RPJMD 2018-2024 sebesar Rp6.244.928.777.121,34 dengan realisasi Rp 5.874.322.163.624,12 yang berarti realisasi lebih rendah dari Anggaran 94,07% atau berkurang 5,93%.

Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pada tahun anggaran tersebut kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menghimpun pendapatan daerah masih belum tercapai secara maksimal.

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih lebih kecil. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut dari proporsi realisasi komponen pendapatan, kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara persisten menunjukkan peningkatan. Semakin meningkatnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah menuju kemandirian pembiayaan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah semakin membaik.

Selama Tahun Anggaran 2018-2020, secara kumulatif realisasi PAD masih lebih rendah dari proyeksi pendapatan pada RPJMD 2018-2023, dengan realisasi 91,18% atau berkurang sebesar 8,82%. Tabel 3.6 menyajikan tentang perkembangan Target dan realisasi PAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Target PAD RPJMD (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2018	169.844.881.097,36	157.482.353.687,31	92,72%	- 12.362.527.410,05	-7,28%
2019	180.103.946.097,36	153.746.222.014,66	85,37%	- 26.357.724.082,70	-14,63%
2020	189.843.215.183,80	180.933.541.320,42	95,31%	- 8.909.673.863,38	-4,69%
Jumlah	539.792.042.378,52	492.162.117.022,39	91,18%	- 47.629.925.356,13	-8,82%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020, diolah

Komponen PAD terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari empat komponen PAD tersebut Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD diikuti oleh komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan. Realisasi belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2018-2020 ditunjukkan pada Tabel 3.15.

Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa selama periode 2018-2020, rata-rata pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan sebesar 4,44% per tahun dari Rp.1.800.129.602.824,10 di tahun 2018 naik menjadi Rp. 1.963.650.199.840,08 di tahun 2020.

Belanja tidak langsung mengalami tren peningkatan sebesar 3,14% pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 1.002.284.933.865,30 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.066.217.306.602,02 pada tahun 2020. Jika dilihat lebih rinci, pada belanja tidak langsung pos belanja belanja tak terduga, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial mengalami tren peningkatan signifikan. Belanja tak terduga mengalami peningkatan sebesar 1.414,77% dengan belanja Rp. 95.669.000,00 pada tahun 2018 menjadi

Rp.21.951.642.673,00 di tahun 2020. Belanja subsidi juga mengalami peningkatan sebesar 41,42% di susul dengan Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan 35,94% per tahun dari Rp. 441.000.000,00 di tahun 2018 menjadi Rp. 815.000.000,00 di tahun 2020. Belanja Hibah mempunyai trend menurun namun berfluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar -21,99 %. Peningkatan belanja tak terduga di tahun 2020 tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan belanja penanganan COVID-19 di tahun 2020 yang masuk dalam pos belanja tak terduga. Adapun pada Belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 6,06% per tahun dari Rp.797.844.668.958,80 pada tahun 2018 menjadi Rp. 897.432.893.238,06 pada tahun 2020.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2018 - 2020

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	1.002.284.933.865,30	1.096.564.843.508,35	1.066.217.306.602,02	3,14%
1	Belanja Pegawai	714.148.949.682,00	745.750.258.970,00	716.983.950.074,00	0,20%
2	Belanja Bunga	-	-	-	0,00%
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	41,42%
4	Belanja Hibah	24.107.410.199,00	44.716.210.275,55	14.671.889.662,00	-21,99%
5	Belanja Bantuan Sosial	441.000.000,00	807.320.000,00	815.000.000,00	35,94%
6	Belanja Bagi Hasil	4.136.894.984,30	6.412.277.609,30	4.905.377.893,02	8,89%
7	Belanja Bantuan Keuangan	257.355.010.000,00	296.878.776.653,50	302.889.446.300,00	8,49%
8	Belanja Tidak Terduga	95.669.000,00	-	21.951.642.673,00	1414,77%
B	Belanja Langsung	797.844.668.958,80	887.321.378.913,59	897.432.893.238,06	6,06%
1	Belanja Pegawai	59.580.169.830,00	59.929.794.545,00	55.677.251.492,00	-3,33%
2	Belanja Barang dan Jasa	524.604.212.403,06	569.823.115.547,84	577.235.363.756,43	4,90%
3	Belanja Modal	213.660.286.725,74	257.568.468.820,75	264.520.277.989,63	11,27%
	Jumlah Belanja	1.800.129.602.824,10	1.983.886.222.421,94	1.963.650.199.840,08	4,44%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020, diolah

Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa pada masa yang akan datang pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir lebih diarahkan pada upaya meningkatkan pembangunan melalui peningkatan belanja langsung. Proporsi belanja langsung terhadap total belanja dalam kurun waktu 2018-2020 sebesar 55,07%, sedangkan komponen belanja tidak langsung sebesar 44,93%.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2018 – 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp 5.058.624.112,08 dan mengalami tren penurunan menjadi Rp 97.164.787.817,71 pada tahun 2020 yang terbesar bersumber dari Silpa. Disisi lain pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih kecil dari penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah hanya bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2018 pengeluaran pembiayaan daerah yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 5.425.000.000,00 turun menjadi Rp 3.700.000.000,00 pada tahun 2020.

Tabel 3.8.
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2020

No.	Uraian	2018	2019	2020
A.	Penerimaan Pembiayaan	5.058.624.112,08	80.465.539.348,31	97.164.787.817,71
1	Penggunaan SilPA	3.058.624.112,08	80.465.539.348,31	95.164.787.817,71
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
B.	Penerimaan Kembali Piutang TGR	-	-	-
1	Pengeluaran Pembiayaan	5.425.000.000,00	10.425.000.000,00	3.700.000.000,00
2	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.425.000.000,00	10.425.000.000,00	3.700.000.000,00
4	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-
5	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
	PEMBIAYAAN	10.483.624.112,08	90.890.539.348,31	100.864.787.817,71

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020, diolah

3.1.2 Neraca Daerah

Sehubungan dengan Neraca Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana per tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara *agregat* nilai aset Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2018-2020 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata mencapai 0,88% per tahun. Tercatat Jumlah aset Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 senilai Rp. 3.886.004.688.630,83 terus meningkat yang akhirnya pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 3.954.995.935.887,92.

Jika dilihat lebih rinci, Aset lancar nilainya dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan dengan rata-rata sebesar -15,81% per tahun. Pada tahun 2018 nilainya sebesar Rp. 189.040.248.941,62, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 133.982.299.342,64. Adapun aset lainnya juga mengalami penurunan rata-rata -7,76% per tahun. Namun, jumlah investasi jangka panjang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,64% dari Rp. 117.383.923.678,90 pada tahun 2018 menjadi Rp. 128.522.497.246,91 pada tahun 2020.

Demikian juga dengan aset tetap juga mengalami pertumbuhan rata-rata 1,77% dari Rp. 3.497.066.644.670,08 pada tahun 2018 menjadi Rp.3.622.281.844.090,30 pada tahun 2020.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Indragiri Hilir hanya berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut relatif terus menurun dari Rp.61.833.993.169,34 ditahun 2018 dan pada tahun 2020 menjadi Rp.25.240.571.572,07. Adapun struktur kewajiban jangka pendek yang terbesar ialah utang jangka pendek lainnya.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas dana Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,17%. Pada tahun 2018 sebesar Rp.3.824.170.695.461,49 menjadi Rp. 3.914.243.740.482,53 pada tahun 2020. Melihat nilai ekuitas dana dalam Neraca Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam keadaan bagus. Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada Tabel 3.9. berikut ini :

Tabel 3.9.
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun Anggaran 2018-2020 Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
ASET	3.886.004.688.630,83	3.919.158.883.535,03	3.954.995.935.887,92	0,88%
ASET LANCAR	189.040.248.941,62	215.658.026.416,73	133.982.299.342,64	-15,81%
Kas di Kas Daerah	77.778.262.547,25	83.292.351.032,09	101.466.587.992,46	14,22%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	4.694.200,00	100,00%
Kas di Bendahara Pengeluaran	421.025.742,00	626.080.741,00	30.909.362,00	-72,90%
Kas di BLUD	1.431.035.093,67	9.997.966.247,22	10.858.898.865,73	175,47%
Kas Bendahara Kapitasi JKN FKTP	0,00	780.050,82	12.154.193,29	100,00%
Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	3.809.201.471,60	1.889.339.866,00	100,00%
Setara Kas Lainnya	1.635.205.346,00	0,00	0,00	-100,00%
Setara Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.179.414.872,76	181.510.886,37	100,00%
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Pajak	81.001.087.925,00	92.029.514.749,00	125.816.374.127,00	24,63%
Penyisihan Piutang Pajak	- 39.739.741.189,69	- 48.374.168.754,16	0,00	-100,00%
Piutang Pajak Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Retribusi	11.529.125.884,20	11.595.218.952,20	11.595.218.952,20	0,29%
Penyisihan Piutang Retribusi	- 11.517.872.984,20	- 11.595.218.952,20	0,00	-100,00%
Piutang Retribusi Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	178.063,50	178.063,50	100,00%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	16.425.814.580,00	22.655.076.978,62	17.214.692.630,18	2,37%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	- 82.149.402,90	- 5.224.774.696,63	0,00	-100,00%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	1.516.317.294,22	0,00	6.345.129.652,19	104,56%
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	54.016.970,00	100,00%
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	- 7.581.586,47	0,00	- 98.342.393.136,68	11289,12%
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Pendapatan Lainnya	54.016.970,00	54.016.970,00	54.016.970,00	0,00%
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	- 48.391.970,00	- 50.891.970,00	- 98.342.393.136,68	4408,00%
Piutang Pendapatan Lainnya Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00%
Uang Muka	22.484.364,60	-		-100,00%
Beban Dibayar diMuka	170.050.591,67	200.636.665,67	51.208.333,03	-45,12%
Persediaan	48.451.559.736,27	54.462.643.995,24	55.092.154.552,05	6,63%
INVESTASI JANGKA PANJANG	117.383.923.678,90	127.869.257.818,85	128.522.497.246,91	4,64%
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investasi Dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investasi Non Permanen Lainnya	12.441.659.208,00	12.450.103.025,00	10.440.117.379,00	-8,40%
Penyisihan Investasi Non Permanen	- 6.979.529.630,36	- 6.979.529.630,36	- 7.814.778.340,00	5,81%
Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	111.921.794.101,26	122.398.684.424,21	125.897.158.207,91	6,06%
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASET TETAP	3.497.066.644.670,08	3.504.168.793.435,39	3.622.281.844.090,30	1,77%
Tanah	633.754.236.466,00	592.836.678.902,96	584.880.384.052,96	-3,93%
Peralatan dan Mesin	589.975.486.948,25	675.653.553.926,53	788.590.872.683,97	15,61%
Gedung dan Bangunan	1.225.143.497.776,85	1.314.309.760.460,04	1.372.340.548.933,15	5,84%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.320.778.013.820,54	2.417.977.676.223,52	2.487.134.846.066,06	3,52%
Aset Tetap Lainnya	18.183.947.952,08	13.217.303.958,79	126.447.376.981,51	163,70%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	553.456.535.026,50	546.862.046.521,36	577.030.073.511,05	2,11%
Akumulasi Penyusutan	- 1.844.225.073.320,14	- 2.056.688.226.557,81	- 2.314.142.258.138,40	12,02%
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASET LAINNYA	82.513.871.340,23	71.462.805.864,06	70.209.295.208,07	-7,76%
Tagihan Penjualan Angsuran	1.446.050.000,00	1.446.050.000,00	1.106.950.000,00	-12,51%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	1.446.050.000,00	1.446.050.000,00	1.106.950.000,00	-12,51%
Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tuntutan Perbendaharaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tuntutan Ganti Rugi	1.946.038.990,10	1.840.323.944,02	1.720.121.018,02	-5,98%
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tuntutan Ganti Rugi Netto	1.946.038.990,10	1.840.323.944,02	1.720.121.018,02	-5,98%
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	13.820.017.056,00	13.820.017.056,00	14.006.135.056,00	0,67%
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Netto	13.820.017.056,00	13.820.017.056,00	14.006.135.056,00	0,67%
Aset Tak Berwujud	2.675.024.000,00	3.043.619.000,00	3.043.619.000,00	6,67%
Amortisasi Aset Tak Berwujud	- 1.283.825.700,00	- 1.718.978.020,00	- 2.129.651.740,00	28,80%
Aset Tak Berwujud Netto	1.391.198.300,00	1.324.640.980,00	913.967.260,00	-18,95%
Aset Lain-lain	153.946.668.172,17	142.858.819.036,77	142.169.619.026,77	-3,90%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	- 90.036.101.178,04	- 89.827.045.152,73	- 89.707.497.152,72	-0,18%
Aset Lain-lain Netto	63.910.566.994,13	53.031.773.884,04	52.462.121.874,05	-9,40%
KEWAJIBAN	61.833.993.169,34	108.024.032.794,15	25.240.571.572,07	-36,11%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	61.833.993.169,34	108.024.032.794,15	25.240.571.572,07	-36,11%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	806.764.897,39	66.450.697,78	19.942.629,15	-84,28%
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	7.421.306.283,27	13.298.376.035,42	80.221.590,50	-89,60%
Utang Belanja	52.086.993.632,51	92.298.151.154,78	19.407.533.028,88	-38,96%
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.518.928.356,17	2.361.054.906,17	5.732.874.323,54	94,28%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
EKUITAS	3.824.170.695.461,49	3.811.134.850.740,88	3.914.243.740.482,53	1,17%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.886.004.688.630,83	3.919.158.883.535,03	3.939.484.312.054,60	0,69%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020, diolah

Selanjutnya analisis neraca daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kegunaan dari masing-masing perhitungan rasio tersebut adalah: (a) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meliputi rasio lancar, dan rasio cepat; (b) Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, meliputi rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal; (c) Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah, meliputi rata-rata umur piutang, dan rata-rata umur persediaan. Tabel 3.10 menyajikan hasil analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020.

Tabel 3.10
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun Anggaran 2018-2020

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
A.	Rasio Likuiditas			
1	Rasio lancar (current ratio)	305,72%	199,64%	530,82%
2	Rasio cepat (quick ratio)	227,33%	149,22%	312,55%
B.	Rasio Solvabilitas			
1	Rasio total hutang terhadap total asset	1,59%	2,76%	0,64%
2	Rasio hutang terhadap modal	1,62%	2,83%	0,64%
C.	Rasio Aktivitas			
1	Perputaran Aktiva Tetap	4,50%	4,39%	5,00%
2	Perputaran Total Aktiva	4,05%	3,92%	4,58%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2020, diolah

Dari Tabel 3.10 dapat dinyatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan dinilai sangat baik dilihat dari hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2020 rasio lancar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat berfluktuasi namun mempunyai tren yang relatif meningkat. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2018 sebesar 305,72%. Artinya Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2018 mempunyai kemampuan menutup hutang jangka pendeknya sebesar 305,72% dari total kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 199,64% dan tahun 2020 kembali naik menjadi 530,82%. Meskipun mempunyai tren yang relatif menurun, namun secara keseluruhan bisa dikatakan masih sangat likuid dan menunjukkan pemerintah daerah masih sangat mampu dalam menutupi kewajiban utang lancarnya.

Meskipun masih dalam kategori sangat likuid, melihat nilai rasio lancar yang relatif menurun, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus dapat membatasi dan merencanakan sejauh mana kewajiban bisa dibayarkan.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya juga sangat baik. Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2018-2020 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi ditahun 2020 yaitu sebesar 0,64% dan yang tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 2,76%. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2018-2020 tidak pernah lebih dari 2,76% dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Indragiri Hilir cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Rasio hutang terhadap modal dalam kurun waktu 2018-2020 terendah sebesar 0,64% pada tahun 2020 dan tertinggi 2,83% pada tahun 2019.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih memungkinkan memperbesar pinjamannya guna memacu pertumbuhan dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Demikian juga dengan upaya untuk meningkatkan aktivitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga sangat baik. Dari Rasio Perputaran Aktiva Tetap menunjukkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin- mesin, perlengkapan kantor, dan lain-lain, untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan. Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2018-2020 memiliki tren relatif berfluktuasi naik. Adapun rasio ditahun 2018 sebesar 4,50% dan menjadi 5,00% ditahun 2020.

Dari rasio perputaran total aktiva Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2018-2020 relatif berfluktuasi namun meningkat. Rasio di tahun 2018 mencapai 4,05% dan naik menjadi 4,58% di tahun 2020. Secara keseluruhan dari tahun 2018-2020 rata-rata nilai total aset daerah terbilang selalu meningkat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan Tabel 3.11 yang menyajikan hasil analisis proporsi realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020, dapat dilihat bahwa proporsi realisasi Baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung terhadap anggaran yang telah ditetapkan di bawah rata-rata 100 persen. Untuk proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung maupun belanja langsung terhadap anggaran yang telah ditetapkan berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

Tabel 3.11.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018			2019			2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	Belanja Tidak Langsung	1.105.397.055.098	1.002.284.933.865	91	1.152.488.638.933	1.096.564.843.508	95	1.157.131.227.634	1.066.217.306.602	92
1	Belanja Pegawai	771.425.958.014	714.148.949.682	93	812.746.198.000	745.750.258.970	92	782.185.677.456	716.983.950.074	92
2	Belanja Bunga	-	-	0	-	-	0	-	-	0
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0
4	Belanja Hibah	66.649.465.000	24.107.410.199	36	28.226.500.000	44.716.210.276	158	16.751.570.000	14.671.889.662	88
5	Belanja Bantuan Sosial	1.385.000.000	441.000.000	32	2.000.000.000	807.320.000	40	1.735.000.000	815.000.000	47
6	Belanja Bagi Hasil	4.156.121.184	4.136.894.984	100	5.432.027.684	6.412.277.609	118	4.930.532.218	4.905.377.893	99
7	Belanja Bantuan Keuangan	258.980.510.900	257.355.010.000	99	298.036.770.629	296.878.776.654	100	302.889.446.300	302.889.446.300	100
8	Belanja Tidak Terduga	800.000.000	95.669.000	12	4.047.142.620	-	0	44.639.001.661	21.951.642.673	49
B	Belanja Langsung	1.010.141.376.939	797.844.668.959	79	1.167.823.490.720	887.321.378.914	76	1.045.643.058.846	897.432.893.238	86
1	Belanja Pegawai	58.892.738.400	59.580.169.830	101	66.582.466.577	59.929.794.545	0	60.759.733.250	55.677.251.492	92
2	Belanja Barang dan Jasa	639.352.417.115	524.604.212.403	82	708.031.496.366	569.823.115.548	80	668.080.684.383	577.235.363.756	86
3	Belanja Modal	311.896.221.424	213.660.286.726	69	393.209.527.777	257.568.468.821	66	316.802.641.214	264.520.277.990	83
	Jumlah Belanja	2.115.538.432.037	1.800.129.602.824	85	2.320.312.129.653	1.983.886.222.422	86	2.202.774.286.481	1.963.650.199.840	89

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2020, diolah

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang optimal, maka pendapatan daerah hendaklah dibelanjakan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya Belanja Daerah haruslah dibelanjakan pada aktivitas-aktivitas yang menjadi skala prioritas berupa pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum/sosial yang layak. Prinsip belanja daerah yang transparan dan akuntabel hendaknya diterapkan untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif dan efisien.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah gambaran tentang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan aparatur.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
A.	Belanja Tidak Langsung	714.148.949.682,00	745.750.258.970,00	716.983.950.074,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	459.227.074.868,00	478.330.391.575,00	472.005.496.929,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan**)	240.852.880.145,00	253.886.425.221,00	230.744.213.145,00
3.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	13.135.220.000,00	12.849.480.000,00	14.234.240.000,00
4.	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	-	-	-
5.	Insentif pemungutan pajak daerah	933.774.669,00	683.962.174,00	-
B.	Belanja Langsung	201.638.623.169,00	243.456.161.245,00	165.199.182.749,90
1.	Belanja Honorarium PNS**)	19.148.149.300,00	23.365.484.500,00	20.094.214.950,00
2.	Belanja Honorarium Non PNS	24.736.740.000,00	22.036.051.077,00	2.041.850.000,00
3.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	353.715.000,00	380.000.000,00	209.000.000,00
4.	Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	2.151.854.426,00	5.832.779.238,00	755.091.600,00
5.	Belanja premi asuransi kesehatan	18.070.290.042,00	33.758.810.281,00	25.005.563.489,00
6.	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	24.857.975.308,00	28.540.150.405,00	22.702.253.251,40
7.	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	876.827.500,00	1.144.751.935,00	738.556.095,00
8.	Belanja Pakaian Kerja	1.572.860.800,00	1.942.287.200,00	1.205.418.400,00
9.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1.520.719.241,00	1.870.784.740,00	981.004.780,00
10.	Belanja perjalanan dinas**)	127.497.640.852,00	147.950.546.369,00	111.560.445.134,50
11.	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	-	-	-
12.	Belanja Modal (Kantor. Mobil Dinas. Meubelair. peralatan dan perlengkapan dll)	3.495.011.780,00	16.997.252.140,02	16.085.145.807,72
	TOTAL	919.282.584.631,00	1.006.203.672.355,02	898.268.278.631,62

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2020, diolah

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2018-2020 Kabupaten Indragiri Hilir dapat disajikan pada Tabel 3.16.

Table 3.13
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2018	919.282.584.631,00	1.805.554.602.824,10	50,91%
2	Tahun Anggaran 2019	1.006.203.672.355,02	1.994.311.222.421,94	50,45%
3	Tahun Anggaran 2020	898.268.278.631,62	1.967.350.199.840,08	45,66%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2020, diolah

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018, persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 50,91% dan pada tahun 2020 sebesar 45,66%.

c. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah yang juga penting dilakukan adalah analisis pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah. Hasil analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020 disajikan pada Tabel 3.14.

Table 3.14
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
A	Belanja Tidak Langsung	975.640.854.666,30	1.049.041.313.232,80	1.024.778.774.267,02	2,49%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	459.227.074.868,00	478.330.391.575,00	472.005.496.929,00	1,38%
2	Tambahan Penghasilan PNS	240.852.880.145,00	253.886.425.221,00	230.744.213.145,00	-2,12%
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	13.135.220.000,00	12.849.480.000,00	14.234.240.000,00	4,10%
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	933.774.669,00	683.962.174,00	-	-100,00%
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.136.894.984,30	6.412.277.609,30	4.905.377.893,02	8,89%
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	257.355.010.000,00	296.878.776.653,50	302.889.446.300,00	8,49%
7	Belanja Bunga	-	-	-	0,00%
B	Pembiayaan Pengeluaran	-	-	-	0,00%
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00%
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	0,00%
	TOTAL (A+B)	975.640.854.666,30	1.049.041.313.232,80	1.024.778.774.267,02	2,49%

Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2020, diolah

Dari Tabel 3.14 dapat dilihat bahwa Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir tumbuh sebesar 2,49 persen. Pertumbuhan ini sepenuhnya merupakan kontribusi dari alokasi Belanja Langsung. Hal ini mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara konsisten melakukan dan menerapkan kebijakan pembangunan daerah yang menekankan pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Berkaitan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Sementara, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam

rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dipaparkan: (a) Hasil Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, (b) Hasil Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, (c) Hasil Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, dan (d) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah.

A. Analisis Penutup Defisit Riil

Hasil analisis penutup defisit riil anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2020 disajikan pada Tabel 3.15. Defisit riil diperoleh dari realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh Defisit Riil Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 sebesar Rp 114.371.538.166,86.

Tabel 3.15
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun Anggaran 2018-2020 (dalam jutaan)

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.880.754.742.543,55	2.009.010.470.891,34	1.984.556.950.189,23
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.800.129.602.824,10	1.983.886.222.421,94	1.963.650.199.840,08
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.425.000.000,00	10.425.000.000,00	3.700.000.000,00
A.	Defisit riil	75.200.139.719,45	14.699.248.469,40	17.206.750.349,15
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	3.058.624.112,08	80.465.539.348,31	95.164.787.817,71
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.058.624.112,08	80.465.539.348,31	97.164.787.817,71
A+B	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	80.258.763.831,53	95.164.787.817,71	114.371.538.166,86

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2020,
diolah

Komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada Tabel 3.16. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa, penutupan deficit sepenuhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	3.058	80.465	95.164
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.000	0,00	2.000
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	80.258	95.164	114.371

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2020, diolah

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran merupakan gambaran tentang pembentukan komposisi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dengan mengetahui SiLPA periode sebelumnya, dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA serta seberapa besar kontribusi komponen pembentuk SiLPA tersebut. Hasil analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir
 Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018		2019		2020		Rata-rata Petum- buan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	3.058.624.112,08	100,00	80.465.539.348,31	100,00	95.164.787.817,71	100,00	-24%
1	Pelampauan penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	3.058.624.112,08	100,00	80.465.539.348,31	100,00	95.164.787.817,71	0,00	-24%
5	Sisa dana alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2020, diolah

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran. Analisis ini merupakan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah seperti pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018	2019	2020
1.	Saldo kas neraca daerah	3.058.624.112,08	80.465.539.348,31	95.164.787.817,71
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00	0.00
3.	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	3.058.624.112,08	80.465.539.348,31	95.164.787.817,71

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2020, diolah

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, proyeksi SiLPA, dan proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada periode tahun RPJMD. Namun dalam perubahan RPJMD ini proyeksi dilakukan untuk tahun 2022 berdasarkan RKPD 2022 dan proyeksi 2023.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;

- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 hingga 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan mempertimbangkan target APBD 2021 Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2020 dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3.19
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2020

NO.	URAIAN	Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	
	PENDAPATAN	2.009.010.470.891,34	1.984.583.102.693,70	-1%
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.746.222.014,66	180.959.693.824,89	18%
1.	Pendapatan Pajak	35.514.403.295,00	55.499.238.207,00	56%
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	6.437.046.218,00	2.991.279.434,00	-54%
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.363.055.176,00	9.949.705.156,00	-4%
4.	Lain-lain PAD yang sah	101.431.717.325,66	112.519.471.027,89	11%
B.	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	1.482.961.894.630,00	1.397.259.408.747,00	-6%
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	216.849.359.808,00	251.474.372.813,00	16%
3.	Dana Alokasi Umum	991.610.493.000,00	884.826.668.000,00	-11%
4.	Dana Alokasi Khusus	274.502.041.822,00	260.958.367.934,00	-5%
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	372.302.354.246,68	406.364.000.121,81	9%
1.	Pendapatan Hibah	83.235.250.436,00	95.782.968.757,00	15%
2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0%
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	97.940.042.810,68	86.455.414.691,81	-12%
4.	Pendapatan Dana Penyesuaian	179.087.144.000,00	201.787.887.000,00	13%
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya	12.039.917.000,00	22.337.729.673,00	86%

NO.	URAIAN	Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	
6.	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0%
	BELANJA	1.983.886.222.421,94	1.963.650.199.840,08	-1%
A.	Belanja Tidak Langsung	1.096.564.843.508,35	1.066.217.306.602,02	-3%
1.	Belanja Pegawai	745.750.258.970,00	716.983.950.074,00	-4%
2.	Belanja Bunga	-	-	0%
3.	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100%
4.	Belanja Hibah	44.716.210.275,55	14.671.889.662,00	-67%
5.	Belanja Bantuan Sosial	807.320.000,00	815.000.000,00	1%
6.	Belanja Bagi Hasil	6.412.277.609,30	4.905.377.893,02	-24%
7.	Belanja Bantuan Keuangan	296.878.776.653,50	302.889.446.300,00	2%
8.	Belanja Tidak Terduga	-	21.951.642.673,00	100%
B	Belanja Langsung	887.321.378.913,59	897.432.893.238,06	1%
1.	Belanja Pegawai	59.929.794.545,00	55.677.251.492,00	-7%
2.	Belanja Barang dan Jasa	569.823.115.547,84	577.235.363.756,43	1%
3.	Belanja Modal	257.568.468.820,75	264.520.277.989,63	3%

Sumber: Hasil Analisis

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah. Selain itu perubahan juga terdapat pada struktur belanja dimana terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Oleh karena itu perubahan keuangan daerah dalam perubahan RPJMD ini fokus pada proyeksi tahun 2022 dan 2023. Hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah 2022-2023 disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022-2023

Kode	Uraian	Perubahan RKPD 2021	RKPD 2022	Proyeksi 2023
4	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.073.130.045	182.522.701.764	200.223.679.389
04.01.01	Pajak Daerah	49.867.340.285	44.372.729.622	46.475.457.247
04.01.02	Retribusi Daerah	5.318.156.112	4.240.022.500	4.993.272.500
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.108	11.925.469.840	11.925.469.840
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	134.226.900.540	121.984.479.802	136.829.479.802
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.674.350.675.853	1.322.139.006.022	1.697.485.595.139
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.549.152.057.831	1.221.202.388.000	1.582.863.889.849
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.198.618.022	100.936.618.022	114.621.705.290
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.746.900.000	71.718.400.000	-
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	71.746.900.000	71.718.400.000	-
	Jumlah Pendapatan	1.952.170.705.898	1.576.380.107.786	1.897.709.274.528
5	BELANJA			
05.01	BELANJA OPERASI	1.619.352.290.729	1.432.316.775.873	1.400.662.507.228
05.01.01	Belanja Pegawai	850.258.123.225	759.346.953.393	778.330.627.228
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	707.059.408.355	616.464.369.350	568.000.000.000
05.01.03	Belanja Subsidi	2.000.000.000	-	-
05.01.04	Belanja Hibah	56.517.049.149	54.173.573.130	52.000.000.000
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	3.517.710.000	2.331.880.000	2.331.880.000
05.02	BELANJA MODAL	219.743.832.388	140.139.735.807	213.820.577.556
05.02.01	Belanja Modal Tanah	5.000.000	450.000.000	-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.564.323.597	30.951.893.307	5.000.000.000
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.399.505.565	36.934.508.500	15.000.000.000
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.790.562.606	65.403.624.000	191.320.577.556
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.954.440.620	4.849.710.000	2.000.000.000
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000	1.550.000.000	500.000.000
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.025.353.655	43.000.000.000	40.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	4.025.353.655	43.000.000.000	40.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	285.040.482.703	284.931.021.637	299.226.189.745
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.769.478.203	4.660.017.137	5.146.872.975
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.271.004.500	280.271.004.500	294.079.316.770
	Jumlah Belanja	2.128.161.959.475	1.900.387.533.317	1.953.709.274.528
	Total Surplus/(Defisit)	(175.991.253.577)	(324.007.425.531)	(56.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114.888.113.243	324.007.425.531	56.000.000.000
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.888.113.243	324.007.425.531	56.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	114.888.113.243	324.007.425.531	56.000.000.000
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	114.888.113.243	324.007.425.531	56.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(61.103.140.334)	-	-

Sumber: Hasil Analisis

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar adalah Pendapatan Transfer dimana berasal dari transfer pemerintah Pusat. Seperti yang terlihat pada tabel 3.20, walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil dari Dana transfer. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan penyempurnaan Regulasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudahan akses pelayanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah berbasis teknologi informasi/digital;
2. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (online system/ digital) serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik / digital dengan tujuan;
 - a) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
 - b) Mempermudah dan mempercepat Wajib Pajak dalam melaporkan, menghitung dan membayar pajak daerah yang terutang;
 - c) Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah;
 - d) Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran wajib pajak;
 - e) Tersedianya Sistem informasi pengelolaan pajak terpadu untuk mengolah data objek dan subjek pajak berbasis teknologi informasi / digitalisasi untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan pajak daerah;
 - f) Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
3. Pemberian *Reward dan Punishment*
 - a) Pemberian *Reward*, seperti :

- Penganugerahan Bupati Inhil Tax Award setiap tahunnya diberikan kepada Wajib Pajak pembayar Pajak Daerah tertaat, terbesar dan kooperatif dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah.
 - Penghargaan bagi Wajib Pajak yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tepat waktu, tepat jumlah dan tanpa denda.
 - Membuat kebijakan fiskal berupa keringanan/pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada event-event yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b) Pemberian *Punishment*, berupa :
- Pemberian sanksi administrasi berupa bunga, denda bagi Wajib Pajak yang tidak dan/ atau lewat waktu dalam pembayaran pajak terutang.
 - Penerapan sanksi hukum lainnya, dalam hal ditemukan Wajib Pajak membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
4. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan membentuk Tim Pemungutan, Tim Penagihan Pajak Daerah, TP2DD dan Tim Kerja Percepatan Penerimaan Pendapatan Daerah yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
 5. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Perpajakan Daerah kepada masyarakat, aparat pemerintah dan Wajib Pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatapmuka.
 6. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.

7. Implementasi layanan penerimaan pendapatan asli daerah secara elektronik/ digital;
8. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran Pajak Daerah secara *offline* maupun *online*.
9. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
10. Penyusunan kajian perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah.
11. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
12. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah dan kerjasama penguatan sumber daya manusia dengan aparat pajak lainnya.
13. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak/retribusi daerah.
14. Mengevaluasi, meninjau dan menyesuaikan kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan.
15. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB,BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan,update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
16. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
17. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dandaya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
18. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
20. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi SiLPA

Penghitungan SiLPA pada periode tahun 2022-2023 menggunakan data APBD Tahun 2021, serta proyeksi tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menggunakan dasar pertumbuhan SiLPA pada periode tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan rata-rata SiLPA dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 236%, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2023

Uraian	Realisasi		Perubahan RKPD 2021	Pertum- buan (%)	Proyeksi	
	2019	2020			RKPD 2022	2023
SiLPA	80.465.539.348	95.164.787.817	114.888.113.243	84%	324.007.425.531	56.000.000.000

Sumber: Hasil Analisis

B. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2021 menggunakan data Perubahan RKPD tahun 2021, sedangkan proyeksi tahun 2022 menggunakan data RKPD 2022. Proyeksi belanja tahun 2023 menggunakan hasil dari perhitungan kinerja rata-rata pertumbuhan belanja kurun waktu 2018-2021. Berdasarkan analisis tersebut sehingga diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	Perubahan RKPD 2021	Proyeksi	
			RKPD 2022	Proyeksi 2023
05.01	BELANJA OPERASI	912.292.882.374	815.852.406.523	832.662.507.228
05.01.01	Belanja Pegawai	850.258.123.225	759.346.953.393	778.330.627.228
05.01.03	Belanja Subsidi	2.000.000.000	-	-
05.01.04	Belanja Hibah	56.517.049.149	54.173.573.130	52.000.000.000
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	3.517.710.000	2.331.880.000	2.331.880.000
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.025.353.655	43.000.000.000	40.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	4.025.353.655	43.000.000.000	40.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	285.040.482.703	284.931.021.637	299.226.189.745
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.769.478.203	4.660.017.137	5.146.872.975
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.271.004.500	280.271.004.500	294.079.316.770
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas	1.201.358.718.732	1.143.783.428.160	1.171.888.696.973

Sumber: Hasil Analisis

C. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Hasil dari analisis serta pengolahan data-data yang dilakukan pembahasan sebelumnya sehingga dapat disajikan proyeksi Riil Kemampuan Keuangan daerah, kapasitas Riil akan dikelompokkan penerimaan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sudah menjadi hak daerah serta pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah maka dapat diketahui besaran dana untuk mendanai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.23
 Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

Uraian	Realisasi		Perubahan RKPD 2021	Proyeksi	
	2019	2020		RKPD 2022	2023
Pendapatan	2.009.010.470.891	1.984.583.102.694	1.952.170.705.898	1.576.380.107.786	1.897.709.274.528
Penerimaan Pembiayaan	80.465.539.348	95.164.787.818	114.888.113.243	324.007.425.531	56.000.000.000
Total penerimaan	2.089.476.010.240	2.079.747.890.511	2.067.058.819.141	1.900.387.533.317	1.953.709.274.528
Dikurangi					
Pengeluaran pembiayaan	10.425.000.000	3.700.000.000	0	0	0
KAPASITAS RIIL KEMAM- PUAN KEUANGAN	2.079.051.010.240	2.076.047.890.511	2.067.058.819.141	1.900.387.533.317	1.953.709.274.528

Sumber: Hasil Analisis

D. Kebijakan Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow of priority program*) sangat penting, maka diperlukan kebijakan Alokasi Anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan ditentukannya prioritas alokasi anggaran.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua). Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Proyeksi Rencana dan Proporsi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel 3.24 berikut ini:

Tabel 3.24
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021-2023

Uraian	Realisasi		Perubahan RKPD 2021	Proyeksi	
	2019	2020		RKPD 2022	2023
PENERIMAAN DAERAH	2.009.010.470.891	1.984.583.102.694	2.067.058.819.141	1.576.380.107.786	1.897.709.274.528
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2.079.051.010.240	2.076.047.890.511	2.067.058.819.141	1.900.387.533.317	1.953.709.274.528
PRIORITAS I	1.106.989.843.508	1.047.965.663.929	1.201.358.718.732	1.143.783.428.160	1.171.888.696.973
PRIORITAS II	972.061.166.731	1.028.082.226.582	865.700.100.409	756.604.105.157	781.820.577.555

Sumber: Hasil Analisis

BAB

4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan pada periode berjalan. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan.

Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Sedangkan isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Selanjutnya, hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan

kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir periode pembangunan 2018-2023 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Penerapan rencana pembangunan daerah akan menimbulkan permasalahan karena adanya *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD dan RPJPD). Terjadinya *gap* tersebut juga karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil daerah saat penyusunan dokumen perencanaan. Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan sehingga penyelesaian secara cepat, tepat dan berkelanjutan dapat dilakukan. Rumusan masalah menurut aspek dan fokus sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir trendnya menurun dari 4,19% pada tahun 2019 menurun menjadi 0,34% pada tahun 2020. Terus menurunnya pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir .
2. PDRB per kapita Indragiri Hilir meski memiliki trend meningkat namun relatif rendah dibanding PDRB tetangga dengan kinerja untuk peningkatan PDRB per kapita yang cenderung terus menurun.
3. Jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir adalah yang tertinggi dibanding kabupaten tetangga dengan kinerja penurunan jumlah

penduduk miskin yang semakin melemah yaitu dari 7,99% tahun 2016 menjadi 5,93% pada tahun 2020.

4.1.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indragiri Hilir selama periode 2016-2020 adalah yang terendah dibanding IPM kabupaten sekitarnya dan masih jauh dari capaian IPM minimal dunia (80). kinerja indikator IPM trendnya menurun dan dibawah target RPJMD.
2. Harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2016-2020 adalah terendah dibanding kabupaten tetangga, kinerja indikator harapan lama sekolah trendnya menurun dan dibawah target RPJMD.
3. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding kabupaten tetangga. Selama periode 2016 - 2020, kinerja indikator rata-rata lama sekolah trendnya menurun dan dibawah target RPJMD.
4. APK SD/MI Indragiri Hilir terendah dibandingkan APK SD/MI kabupaten tetangga. Selama periode 2016- 2020, kinerja indikator APK SD/MI trendnya menurun.
5. APK SMP/MTs Indragiri Hilir termasuk tertinggi dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu dan , namun capaian APK ini masih dibawah target RPJMD.
6. Angka harapan hidup Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding capaian Kabupaten tetangga serta Provinsi Riau. Namun Selama periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan AHH kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,24% per tahun, tertinggi dibanding rata-rata pertumbuhan AHH Kabupaten tetangga serta Provinsi Riau.
7. Prevalensi balita gizi buruk tahun 2020 sebesar 0,03% meningkat dari realisasi pada tahun 2019 sebesar 0,02%.

8. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 sebesar 4,35%. Capaian tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 yaitu sebesar 5,62%, lebih tinggi dibanding Kabupaten tetangga Indragiri Hulu (4,82%). Selama periode 2016 - 2020, realisasi kinerja indikator pengangguran terbuka trendnya mengalami fluktuasi.

4.1.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Relatif stagnannya cakupan fasilitas seni yang sekaligus menggambarkan masih lemahnya pembinaan dan pengelolaan grup kesenian.
2. Semakin berkurangnya perhatian generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam grup-grup kesenian.
3. Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub-klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

4.1.2.1.1. Pendidikan

1. Selama periode 2016 - 2020, APM SD/MI Indragiri Hilir berkisar antara 94,62% - 95,52% yang berarti ada sekitar 4,48% - 5,38% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian ADM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2017 lebih rendah dibanding capaian APM Indragiri Hulu (99,17%) dan Provinsi Riau (97,08%).
2. Selama periode 2016 - 2020, APM SMP/MTs Indragiri Hilir berkisar antara 79,96% - 82,06%, yang berarti ada sekitar 17,94% - 20,68% penduduk usia 7 -13 yang yang belum sekolah.
3. Selama periode 2016-2020, APS 7 - 12 tahun Indragiri Hilir trendnya meningkat yaitu dari 0,01% pada tahun 2016 menjadi 1,32% pada tahun 2020, yang berarti sebesar 98,43% - 99,75% penduduk umur 7 - 12 tahun Indragiri Hilir yang berpartisipasi pada pendidikan di SD/MI.

4. APS 13 – 15 tahun Indragiri Hilir selama periode 2016 – 2020 berkisar antara 0,43% - 1,83%, yang menggambarkan bahwa penduduk umur 13 – 15 tahun Indragiri Hilir yang berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs sebesar 91,87% - 92,13%.
5. Selama periode 2016-2020, rasio ketersediaan Sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs memiliki trend berfluktuatif menurun. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan sekolah tidak mencukupi untuk menampung penduduk usia SD/MI dan SMP/MTs yang disebabkan oleh rendahnya persentase bangunan dengan kondisi yang baik.
6. Pada tahun 2020, masih terdapat sekitar 28,72% guru yang belum berkualifikasi S1/D.IV sehingga yang bersangkutan belum tersertifikasi sebagai guru.

4.1.2.1.2. Kesehatan

1. Rasio ideal daya tampung rumah sakit adalah setiap 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2020 Indragiri Hilir hanya 0,004, capaian rasio rumah sakit Indragiri Hilir lebih rendah dibanding Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 0,0067 dan 0,0092.
2. Rasio puskesmas per 1.000 penduduk telah memenuhi standar nasional namun kualitas pelayanan puskesmas relatif belum standar sebagai akibat rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan puskesmas.
3. Kondisi rasio dokter spesialis Indragiri Hilir masih dibawah standar (15 dokter spesialis melayani 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis melayani 6.946 penduduk).
4. Rasio dokter umum per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,064 (norma 0,40) pada tahun 2020
5. Rasio dokter gigi per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu 0,032 pada tahun 2020.

6. Rasio perawat per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,957 (norma 1,1), pada tahun 2020.
7. Rasio Bidan per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,568 (norma 1,0). pada tahun 2020 .
8. Rendahnya pencapaian SPM dibidang kesehatan
9. Masih tingginya Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular serta penyakit new emerging disease
10. Belum Optimalnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

4.1.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi Baik (14,22%) dan Mantap (59,23%), masih dibawah target dan standar Nasional (80%).
2. Proporsi jembatan dengan kondisi Baik (35,96%) dan Mantap (43,36%), masih dibawah standar Nasional.
3. Proporsi irigasi dalam kondisi baik sebesar 27 %, Jauh dibawah Target yang ditetapkan (40%)
4. Rendahnya kualitas insfrastruktur yang dibangun dan kondisi lahan gambut dan rawa pasang surut mengakibatkan tingginya frekuensi pemeliharaan terhadap insfrastruktur tersebut.
5. Belum optimalnya penataan Drainase dan limbah terutama perkotaan, sehingga sering terjadi genangan ketika hujan dan pasang naik.
6. Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2020 hanya sebesar 20,05% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir jauh dari sebesar 98%
7. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Permendagri 20 % dari Luas Perkotaan
8. Rasio rumah ber IMB baru 2,50% dari total rumah yang ada di Indragiri Hilir tahun 2020.

4.1.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih terbatasnya pembangunan rumah layak huni di Indragiri Hilir yaitu berkisar antara 75 unit - 162 unit per tahun selama periode 2016-2020. Disisi lain, jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 16.868 unit rumah.
2. Masih adanya permukiman kumuh di perkotaan yaitu sebesar 22% pada tahun 2020.
3. Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dasar di wilayah permukiman

4.1.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

1. Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk masih rendah yaitu 0,04 sehingga penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kurang optimal.
2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat masih rendah dengan kinerja 10,00% sebagai konsekuensi kurangnya tenaga Satpol PP.
3. Belum tersedianya data Daerah Rawan Bencana dimasing-masing Kecamatan secara menyeluruh di Kabupaten indragiri Hilir sebagai acuan identifikasi bencana.
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah terdampak bencana belum terlaksana dengan baik karena terbentur anggaran.

4.1.2.1.6. Sosial

1. Belum optimalnya pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui sistem layanan dan rujukan terpadu dan SINK-NG menuju penyediaan Basis Data Terpadu (BDT).
2. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan bencana sosial karena kekurangan penyediaan logistik bencana dan biaya operasional.

3. Belum optimal penanganan anak bermasalah sosial.

4.1.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

4.1.2.2.1. Tenaga Kerja

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding Kabupaten sekitar dan Provinsi Riau dengan capaian kinerja yang terus menurun.
2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir tahun 2020 capaiannya sebesar 3,89%.
3. Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan sebesar 0% dan ada sekitar 100% yang belum mendapat pelatihan pada tahun 2020.
4. Tidak berjalannya peranan dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dibentuk di perusahaan.

4.1.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks pembangunan gender (IPG) Indragiri Hilir tahun 2020 sebesar 82,34% adalah yang terendah dibandingkan IPG kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indragiri Hilir yaitu sebesar 64,45% juga termasuk yang terendah dibanding kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
3. Masih lemahnya kelembagaan/institusi yang mendukung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, kurangnya pemahaman tentang kota layak anak serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam menuju kota layak anak.

4.1.2.2.3. Pangan

1. Pencapaian kinerja penanganan daerah rawan pangan relatif rendah.

4.1.2.2.4. Pertanahan

1. Persentase luas tanah yang bersertifikat baru sebesar 41,39%.
2. Belum memadainya SDM dalam bidang Sistem Pendaftaran Tanah.

3. Masih terdapatnya aset kekayaan daerah yang belum memiliki bukti autentik, sehingga rawan terjadi penyerobotan;

4.1.2.2.5. Lingkungan Hidup

1. Belum memiliki laboratorium lingkungan dan perlengkapannya guna memberikan hasil sampel yang cepat untuk disampaikan dalam waktu dan tempat tertentu
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
3. Masing tingginya pencemaran lingkungan hidup.
4. Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan DAS, degradasi kawasan pesisir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan.
5. Persentase penanganan sampah masih belum optimal, baru sekitar 81,50%.
6. Tingginya alih fungsi hutan dan lahan.
7. Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai standar (*Sanitary landfill/control landfill*).

4.1.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Cakupan penerbitan kartu keluarga masih 84,23% dari total keluarga di Indragiri Hilir
2. Kepemilikan KTP (e-KTP) hanya 57% dari total penduduk Indragiri Hilir yang harus ber-KTP.
3. Kepemilikan akte kelahiran hanya sebanyak 563 per 1.000 penduduk Indragiri Hilir. Masih ada 463 penduduk dari 1.000 penduduk yang belum ada akta kelahiran.
4. Keterbatasan peralatan untuk mendukung kegiatan administrasi kependudukan.

5. Tidak sinkronnya data penduduk baik jumlah penduduk ataupun LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang) karena tidak dilaporkan secara berkala dari Kecamatan.

4.1.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Capaian desa maju masih sangat rendah yaitu hanya 11 desa pada tahun 2020.
2. Masih sangat lemahnya kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
3. Masih rendahnya pengelolaan administrasi keuangan desa.

4.1.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Cakupan peserta KB aktif masih 64,10% pada tahun 2020.
2. Cakupan PUS peserta KB masih 77,82%.
3. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh anak, remaja dan bina lansia.
4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKB/PK) serta pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
5. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
6. Masih kurangnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
7. Masih kurangnya tenaga (petugas lapangan) sarana dan prasarana.

4.1.2.2.9. Perhubungan

1. Kurangnya SDM Teknis Perhubungan baik Kualitas Maupun Kuantitas dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

2. Kurangnya Ketersediaan Produk Hukum baik peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati
3. Kurangnya sarana Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
4. Belum beroperasi secara maksimal UPT pengujian kendaraan bermotor , terminal dan perpakiran pada Dinas Perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir
5. Kurangnya Pemeliharaan dan atau peningkatan Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir
6. Masih rendahnya pemenuhan standar layanan angkutan di kabupaten Indragiri Hilir

4.1.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

1. Masih lemahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
2. Sebagian besar penduduk Indragiri Hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi.

4.1.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi aktif di Idnragiri Hilir sebesar 67,00% pada tahun 2020.
2. Usaha mikro dan kecil persentasenya sebesar 72,00% pada tahun 2020.
3. Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi, dan kurang baiknya citra koperasi.
4. Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah.
5. Sumberdaya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah relatif rendah kualitas.
6. Kebanyakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.

7. Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan UKM, Kebanyakan hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal dan sedikit yang melakukan ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

4.1.2.2.12. Penanaman Modal

1. Realisasi PMDN masih rendah yaitu Rp 448,60 milyar tahun 2020, dibawah target Rp 20.000 milyar.
2. Realisasi PMA jauh masih rendah yaitu USD 274,38 juta pada tahun 2020, dibawah target USD 74 juta.
3. Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal (pemantauan pembinaan dan pengawasan).
4. Terbatasnya kompetensi SDM dan sarana dan prasarana penunjang kegiatan BP2MPD.
5. Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi kecamatan dan kelurahan dalam pengurusan perijinan penanaman modal.
6. Masih kurangnya upaya promosi daerah melalui kegiatan berskala regional, nasional maupun internasional.

4.1.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendah persentase wirausaha muda.
2. Masih rendah cakupan pembinaan olahraga.
3. Masih rendah cakupan pelatih yang bersertifikat.
4. Masih rendah cakupan pembinaan atlet muda.
5. Pembinaan olahraga belum berorientasi prestasi.

4.1.2.2.14. Statistik

1. Data-data untuk pengukuran indikator kinerja pada RPJMD banyak yang tidak tersedia di Indragiri Hilir Dalam Angka, kecamatan dalam Angka, PDRB, Statistik Daerah dan Indikator kesejahteraan serta terbitan lainnya.

2. Koordinasi dan sinergi antara Pemerintahan Kabupaten khususnya SKPD dengan BPS Kabupaten Indragiri Hilir masih belum optimal.

4.1.2.2.15. Persandian

1. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.
2. Pemutakhiran jaringan dan sistem pengamanan sandi belum optimal.

4.1.2.2.16. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih terbatas.
2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya masih terbatas kuantitas dan kualitasnya.
3. Mulai ditinggalkannya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan Masyarakat.
4. Belum optimalnya pemeliharaan Cagar budaya dan bangunan bersejarah.

4.1.2.2.17. Perpustakaan

1. Jumlah perpustakaan yang masih terbatas yaitu sebanyak 7.866 orang pada tahun 2020.
2. Koleksi buku perpustakaan yang masih terbatas dengan pelayanan yang belum baik.

4.1.2.2.18. Kearsipan

1. Masih relatif rendahnya pengelolaan arsip secara baku yaitu sebesar 50,74% pada tahun 2020.
2. Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas untuk pengelola kearsipan yaitu sebanyak 25 orang.

4.1.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.2.3.1. Pariwisata

1. Belum berkembang destinasi dan objek pariwisata di Indragiri Hilir sehingga jumlah wisatawan ke Indragiri Hilir hanya sebanyak 22.047 orang tahun 2020.
2. Belum memadai sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang ada.

4.1.2.3.2. Pertanian

1. Produksi beras Indragiri Hilir belum mencukupi konsumsi penduduk Indragiri Hilir.
2. Produktivitas kelapa masih rendah yaitu 1217 ton kopra/hektar tahun 2020.
3. Produktivitas kelapa sawit rakyat masih rendah yaitu 2515 ton CPO/hektar, diibawah produktivitas perkebunan besar Indragiri Hilir (4,24 ton CPO/hektar)
4. Pembangunan infrastruktur kebun terutama pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran yang masih jauh dibawah kebutuhan.
5. Kegiatan Rehabilitasi/peremajaan kebun kelapa belum dapat menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Harga kelapa petani PIR maupun petani non PIR berfluktuatif dan cenderung rendah.

4.1.2.3.3. Perdagangan

1. Nilai ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir yang ysng venderung terus menurun, dimana pada tahun 2020 hanya USD 409,15 juta.
2. Kontribusi sektor perdagangan yang masih dibawah target 16,14% dari

4.1.2.3.4. Perindustrian

1. Nilai produksi usaha menengah kecil masih rendah dan kalah jauh dibanding Kuantan Singingi.
2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB relatif masih rendah yaitu 24,05% pada tahun 2020.
3. Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah dan kewirausahaan masyarakat.
4. Masih rendahnya jumlah industri pengolahan.
5. Rendahnya daya saing industri kecil menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.

4.1.2.3.5. Transmigrasi

1. Kegiatan-kegiatan ketransmigrasian secara terbatas pada transmigrasi lokal.

4.1.2.3.6. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan Indragiri Hilir masih mengandalkan perikanan tangkap dan sangat terbatas pada perikanan budidaya.
2. Konsumsi ikan penduduk Indragiri Hilir yang rata-ratanya sebesar 39,69 ton/kapita perlu didorong meningkat menjadi 50,80ton/kapita/tahun.
3. Masih terdapatnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan alat terlarang.
4. Terjadinya konflik antara sesama nelayan dalam hal menentukan lokasi penangkapan.
5. Rendahnya kemampuan petani pembudidaya tambak dalam hal merevitalisasi tambaknya.

4.1.2.4. Penunjang Urusan

4.1.2.4.1. Perencanaan Pembangunan

1. Terbatasnya Sumberdaya kuantitas (fungsional) dan kualitas rencana pembangunan.

2. Hasil Evaluasi (RPJMD, RKPD dan lainnya) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
3. Belum optimalnya *e-planning* dan *e-budgeting*.
4. Terbatasnya sumber data yang lengkap dan akurat, yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

4.1.2.4.2. Keuangan

1. Realisasi Pendapatan daerah yang kurang tercapai.
2. Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
3. Masih kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dibidang pemeriksaan pajak daerah.
4. Pemerintah Indragiri Hilir belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

4.1.2.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan

1. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan.
2. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, baik diklat struktural, fungsional maupun teknis.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai oleh sebagian pejabat struktural kepada PNS bawahannya yang indisipliner, sementara peraturan disiplin PNS telah memberikan kewenangan sesuai dengan jenjang jabatannya.

4.1.2.4.4. Penelitian dan Pengembangan

1. Masih sedikit pemanfaatan hasil penelitian untuk pembangunan di Indragiri Hilir.
5. Penelitian yang dilakukan spasial dan tidak komprehensif sehingga sukar diterapkan.

4.1.2.4.5. Pengawasan

1. Masih banyak temuan APIP yang belum ditindak-lanjuti. Tahun 2020, persentase APIP yang ditindaklanjuti sebesar 70,96%.
2. Masih terbatas jumlah personel APIP yang hanya 12 orang dan idealnya sebanyak 45 orang.
3. Lemahnya penegakan hasil temuan APIP sehingga terjadi serupa berulang kembali.

4.1.2.4.6. Sekretariat Dewan

1. Sering terlambatnya materi pembahasan prolegda yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Pengampu.

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang paling prioritas untuk diselesaikan.

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan berpengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis memiliki ruang lingkup yang terkait dengan isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi dengan penjabaran isu strategis pada pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), ancaman *Corona Virus Diseases* (COVID19), penerapan *green economic global* (ekonomi ramah lingkungan), penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, era industri 4.0, serta Kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), .

4.2.1.1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang secara umum belum tercapai. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan dan berlaku bagi seluruh bangsa dengan target sampai dengan 2030.

Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana

lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social Sustainability. Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;

- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2. Ancaman Corana Virus Disiaeses (COVID-19)

Virus Corona atau Coronavirus (CoV) merupakan keluarga virus yang menaungi virus SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini, SARS-CoV pada 2002, dan MERS-CoV pada 2012. Kata corona sendiri diambil dari Bahasa Latin yang berarti mahkota. Nama ini diberikan karena bentuk Virus Corona menyerupai mahkota. Sedangkan penyakit yang disebabkan terinfeksi SARS-CoV-2 disebut Covid-19, yang merupakan akronim dari coronavirus disease 2019. Gejala penderita Covid-19 ini hampir mirip dengan gejala flu, di antaranya: Demam tinggi lebih dari 38 derajat Celsius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernapas serta sakit kepala. Virus Corona bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran Virus Corona dapat melalui droplet pernapasan. Percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi Virus Corona akan menempel di permukaan benda atau

kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Kemudian, virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, dan mata. Hingga dokumen ini disusun pada bulan Agustus 2021 tercatat 215,739,166 orang yang terinfeksi COVID-19 diseluruh dunia dengan korban meninggal sebanyak 4,490,820 orang. Penanganan, pengendalian dan penyelesaian ancaman pandemi ini sudah mulai diupayakan dengan penerapan protokol kesehatan dan gaya hidup baru (*new normal*), serta pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat di dunia.

4.2.1.3. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Berdasarkan data PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (*industrialis*) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan. Penerapan ekonomi ramah lingkungan memiliki tujuan jangka panjang demi keberlangsungan ekosistem yang ada di dunia, namun tantangan terbesar dalam penerapan

ekonomi ramah lingkungan adalah *main set* atau pola pikir masyarakat yang masih belum berbasis lingkungan.

4.2.1.4. Penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan.

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun anorganik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin dan sebagainya. Diharapkan, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global.

4.2.1.5. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/ Climate Change*).

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global*

warming. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

4.2.1.6. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan:

- 1) Lebih cepat.
- 2) Lebih luas sebarannya.
- 3) Lebih lama penyimpanannya

Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory* dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi ini, Negara Indonesia

diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

E-Government sendiri merupakan kegiatan yang terkait dengan upaya seluruh lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga dapat menyediakan jasa layanan elektronik dan informasi yang akurat kepada individu masyarakat dan dunia usaha. Inisiatif *e-Government* adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan penyelenggaraan layanan yang efisien bagi publik. Perlu ditekankan bahwa, efisiensi sangat tergantung pada kurun waktu dan teknologi. *e-Government* yang sangat efisien saat ini belum tentu efisien beberapa tahun ke depan karena perkembangan TIK dan demand dari stakeholdernya. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan melalui penggunaan media elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan adanya pengembangan *e-Government* maka perlu dilakukan penataan sistem dan proses kerja di lingkungan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) kegiatan atau aktifitas langsung, (Inpres No.3, 2003) yaitu:

- 1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.

- 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pelaksanaan dalam pengembangan e-Government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan utama, (Inpres No.3, 2003) yaitu:

- 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- 3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- 4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, pengembangan e-Government dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut (Inpres Nomor 3 tahun 2003):

- 1) Tingkat 1 – Persiapan yang meliputi:
 - a) Pembuatan situs informasi di setiap lembaga.
 - b) Penyiapan SDM.

- c) Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya, menyediakan sarana *Warnet, SME-Center*, dll.
 - d) Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- 2) Tingkat 2 – Pematangan yang meliputi:
- a) Pembuatan situs informasi publik interaktif.
 - b) Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- 3) Tingkat 3 – Pemantapan yang meliputi:
- a) Pembuatan situs transaksi pelayanan publik.
 - b) Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- 4) Tingkat 4 – Pemanfaatan yang meliputi:
- a) Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

4.2.1.7. Era Industri 4.0

Pada tahun 2020 dunia industri mulai memasuki tahapan yang disebut era Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan tren automasi industri dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur yang mana didalamnya termasuk teknologi *cloud computing, cyber-physical system* dan *Internet of Things (IoT)*. Istilah “*smart factory*” akan menjadi hal yang lumrah kita dengar di era Industri 4.0 sebagaimana saat ini kita mendengar istilah *smartphone, smartcard* dan istilah-istilah lain yang ditambahkan prefiks *smart*. Istilah “*Industrie 4.0*” dicetuskan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang lalu.

Dirangkum dari World Economic Forum (WE), pada era Revolusi Industri Generasi Keempat ada sepuluh *soft skill* yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri. *Soft skill* tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (*Complex Problem*

Solving), berpikir kritis (*Critical Thinking*), kreatifitas (*Creativity*), manajemen SDM (*Human Resources Management*), koordinasi (*Coordinating*), kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*), pengambilan keputusan (*Judgment and Decision Making*), orientasi pada layanan (*Service Orientation*), negosiasi (*Negotiation*) dan kelenturan berpikir (*Cognitive Flexibility*).

4.2.1.8. Kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan pada semua wilayah dan negara di ASEAN.

Tujuan MEA salah satunya adalah meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang juga akan membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara Asia Tenggara. Dalam kesepakatan tersebut terdapat lima hal yang tidak boleh dibatasi peredarannya di seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia, yaitu Arus barang, Arus jasa, Arus modal, Arus investasi, dan Arus tenaga kerja terlatih.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) Program Pembangunan MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) pembentukan Komite Nasional

AEC 2015, dan i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA 2025, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Kabupaten Indragiri Hilir baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif serta mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi terbentuknya lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Kebijakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional menjadi isu nasional yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah pembangunan kabupaten/kota

pada masa mendatang. Dokumen perencanaan tingkat nasional akan menjadi salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik regional maupun nasional.

4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Adapun Permasalahan strategis yang termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
 - 1) Keberlanjutan sumber daya alam
 - 2) Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi
 - 3) Transformasi struktural berjalan lambat
 - 4) Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
 - 2) Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - 3) Pemenuhan layanan dasar
 - 4) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
 - 5) Pengentasan kemiskinan
 - 6) Peningkatan produktivitas dan daya saing

- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
 - 1) Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa
 - 2) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
 - 3) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran Agama
 - 4) Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
 - 5) Belum optimalnya peran keluarga
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - 1) Infrastruktur pelayanan dasar
 - 2) Infrastruktur ekonomi
 - 3) Infrastruktur perkotaan
 - 4) Energi dan ketenagalistrikan
 - 5) Transformasi digital
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
 - 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 3) Pembangunan rendah karbon
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - 1) Konsolidasi demokrasi
 - 2) Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 3) Penegakan hukum nasional
 - 4) Reformasi birokrasi dan tata kelola
 - 5) Menjaga stabilitas keamanan nasional

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Riau

Kebijakan pembangunan Provinsi Riau yang terdapat dalam RPJMD Propinsi Riau Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan Riau yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”. Dalam mewujudkan Visi Provinsi Riau 2019-2024 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
- 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- 4) Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Isu strategis pembangunan Provinsi Riau berdasarkan RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

4.2.3.1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dilakukan dengan:

- Peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan;
- Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, upaya peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan dan penyembuhan;
- Pelayanan warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa;

- Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui peningkatan produktivitas lapangan usaha masyarakat.
- Peningkatan sumberdaya manusia yang beriman, dilakukan melalui;
- Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berprestasi dalam bidang keagamaan;
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

4.2.3.2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dilakukan melalui:

- Peningkatan konektivitas untuk penguatan daya saing melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi dan pengembangan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi;
- Peningkatan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas air baku serta peningkatan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan;
- Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat;
- Peningkatan rasio elektrifikasi melalui peningkatan akses dan infrastruktur energi ke seluruh wilayah dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- Peningkatan infrastruktur sumber daya air; dan
- Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan pemulihan kawasan kritis dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan.

4.2.3.3. Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Penanggulangan Kemiskinan

Peningkatan produktifitas sektor unggulan dilakukan melalui;

- Peningkatan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal;
- Peningkatan kemandirian dan daya saing industri dengan peningkatan produksi industri dan nilai tambah dan peningkatan keunggulan kompetitif untuk pasar regional dan global;
- Peningkatan daya tarik investasi;
- Peningkatan produksi pangan pokok untuk ketahanan pangan menuju kemandirian pangan;

Penanggulangan kemiskinan melalui:

- Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk pengurangan jumlah penduduk miskin;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

4.2.3.4. Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dan Pengembangan Pariwisata

Peningkatan perlindungan dan pengembangan pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dilakukan melalui:

- Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
- Peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;

- Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi;
- Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau;
- Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan (LAMR), Dewan Kesenian Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.

Pengembangan pariwisata dilakukan melalui:

- Pemanfaatan potensi pariwisata dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata; dan
- Pengelolaan pariwisata.

Kemudian Berdasarkan konsultasi publik terhadap perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 terdapat penamabahan isu strategis yakni :

4.2.3.5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi

Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dilakukan melalui:

- Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;
- Peningkatan profesionalisme ASN dan peningkatan kapasitas kelembagan sehingga mendukung penyelenggaran pemerintahan yang yang bersih, transparan dan akuntabel
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam periode 2018 - 2023 isu-isu strategis penting di Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan inovasi pemerintahan yang telah diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya. Untuk memperkuat optimalisasi inovasi pemerintahan tersebut Kabupaten Indragiri Hilir menindaklanjutinya dengan penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mewujudkan pelayanan publik maksimal bagi masyarakat.

2. Pemantapan pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi,serta perumahan perlu penanganan yang lebih baik lagi. hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan,serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.Selain itu juga perlu adanya penanganan terhadap Limbah dan Drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan apabila Hujan deras dan Pasang naik terutama didaerah perkotaan.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir masih di topang dengan potensi pertanian dan perkebunan, akan tetapi pendapatan asli daerah sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah masih belum memiliki sumber - sumber potensi pendapatan lainnya yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah guna menunjang perekonomian daerah.
4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.
Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal Seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.
6. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah perdesaan, terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid19 yang harus menjadikan kualitas pelayanan kesejatan bagi masyarakat harus jauh lebih optimal.

7. Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Isu utama terkait dengan pengelolaan potensi sumberdaya alam adalah luas perkebunan kelapa sebesar 61.025 ha yang berada dalam kondisi rusak dan tua, serta diverifikasi produk yang rendah, dimana belum adanya industri - industri hilir dari produk kelapa Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perkebunan kelapa yakni dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, dengan penetapan kawasan perdesaan perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tentunya memberi peluang adanya bantuan terkait pengembangan potensi perkebunan kelapa yang akan berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) Ekowisata Pantai Solop, Hutan Mangrove seperti Hutan Mangrove Sungai Bela (ii) Perbukitan dalam kawasan Bukit tiga puluh seperti Bukit Condong (iii) Air Terjun seperti Air Terjun 86, Air Terjun Tembulon Ruso (iv) Danau Seperti Danau mablu (v) Wisata Religi seperti Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari dan masih banyak lagi potensi wisata di Indragiri Hilir yang telah ditetapkan dalam Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan. Namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

Isu yang cukup menjadi perhatian di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kondisi alam gelombang pasang yang mengakibatkan terjadinya abrasi di beberapa wilayah daratan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, upaya rekonstruksi wilayah rawan abrasi melalui pelestarian hutan mangrove dapat menjadi solusinya.

8. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Isu ketentraman dan ketertiban yang menjadi isu daerah dengan ruanglingkup nasional bahkan internasional adalah terkait dengan isu keamanan kejahatan transnasional peredaran narkotika, mengingat kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk dalam daerah terluar Indonesia tentu dapat menjadi pintu masuk bagi peredaran narkotika transnasional yang perlu juga menjadi perhatian.

9. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi

Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi local Desa sehingga memiliki nilai ekonomis .

Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolaannya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

Tabel 4-1 Integarsi Antara Isu - Isu Strategis Internasional/ Global, Nasional, Provinsi Riau, dan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Isu Global	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Riau 2019-2024	Isu Strategi Perubahan RPJMD Kabupaten Inhil 2018-2023
1	Sustainable Development Goals (SDGs)	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan 2) Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk 3) Pemenuhan layanan dasar 4) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda 5) Pengentasan kemiskinan 6) Peningkatan produktivitas dan daya saing 	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya • Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban • Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi
2	Ancaman Corana Virus Disiaeses (COVID-19)	<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keberlanjutan sumber daya alam 2) Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi 	Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Penanggulangan Kemiskinan	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

No	Isu Global	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Riau 2019-2024	Isu Strategi Perubahan RPJMD Kabupaten Inhil 2018-2023
		3) Transformasi struktural berjalan lambat 4) Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital		
3	Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan pemerataan pembangunan. • Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan
4	Penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup		
5	Antisipasi perubahan iklim global (Global Warming/ Climate Change)	2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim 3) Pembangunan rendah karbon		
6	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa 1) Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa 2) Belum optimalnya pemajuan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

No	Isu Global	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Riau 2019-2024	Isu Strategi Perubahan RPJMD Kabupaten Inhil 2018-2023
		kebudayaan Indonesia 3) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran Agama 4) Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan 5) Belum optimalnya peran keluarga		
7	Era Industri 4.0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 1) Keberlanjutan sumber daya alam 2) Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi 3) Transformasi struktural berjalan lambat 4) Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital	Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dan Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran • Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi
8	Kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

No	Isu Global	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Riau 2019-2024	Isu Strategi Perubahan RPJMD Kabupaten Inhil 2018-2023
		1) Infrastruktur pelayanan dasar 2) Infrastruktur ekonomi 3) Infrastruktur perkotaan 4) Energi dan ketenagalistrikan 5) Transformasi digital		

BAB

5

**VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN**

5.1. Visi

Visi, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan peraturan turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang disampaikan saat pencalonan atau masa kampanye pertama di depan DPRD menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan

pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang dimiliki.

Disamping itu, visi dan misi calon kepala daerah tersebut juga harus dipadu padankan dengan visi jangka panjang daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, yaitu:

“INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG 2025”

Berdasarkan hasil penelaahan visi pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 dan visi misi kepala daerah terpilih, maka visi antara yang hendak diwujudkan Kepala Daerah dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah;

“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih

berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.

- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

5.2. Misi

Misi, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

- Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkepatutan hukum.
- Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- Misi 4 : Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.
- Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perubahan karena berbagai kondisi yang terjadi selama masa pelaksanaan pembangunan yang telah dilewati. Berikut perubahan tujuan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir pada perubahan RPJMD periode pembangunan 2018-2023:

Tabel 5.1 Perbandingan Tujuan RPJMD Murni dan RPJMD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

RPJMD Murni		RPJMD Perubahan	
T.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik	T.1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah
T.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan	T.2	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
T.3	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	T.3	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam • Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
T.4	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	T.4	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa
T.5	Meningkatkan partisipasi sosial Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	T.5	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah • Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa
T.6	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	T.6	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketenteraman sosial
T.7	Menurunkan tingkat pengangguran Menurunkan tingkat kemiskinan	T.7	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
T.8	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	T.8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Tabel 5.2
Indikator Tujuan/Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2018	Kondisi Akhir 2023
VISI: "Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermartabat dan Bermartabat"				
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeadilan hukum				
Tujuan 1. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	44,36	79,00
Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah				
Tujuan 2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	N/A	51,20
Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat				
Tujuan 3.				
• Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam	• Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam (%)	Persen	53,04	56,54
• Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,04	60,05
Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa				
Tujuan 4. Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,51	68,04
Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.				
Tujuan 5.				
• Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah	• Indeks Partisipasi Sosial	Indeks	60	80
• Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa	• Tingkat Keberdayaan Masyarakat	Persen	60	60
Misi 6: Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial				
Tujuan 6. Meningkatkan	Indeks keamanan,	Indeks	60,00	61,62

Kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial	ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)			
Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran				
Tujuan 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PDRB per kapita (Juta per Kapita)	(Juta per Kapita)	58,78	72,5
Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah				
Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,61	4,90

Berdasarkan rumusan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan adanya implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif. Hal ini dapat direalisasikan melalui komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan memiliki prinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, pelaksanaan reformasi birokrasi harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah agar fungsi kontrol masih terjaga. Lebih lanjut, agar tujuan ini tercapai maka sasaran dan indikator yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- a. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Nilai LPPD, Nilai AKIP, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**
- b. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.**

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan bagi Masyarakat

Salah satu indikator kemakmuran dan kemajuan suatu daerah adalah tersedianya fasilitas infrastruktur pengembangan wilayah yang merata dan memadai. Pembangunan infrastruktur secara merata

merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah. Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah masyarakat dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir harus selalu seimbang antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan sosial. Hal ini dilakukan untuk mendukung segala aspek pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar seluruh pembangunan dapat dinikmati pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. **Meningkatnya kualitas pelayanan insfrastruktur permukiman, dengan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih (%) dan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%).**
- b. **Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, dengan Persentase Penyediaan Infrastruktur (%).**
- c. **Meningkatnya pelayanan transportasi, dengan Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun (%).**

3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam

Pengelolaan sumber daya alam daerah di Kabupaten Indragiri Hilir tentu saja menjadi dasar dalam peningkatan produktivitas sumber daya alam potensial yang memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup. Pengukuran terhadap sasaran dari tujuan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ini didasarkan pada **Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam dan nilai indeks kualitas lingkungan**

hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. **Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dengan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%).**
- b. **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.**

4. Meningkatkan Kualitas SDM Berdaya Saing Berbasis Iman dan Taqwa

Kualitas sumber daya manusia tentu saja menjadi perhatian penting dalam peningkatan daya saing kompetitif sebuah daerah terutama Kabupaten Indragiri Hilir yang berbasis pada nilai - nilai religi yaitu iman dan taqwa. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah **meningkatnya indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada:**

- a. **Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan Indeks Pendidikan.**
- b. **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan Indeks Kesehatan.**
- c. **Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun).**

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa

Kesejahteraan sosial masyarakat menjadi salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa pokok yang menjadi perhatian dalam perwujudan tujuan ini adalah penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin yang dapat diupayakan sebagai sasaran pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut seperti meningkatkan daya beli

masyarakat baik melalui pengendalian harga barang dan jasa, peningkatan pendapatan masyarakat maupun dan penurunan angka pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. **Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan, dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)**
- b. **Meningkatnya program masyarakat pedesaan, dengan Status Indeks Desa Membangun**
- c. **Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, dengan indeks pembangunan gender**
- d. **Meningkatnya peranan aktif perempuan dalam ekonomi dan politik, dengan indeks keberdayaan gender**

6. Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial

Salah satu keinginan masyarakat dalam menjalani kehidupannya adalah adanya rasa tentram, nyaman dan aman dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir hadir dalam mewujudkan ketentraman dan kenyamanan wilayah termasuk didalamnya keamanan dan ketertiban agar kondusivitas wilayah tetap terjaga. Guna mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. **Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat, dengan indeks rasa aman.**
- b. **Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%).**

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah diselenggarakan dengan beragam upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah khususnya sektor-sektor yang menjadi unggulan pembangunan daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah dengan melakukan akselerasi dan peningkatan pembangunan pada pusat-pusat perekonomian berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru, dimana setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya.

- a. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan persentase angka kemiskinan.**
- b. Menurunnya tingkat pengangguran, dengan tingkat pengangguran terbuka.**

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Di sisi lain, suksesnya percepatan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada percepatan pergerakan perekonomian yang berkualitas. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Selain itu, keterbukaan terhadap akses permodalan perlu dioptimalkan sehingga mampu menciptakan berbagai lapangan usaha baru untuk mendongkrak capaian kualitas perekonomian daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya produksi sektor potensial, dengan PDRB (Milyar Rupiah)**
- 2. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah, dengan Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah).**

3. Meningkatnya nilai ekspor daerah, dengan Nilai ekspor (Milyar Rupiah).

Jika dilihat, maka perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan jumlah sasaran dimana pada perubahan RPJMD ini difokuskan untuk lebih melihat program pembangunan yang dirumuskan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir sesuai dengan kondisi fenomena pembangunan beserta permasalahannya. Berikut perbandingan sasaran pembangunan antara RPJMD murni dan perubahan RPJMD.

Tabel 5.3 Perbandingan Sasaran Pembangunan RPJMD Murni dan RPJMD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

Tujuan Lama	Tujuan Baru	Indikator Tujuan Lama	Indikator Tujuan Baru	Sasaran Lama	Sasaran Baru	Indikator Sasaran Lama	Indikator Sasaran Baru
VISI: "Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat"							
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum							
Tujuan 1: Memantapkan kinerja pelayanan publik	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP (predikat)	Nilai AKIP
						Nilai LPPD (Nilai)	Nilai LPPD
						Opini BPK atas LKPD (predikat)	Opini BPK terhadap LKPD
							Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
							Indeks Inovasi Daerah (Kategori)
				Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)		Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah							
Tujuan 2: Mantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Konektivitas Wilayah (Desa yang terhubung) (%)	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	Meningkatnya layanan angkutan darat	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman	Konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan darat (%)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih (%)
							Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)
				Meningkatnya layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan perairan, sungai dan penyeberangan (%)	Persentase Penyediaan Infrastruktur (%)
					Meningkatnya pelayanan transportasi		Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per

								tahun (%)
Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat								
Tujuan 3.1 Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam	PDRB Sektor Pertanian dan Pariwisata (Rp Ribu)	Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam (%)	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian dan Pariwisata (Rp Ribu)		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)
	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan hidup		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			a. Indeks Kualitas Udara b. Indeks Kualitas Air c. Indeks Kualitas Tutupan lahan
Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa								
Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Melek Huruf (%)		Angka Harapan Lama Sekolah
				Meningkatnya	Meningkatnya			Angka Harapan

				pelayanan kesehatan masyarakat	derajat kesehatan masyarakat	Hidup (tahun)	Hidup (tahun)
				Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Ribu rupiah)	Pengeluaran per kapita (Ribu rupiah)
Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan							
Meningkatkan partisipasi sosial	Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah	Cakupan partisipasi sosial (%)	Indeks partisipasi sosial	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender IPG)	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Desa dengan peningkatan Status Desa dalam Indeks Desa membangun (Desa)	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Meningkatnya program masyarakat pedesaan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Status Indeks Desa Membangun
					Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Misi 6: Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial							
Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial	Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)	Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)	Menurunnya angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan indikator Angka Kemiskinan. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat, dengan indikator Tingkat. Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks Rasa Aman
					Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak		Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)
Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran							
Menurunkan tingkat kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase penduduk miskin	PDRB per kapita (Rp)	Meningkatnya cakupan bantuan kepada masyarakat miskin	Menurunnya tingkat kemiskinan	Cakupan bantuan kepada masyarakat miskin (%)	Persentase penduduk miskin (%)

				Meningkatnya kesempatan kerja	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat kesempatan kerja (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah							
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi sektor potensial	Indeks gini (indeks)	PDRB (Milyar Rupiah)
					Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)
					Meningkatnya nilai ekspor daerah		Nilai ekspor bersih perdagangan (Milyar Rupiah)
					Meningkatnya Daya Saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Tabel. 5.4.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Target Capaian Indikator Kinerja Evaluasi RPJMD
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Realisasi			Target		Kondisi Akhir
				2019	2020	2021*	2022	2023	
VISI: KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT									
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum									
1.1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	44,36	60.05	65.02	69.00	72.00	79.00	79.00
1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai AKIP (Predikat)	CC	CC	B	B	B	BB	BB
		2. Nilai LPPD (Nilai)	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		3. Opini BPK atas LKPD (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,06	2,07	2,08	2,08	2,09	3,0	3,0
		5. Indeks Inovasi Daerah (Kategori)	N/A	N/A	Sangat Inovatif/ Zona Hijau	Sangat Inovatif/ Zona Hijau	Sangat Inovatif/ Zona Hijau	Sangat Inovatif/ Zona Hijau	Sangat Inovatif/ Zona Hijau
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75,22	82.38	84,31	85,12	87,65	89,22	89,22
Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah									
2.1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	NA	NA	NA	NA	49,91	51,20	51,20
2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih	29	29	35	42	48	52,00	52,00

				(%)							
			2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	40	40	46	57	65	70	70
	2.1.2	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	1.	Persentase Penyediaan Infrastruktur (%)	56,64	57,8	58,24	58,67	59,5	60	60
	2.1.3	Meningkatnya pelayanan transportasi	1	Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun (%)	100	100	100	100	100	100	100
Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat											
3.1	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam		Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam (%)		53,04	53,04	53,92	54,79	55,66	56,54	56,54
3.2	3.1.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)		44,74	44,68	46,78	47,54	48,56	49,61	49,61
	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan hidup		53,04	53,04	57,79	58,64	59,12	60,05	60,05
	3.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Udara	92,91	92,91	92,15	93,12	93,50	93,98	93,98
2.			Indeks Kualitas Air	52,22	52,22	52,86	52,99	52,55	53,78	53,78	
3.			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24,69	24,69	50,72	52,55	53,87	52,22	52,22	
Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa											
4.1	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)		66,51	66,84	66,54	66,54	67,53	68,04	68,04

	4.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >25 tahun (tahun)	7,19	7,22	7,23	7,52	8	8,5	8,5
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,89	11,9	11,91	12	12,5	13	13
	4.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.	Angka Harapan Hidup (tahun)	67,32	67,66	67,85	68,05	69,9	70	70
	4.13	Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun)	3.	Pengeluaran per kapita (Ribu rupiah)	10.254	11.987	12.724	13.565	13.800	14.200	14.200
Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan											
5.1	Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah		Indeks partisipasi sosial		60	60	65	70	75	80	80
	5.1.1	Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	1.	Tingkat Partisipasi kelembagaan Masyarakat (%)	60	60	65	70	75	80	80
5.2	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		Status Indeks Desa Membangun		Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Maju
	5.2.1	Meningkatnya keikutsertakan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	2.	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	60	60	65	70	75	80	80
	5.2.2	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	82,34	82,57	83,41	83,58	84,00	85,00	85,00
Misi 6: Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial											
6.1	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial		Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)		60,00	60,15	60,15	60,23	60,65	61,62	61,62
	6.1.1	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat	1.	Indeks Rasa Aman	66,66	66,66	75,80	80,45	95,00	100	100

	6.1.3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	2	Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100	100
Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran											
	7.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		PDRB per kapita (Rp)	58,78	60,46	68,6	69,8	70,5	72,5	72,5
	7.1.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,05	6,54	5,93	5,75	5,34	5,00	5,00
	7.1.2	Menurunnya tingkat pengangguran	2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,96	4,55	4,35	4,30	4,00	3,00	3,00
Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah											
	8.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah		Laju pertumbuhan ekonomi (%)	3,61	4,19	0,34	3,60	4,30	4,90	4,90
	8.1.1	Meningkatnya produksi sektor potensial	1.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	58,78	60,46	68,6	69,20	69,80	70,00	70,00
	8.1.2	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	2.	Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)	5.116	385,23	448,6	1.681,9	2.782,6	7.491	7.491
	8.1.3	Meningkatnya nilai ekspor daerah	3.	Nilai ekspor bersih perdagangan (juta Rupiah)	629.2	301.51	409.15	410.12	412.67	415.35	415.35
	8.1.4	Meningkatnya daya saing daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah	NA	NA	NA	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi

BAB

6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dirumuskan secara komprehensif. Selain untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat diselenggarakan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta

pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Pada Tabel 6.1 disajikan keterkaitan antara strategi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum						
1.1	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja • Meningkatkan kualitas Pengawasan Daerah • Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset • Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
			Nilai AKIP	Persentase		
			Nilai LPPD	Nilai		
			Opini BPK atas LKPD	Predikat		
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	Peningkatkan penerapan standar pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan • Peningkatan integritas, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Aparatur 		
Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah						
1.1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar		Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	Indeks		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih (%)	Persentase	Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)		Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat
		Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Penyediaan Infrastruktur (%)	Persentase	Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar masyarakat
		Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara per tahun (%)	Persentase	Peningkatan pergerakan orang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan pergerakan orang/barang melalui terminal dan dermaga
Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat						
1.1	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam		Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam (%)	Persentase		
		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perikanan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.2	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Persentase		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Udara b. Indeks Kualitas Air c. Indeks Kualitas Tutupan lahan	Indeks	Menjamin keberlangsungan pembangunan dengan tetap menjaga indeks kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara • Meningkatkan kualitas tutupan lahan
Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa						
1.1	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Indeks)		
		Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan • Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan • Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak • Pencegahan dan penanganan penyakit menular • Standarisasi pelayanan Kesehatan • Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	(Rp per kapita per tahun)	Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka Peluang usaha • Meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan (usaha) besar • Peningkatan Bantuan sosial
Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan						
1.1	Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah		Indeks Partisipasi Sosial	Indeks		
		Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi kelembagaan Masyarakat (%)	Persen	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi sosial kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah
1.2	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		Status Indeks Desa Membangun			
		Meningkatnya keikutsertakan masyarakat	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	Indeks	Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin tingkat keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dalam

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		dalam program pemberdayaan masyarakat				rangka program DMIJ Plus Terintegrasi
		Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Menciptakan Ruang Perempuan dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Responsif Gender dalam Pembangunan • Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan
Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial						
1.1	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial		Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)			
		Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat	Indeks Rasa Aman	(indeks)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat • Mengurangi Risiko Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin rasa aman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari • Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Peran Keluarga dan Kesetaraan Gender • Pemenuhan hak anak dan perempuan secara berkesinambungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak • Meningkatkan cakupan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran						
1.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		PDRB per kapita (Rp)	Rp		
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	(%)	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19 • Peningkatan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin terdampak COVID-19
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	Memperluas Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja • membuka lapangan kerja sektor unggulan daerah
Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah						
1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Meningkatnya produksi sektor potensial	PDRB	(Milyar Rupiah)	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing dan produktivitas industri unggulan • Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata
		Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi PMDN	(Milyar Rupiah)	Meningkatkan Daya tarik investasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan angka nilai investasi di daerah
		Meningkatnya nilai ekspor	Nilai ekspor	(Milyar Rupiah)	Meningkatkan perdagangan dalam dan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang,

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		daerah			luar negeri	pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah Kebijakan pembangunan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus sasaran dari waktu ke waktu. Arah kebijakan selama 5 tahun tersebut kemudian dijabarkan kepada prioritas dan sasaran pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan menjadi tahapan pembangunan selama lima tahun yang nantinya akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada saat penyusunan RKPD.

Tahapan dalam pencapaian Indragiri Hilir Gemilang pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 6.1 dan Tabel 6.2.



Gambar 6.1
Tahapan Pencapaian Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2023

Berikut ini merupakan deskripsi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023

Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2023

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Tema: Meningkatkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	Tema: Memperkuat Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	Tema: Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	Tema: Lebih Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	Tema: Menjaga Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir
Fokus: Meningkatkan DMIJ Plus terintegrasi pada seluruh wilayah desa dan kelurahan, dan rehabilitasi industri kelapa untuk kesejahteraan rakyat	Fokus: Memperkuat DMIJ Plus terintegrasi melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan pengembangan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	Fokus: Memantapkan DMIJ Plus terintegrasi melalui pemantapan infrastruktur dan penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	Fokus: Lebih memantapkan DMIJ Plus terintegrasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pemantapan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan pemantapan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	Fokus: Menjaga DMIJ Plus terintegrasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat Serta Tata Kelola pemerintahan

Mengacu pada Tabel 6.2 dapat dinyatakan bahwa fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 5 (lima) tahun kedepan adalah meningkatkan, memperkuat, memantapkan dan

menjadi prioritas pembangunan daerah pada Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus (DMIJ-Pus). Hal ini didasarkan pada diterbitkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat peran Desa dalam pembangunan, Desa bukan hanya menjadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subjek pembangunan. Semangat ini diterima di seluruh daerah di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Indragiri Hilir khususnya telah menyambut semangat pembangunan Desa ini dengan meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Program ini bermula dari tahun 2014 di era kepemimpinan pertama H. Muhammad Wardan, karena pada saat itu Bupati melihat bahwa pembangunan di Desa masih sangat kekurangan, pada saat itu program ini bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang merupakan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program ini bertujuan sebagai penggerak agar pembangunan/kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bercirikan daerah, artinya mengikuti khasanah Indragiri Hilir.

Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini selanjutnya. pada masa kepemimpinan H. Muhammad Wardan dan H. Syamsuddin Uti di rancanglah sebuah program yang melanjutkan program yang telah dibuat sebelumnya. Bupati sebagai inisiator menempatkan Program ini sebagai wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan, kemudian juga dengan melihat perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada maka dinilai perlu untuk memberikan perhatian pada tercapainya porsi besar pada Pendapatan

Asli Desa yang berasal dari sumber-sumber ekonomi Desa yang potensial dan belum teroptimalkan.

Ruang lingkup Program DMIJ Plus Terintegrasi terdiri dari:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan Program DMIJ Plus Terintegrasi disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat, LKD, LAD dan unsur kelembagaan lainnya. Adapun musyawarah desa dimaksud dilakukan dengan keterwakilan unsur-unsur masyarakat yang jumlahnya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Perencanaan pembangunan desa dilakukan setelah melalui pengkajian potensi desa yang selanjutnya disusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa. Adapun RPJM Desa dimaksud adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan persetujuan BPD.

Dalam mewujudkan dan merealisasikan RPJM Desa, pemerintah desa bersama BPD menetapkan RKP Desa. Adapun Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun sesuai skala prioritas desa seperti peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta prioritas pembangunan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan persetujuan BPD.

Berdasarkan dokumen RKP Desa, pemerintah desa bersama BPD menyusun dokumen APB Desa. Adapun APB Desa dimaksud disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.

Kemudian APB Desa setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan persetujuan BPD. APB Desa terdiri atas: Pendapatan Desa; belanja Desa; dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa bersumber dari: Pendapatan Asli Desa; Pendapatan transfer; dan Pendapatan lain-lain. Adapun Belanja Desa terdiri dari atas bidang: penyelenggaraan pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; pemberdayaan masyarakat Desa; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Sedangkan Pembiayaan terdiri dari kelompok: penerimaan pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan.

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Adapun pelaksanaan pembangunan desa dimaksud meliputi: pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dilaksanakan secara partisipatif sesuai dengan dokumen APB Desa. Dalam hal kegiatan pembangunan yang melibatkan desa lainnya, maka desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lainnya melalui Badan Kerjasama Antar Desa. Begitu pula dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang terintegrasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian desa yang dilaksanakan melalui instrumen Indeks Desa Membangun atau instrument lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan lebih lanjut tentang sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diatur melalui Peraturan Bupati.

2. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Adapun pembangunan kawasan perdesaan dimaksud terdiri atas: penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu; penguatan kapasitas masyarakat; kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh desa di kawasan perdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati. Adapaun penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati;

- c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
- d. Berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati.

Untuk itu, bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkan kepada gubernur. Sedangkan pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kabupaten dicantumkan dalam RPJMD kabupaten dan RKPD kabupaten.

Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat melalui camat. Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa. Bupati dapat menerbitkan Keputusan tentang tim yang mengkaji Pembangunan Kawasan Perdesaan

3. Kegiatan Kelurahan

Pelaksanaan kegiatan di Kelurahan wajib mendukung kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah. Begitu juga pelaksanaan kegiatan di Kelurahan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Adapun mekanisme Program DMIJ Plus Terintegrasi secara umum mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional.

4. Kegiatan Prioritas

Daerah menetapkan kegiatan prioritas Program DMIJ Plus Terintegrasi sesuai dengan kearifan lokal desa dan kelurahan. Kegiatan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Gerakan Magrib Mengaji.
- b. Gerakan 1 Desa 1 Kelurahan 1 Rumah Tahfidz.

- c. Pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur.
- d. Gerakan 1 Desa 1 BUM Desa.
- e. Bantuan Operasional Kader Posyandu.
- f. Bantuan Operasional PAUD.
- g. Bantuan Operasional 10 Program Pokok PKK.
- h. Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

5. Peningkatan Ekonomi Desa

Peningkatan Ekonomi Desa dapat melalui BUM Desa, BUM Desa Bersama dan Usaha Ekonomi Kelurahan melalui usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Untuk mewujudkan Peningkatan Ekonomi Desa, maka Desa wajib membentuk suatu gerakan yang disebut dengan Gerakan 1 (satu) Desa 1 (satu) BUM Desa. Pembentukan, pengelolaan dan pelaksanaan BUM Desa, BUM Desa Bersama dan Usaha Ekonomi Kelurahan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

6. Penilaian Desa

Penilaian Desa merupakan upaya identifikasi awal untuk melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun penilaian desa mengacu kepada peraturan yang berlaku.

7. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari APBD dan sumber lain tidak mengikat yang diperuntukan untuk desa dan kelurahan. Adapun sumber dana yang diperuntukan untuk desa terdiri dari: ADD; Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan Bantuan Keuangan kepada Desa dan sumber-sumber lainnya yang sah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran. ADD tersebut dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran. Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran. Adapun bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tata cara pembagian dan penyaluran ADD, Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan Bantuan Keuangan Kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8. Pendampingan

Untuk mendukung terlaksananya Program DMIJ Plus Terintegrasi, dilakukan dengan pola pendampingan. Adapun pendampingan tersebut bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam Pembangunan Partisipatif.
- c. Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya desa bagi kesejahteraan dan keadilan.
- d. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama desa dan Kawasan Perdesaan.

Pendampingan dilakukan melalui: Fasilitator Kabupaten ditingkat Kabupaten; Fasilitator Masyarakat ditingkat Kecamatan; dan Pendamping Desa ditingkat Desa dan Kelurahan. Adapun kebutuhan formasi Pendamping diusulkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan ditetapkan oleh Bupati. Dalam menjalankan tugasnya, Pendamping berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Panduan tentang Pendampingan, Kontrak Kerja, Petunjuk Teknis Operasional serta Panduan Program DMIJ Plus Terintegrasi lainnya. Pendampingan dimaksud diutamakan bagi yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh pemerintah.

9. Sistem Informasi

Masyarakat desa dan kelurahan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang Program DMIJ Plus Terintegrasi. Untuk mendukung penyebaran informasi, maka Program DMIJ Plus Terintegrasi dalam prosesnya diinformasikan kepada

masyarakat. Penyebaran informasi dilakukan ditingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Penyebaran informasi di desa dan kelurahan dapat dilakukan melalui: musyawarah dan pertemuan sosial; media papan informasi di tempat umum; pengumuman-pengumuman lisan dengan pengeras suara di tempat-tempat umum dan di masjid, surau dan mushalla; dan/atau pengumuman-pengumuman tertulis di tempat-tempat umum. Penyebaran informasi ini memuat informasi penting tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan. Informasi pembangunan tersebut juga dapat disesuaikan dengan keadaan desa dan kelurahan dan diperbaharui sesuai dengan tahapan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Laporan penyelenggaraan Program DMIJ Plus Terintegrasi ditingkat kecamatan disusun dan disampaikan oleh camat. Dalam proses penyusunan laporan, maka camat dibantu oleh pendamping di tingkat kecamatan. Laporan tersebut merupakan laporan pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi di desa dan kelurahan yang ada di kecamatan.

Pemerintah Daerah mempublikasikan penyelenggaraan Program DMIJ Plus Terintegrasi kepada masyarakat. Publikasi dilakukan melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; atau
- c. website Pemerintah Daerah atau media sosial.

10. Integrasi

Program DMIJ Plus Terintegrasi merupakan tanggung jawab seluruh OPD, satker dan lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam mendukung program DMIJ Plus Terintegrasi, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemerintah desa dan kelurahan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Kabupaten/Kota Sehat;
- b. Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. Pencegahan Stunting;
- d. Taman Bacaan Masyarakat
- e. Rumah Layak Huni; dan
- f. Rumah Desa Sehat.

Mengacu pada konsep DMIJ Plus Terintegrasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, diiringi dengan implementasi program dan kegiatan yang konsisten dan sungguh-sungguh maka Kabupaten Indragiri Hilir akan mampu meningkatkan Indeks Desa Membangun menjadi kondisi yang jauh lebih baik. Kondisi awal dan target Indeks Desa Membangun (ID) Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3. Kondisi Awal dan Target Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2019

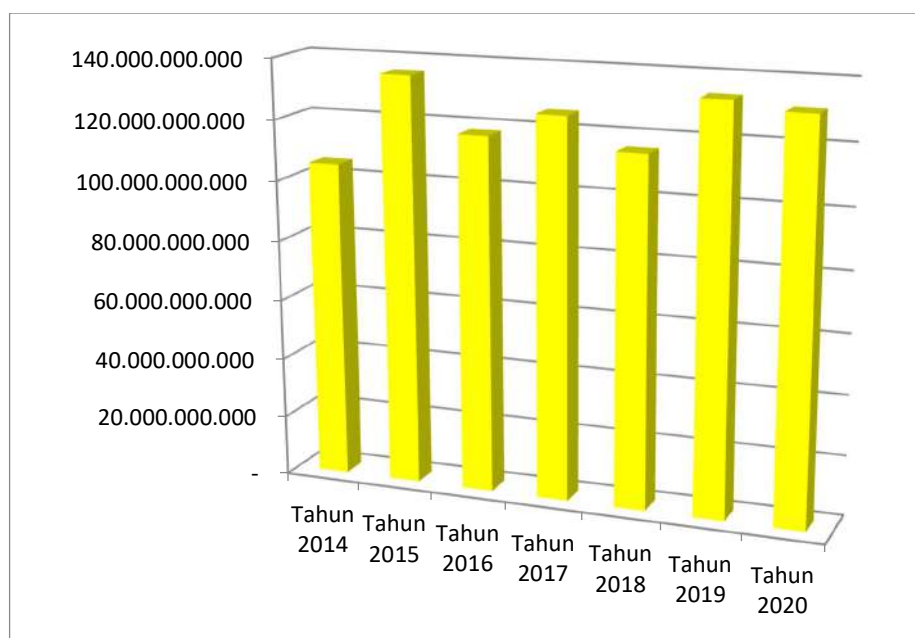
No	Status IDM	Kondisi Awal (2018)	Target IDM				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri	0	0	0	1	3	10
2	Desa Maju	2	12	20	30	41	50
3	Desa Berkembang	49	59	70	79	153	137
4	Desa Tertinggal	129	115	103	87	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	17	11	4	0	0	0
	Jumlah Desa	197	197	197	197	197	197

Dari Tabel 6.3. dapat dilihat bahwa dari 197 desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, masih terdapat 17 desa dengan status sangat tertinggal dan 129 desa tertinggal. Sementara itu desa dengan status

berkembang dan maju, masing-masing 49 desa dan 2 desa, belum ada desa dengan status mandiri.

Melalui Program/Kegiatan DMIJ Plus Terintegrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan tidak terdapat lagi desa sangat tertinggal pada tahun 2021 dan tidak terdapat lagi desa tertinggal pada tahun 2022. Seiring dengan itu, jumlah desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri terus ditingkatkan, sehingga pada akhir RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, yakni pada tahun 2023, jumlah desa berkembang sebanyak 137 desa, jumlah desa maju sebanyak 50 desa, dan jumlah desa mandiri sebanyak 10 desa.

Gambaran tentang pendanaan DMIJ dan DMIJ Plus Terintegrasi tahun 2014-2019 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 6.2.
Alokasi Anggaran DMIJ (2014-2018) dan DMIJ Plus Terintegrasi (2019-2020) Kabupaten Indragiri Hilir

6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka kebijakan pengembangan kewilayahan perlu dilakukan. Wilayah strategis yang perlu dibangun dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah: (1) Pembangunan Kotabaru sebagai pusat pelayanan publik; (2) Pengembangan Kawasan Wisata; dan (3) Pembangunan dan pengembangan Kawasan Kuala Enok-Pulau Burung, yang merupakan kawasan yang terletak di bagian hilir kabupaten ini.

Untuk membangun Kotabaru sebagai pusat pelayanan publik sejumlah program/aktivitas akan dilakukan. Aktivitas utama yang akan dilakukan adalah pembebasan lahan seluas 520 Ha, berturut-turut untuk tahun pertama (2019) seluas 120 Ha, tahun kedua (2020) seluas 100 Ha, tahun ketiga (2021) seluas 100 Ha, tahun keempat (2022) seluas 100 Ha, dan tahun kelima (2023) seluas 100 Ha. Untuk mewujudkan hal tersebut akan dilakukan melalui Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pengembangan Kawasan Pemukiman.

Pengembangan Kawasan Wisata ditujukan untuk menumbuhkembangkan berbagai potensi alam dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun pengembangan Kawasan Wisata mencakup objek/kegiatan, daerah dan jenis wisata berikut ini:

Tabel 6.4. Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2006

No.	Objek/Kegiatan Wisata	Wilayah	Jenis
1.	Ekowisata Solop	Desa Pulau Cawan Kec.Mandah	Wisata Alam
2.	Pantai Ujung Jungkir	Kecamatan Kateman	Wisata Alam
3.	Hutan Mangrove	Kecamatan Batang Tuaka, Mandah, Concong Luar, Kuindra sekitarnya	Wisata Alam
4.	Pulau dan Tanjung :	Kab. Inhil	Wisata Alam

No.	Objek/Kegiatan Wisata	Wilayah	Jenis
	- Pulau Burung, Pulau Busung, Pulau Palas, Pulau Sangkaran Ayam, Pulau megat, Tanjung Bakung dan Tanjung Datuk		
5.	Danau : - Danau Air Tawar, Danau Mablue, Danau 70 dan Danau Mentimun	Kab. Inhil	Wisata Alam
6.	Gua : - Gua Api Panjang - Gua Batu leman - Gua Bukit Lempang	Kec. Pulau Burung Kec. Kemuning Kec. Kemuning	Wisata Alam
7.	Perbukitan : - Bukit 86 - Bukit Selensen Salak - Bukit Condong - Bukit Terbakar - Bukit Berbunga - Bukit Sari Intan	Kec. Kemunig Kec. Kemunig Kec. Kemunig Kec. Kemunig Kec. Kemunig Kec. Teluk Belengkong	Wisata Alam
8.	Air Terjun : - Air Terjun 86 - Air Terjun Tembulun Rusa - Air Terjun Selensen Salak	Kec. Kemuning	Wisata Alam
9.	Flora dan Fauna	Kec. Kateman	Wisata Alam
10.	Dayung Indragiri	Rumbai Jaya Kec. Kempas	Wisata Buatan
11.	Festival Sampan Leper	Kuala Getek Kec. Batang Tuaka	Wisata Buatan
12.	Menongkah Kerang	Kec. Concong dan Kuindra	Wisata Buatan
13.	Semah Kampung	Desa Pelanduk Kec. Mandah	Wisata Buatan
14.	Kenduri Duano	Kec. Concong	Wisata Buatan
15.	Pekan Budaya Indragiri Hilir	Kab. Inhil	Wisata Buatan
16.	Dondang Tandak dan Pesta Pantai Solop	Kec. Mandah	Wisata Buatan
17.	Jelajah Indragiri Hilir	Kab. Inhil	Wisata Buatan
18.	Agro Wisata Pulau Burung	Kec. Pulau Burung	Wisata Buatan
19.	Memancing laut	Kab. Inhil	Wisata Buatan
20.	Sampan layar Tradisional	Kec. P. Burunf dan Kec. Mandah	Wisata Buatan
21.	Haul jamak	Kab. Inhil	Wisata Buatan
22.	Pertandingan dan Pertunjukan Olahraga	Kab. Inhil	Wisata Buatan
23.	Sejarah-Cagar Budaya-Religi : - Meriam Belanda - Rumah Kuning - Makam Syekh Abdurrahman Siddiq - Makam Syekh Abdurrahman Yaqub - Makam Penghulu Jumat - Makam Penghulu Hitam - Makam Narsinga II - Makam Datok Geronggang	Kec Mandah Kec Mandah dan Kec. Enok Desa Hidayat Kec. Kuindra Kec. Reteh Sungai Sirih Bayas Jaya kec. Kempas Desa Pekan Tua Kec. Kempas Kec. Mandah	Sejarah-Cagar Budaya-Religi

No.	Objek/Kegiatan Wisata	Wilayah	Jenis
	- Makam Raja Seman Usman	Desa batu Ampar Kec. Kemuning	
	- Makam Tuan Haji Khalil	Kec. Mandah	
	- Makam Letda M.Boya	Enok	
	- Makam K.H.T Zainuddin Yaqob	Tempuling	
	- Makam Putri Tujuh	Batu Ampar	
	- Makam Tuanku Syarif	Mandah	
	- Makam Raja Hawi	Mandah	
	- Makam Tengku Abdul Fatah	Desa Mumpa	
	- Keramat Teluk Sungka	Kec. GAS	
	- Makam Raja Kemuning	Kemuning Tua	

Pengembangan Kawasan Kuala Enok–Pulau Burung sangat penting sebagai outlet utama hasil bumi bagi daerah Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara. Daerah hinterland Kuala Enok merupakan daerah-daerah yang kaya akan hasil sumberdaya alam seperti perkebunan Kelapa Sawit, kopra, karet, hasil hutan, perikanan, minyak kelapa serta mulai dibukanya penambangan batu bara di daerah hinterland-nya. Keberadaan pintu keluar bagi daerah Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara sudah sangat mendesak karena akan memperpendek waktu dan efisiensi biaya dalam memasarkan hasil bumi di daerah tersebut. Kuala Enok akan didorong untuk menjadi outlet Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara.

Guna mempersiapkan Kuala Enok sebagai outlet Riau bagian Selatan dan Jambi bagian Utara, telah tersedia pelabuhan yang sarana dan prasarannya setara dengan pelabuhan internasional serta dukungannya terhadap pembangunan kemaritiman. Disamping itu, pembangunan ekonomi bidang kemaritiman pada sub sektor perikanan yang memiliki potensi pada wilayah pesisir dan laut, dengan sebagian besar produksi perikanan merupakan perikanan tangkap laut sebesar 93.279 ton yang terdapat salah satunya di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk pengembangan kawasan Kuala Enok, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mempersiapkan dan membangun infrastruktur pendukung lainnya. Secara bertahap Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir, telah membangun jalan yang langsung menghubungkan Kuala Enok dengan Jalan Lintas Timur (Jalan Nasional) sebagai akses langsung bagi daerah – daerah sekitar untuk masuk ke Kuala Enok.

Sedangkan Pulau Burung merupakan pulau kembaran dari Kuala Enok yang dipersiapkan sebagai pusat industri untuk pengolahan berbagai hasil bumi daerah hinterland Kuala Enok. Sampai sekarang, industri yang paling menonjol di Pulau Burung adalah pengolahan hasil kelapa dan kelapa sawit. Industri daerah ini telah mampu menghasilkan turunan hasil kelapa dan kelapa sawit, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produknya. Pada masa yang akan datang diharapkan dengan dukungan kawasan industri yang baik akan memberi nilai tambah bagi sumber daya alam secara keseluruhan bagi hinterland Kuala Enok sehingga kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dapat meningkat.

Perencanaan pengembangan kawasan industri Kuala Enok telah dimulai sejak tahun 2010. Milestone pengembangan kawasan industri Kuala Enok tahun 2010 – 2014 meliputi:

1. Feasibility studi kawasan klaster industri berbasis pertanian dan oleokimia di Kuala Enok 2010 oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau.
2. Penyusunan dokumen eksisting infrastruktur fisik dan non fisik serta rancangan umum pengembangan kawasan klaster Kuala Enok tahun 2011 oleh Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Riau.
3. Identifikasi dan inventarisasi kepemilikan lahan kawasan klaster Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) Kuala Enok tahun 2011 oleh Bappeda Provinsi Riau.

4. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Penyusunan dokumen AMDAL kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Penyusunan business plan kawasan klaster Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
6. Penyusunan Perda penetapan kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
7. Penyusunan Perda badan pengelola kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
8. Penyusunan blok plan dan animasi kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012.
9. Rencana penyertaan modal pada badan pengelola klaster IHKS Kuala Enok tahun 2013 oleh Biro Ekonomi Setda Provinsi Riau.
10. Rencana penyusunan dokumen identifikasi dan inventarisasi existing teknologi IHKS pada perusahaan dan perguruan tinggi serta lembaga terkait lainnya tahun 2013 oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
11. Pembebasan lahan kawasan IHKS Kuala Enok tahun 2014 oleh Badan Pengelola.
12. Master plan pengembangan IHKS Kuala Enok tahun 2014. (14) Pelaksanaan persiapan pembangunan infrastruktur dalam kawasan tahun 2014.

Pengembangan kawasan IHKS Kuala Enok memerlukan dana yang besar sehingga juga memerlukan dukungan yang besar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Namun perlu disadari

bahwa memasuki tahun 2014, peta kebijakan pembangunan di Provinsi Riau telah mengalami perubahan yang cukup drastis. Meski pengembangan kawasan IHKS Kuala Enok termasuk ke dalam isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau, namun komitmen pimpinan di Provinsi Riau sudah mulai teralihkan dengan isu-isu strategis lainnya. Disisi lain, semakin terbatasnya pendanaan Pemerintah Pusat menjadikan pembangunan kawasan industri yang sudah direncanakan “ditinjau kembali” berdasarkan skala prioritas. Hingga saat ini, keberadaan IHKS Kuala Enok prioritasnya berada di bawah kawasan IHKS Pelintung dan bahkan dengan kawasan industri Buton.

Peluang terbesar untuk melanjutkan pembangunan IHKS Kuala Enok selain mempunyai potensi sumber daya alam adalah dengan letak yang strategis, dimana pelabuhan Kuala Enok terhubung dengan alur pelayaran internasional (Selat Malaka) dan bisa menampung kapal yang berbobot 25.000 DWT serta adanya rencana pemerintah pembangunan Hight Way dan Rail Way Ke Pelabuhan Kuala Enok. Daya dukung lainnya adalah tersedianya areal pelabuhan seluas 105 Ha dan kawasan industri seluas 5.203,95 Ha yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Indragiri Hilir.

Pengembangan IHKS Kuala Enok sejalan dengan program strategis nasional (Nawacita - 9) dengan agenda prioritas meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga berupaya untuk mendukung program-program nasional sebagaimana telah ditetapkan seperti:

1. PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)

Tujuan : Untuk mempercepat pencapaian Akses Air Minum dan Sanitasi Bagi Masyarakat, terutama bagi masyarakat Perdesaan, sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat. Program ini dimulai dari Tahun 2006, yang saat itu disebut PAMSIMAS I. Selanjutnya pada Tahun 2012 - 2016 disebut Program Pamsimas II dan untuk Tahun 2016 - 2019 disebut Program PAMSIMAS Tahap III.

Sumber Dana : Bantuan Bank Dunia (*WORD BANK*) melalui APBN, APBD Kabupaten dan Kontribusi Masyarakat.

Pola

Penganggaran

Program : 70 % APBN, Minimal 10 % APBD dan 20 % Kontribusi Masyarakat dalam bentuk *IN-KIND* 16 % dan *IN-CASH* 4 %.

Pola

Pelaksanaan : Pemberdayaan Masyarakat.

Target

Program

s/d. 2019 : Tercapainya secara nasional akses penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat 100 % di Tahun 2019 yang masuk dalam target nasional *UNIVERSAL ACCESS*.

Instansi/

lembaga

terkait : Ditingkat Nasional; Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Bank Dunia, Ditingkat Daerah; BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi/menangani air minum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD/BPMADES/DPMD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Dinas Kehutanan.

Mengingat pentingnya Program Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (PAMSIMAS) sampai berakhirnya target nasional Tahun 2019, maka Kabupaten yang mendapat alokasi program diharuskan membuat/menyusun dokumen perencanaan yang diberi nama dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) yang sewaktu-waktu dalam perjalanannya akan ditinjau kembali atau direvisi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten. Dokumen RAD-AMPL ini akan disusun dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) sehingga penganggaran program dalam APBD dapat lebih terjamin setiap tahunnya.

2. PROGRAM PENANGANAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

Tujuan : Untuk memperbaiki dan merubah lingkungan kawasan permukiman kumuh menjadi tidak kumuh, terutama dikawasan perkotaan.

Program ini dimulai dari Tahun 2006, yang saat itu disebut dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program ini di Tahun 2012 berubah nama menjadi Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Selanjutnya, mulai Tahun 2016 hingga saat ini berubah lagi nama programnya menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kotaku diarahkan hanya pada Kawasan Perkotaan dan untuk Kabupaten Indragiri Hilir, program ini diarahkan pada Kawasan Perkotaan Dalam Ibukota Kabupaten yaitu 8 kelurahan di Kecamatan Tembilahan.

Arah kebijakan terhadap kegiatan pembangunan pada Program Kotaku ini adalah (1) perbaikan infrastruktur permukiman (jalan dan jembatan dalam lingkungan permukiman, drainase lingkungan, MCK, Pemb. Sumur Bor untuk Air Bersih), (2) perbaikan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha kecil dengan cara memberikan bantuan dana bergulir (*Revolving*), dan (3) perbaikan status sosial masyarakat dengan cara memberikan pelatihan keterampilan usaha kecil, seperti menjahit, montir/perbengkelan, kerajinan dan lain-lain.

Sumber dana : APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Kontribusi Masyarakat.

Pola Pelaksanaan : Pemberdayaan Masyarakat

Target

Program

s/d. 2019 : Tercapainya secara nasional kawasan permukiman perkotaan yang tidak kumuh (0 % Kumuh) di Tahun 2019 yang masuk dalam target nasional *UNIVERSAL ACCESS*.

Target nasional

di tahun 2019 : Tercapainya target UNIVERSAL ACCES, yakni terciptanya akses air minum 100%, tidak adanya Kawasan Kumuh (0%) dan terbangunnya sanitasi yang layak (100%), yang dikenal dengan target UNIVERSAL ACCESS 100%-0%-100% TAHUN 2019.

3. PROGRAM PEGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW).

Tujuan : Untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di Kecamatan, serta kualitas permukiman perdesaan.

Program ini dimulai dari Tahun 2006, yang saat itu disebut dengan Program *Rural Infrastructure Support Program* Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM). Program ini lebih diarahkan pada wilayah-wilayah kecamatan/perdesaan yang merupakan wilayah sentra produksi lokal, baik pertanian, perkebunan, perikanan, industri lokal yang selama ini kurang memadai infrastrukturnya.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah membangun jalan-jalan akses kecamatan/perdesaan yang non status guna untuk memudahkan akses produksi, agar perekonomian masyarakat setempat/desa tumbuh lebih baik.

Sumber dana : APBN untuk pelaksanaan pembangunan fisiknya, dan Kontribusi APBD Minimal 5 % dari total APBN

untuk biaya penunjang program dalam bentuk kegiatan koordinasi dan pengendalian di lapangan.

Pola

Pelaksanaan : Kontraktual dengan Pihak Ketiga.

OPD Pelaksana

Fisik : Satker Pusat di Provinsi

4. PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

SDGs sebagai pengganti *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia yang berisikan 17 tujuan (goal), 169 sasaran (target) dan 220 indikator pembangunan dan telah disepakati oleh lebih dari 190 negara. SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru dengan masa berlaku dari tahun 2015 hingga 2030, tujuan dan sasaran SDGs diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara-negara maju (seperti penanganan masalah konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara sedang berkembang (seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

SDGs berisi 4 pilar, 17 Tujuan, 169 target dan 241 indikator, sebagai berikut:

1. Pilar Sosial (5 tujuan, 47 target, 77 indikator):
 - a. Tujuan 1. Menghapus kemiskinan: 7 target, 12 indikator
 - b. Tujuan 2. Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan: 8 target, 14 indikator
 - c. Tujuan 3. Kesehatan untuk semua umur: 13 target, 27 indikator

- d. Tujuan 4. Pendidikan yang berkualitas dan merata: 10 target, 10 indikator
- e. Tujuan 5. Kesenjangan Gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan: 9 target, 14 indikator
- 2. Pilar Ekonomi (5 tujuan, 54 target, 72 indikator):
 - a. Tujuan 7. Energi untuk semua: 5 target, 6 indikator
 - b. Tujuan 8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja layak: 12 target, 17 indikator
 - c. Tujuan 9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan: 8 target, 11 indikator
 - d. Tujuan 10. Menurunkan ketimpangan: 10 target, 12 indikator
 - e. Tujuan 17. Kerjasama internasional yang semakin kuat: 19 target, 25 indikator
- 3. Pilar Lingkungan (6 tujuan, 56 target dan 69 indikator):
 - a. Tujuan 11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan: 10 target, 15 indikator
 - b. Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan: 11 target, 13 indikator
 - c. Tujuan 13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya: 5 target, 7 indikator
 - d. Tujuan 14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam: 10 target, 10 indikator
 - e. Tujuan 15. Melindungi dan merestorasi ekosistem dan perlindungan hutan: 12 target, 14 indikator
- 4. Pilar Hukum dan Pemerintahan (1 tujuan, 12 target, 23 indikator):

- a. Tujuan 16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non diskriminasi: 12 target, 23 indikator.

Disamping berbagai kebijakan kewilayahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada hari Senin tanggal empat bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan, telah diselenggarakan Rapat Pleno II pada Musrenbang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rapat Pleno II Musrenbang RPJMD terhadap materi yang dipaparkan dan dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi Rapat Pleno II musrenbang RPJMD, seluruh peserta Rapat Pleno II Musrenbang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 menyepakati:

- (1) Mendorong percepatan penanganan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terhadap infrastruktur jalan dan jembatan di masing-masing kabupaten dalam Provinsi Riau.

Kabupaten Pelalawan :

- Simpang Bunut -Teluk Meranti sepanjang 84,59 Km'.
- Teluk Meranti - Sebekek sepanjang 50,88 Km'.

Kabupaten Indragiri Hulu :

- Peningkatan Infrastruktur Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiambang - Mumpa, panjang 72 Km' (sesuai SK Gubernur).
- Ruas Jalan Pekan Heran - Kampung Besar Seberang sepanjang 12 Km', sedangkan ruas jalan Kampung Besar Seberang sampai Pelor perlu ditingkatkan sepanjang 22 Km'.
- SPAM Regional telah dilakukan survey 2 tempat yaitu di Kuala Mulya 2 Ha, Pulau Jum'at 5 Ha.

- Pemeliharaan jalan dan abrasi Sungai mengancam jalan pada ruas Jalan Provinsi Rengat - Kuala Cenaku (batas Inhil) sepanjang 26,26 Km'.
 - Pemeliharaan Jalan Kuala Cenaku (batas Inhil) - Rumbai Jaya sepanjang 36,25 Km'.
 - Jalan alternatif Rengat-Kuala Cenaku telah disusun perencanaannya yang dimulai dari Simpang Sawmill - Bukit Meranti - Rawa Bangun - Rawa Asri - Rawa Sekip - Kuala Cenaku.
- (2) Mendorong percepatan penanganan Infrastruktur jalan dan jembatan serta melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

- Peningkatan Jalan Parit 10 / Senyerang - Pasar Senin ke batas Indragiri Hilir, sepanjang 6 KM.
- Pembangunan Jembatan Sungai Pengabuan 1 Unit.
- Peningkatan jalan Kelurahan Betara Kiri menuju Desa Sungai dungun sepanjang 7 KM.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

- Pengembangan Infrastruktur Jalan sebagai konektivitas sebagai jalur arus lalu lintas orang dan barang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Peningkatan Ruas Jalan :
 1. Pangkal Duri - Mendahara Tengah.
 2. Sungai Tawar - Mendahara Hilir.
 3. Mendahara Hilir - Geragai - Muara Sabak Barat.
- Pembangunan Jembatan :
 1. Sungai Mendahara.

2. Parit 7, 8, 9 Pangkal Duri.
 3. Kanal WKS.
 4. Parit Jenggek, Parit 4 Bengkok, Parit Berkat dan Box Culvert di Desa Sungai Tawar.
- Pengembangan Perkebunan kelapa masyarakat, khususnya kelapa dalam.
 - Pemanfaatan BUMDES secara bersama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Menyusun dan melengkapi proposal bersama untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan Musrenbangnas.
 - Forum CSR bersama untuk percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perusahaan yang dilewati jalur jalan yang akan dibangun.
- (3) Mendorong percepatan penanganan ruas jalan dan jembatan yang ada di wilayah Provinsi Riau, khususnya antar Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan :
- Kabupaten Indragiri Hilir :**
- Ruas Simpang Kuala Saka - Teluk Lanjut (Sei.Guntung).
 - Ruas Sungai Teritip (Sambu) - Pulau Burung.
- (4) Mendorong percepatan penanganan ruas jalan dan jembatan antar wilayah Provinsi dan kerjasama lainnya antara Pemda Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.
- Ruas Enok - Batas Jambi.
 - Desa Sungai Asam merupakan Daerah Konservasi untuk usaha Budidaya species kepiting, siput dan kerang-kerangan.
- (5) Mendorong percepatan kerjasama antar wilayah di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Pariwisata, Pengelolaan Mangrove dan Perikanan untuk daerah konservasi dalam usaha

Budidaya species kepiting, siput dan kerang-kerangan serta kerjasama di semua sektor dan sub sektor yang memiliki potensi yang sama pada Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk percepatan Pembangunan Daerah yang bersifat saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).

6.4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghadapi pandemi COVID-19 akan melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19 merupakan upaya mengembalikan kondisi perekonomian dan kesehatan masyarakat yang terdampak akibat terjadinya pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi (1) pemulihan ekonomi, (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat, (3) Peningkatan sistem perlindungan sosial. Adapun rincian dari kebijakan tersebut sebagai berikut:

(1) Pemulihan ekonomi

a. Membangkitkan UMKM di tengah Pandemi

Kerjasama dengan pihak Swasta melalui dana CSR nya adalah upaya untuk membantu para pelaku UMKM. Dana CSR ini diberikan dalam bentuk barang untuk menunjang usaha UMKM. Bantuan sosial juga diberikan kepada para pelaku UMKM yang masuk dalam kategori miskin dan rentan serta Bantuan keuangan kepada para pelaku UMKM dengan mendorong sektor perbankan untuk memberikan pinjaman lunak kepada para pelaku UMKM.

b. Penerapan Protokol Kesehatan di Dunia Usaha

Kemenkes (2020) pada tanggal 20 Mei 2020 mengeluarkan ketentuan mengenai protokol pencegahan COVID-19 di area publik khususnya untuk setkor jasa dan perdagangan. Ketentuan tersebut berlaku bagi pengurus atau pengelola tempat kerja/pelaku usaha, pekerja, dan konsumen/pelanggan. Langkah tersebut dianjurkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM antara lain dalam bentuk penggunaan masker baik oleh pelaku sektor UMKM maupun masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa UMKM. Para pengurus atau pengelola tempat kerja/pelaku usaha masih bisa melakukan Aktivitas sehingga masih mendapatkan penghasilan dalam upaya pemulihan Ekonomi.

c. Optimalisasi Bumdes

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya dapat berperan dalam upaya pemulihan ekonomi di Desa melalui Optimalisasi Simpan pinjam untuk kegiatan usahatani dan perdagangan, Pengelolaan kios usaha seperti kios pertanian dan kios perdagangan, Pengelolaan air bersih, Pengelolaan pasar.

(2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Terjadinya pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan Di Kabupaten Indragiri Hilir Upaya pencegahan penularan dan meminimalisasi jumlah kematian akibat COVID-19 memerlukan penanganan secara

serius. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan dalam penanganan penyebaran COVID-19.

kebijakan dan strategi yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi mulai dari fasilitas layanan primer (Puskesmas atau Klinik Swasta) sampai ke fasilitas layanan tingkat lanjut yaitu Rumah Sakit Rujukan termasuk laboratorium kesehatan
- b. Penguatan kapasitas sumber daya kesehatan, baik SDM maupun sarana prasarana pelayanan kesehatan
- c. Menjamin pembiayaan layanan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

(3) Peningkatan sistem perlindungan sosial

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dan memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat Indragiri Hilir, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut perlu ditangani dengan optimalisasi program perlindungan sosial yang komprehensif bagi masyarakat yang terkena dampak dengan strategi peningkatan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID -19.

Tabel 6.5 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020

No	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public yang transformatif	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
2	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan kualitas serta pemerataan tenaga Pendidik	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang baik
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan disabilitas	Meningkatkan infrastruktur Kawasan permukiman kumuh
4	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian/Perkebunan untuk peningkatan ketersediaan dan keanekaragaman pangan dengan memperhatikan kelestarian alam
5	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan kualitas serta pemerataan tenaga pendidik
6	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan kualitas serta pemerataan tenaga pendidik
7	Mengembangkan sistem jaringan transportasi antar Kecamatan yang terintegrasi	Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan disabilitas
8	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang baik	Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan
9	Meningkatkan infrastruktur Kawasan permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas Kelapa
10	Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana	Mememberdayakan ekonomi masyarakat melalui ekonomi kreatif

No	Tahun 2019	Tahun 2020
11	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas Kelapa	Meningkatkan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berbasis potensi kearifan lokal daerah
12	Melakukan pemetaan terhadap potensi ekonomi kreatif	Meningkatkan iklim dan promosi investasi daerah baik migas dan non migas
13	Meningkatkan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berbasis potensi kearifan lokal daerah	Memperbaiki iklim dan promosi investasi
14	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan

Tabel 6.6 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023

No	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Meningkatkan program DMIJ Plun Terintegrasi dalam mewujudkan Inhil Gemilang	Meningkatkan program DMIJ Plun Terintegrasi dalam mewujudkan Inhil Gemilang	Meningkatkan program DMIJ Plus Terintegrasi dalam mewujudkan Inhil Gemilang
2	Meningkatkan infrastruktur Kawasan permukiman kumuh	Mengembangkan sistem jaringan transportasi antar Desa dan Kecamatan yang terintegrasi	Mengembangkan sistem jaringan transportasi antar Desa dan Kecamatan yang terintegrasi
3	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang baik	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang baik	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan kualitas serta pemerataan tenaga pendidik

No	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4	Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan disabilitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas kelapa	Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan disabilitas
5	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan kualitas serta pemerataan tenaga pendidik	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan sarana prasarana perikanan	Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan
6	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	Menguatkan pemberdayaan terhadap ekonomi kreatif masyarakat berdasarkan potensi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas pertanian
7	Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan sarana prasarana kelautan dan perikanan
8	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas pertanian	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan	Menguatkan pemberdayaan terhadap ekonomi kreatif masyarakat berdasarkan potensi daerah
9	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan sarana prasarana kelautan dan perikanan	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	Meningkatkan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berbasis potensi kearifan lokal daerah

No	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
10	Menguatkan pemberdayaan terhadap ekonomi kreatif masyarakat berdasarkan potensi daerah	Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
11	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
12	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan	Meningkatkan kompetensi wirausaha muda	Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata
13	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan produksi hasil industri	Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata
14	Menguatkan pemberdayaan terhadap ekonomi kreatif masyarakat berdasarkan potensi daerah	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi	Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu
		Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Memperbaiki iklim dan promosi investasi

6.5. Integrasi KLHS dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir

Skenario pembangunan berkelanjutan berisi tentang perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tim Penyusun mendampingi tim penyusun RPJMD menyelaraskan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan konsultasi publik. Dalam tahap persiapan penyusunan rancangan RPJMD, tim penyusun RPJMD menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah ke dalam rumusan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan rencana pendanaan, sementara tim Tim Penyusun melaksanakan proses kajian khususnya integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedalam Rencana awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Setelah diperoleh hasil kajian Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir, yang berupa deskripsi pengaruh kaitan isi Rencana Teknokratik dan Visi Misi Program Bupati terpilih, Tim Penyusun merumuskan langkah-langkah atau skenario pembangunan berkelanjutan, dimana dengan pertimbangan isu strategis dan kondisi daya dukung lingkungan, dirumuskan program-program penting untuk mendukung implementasi TPB Kabupaten Indragiri Hilir. Secara umum skenario terjadi dalam dua keadaan yaitu berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.

Kemudian Tim Penyusun menyusun rekomendasi yang berisi rangkuman langkah- langkah, skenario atau alternatif program prioritas, serta program-program prioritas yang pengaruhnya perlu dikaji lebih dalam melalui proses. Hasil rekomendasi ini, oleh tim penyusun RPJMD digunakan sebagai salah satu dasar acuan dalam forum konsultasi publik.

Dari hasil konsultasi publik, Tim Penyusun mendampingi tim penyusun RPJMD menyelaraskan program prioritas. Hasil penyelarasan digunakan oleh tim penyusun RPJMD untuk merumuskan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. Sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tata cara mengintegrasikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD sesuai dengan sistematika pada tabel berikut ini:

Tabel : 6.7. Integrasi Program Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan	Target	Program
PILAR SOSIAL		
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak • Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk	• Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Tujuan	Target	Program
	berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	(Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan) <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan)
	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Program Lingkungan Sehat Perumahan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin • Penyediaan Sanitasi Lingkungan berbasis Masyarakat Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan
	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah	Program Perencanaan Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan • Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Program Perencanaan Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan Prasarana Permukiman
	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Program Penataan Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (penerbitan akte kelahiran) • Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (penerbitan KTP) • Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (penerbitan Kartu Keluarga)

Tujuan	Target	Program
Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (P2B)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> Kajian Pengembangan Agribisnis Hortikultura
	Terselenggaranya system pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, oeternakan dan perikanan efisien dilokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan <ul style="list-style-type: none"> Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Program Upaya Kesehatan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	Angka Partisipasi Kasar (APK) pengurusan tinggi meningkat menjadi 36,73 %	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan <ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan dan Pembinaan Perguruan Tinggi Pembangunan Gedung Pengadaan Perlengkapan Perguruan Tinggi
PILAR EKONOMI		
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Program Pengembangan

Tujuan	Target	Program
untuk Semua		Destinasi Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik dan sedang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pembangunan Jalan • Pembangunan Jalan • Perencanaan Pembangunan Jembatan • Pembangunan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan • Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
	Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%)	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri • Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya • Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri • Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah • Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perbengkelan • Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri Sandang • Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri Kerajinan Umum • Pembinaan Industri Kecil

Tujuan	Target	Program
		<p>dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri Perabot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perbengkelan
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan didalam Negara dan Antar Negara	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	<p>Program Perencanaan Sosial Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
PILAR LINGKUNGAN		
Tujuan 6 . Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	<p>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan <p>Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan • Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin
	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Sumber Air Baku untuk air minum di kab. Inhil • pembangunan Unit Air Baku di Perkotaan dan IKK • Penyiapan SIPA Untuk Kebutuhan Air Baku Air Minum
	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	<p>Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin
Tujuan 11. Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Tujuan	Target	Program
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan • Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
	Meningkatnya ratio RTH per satuan wilayah be HPL / HGB	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> • Penataan RTH • Pemeliharaan RTH • Penataan Lampu Taman dan Jalan
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya		Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Logistik Bencana • Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana <ul style="list-style-type: none"> • Operasional Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana
PILAR KELEMBAGAAN		
Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial • Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645	<ul style="list-style-type: none"> • Program jaminan sosial • Program kemitraan bina ideology Negara dan wawasan kebangsaan

Tujuan	Target	Program
	orang pada tahun 2019.	
	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.	

6.6. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dapat dirumuskan program pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 6.8
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 - 2023
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
	Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeataatan hukum										
	1.1. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		44,36	2,88		3,00		3,29		
	1.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP (Predikat)		CC	B		B		BB		
		Nilai LPPD (Nilai)		Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
		Opini BPK atas LKPD (predikat)		WTP	WTP		WTP		WTP		
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,06	0,09		2,09		3,00		

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Persen	100	100	1.281	100	1.190	100	1.190	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPd dan RENJA)	Persen	100	100	1.536	100	2.180	100	2.180	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	60	70	735	80	1.060	90	1.060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	100	292.055	100	331.857	100	331.857	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen	100	100	1.570	100	3.030	100	3.030	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	8,86	9,29	3.512	9,5	3.756	10,02	3.647	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti pada tahun berkenaan	Persen	63,36	86	1.938	100	2.548	100	2.548	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Nilai	68	70	278	75	386	80	386	INSPEKTORAT DAERAH
2 16 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Persen	30,55	53,70	8.689	81,48	7.075	100	3.573	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Diskominfoopers Kab.Inhil	Persen	18	26,47	986	58,82	892	100	451	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen	26	33,33	-	66,48	-	100	-	

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase documen data statistik sektoral daerah yang tepat waktu	Persen	20	26,10	63	59,70	100	100	51	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian	Persen	20	25	103	53	100	100	51	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	1.1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		75,22	85,12		87,65		89,22		
2 12 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	90,00	91,00	445	92,50	403	93,00	203	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	90,00	0,00	-	92,00	70	92,50	35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 12 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen	22	22	607	70	290	90	146	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Angka	3.25	3.64	139	3.70	345	3.80	1.910	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	60	65	368	70	180	80	517	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai	2.60	2.70	-	2.80	113	3.00	57	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	2	9	96	24	107	43	54	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persen	100	100	25.828	100	27.790	100	27.790	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	4.545	100	4.870	100	5.075	SEKRETARIAT DAERAH
4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitasi	Persen	100	100	35.975	100	42.273	100	42.273	SEKRETARIAT DPRD
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yg terselesaikan	Persen	100	100	2.248	100	3.998	100	2.019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	40	48	2.743	50	2.713	52	1.370	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	1.251	90	17	90	8	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	350	100	22	100	11	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	611	100	71	100	36	KECAMATAN TEMPULING
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	166	100	33	100	17	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	128	0	-	0	-	KECAMATAN CONGONG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	702	100	59	100	30	KECAMATAN ENOK
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	179	100	22	100	11	KECAMATAN GAUNG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	409	100	24	100	12	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	414	0	-	0	-	KECAMATAN KATEMAN
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	236	0	-	0	-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	259	100	67	100	34	KECAMATAN KEMUNING

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	111	100	11	100	5	KECAMATAN KERITANG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	136	100	4	100	2	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	140	100	37	100	19	KECAMATAN MANDAH
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	113	100	26	100	13	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	15	100	1	100	0	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	390	100	22	100	11	KECAMATAN RETEH

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	150	100	19	100	9	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	206	100	19	100	-	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	55	100	56	100	28	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.155	100	616	100	311	KECAMATAN KEMPAS
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	560	100	172	100	87	KECAMATAN KEMUNING
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	570	100	308	100	156	KECAMATAN KERITANG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	291	100	219	100	110	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	560	100	410	100	207	KECAMATAN MANDAH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	560	100	289	100	146	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	0	-	100	10	100	5	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.682	100	720	100	364	KECAMATAN RETEH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	533	100	248	100	125	KECAMATAN SUNGAI BATANG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	618	100	310	100	157	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	46	100	46	100	23	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	59	100	75	100	38	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	77	100	45	100	23	KECAMATAN TEMPULING
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	127	0	-	0	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	58	100	130	100	66	KECAMATAN CONGONG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	49	100	87	100	44	KECAMATAN ENOK
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	114	100	29	100	14	KECAMATAN GAUNG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	120	100	93	100	47	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	116	100	46	100	23	KECAMATAN KATEMAN
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	60	100	52	100	26	KECAMATAN KEMPAS
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	101	100	97	100	49	KECAMATAN KEMUNING

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	65	100	47	100	24	KECAMATAN KERITANG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	47	100	46	100	23	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	119	100	87	100	44	KECAMATAN MANDAH
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	95	100	76	100	38	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	89	100	80	100	41	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	58	100	85	100	43	KECAMATAN RETEH

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	86	100	86	100	43	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	78	100	114	100	58	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	67	100	101	100	51	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	170	100	50	100	25	KECAMATAN KEMPAS
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	247	100	82	100	41	KECAMATAN KEMUNING
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	289	100	47	100	24	KECAMATAN KERITANG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	249	100	95	100	48	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	271	100	42	100	21	KECAMATAN MANDAH
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	362	100	79	100	40	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	277	100	69	100	35	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	261	100	27	100	14	KECAMATAN RETEH
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	172	100	31	100	16	KECAMATAN SUNGAI BATANG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	255	100	189	100	95	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	365	100	96	100	48	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah										
	2.1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)		27,03	49,78		51,56		54,71		
	2.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih (%)		12,54	45,83		48,92		52,00		

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)			63,47		64,52		65,56		
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	Persen	0	1,42	2.418	0,79	1.875	0,79	947	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	1,17	1,07	4.193	1,14	1.083	1,02	547	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Persen	1,17	1,17	9.780	1,14	537	1,02	271	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan Kualitas PSU di Lingkungan Perumahan	Persen	1,93	5,18	35.361	5,18	33.075	5,18	19.411	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.1.2. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Penyediaan Infrastruktur (%)		36,58	45,83		65,21		70,10		
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	1,02	1,4	17.439	2,00	27.386	1,00	14.646	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2021		2022		2023			
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)		
1 3 3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	Persen	11.32	11.88	6.191	12,00	10.588	14,29	6.598	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan	Persen	27,00	90	1.455	90	16.028	90	8.094	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	54,13	55,10	33.283	56,00	53.818	57,00	40.171	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	Persen	0	90,00	221	90,00	441	90,00	222	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	Persen	0	65,00	1.600	70,00	1.800	80,00	909	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.1.3.	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun (%)		100,00	100,00		100,00		100,00		

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Persen	75,89	80,29	2.226	85,10	4.664	90,17	2.355	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	49,68	69,88	5.847	81,84	4.090	92,47	2.066	DINAS PERHUBUNGAN
	Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat										
	3.1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam	Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam (%)		53,04	54,79		55,66		65,54		
	3.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)		44,74	47,54		48,56		49,61		

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan inprastruktur dan seluruh kemandirian pangan yang tersedia	Persen	25,71	55,71	1.417	65,71	561	75,71	8.012	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Persen	27,1	57,91	1.182	73,32	582	83,29	1.854	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan pangan Utama	Persen	0	22,22	120	33,33	306	66,67	155	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	15	70	390	80	63	85	32	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton	54845,77	72281,92	4.609	81000	2.842	83000	6.191	DINAS PERIKANAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2259,08	4086,36	2.125	5000	2.312	5500	5.010	DINAS PERIKANAN
3 25 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan Perkapita Tahunan	Kg/Kapita/Th	39,69	39,96	248	40,10	275	40,20	139	DINAS PERIKANAN
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	32,50	39,17	1.315	42,50	4.115	45,75	2.078	DINAS PERKEBUNAN
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	21,38	61,25	2.228	81,19	1.993	90,95	2.606	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	23,52	31,67	9.642	35,75	9.358	45,22	9.978	DINAS PERKEBUNAN
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen	2,56	28,83	1.687	41,96	648	75,56	3.365	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	Persen	21,14	70,53	175	95,23	156	100	479	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	5	45	88	65	83	70	42	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	13,5	31,17	986	40,00	1.440	42,5	1.227	DINAS PERKEBUNAN
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan evaluasi	Persen	75	78,33	265	80	250	90	126	DINAS PERKEBUNAN
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	55,95	56,26	1.777	56,42	1.775	65,00	896	DINAS PERKEBUNAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	16,01	43,25	378	56,87	474	73,04	796	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup		53,04	58,64		59,12		60,05		
		Indeks Kualitas Udara		92,91	93,12		93,50		93,98		
		Indeks Kualitas Air		52,22	52,99		52,55		53,78		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan		24,69	52,55		53,87		52,22		
2 11 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	1	501	2	499	2	252	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Indeks	91,67	92,09	231	92,29	787	92,50	398	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	13,79	0	-	65,00	265	35,00	134	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 11 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persen	55	70	57	85	77	100	39	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	149	100	202	100	102	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				100	61	0	-	0	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	97	100	63	100	32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	0	-	100	36	100	18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	Persen	90	90	7.749	90	9.125	90	6.678	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa										
	4.1. Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)		66,53	66,54		67,53		68,04		
	4.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan		7,18	7,23		7,35		7,38		
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	99,75	100	150.568	100	122.094	100	146.460	DINAS PENDIDIKAN
		APK SD	Persen	104,31	106,01	-	106,09	-	106,17	-	
		APK SMP	Persen	98,33	102,56	-	103,40	-	104,14	-	
		APM SD	Persen	94,92	95,88	-	100,00	-	100,00	-	
		APM SMP	Persen	82,39	83,3	-	100,00	-	100,00	-	DINAS PENDIDIKAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
1 1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	94,39	97	236	98	681	99	344	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	46,43	55	-	60	-	70	-	
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	Persen	40	49,57	799	50	1.070	55	540	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Atlit Berprestasi yang Meningkatkan	Persen	70	91,54	8.051	95	6.380	100	3.222	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan Kepramukaan	Persen	0	100	868	100	850	100	429	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 23 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	40	40	10.952	42	159	45	80	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	4.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		67,09	68,00		68,02		68,05		
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	77	89	133.769	95	45.730	100	82.501	DINAS KESEHATAN
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	Persen	100	100	28.774	100	1.971	100	995	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	8.219	100	326	100	165	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	10.856	100	501	100	253	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDM_K) Yang Kompeten	Persen	60	92	3.248	95	581	98	3.160	DINAS KESEHATAN
1 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan sesuai Standard	Persen	70	76	516	100	251	100	534	DINAS KESEHATAN
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	50	93	1.265	95	704	97	658	DINAS KESEHATAN
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	100	-	100	75	100	38	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk terhadap Program KKBPK	Persen	10,50	13,50	47	17,50	159	20,50	231	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	19,92	23,26	5.283	26,75	460	36,92	3.509	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	Persen	56	58	1.005	60	290	75	3.351	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
	4.1.3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun)	11.003,59	10.645,15		10.850,12		11.604,12		
2 17 2		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan rekomendasi teknis Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	3	10	83	23	99	33	50	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	20,00	32,26	80	36,31	125	53,65	63	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 4		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	25	45	63	50	139	65	70	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan koperasi yang memiliki Kompetensi berdaya saing	45,50	62,83	67	70,68	247	78,53	125	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Produksi yang diberdayakan	6,00	6	-	-	#VALUE!	5,00	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi	Persen	67,00	70	1.503	71,00	1.717	72,00	867	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Skala UMKM yang meningkat	Unit	1382	1392	203	1402	1.156	1407	584	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan										
	5.1. Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah	Indeks partisipasi sosial		51,20	48,00		48,00		49,00		
	5.1.1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi kelembagaan Masyarakat (%)		20,00	26,00		28,00		28,00		
2 13 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa	Persen	N/A	100	2.497	100	198	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	Persen	N/A	100	16.536	100	14.703	100	7.425	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 13 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	N/A	60	881	80	2.493	100	1.259	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	25	100	48	100	24	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	179	100	95	100	48	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	209	100	53	100	27	KECAMATAN TEMPULING
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	197	100	45	100	23	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	200	100	65	100	33	KECAMATAN CONCONG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	255	100	49	100	25	KECAMATAN ENOK
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	344	100	101	100	51	KECAMATAN GAUNG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	174	100	71	100	36	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	204	100	83	100	42	KECAMATAN KATEMAN
	5.2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Status Indeks Desa Membangun	Status	Tertinggal	Berkembang		Maju		Maju		
	5.2.1 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	Persen	60	70		75		80		
2 13 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen	N/A	0	75	25,38	4.816	50,76	2.432	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	4.480	100	2.127	100	1.074	DESA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.136	100	639	100	323	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	2.238	100	825	100	416	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	590	100	208	100	105	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	560	100	200	100	101	KECAMATAN CONCONG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	2.242	100	799	100	403	KECAMATAN ENOK
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	492	100	196	100	99	KECAMATAN GAUNG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.690	100	735	100	371	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.504	100	668	100	338	KECAMATAN KATEMAN
	5.2.2 Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	Indeks	82,34	83,58		84,00		85,00		
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	Persen	0,5	1,81	381	1,81	785	1,81	396	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kuallitas keluarga	Persen	30	35	78	40	240	60	121	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
	Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial										
	6.1. Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial	Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)		60,00	60,23		60,65		61,62		
	6.1.1. Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat	Indeks Rasa Aman		66,66	80,45		95,00		100,00		
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	Persen	100	100	3.192	100	2.464	100	2.244	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	3.358	100	4.407	100	2.226	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	Persen	0,23	0,02	4.314	0,013	3.127	0,011	1.579	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warganegara yg memperoleh pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	100	278	100	148	100	75	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TEMPULING
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN CONCONG

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN ENOK
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN GAUNG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN KATEMAN
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN KEMUNING

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen		0	100	0	-	0	-	KECAMATAN KERITANG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN MANDAH
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN RETEH

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
8 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	431	100	900	100	455	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	0	100	1.248	100	1.605	100	811	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	0	100	210	100	645	100	326	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	Persen	100	100	132	100	275	100	139	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Persen	100	100	370	100	312	100	158	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.1.2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)		100,00	100,00		100,00		100,00		

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	Persen	65	66	167	67	332	69	275	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen	0	40	-	50	92	70	46	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	Persen	65	70	157	75	400	85	202	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pendampingan dn Perlindungan Anak	Persen	50	55	694	60	340	70	516	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran										
	7.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PDRB per kapita (Rp)		84,80	88,12		90,15		92,35		
	7.1.1. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (%)		6,54	5,75		5,34		5,00		
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Persen	100	100	2.147	100	3.650	100	2.143	DINAS SOSIAL
1 6 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase korban Tindak Kekerasan yang menerima bantuan sosial	Persen	100	100	105	100	116	100	59	DINAS SOSIAL

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	1.316	100	1.641	100	1.729	DINAS SOSIAL
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	100	100	2.316	100	267	100	449	DINAS SOSIAL
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	545	100	288	100	146	DINAS SOSIAL
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	Persen	100	100	46	100	75	100	38	DINAS SOSIAL
	7.1.2. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		4,56	4,30		4,28		4,05		
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	36.96	36.96	224	36.96	165	36.96	2.383	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja Yang ditempatkan	Persen	59,00	6,23	555	6,87	600	6,87	2.501	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	53,00	38,41	283	39,00	150	39,00	76	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 32 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi	Persen	100	100	236	100	133	100	67	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 32 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	Persen	100	100	64	100	67	100	34	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah										
	8.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi (%)		4,19	4,40		4,55		4,66		
	8.1.1. Meningkatnya produksi	PDRB (Milyar Rupiah)		6,84	28,56		28,63		28,71		

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
2 22 2	sektor potensial PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang	Jenis	4	1	1.591	4	1.199	4	605	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 22 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional yang Berkembang	Persen	20	0	75	30	75	40	38	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 22 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Cagar Budaya	4	0	-	4	61	4	31	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan	Persen	30	0	801	40	1.193	50	1.652	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	35	39,82	610	45	1.046	50	528	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang	Persen	30	0	70	35	200	40	101	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	8.1.2. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)		62.701,99	66.252,92		67.325,25		68.521,00		
2 18 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	Persen	50	0	-	0	-	60	1.150	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	207	93	112	93	640	93	323	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	8.1.3. Meningkatnya nilai ekspor daerah	Nilai ekspor (Milyar Rupiah)		301,51	410,12		412,67		415,35		

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
3 30 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan	Persen	100	100	30	100	174	100	88	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persen	100	100	3.044	100	1.293	100	1.553	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kecamatan yang Dipantau	Persen	100	100	189	100	337	100	320	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	US Dolar	193,87	482,95	791	507,10	860	522,32	1.013	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/ tera ulang	Persen	23,42	41,33	311	74,56	505	93,65	795	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	80	85	246	90	262	95	132	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)	
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina	Persen	20,01	21,11	2.014	77,80	4.662	100	2.904	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	Persen	0	58	20	80	70	100	36	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	100	100	40	100	54	100	27	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BAB

7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan penting untuk dirumuskan dalam rangka memperoleh gambaran tentang alokasi penerimaan daerah terkait dengan kapasitas riil kemampuan daerah, belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung), dan pembiayaan pengeluaran. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 3 bahwa hal ini perlu dilakukan dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow of priority program). Oleh karenanya maka diperlukan kebijakan Alokasi Anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan ditentukannya prioritas alokasi anggaran.

Dalam penganggaran program perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Tujuan Kerangka pendanaan ini digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap

tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. kerangka pendanaan dalam perhitungannya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Meskipun mengalami perubahan, RPJMD ini tetap mempunyai arah dan tujuan besar yang sama yaitu selain sebagai penjabaran visi dan misi kepada daerah terpilih, yang tentu juga tetap mempedomani RPJPD, RTRW, RPJMN maupun RPJMD Provinsi. Program pembangunan dan program perangkat daerah dalam perubahan ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target outcomes hingga impacts serta pemenuhan SPM, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 ini sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga dalam penyusunan tabel "Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan" dibuat dalam dua tabel yaitu Tabel 7.2 (terlampir) yang berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Tabel 7.3 (terlampir) yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Dengan adanya PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bantuan sosial dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan kembali. Total pagu indikatif dalam melaksanakan program pembangunan RPJMD sebagaimana terdapat pada Tabel 7.2 (terlampir) dan Tabel 7.3 (terlampir) harus sama nilainya dengan nilai kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	Perubahan RKPD 2021	RKPD 2022	Proyeksi 2023
4	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	2.067.058.819.141	1.900.387.533.317	1.953.709.274.528
5	BELANJA	2.128.161.959.475	1.900.387.533.317	1.953.709.274.528
05.01	BELANJA OPERASI	1.619.352.290.729	1.432.316.775.873	1.400.662.507.228
05.01.01	Belanja Pegawai	850.258.123.225	759.346.953.393	778.330.627.228
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	707.059.408.355	616.464.369.350	568.000.000.000
05.01.03	Belanja Subsidi	2.000.000.000	-	-
05.01.04	Belanja Hibah	56.517.049.149	54.173.573.130	52.000.000.000
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	3.517.710.000	2.331.880.000	2.331.880.000
05.02	BELANJA MODAL	219.743.832.388	140.139.735.807	213.820.577.556
05.02.01	Belanja Modal Tanah	5.000.000	450.000.000	-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.564.323.597	30.951.893.307	5.000.000.000
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.399.505.565	36.934.508.500	15.000.000.000
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.790.562.606	65.403.624.000	191.320.577.556
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.954.440.620	4.849.710.000	2.000.000.000
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000	1.550.000.000	500.000.000

Kode	Uraian	Perubahan RKPD 2021	RKPD 2022	Proyeksi 2023
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.025.353.655	43.000.000.000	40.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	4.025.353.655	43.000.000.000	40.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	285.040.482.703	284.931.021.637	299.226.189.745
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.769.478.203	4.660.017.137	5.146.872.975
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.271.004.500	280.271.004.500	294.079.316.770

Sumber: Hasil Analisis

7.2 Program Perangkat Daerah

Program prioritas dirumuskan dalam rangka pencapaian visi Pembangunan Daerah “Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat”. Program sebagaimana dimaksud harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program prioritas ini meliputi program kegiatan pada urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Untuk program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah berdasarkan bidang urusan seperti Tabel 7.2.

Tabel 7.2.

Program Prioritas yang Disertai Pendanaan Realisasi 2019 dan 2020

Kabupaten Indragiri Hilir yang Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1.	DINAS PENDIDIKAN				104.786,38		114.961,21	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	85	1.167,28	66,90	1.559,05	Dinas Pendidikan
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan	Persen	20	71,17	11	7.576,98	Dinas Pendidikan
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	Persen	100	117,25	0	-	Dinas Pendidikan
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	34	242,14	67	204,09	Dinas Pendidikan
	5. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	0	-	104	261,05	Dinas Pendidikan
	6. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	27	2.353,48	27	3.575,28	Dinas Pendidikan
	7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	77	81.949,94	78	83.212,49	Dinas Pendidikan
	8. Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	Persen	95	656,66	97	496,37	Dinas Pendidikan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
		yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000 Murid SD/MI)	Orang	667	505,57	833	1.061,32	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs- (Guru/10.000 Murid SMP/MTs)	Orang	769		714		Dinas Pendidikan
10.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan	Persen	100	17.722,88	100	17.014,59	Dinas Pendidikan
2. DINAS KESEHATAN								
				163.731,68		133.833,52		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	87	10.002,80	87	8.500,38	Dinas Kesehatan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persen	66,24	3.543,30	69	539,47	Dinas Kesehatan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan Keterampilan Khusus	Persen	14	2.411,04	197	613,26	Dinas Kesehatan
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tercapainya penyusunan dokumen capaian kinerja dan keuangan	Persen	61	181,33	89	205,66	Dinas Kesehatan
5.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Jumlah dokumen penunjang program kerja	Dokumen	0	-	9	160,58	Dinas Kesehatan
6.	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat, bahan medis habis pakai (BMHP) dan vaksin di Puskesmas	Persen	23	8.792,86	63	9.192,77	Dinas Kesehatan
7.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Sakit	Kunjungan	333.355	65.778,98	116.993	49.700,55	Dinas Kesehatan
8.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan		749,52	15,75	62,83	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	9.	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Gizi Buruk	Persen	-	12	25,66	Dinas Kesehatan	
	10.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	1.367,78	14	787,25	Dinas Kesehatan	
	11.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	Persen	-	27	136,10	Dinas Kesehatan	
	12.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa Sehat	Persen	1.980,96	11	474,75	Dinas Kesehatan	
	13.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Angka Kesakitan	Persen	3.773,79	42	1.741,82	Dinas Kesehatan	
	14.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	8.627,59	42	562,11	Dinas Kesehatan	
	15.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Fasyankes sesuai standar	Puskesmas	29.860,16	0	30.482,55	Dinas Kesehatan	
	16.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Kemitraan Organisasi Profesi dan LSM Kesehatan	Persen	252,18	25	61,32	Dinas Kesehatan	
	17.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kepuasan Masyarakat	Persen	39,63	54	21,35	Dinas Kesehatan	
	18.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase AKI dan AKB	Persen	333,92	52	37,01	Dinas Kesehatan	
	19.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD	Persen	25.263,28	55	28.270,10	Dinas Kesehatan	
	20.	Program Manajemen dan Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajemen Sistem Informasi Kesehatan berbasis IT	PKM	772,55	7	2.258,02	Dinas Kesehatan	
3.	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN				84.183,27		105.265,75		
	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	17	8.666,93	17	6.775,56	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilihan
	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	20	1.308,33	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilihan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	0	-	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	15	429,67	15	233,10	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	0	-	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
6.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	0	-	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
7.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	Persen	0	-	0	-	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
8.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan (%)	Persen	19	221,37	57	56,31	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
9.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi HIV AIDS, dll (%)	Persen	14	8,65	0	-	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
10.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	Persen	0	-	20,00	47,04	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	Persen	27	10.425,95	20	38.608,06	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
	12. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)	Persen	1	140,00	20	148,44	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
	13. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (%)	Persen	100	64.290,71	20	58.088,91	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG			6.156,68		7.758,12		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	17	2.713,11	16	1.819,61	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	10	72,75	20	24,26	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	20	51,00	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
	KESEHATAN					0	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
5.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase penyampaian Informasi kesehatan	Persen	38	16,65	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
6.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi penanggulangan penyakit menular	Persen	0	-	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
7.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	Persen	20	374,41	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
8.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persen	18	773,71	12	5.546,92	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
9.	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persen	0	-	8	367,33	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
10.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	Persen	18	2.155,04	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
5.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA			25.702,26		23.499,67		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	7	3.755,26	20	3.292,57	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	20	264,43	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah	Persen	20	352,39	20	5,55	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
KESEHATAN						-	0	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
5.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	Persen		-	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
6.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	Persen		-	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
7.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	Persen		-	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
8.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	Persen	100	15.139,11	77	13.847,13	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
9.	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persen		-	0	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
10.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	Persen	20	6.191,07	20	6.354,42	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				114.413,96		56.449,49	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	19	9.622,51	15	10.173,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	20	868,98	17	336,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai	Persen	20	37,50	20	11,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	13	116,08	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	20	221,38	20	162,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik	KM	53,82	70.514,79	53	18.677,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah Jembatan yang terbangun	Unit	23	-	1	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap di wilayah aliran sungai rawan longsor dalam kondisi baik	Meter	2203	479,47	0	169,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	8. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	4,52	8.959,62	4	6.158,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	9. Program rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Proporsi Turap/Talud/Bronjong yang di rehabilitasi/Pelihara	Persen	0	-	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebhinamargaan	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi dan Alat-alat berat	Persen		227,35	0	299,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik	Persen		4.007,96	0	1.797,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	12. Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen		-	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	13. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	Unit	0	-	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
14.	Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	Persen	19	-	19	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15.	Program pengendalian banjir	Panjang parit (anak sungai) dalam kondisi baik	KM	113,964	18.639,37	65414	7.818,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	SR	20	-	20	213,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Persen	0	68,40	0	32,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	Persen	0	164,11	0	83,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Cakupan Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persen		105,16	0	30,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Peningkatan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang tersedia	Persen	50	218,03	50	483,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21.	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	Persen	100	143,82	100	138,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Persen	75	19,44	100	13,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					0		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	Unit	0	-	10	188,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	24. Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	Persen	15	-	12	9.659,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			29.193,68		25.831,78		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	13	2.304,19	18	2.042,02	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	14	62,02	17	231,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	14	49,53	0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	18	218,51	22	264,35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					0	-	
	5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi	KM	18,20	512,56	7	2.733,24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	SR		3.985,29	0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	7. Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat	Unit	2	15.790,36	3	18.457,82	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Proporsi Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik	KM			0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	8. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	Unit	42	3.869,08	0	8,54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	9. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar	3	600,77	0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	10. Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah daya tampung TPU	Lokasi	0	79,82	0	696,38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	11. Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	Persen	76	312,33	0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	12. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi	KM		-	0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Publik yang dibangun	Lokasi		-	0	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	LINGKUNGAN HIDUP							
	14. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Publik yang dibangun	Lokasi	1	1.409,25	1	1.398,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			7.153,14		4.269,98		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi	Persen	21	1.143,56	19	2.023,15	Satuan Polisi Pemong Praja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana Prasarana	Persen	0	-	0	-	Satuan Polisi Pemong Praja
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman Pakaian Dinaas Dan Peningkatan Disiplin ASN	Persen	20	201,71	0,00	-	Satuan Polisi Pemong Praja
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus	Persen	19	485,87	37	71,33	Satuan Polisi Pemong Praja
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persen	20	114,96	15	26,40	Satuan Polisi Pemong Praja
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	kali		2.990,18	0	1.075,71	Satuan Polisi Pemong Praja
	7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	Persen	4	787,80	20	1.041,49	Satuan Polisi Pemong Praja
	8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan petugas linmas	Persen	18	175,91	0	31,91	Satuan Polisi Pemong Praja
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	9. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Pengamanan Tahapan Pemilu / Pilkada dan Pilkadaes	kali	21	1.253,14	0	-	Satuan Polisi Pemong Praja
9.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				3.703,54	2.385,95		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	16	768,09	20	862,27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatnya sarana Prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	20	69,36	25	78,75	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	20	58,59	3	17,99	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	0	-	0	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase terwujudnya penata usahaan keungan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	20	64,08	21	26,83	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	8. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian		0	0	-	0	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen	17,77	937,08	20	1.386,45	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	10. Program Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	1,00	1.806,34	13	13,66	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	DINAS SOSIAL				6.868,71		4.635,19	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	19	1.192,69	17	919,84	Dinas Sosial

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	20	255,34	10	65,94	Dinas Sosial
	3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus (%)	Persen	20	105,39	20	66,70	Dinas Sosial
	4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	20	28,80	20	36,00	Dinas Sosial
	5.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	0	-	Dinas Sosial
	SOSIAL								
	6.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase masyarakat yang menerima bantuan	Persen	16,97	1.749,10	20	696,30	Dinas Sosial
	7.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Persen	16,90	1.147,12	20	680,61	Dinas Sosial
	8.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah cacat fisik dan mental yang mendapat bantuan	Persen	16,90	69,58	0	35,46	Dinas Sosial
	9.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan Pelatihan SDM dan Bantuan	Persen	15,54	142,02	0	62,25	Dinas Sosial
	10.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan dan Pelatihan Peningkatan SDM	Persen	15,54	434,17	10	255,06	Dinas Sosial
	11.	Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Program Keluarga Harapan yang dibina	Persen	16,94	800,73	20	654,27	Dinas Sosial
	12.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persen	13,91	333,14	0	218,20	Dinas Sosial
	13.	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Perjuang Kemerdekaan, Veteran yang ditangani	Persen	19,38	297,82	20	262,53	Dinas Sosial
	14.	Program Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Terehabilitasi dan terbantunya Pengemis,	Persen	17,89	312,81	20	682,04	Dinas Sosial

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
		Gelandangan serta terkirimnya Orang Terlantar						
11.	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI			1.605,90	1.926,28			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	20	872,38	20	795,27	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	18	28,78	18	185,87	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	20	44,97	16	45,42	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	4. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	20	10,35	9	5,95	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	KETENAGAKERJAAN							
	5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang di latih	Orang	13	32,27	0	6,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	0	126,61	0	477,80	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	7. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB	Persen	20	282,80	11	220,23	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	TRANSMIGRASI							
	8. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	KK	563	159,13	0	114,18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	9. Program Transmigrasi Lokal	Cakupan bina transmigrasi	KK	687	48,61	0	75,56	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				8.415,36		9.639,71	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	20	1.563,44	100	1.718,81	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	20	27,55	100	45,96	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus	Persen	20	15,12	0	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tercapainya penyusunan dokumen capaian kinerja dan keuangan	Persen	20	108,80	100	30,06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	5. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya rencana kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persen	20	95,23	0	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	LINGKUNGAN HIDUP							
	6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah	Ton		6.045,29	0	6.163,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut Pengaduan Dugaan Kasus Lingkungan dan Penghargaan Lingkungan Tingkat Nasional	Kegiatan usaha		259,44	19	266,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Tutupan Lahan Hijau	Pembinaan	1	103,85	2	102,92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	9. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persen	90	61,91	90	1.112,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	75,11	2	140,14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	11. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Pengujian Emisi/Polusi Udara dan Penyuluhan	Pengujian	7	59,63	5	58,85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.250,15		3.633,76		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	85	1.282,07	97	1.267,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	20	584,21	145	277,37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	64,35	100	64,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	80	2.319,53	80	1.990,45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen		-	100	33,41	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen		-	0	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen		-	0	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen		-	0	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				15.458,88		12.777,79	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	19	889,66	73	800,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	97	27,82	85	133,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	20	45,67	90	18,16	Dinas Pemberdayaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
								Masyarakat dan Desa
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
4.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Lembaga Ekonomi yang Aktif Membangun Desa	BUM Desa	22	709,63	24	545,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	85	11.505,90	80	10.337,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan	Orang	20	76,76	80	181,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Jumlah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK di Desa/Kelurahan	Desa/Kel	118	919,29	38	304,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit		49,90	0	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9.	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Sistem Informasi	Orang	197	102,41	197	170,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan	Jumlah Pemetaan Kawasan Pedesaan	Desa	20	46,47	0	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	10	43,22	8	45,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	58	1.042,16	58	239,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.229,72		5.471,57		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	23,00	662,94	88	612,59	DP2KBP3A
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	15	141,35	11	6,37	DP2KBP3A
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	0	-	0	-	DP2KBP3A
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	-	0	-	DP2KBP3A
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	44,18	100	33,96	DP2KBP3A
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	6. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan OPD yang menggunakan Data gender dan anak dalam pembangunan Daerah	Persen	0	-	0	-	DP2KBP3A

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
7.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen	66	302,02	55	377,71	DP2KBP3A
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	Persen	27	82,05	74	118,81	DP2KBP3A
9.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan	1	695,93	2	331,18	DP2KBP3A
10.	Program Pengembangan Kota Layak Anak	Angka Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)	Poin	580	179,93	600	69,73	DP2KBP3A
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
11.	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Persen	19	608,66	17	846,81	DP2KBP3A
12.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja yang mengikuti Materi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen	100	69,99	0	1,70	DP2KBP3A
13.	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	1	53,68	19	73,50	DP2KBP3A
14.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Kampung KB yang dibina	Kecamatan	100	3.144,42	20	2.742,91	DP2KBP3A
15.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa.	Persen	10	181,49	11	221,97	DP2KBP3A
16.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Cakupan Advokasi tentang Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persen	0	-	0	-	DP2KBP3A
17.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	Persen	18	63,08	7	34,32	DP2KBP3A

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
16	DINAS PERHUBUNGAN			11.773,95		9.901,51		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	50,16	1.606,72	75,57	2205,32	Dinas Perhubungan
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	44,31	123,04	76,57	332,97	Dinas Perhubungan
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	0	-	69,66	122,61	Dinas Perhubungan
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	7	22,72	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	-	100,00	155,24	Dinas Perhubungan
	PERHUBUNGAN							
	6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Dokumen Standar Perhubungan	Persen	1	402,07	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persen	4	754,35	0,00	1.135,18	Dinas Perhubungan
	8. Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan	Persen	20,83	2.090,51	24,22	1.953,66	Dinas Perhubungan
	9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	25,23	6.679,70	6,56	2.233,01	Dinas Perhubungan
	10. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tingkat Kendaraan bermotor Laik Jalan	Persen	13	94,84	60,00	1.763,52	Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
17.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK				17.645,85		13.912,90		
	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	95	747,48	93	1.726,05	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	146,59	90	727,59	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	0	-	100	7,51	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	23,19	100	8,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	103,14	100	15,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	6.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persen	18	664,49	0	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	7.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Terpenuhinya kerjasama informasi dan media massa.	Persen	25	15.031,94	0	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	8. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen		-	25	9.739,10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	9. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen		-	36	1.475,82	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	10. Program Pengembangan E-Government	Persentase Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik, Jumlah OPD yang Menyelenggarakan E-Government	Persen	3	608,00	0	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	STATISTIK							
	11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen/buku informasi pembangunan daerah	Persen	13	183,28	0	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	12. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah	Persen		-	15	101,77	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	PERSANDIAN							
	13. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan persandian	Persen	18	137,72	0	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	14. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persen		-	17	112,06	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				2.322,60		2.652,30	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persen	19,74	788,18	71	518,36	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhiya Sarana Prasarana Kantor Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja (%)	Persen	8,30	25,86	65	65,64	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman Dan Peningkatan Disiplin ASN (%)	Persen	20	18,30	0	-	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus (%)	Persen		-	0	-	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
	5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibina dan difasilitasi	Kelompok UM	20	1.024,84	34	1.097,94	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih	Kelompok	173	137,45	599	71,12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran dan promosi produk yg diikuti	Kali	1	311,36	2	860,81	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	Koperasi	10	16,61	300	38,44	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			2.183,00		2.151,00		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	92	824,00	100,00	1075,00	DPMPSTP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	80	43,00	100,00	56,00	DPMPTSP
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	-	0	0,00	0,00	DPMPTSP
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	-	0	0,00	0,00	DPMPTSP
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	75	23,00	99,90	29,00	DPMPTSP
6.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	-	0	0,00	0,00	DPMPTSP
PENANAMAN MODAL								
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	Kali	2	540,00	1,87	661,00	DPMPTSP
8.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha	Persen	20	537,00	19,87	153,00	DPMPTSP
9.	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah Potensi Daerah	Potensi			0,00	0,00	DPMPTSP
10.	Program Pengendalian dan Penataan Perizinan	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin	0	-	499,87	59,00	DPMPTSP
11.	Program Penataan Perizinan Tertentu	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan	Izin	80	216,00	105,00	118,00	DPMPTSP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			914,93		1.369,18		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	90	378,81	79	498,21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	16	12,05	90	88,69	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	90	14,85	90	18,10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	-	0	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Laporan	0	-	90	40,59	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	0	-	0	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	PERPUSTAKAAN					0	-	
	7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	4	446,91	4	604,24	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	KEARSIPAN							
	8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan pada LKD	Persen	83	62,30	83	77,97	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pengelolaan Arsip secara baku	Persen	90	-	90	41,39	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
21	DINAS PERIKANAN				8.482,72		2.849,76	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	730,28	98	1.035,11	Dinas Perikanan
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persen	100	329,98	75	39,93	Dinas Perikanan
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN Dinas Perikanan	Persen	0	-	0	-	Dinas Perikanan
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur Dinas Perikanan	Persen	0	-	0	-	Dinas Perikanan
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persen	0	-	0	-	Dinas Perikanan
	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan	Persen	75	89,33	100	63,25	Dinas Perikanan
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					0	-	
	7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		574,08	0	492,66	Dinas Perikanan
	8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton	387907	6.491,47	0	1.172,49	Dinas Perikanan
	9. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh yang kompeten	orang	940	56,10	0	-	Dinas Perikanan
	10. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Penyerapan Teknologi Tepat Guna Yang Dapat Dikembangkan	Persen	100	50,33	0	-	Dinas Perikanan
	11. Program Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Perikanan	Ketersediaan pangan dan Konsumsi Ikan Perkapita Tahun	Kg/Kapita/Th	198	161,16	0	46,32	Dinas Perikanan
22	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN				17.850,18		13.061,05	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	20,34	2.239,08	93	1.682,97	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai dengan Syandar Kerja	Persen	20	410,35	90	633,61	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN	Persen	0	-	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN	Persen	20	13,44	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketepatan Penyampaian laporan	Persen	20	324,89	90	403,71	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
6.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase Ketepatan Penyampaian laporan	Persen	20	218,21	90	596,89	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
7.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase wirausaha muda	Persen		-	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
8.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	1.255,08	0	354,04	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	9. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pembinaan wirausaha muda	Persen		-	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
	10. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	Cabor		-	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
	11. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	6	1.256,34	0	185,68	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
	12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Yang Disediakan	Unit	48	4.639,29	28	6.365,11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
	KEBUDAYAAN						0	-
	13. Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan Budaya Daerah	Tampilan Kesenian	7	987,21	1	13,73	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
	14. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Kegiatan	1	424,51	2	223,51	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
	15. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Keragaman Kebudayaan Daerah	Festival Budaya Daerah	1	461,23	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
	16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Bangunan Bernilai Sejarah	Unit	5	1.637,86	1	812,35	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
	PARIWISATA						0	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
17.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	Pameran		-	0	193,90	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
18.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Pariwisata	daya tarik		-	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
19.	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata	Kerjasama		-	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
20.	Program Pengembangan Kelembagaan Dan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM yang Dilatih	Orang		-	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
21.	Program Peningkatan Kebijakan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah	Dokumen		-	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
22.	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata Yang Memiliki TDUP	Persen		-	47	9,90	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
23.	Program Pengembangan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Event Pariwisata	Event	7	1.606,23	1	30,35	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
24.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Peserta		-	0	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
25.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	Unit	7	1.881,79	10	1.304,27	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	26. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan	Jumlah Peserta Yang Dilatih	Orang	48	494,68	50	251,03	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
23	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN			6.823,73		4.777,77		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	85,50	687,25	90	956,62	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	67,50	88,28	87	182,76	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	20	51,34	0	-	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	20	7,84	0	-	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	90	76,44	90	218,85	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	90	69,61	90	194,36	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
7.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	Persen	20	1.692,27	41	1.881,91	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani		511,02	0	147,11	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
9.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	kali	2	166,57	0	37,26	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
10.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produksi sektor tanaman pangan	Ton		84,08	0	211,38	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
11.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi sektor perkebunan	Persen		-	0	-	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
12.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Pertemuan penyuluh pendamping petani	Kali	36	1.558,59	36	235,27	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
13.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Kesehatan ternak	Persen	4	536,39	4	77,27	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
14.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persen	20	1.224,59	70	543,28	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
15.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	kali	5	69,45	4	91,69	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
24	DINAS PERKEBUNAN			6.853,13		7.185,28		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	92	1.317,39	90	1.338,82	Dinas Perkebunan
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persen	11	756,08	86	504,58	Dinas Perkebunan
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin ASN	Persen	87,78	129,79	0,00	-	Dinas Perkebunan
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	Persen	20	46,10	68	12,43	Dinas Perkebunan
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persen	92	282,32	70	191,57	Dinas Perkebunan
	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya rencana kerja Badan / Dinas / Instansi / Bagian	Persen	90	205,71	90	179,63	Dinas Perkebunan
	7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk perkebunan	Persen	13	1.073,06	26	1.102,46	Dinas Perkebunan
	8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan pendapatan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis dan Kemampuan Lembaga Petani	Kelompok Tani		-	5	337,65	Dinas Perkebunan
	9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Penyebaran Informasi Produk Perkebunan	Persen		-	90	224,34	Dinas Perkebunan
	10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Terwujudnya Penerapan Teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi dan penyelamatan kebun masyarakat	Persen	40	1.797,68	0	1.054,91	Dinas Perkebunan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	11. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun Masyarakat dan peningkatan Produksi perkebunan	Persen	5,50	227,81	26	681,91	Dinas Perkebunan
	12. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan dalam menyusun program dan penyebarluasan informasi penyuluhan	Persen		1.017,20	0	1.556,99	Dinas Perkebunan
25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				11.424,09		6.183,69	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	20	1.052,41	86	556,60	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	20	398,71	0	16,80	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen		-	100	23,10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		-	0	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	20	86,84	96	128,74	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	20	305,07	100	293,51	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PERDAGANGAN							
	7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen cakupan perlindungan konsumen dan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	Persen		843,53	0	724,61	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persen	84	900,57	50	176,89	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan pendataan dan informasi harga	Persen	54	3.660,94	100	1.150,37	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	Persen	100	604,98	67	1.188,65	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	11. Program Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Cakupan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persen	55	2.153,99	27	718,67	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PERINDUSTRIAN							
	12. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peralatan mesin pengolahan kelapa	Persen	20	409,13	0	50,56	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persen	61	1.007,92	44	647,74	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	14. Program Penataan Struktur Industri	Cakupan pertumbuhan Industri	Persen	0	-	100	507,44	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				7.452,54	4.269,50		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	41	1.664,04	85,13	1.072,89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	16	479,29	0,00	265,22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan peningkatan disiplin Aparatur	Persen	0	-	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah (%)	persen	12	102,37	63,64	69,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	17	208,47	90,00	136,06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian	Persen	18	100,85	90,00	96,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
7.	Program Kerjasama Pembangunan	Capaian kerjasama pembangunan daerah (%)	Persen	86	79,12	0,00	68,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persen	17	81,44	90,00	98,33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	9. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	Persen	6	49,85	80,00	1.309,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	10. Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	Persen	85	2.828,62	65,32	240,98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	11. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang ekonomi	Persen	27	536,17	82,14	603,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	12. Program perencanaan sosial budaya	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	Persen	13	1.078,30	28,57	154,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	13. Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	Persen	11	244,01	39,83	154,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH				4.833,54		4.344,48	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	41	2.028,26	137,67	2.541,72	Badan Pendapatan Daerah
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	Persen	66	610,78	42,86	91,55	Badan Pendapatan Daerah
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan peningkatan disiplin Aparatur (%)	Persen	2	5,50	0,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Persen	59	194,22	0,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	Persen	100	76,81	96,09	55,38	Badan Pendapatan Daerah
	KEUANGAN							
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah (%)	Persen	10	1.917,97	-10,00	1.655,83	Badan Pendapatan Daerah
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			19.941,46		12.459,39		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	20	3.385,51	90,00	2.773,88	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	28	10.794,03	85,95	5.455,45	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	9	208,45	90,00	60,08	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	20	893,55	90,00	643,80	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	KEUANGAN							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	95	3.698,21	100,00	3.445,36	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	6.	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persen	90	961,72	100,00	80,83	Badan Keuangan dan Aset Daerah
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA			8.590,49		4.815,26		
	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	39	866,02	80	723,44	BKPSDM
	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	22	237,07	95	1659,17	BKPSDM
	3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	13	20,15	0	0,00	BKPSDM
	4.	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persen	21	372,13	0	0,00	BKPSDM
	5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen	12	149,29	0	0,00	BKPSDM
	6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	20	9,68	5	11,06	BKPSDM
	7.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persen	20	5,65	5	5,44	BKPSDM
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	8.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persen	15	2.320,41	74	2193,04	BKPSDM
	9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (teknis)	Persen	10	4.610,09	50	223,11	BKPSDM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
30	INSPEKTORAT DAERAH			5.589,57	4.534,33			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	1.569,59	85	1.023,45	Inspektorat Daerah
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	24	600,59	92	630,97	Inspektorat Daerah
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	26	34,04	0	-	Inspektorat Daerah
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus	Persen	65	264,65	0	-	Inspektorat Daerah
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Dan Keuangan (%)	Persen	100	219,18	100	187,09	Inspektorat Daerah
	PENGAWASAN							
	6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	Persen	65,76	2.471,81	70,96	2.056,56	Inspektorat Daerah
	8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kantor sendiri	Persen	4	47,73	86,54	31,72	Inspektorat Daerah
	9. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Nilai	90,00	381,98	83,37	604,54	Inspektorat Daerah
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7.707,95	4.045,70			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik	Persen	92	1.143,91	79	662,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecukupan Sarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan Standar Kerja	Persen	32	4.243,49	236	2.564,96	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin ASN	Persen	10	30,28	90	16,20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan, Keterampilan Khusus dan Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Persen	14	652,82	67	166,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persen	20	49,20	65	47,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PENGAWASAN					0	-	
	8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kecamatan	10	176,97	0	13,94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					0	-	
	9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah warga negara yang mendapat pelatihan wawasan kebangsaan	Orang		636,85	0	252,80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	10. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kemitraan wawasan kebangsaan yang dikembangkan	Persen	80	28,77	80	42,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah warga negara yang mengikuti Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Orang	53	107,39	219	45,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	12. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dan Jumlah Forum-forum Diskusi Politik	Persen	9	332,64	74	204,91	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	13. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pilkada dan Pemilu	Persen	45	305,65	0	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	14. Program Pengembangan dan Kemitraan Ormas	Persentase cakupan Ormas yang dibina	Persen		-	0	27,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3.205,07		11.109,95	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	94	686,39	94	708,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	26	149,78	98	140,21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	0	-	100	74,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	61	15,43	0	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	32	48,46	97	202,06	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	98	79,64	98	31,71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Cakupan Pencegahan dan Penanganan Daerah Rawan Bencana	Persen	95	89,05	84	240,35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Daerah Rawan Bencana	Persen	98	1.494,84	98	5.674	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	9. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sementara daerah pasca bencana	Persen	69	47,02	94	2.685,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	10. Program Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Persentase Jumlah penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik korban bencana	Persen	33	594,46	98	1.351,72	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	SEKRETARIAT DAERAH				71.958,30		76.109,01	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	24	17.433,91	43	15.171,88	Sekretariat Daerah
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	25	9.392,22	66	7.169,81	Sekretariat Daerah
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	19	143,32	3	150,80	Sekretariat Daerah
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	15	1.330,93	52	420,88	Sekretariat Daerah
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program	Persen	18	598,77	58	557,55	Sekretariat Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
		yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah						
6.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya rencana kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persen		-	0	-	Sekretariat Daerah
7.	Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kategori)	(Tinggi)	100	45,80	100	44,37	Sekretariat Daerah
8.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas pengelolaan keuangan	Persen	100	171,42	90	329,19	Sekretariat Daerah
9.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ketersediaan data informasi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	80	432,21	80	73,74	Sekretariat Daerah
10.	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pengiriman peserta sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Teknis Luar Daerah	Persen	10	103,50	25	29,58	Sekretariat Daerah
11.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH	Persen	90	7.375,29	85	6.993,36	Sekretariat Daerah
12.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase keselarasan produk hukum daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi	Persen	15	42,17	0	-	Sekretariat Daerah
13.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen	14	2.446,71	0	-	Sekretariat Daerah
14.	Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	Persen	70	70,29	70	85,21	Sekretariat Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	15. Program Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Pembangunan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi Pembangunan	Persen	0	1.368,19	0	875,55	Sekretariat Daerah
	16. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Persentase keluaran Produk Hukum yang berkualitas	Persen	4	-	5	595,56	Sekretariat Daerah
	17. Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Dokumen dan Informasi yang berkualitas	Persen	72	-	90	266,57	Sekretariat Daerah
	18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase layanan bantuan hukum	Persen	3	-	4	708,26	Sekretariat Daerah
	19. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.	Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial keagamaan dan kemasyarakatan	Persen	85	19.920,69	80	33.516,07	Sekretariat Daerah
	20. Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembinaan, koordinasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	Persen	100	1.624,82	90	860,16	Sekretariat Daerah
	21. Program Pembinaan, Pelaksanaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Persen	100	3.096,52	100	2.365,81	Sekretariat Daerah
	22. Program Hubungan Masyarakat, Dokumentasi, Publikasi Protokol dan Acara	Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	Persen	94	3.715,37	20	3.964,37	Sekretariat Daerah
	23. Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Administrasi pemerintahan	Persen	0	1.017,22	221	1.209,19	Sekretariat Daerah
	24. Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Organisasi	Cakupan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	Persen	55	974,82	63	451,01	Sekretariat Daerah
	25. Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, Asistensi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	Persen	81	654,13	0	270,08	Sekretariat Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
34	SEKRETARIAT DPRD				61.578,31		54.180,40	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	90	10.466,26	72	10.745,19	Sekretariat DPRD
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	68	4.920,28	68	3.906,31	Sekretariat DPRD
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	56	707,17	56	222,27	Sekretariat DPRD
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	26	181,88	0	-	Sekretariat DPRD
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	90	131,81	90	137,80	Sekretariat DPRD
	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase peningkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	90	31,40	78	32,92	Sekretariat DPRD
	KEPALA DAERAH							
	7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi	Persen	73	2.688,21	73	2.626,86	Sekretariat DPRD
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	8. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	Persen	55	42.451,31	55	36.509,05	Sekretariat DPRD
35	KECAMATAN TEMBILAHAN				6.603,02		2.716,34	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	95	324,79	56	248,96	Kecamatan Tembilahan
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	85	82,48	95	47,76	Kecamatan Tembilahan
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	11	8,35	0	-	Kecamatan Tembilahan
	4. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	100	21,55	100	21,56	Kecamatan Tembilahan
	KECAMATAN					0	-	
	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	85	6.165,84	34	2.398,06	Kecamatan Tembilahan
36	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU				2.949,80		1.188,69	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	95	283,73	100	300,36	Kecamatan Tembilahan Hulu
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran	Persen	75	31,94	99	61,30	Kecamatan Tembilahan Hulu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
		tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)						
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	75	29,50	100	18,25	Kecamatan Tembilahan Hulu
	KECAMATAN							
	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	18	2.604,63	62	808,78	Kecamatan Tembilahan Hulu
37	KECAMATAN TEMPULING				2.627,51	1.834,64		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	95	191,03	99	141,74	Kecamatan Tempuling
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	75	9,50	100	75,73	Kecamatan Tempuling
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	5,64	100	11,76	Kecamatan Tempuling
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		-	0	-	Kecamatan Tempuling
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		-	100	9,42	Kecamatan Tempuling

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	KECAMATAN							
	6. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	84	2.421,34	39	1.595,99	Kecamatan Tempuling
38	KECAMATAN BATANG TUAKA			1.979,80	747,49			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	90	220,66	42	226,88	Kecamatan Batang Tuaka
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	85	233,46	79	33,33	Kecamatan Batang Tuaka
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen		-	99	33,70	Kecamatan Batang Tuaka
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	20	399,30	0	-	Kecamatan Batang Tuaka
	KECAMATAN							
	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	80	1.126,38	16	453,58	Kecamatan Batang Tuaka
39	KECAMATAN CONGONG			2.152,19	1.193,20			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	Persen	95	273,41	59	226,37	Kecamatan Congong

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
		kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)						
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	50	7,20	93	22,97	Kecamatan Concong
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	100	15,00	50	15,00	Kecamatan Concong
	KECAMATAN							
	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	80	1.856,58	43	928,86	Kecamatan Concong
	KECAMATAN ENOK							
40				3.287,41		1.643,23		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	210,70	94	207,66	Kecamatan Enok
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	7,00	100	84,26	Kecamatan Enok
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	0	-	Kecamatan Enok
	KECAMATAN							
	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	70	3.069,72	40	1.351,32	Kecamatan Enok

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
41	KECAMATAN GAUNG				2.040,62		1.060,63	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	73	118,15	93	146,33	Kecamatan Gaung
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat (%)	Persen	74	4,77	95	25,00	Kecamatan Gaung
	KECAMATAN							
	3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	23	1.917,70	57	889,30	Kecamatan Gaung
42	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA				3.417,33		1.825,39	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	192,10	89	194,96	Kecamatan Gaung Anak Serka
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	80	62,74	100	19,06	Kecamatan Gaung Anak Serka
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	100	21,62	100	16,80	Kecamatan Gaung Anak Serka
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	Persen		-	0	-	Kecamatan Gaung Anak Serka
	KECAMATAN							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	3.140,87	57	1.594,57	Kecamatan Gaung Anak Serka
43	KECAMATAN KATEMAN			3.089,23		1.754,62		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	90	196,85	100	261,04	Kecamatan Kateman
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	0	-	100	23,86	Kecamatan Kateman
	KECAMATAN							
	3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	90	2.892,38	82	1.469,72	Kecamatan Kateman
44	KECAMATAN KEMPAS			2.218,28		805,11		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	222,86	93	201,92	Kecamatan Kempas
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	94	5,67	69	15,17	Kecamatan Kempas
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	4,20	100	4,90	Kecamatan Kempas
	KECAMATAN							
	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap	Persen	14	1.985,55	19	583,11	Kecamatan Kempas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
		pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan						
45	KECAMATAN KEMUNING			1.433,98	979,61			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	88	176,37	100	223,73	Kecamatan Kemuning
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	90	10,20	100	7,50	Kecamatan Kemuning
	KECAMATAN						-	
	3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	93	1.247,40	100	748,38	Kecamatan Kemuning
46	KECAMATAN KERITANG			1.517,50	343,46			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	258,18	92	207,37	Kecamatan Keritang
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	93	21,00	100	31,60	Kecamatan Keritang
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	Persen		-	0	-	Kecamatan Keritang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	KECAMATAN							
	4 Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	65	1.238,32	56	104,48	Kecamatan Keritang
47	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI			1.079,11		354,28		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	64	108,74	56	141,17	Kecamatan Kuala Indragiri
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	65	41,63	63	84,56	Kecamatan Kuala Indragiri
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen		-	100	7,50	Kecamatan Kuala Indragiri
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	-	0	-	Kecamatan Kuala Indragiri
	KECAMATAN							
	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	50	928,74	100	121,06	Kecamatan Kuala Indragiri
48	KECAMATAN MANDAH			2.046,21		827,55		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	Persen	68	181,47	93	192,25	Kecamatan Mandah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
		kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)						
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	100	47,23	Kecamatan Mandah
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	0	-	100	20,90	Kecamatan Mandah
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen		-	0	-	Kecamatan Mandah
	KECAMATAN							
	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	79	1.864,74	62	567,18	Kecamatan Mandah
49	KECAMATAN PELANGIRAN			1.889,91		633,63		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	89	221,96	62	206,75	Kecamatan Pelangiran
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	193,93	44	9,96	Kecamatan Pelangiran

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen		-	0	-	Kecamatan Pelangiran
	KECAMATAN					0	-	
	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	72	1.474,02	6	416,92	Kecamatan Pelangiran
50	KECAMATAN PULAU BURUNG				624,16		454,28	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	96	214,89	77	213,71	Kecamatan Pulau Burung
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	6,50	33	10,00	Kecamatan Pulau Burung
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen		-	0	-	Kecamatan Pulau Burung
	KECAMATAN							
	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	77	402,77	77	230,57	Kecamatan Pulau Burung
51	KECAMATAN RETEH				3.174,54		746,77	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	60	209,14	68	196,25	Kecamatan Reteh

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	17,98	100	17,85	Kecamatan Reteh
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	100	6,30	100	6,30	Kecamatan Reteh
	4. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		-	0	-	Kecamatan Reteh
	KECAMATAN							
	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	74	2.941,12	40	526,38	Kecamatan Reteh
52	KECAMATAN SUNGAI BATANG				1.353,19	869,09		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	209,33	94	191,87	Kecamatan Sungai Batang
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	92	43,94	40	84,51	Kecamatan Sungai Batang
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persen		-	0	-	Kecamatan Sungai Batang
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan	Persen		-	0	-	Kecamatan Sungai Batang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
		Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)						
	KECAMATAN							
	5.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	75	1.099,91	56	592,71	Kecamatan Sungai Batang
53	KECAMATAN TANAH MERAH							
	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	81	164,69	92	164,20	Kecamatan Tanah Merah
	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	5,00	90	17,20	Kecamatan Tanah Merah
	3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	90	7,60	82	-	Kecamatan Tanah Merah
	KECAMATAN							
	4.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	64	1.042,80	49	363,37	Kecamatan Tanah Merah
54	KECAMATAN TELUK BELENGKONG							
	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	87	222,95	92	176,55	Kecamatan Teluk Belengkong

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	73	10,80	0	-	Kecamatan Teluk Belengkong
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen		1.137,06	0	-	Kecamatan Teluk Belengkong
	KECAMATAN							
	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	93	741,40	73	223,87	Kecamatan Teluk Belengkong

Tabel 7.3.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PENDIDIKAN					607.731		467.198		610.464	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	80,32	100	472.477	100	344.424	100	463.660	DINAS PENDIDIKAN
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					-		-		-	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	99,75	100	135.018	100	122.094	100	146.460	DINAS PENDIDIKAN
		APK SD	Persen	104,31	106,01	-	106,1	-	106,2	-	
		APK SMP	Persen	98,33	102,56	-	103,40	-	104,1	-	
		APM SD	Persen	94,92	95,88	-	100,00	-	100,00	-	
		APM SMP	Persen	82,39	83,3	-	100,00	-	100,00	-	DINAS PENDIDIKAN
1 1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	94,39	97	236	98	681	99	344	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	46,43	55,00	-	60	-	70	-	
						-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
	DINAS KESEHATAN					279.330		171.763		205.139	
X	NON URUSAN					-		-		-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	93	93	128.650	100	124.498	100	118.287	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-		-		-	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	77	89	145.651	95	45.730	100	82.501	DINAS KESEHATAN
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDM_K) Yang Kompeten	Persen	60	92	3.248	95	581	98	3.160	DINAS KESEHATAN
1 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan sesuai Standard	Persen	70	76	516	100	251	100	534	DINAS KESEHATAN
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	50	93	1.265	95	704	97	658	DINAS KESEHATAN
	RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN					-		-		-	
	NON URUSAN					129.649		90.782		85.685	
X	NON URUSAN					-		-		-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	99.343	100	88.736	100	84.652	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	Persen	100	100	30.307	100	1.971	100	995	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	-	100	75	100	38		
RSUD TENGGU SULUNG						16.770		8.408		7.175	
X X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	8.452	100	8.082	100	7.010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-		-		-	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	8.318	100	326	100	165	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
RSUD RAJA MUSA						27.078		18.462		15.819	
X X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	15.973	100	17.961	100	15.566	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-		-		-	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	11.106	100	501	100	253	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
						-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					80.246		122.728		81.219	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	55	65	19.077	23,41	12.668	36,35	10.580	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					-		-		-	
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	1,02	1,4	17.439	2,00	27.386	1,00	14.646	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	Persen	11.32	11.88	6.511	12,00	10.588	14,29	6.598	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan	Persen	27,00	90	1.455	90	16.028	90	8.094	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	54,13	55,10	33.943	56,00	53.818	57,00	40.171	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	Persen	0	90,00	221	90,00	441	90,00	222	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	Persen	0	65,00	1.600	70,00	1.800	80,00	909	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					60.998		44.030	90,86	27.660	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	85	85	7.425	84,28	7.460	82,85	6.483	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					-		-		-	
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	Persen	0	1,42	2.418	0,79	1.875	0,79	947	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	1,17	1,07	4.193	1,14	1.083	1,02	547	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Persen	1,17	1,17	9.780	1,14	537	1,02	271	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan Kualitas PSU di Lingkungan Perumahan	Persen	1,93	5,18	37.182	5,18	33.075	5,18	19.411	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					-		-		-	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	14.673	100	17.015	100	14.698	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						17.464		19.479		16.942	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					-		-		-	
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	Persen	100	100	2.791	100	2.464	100	2.244	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					10.395		10.853		7.625	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	6.533	100	6.298	100	5.325	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					-		-		-	
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warganegara yg memperoleh pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	100	570	100	148	100	75	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	3.293	100	4.407	100	2.226	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					8.897		8.798		6.307	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	94,50	95,00	4.806	95,43	5.671	97,14	4.728	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					-		-		-	
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	Persen	0,23	0,02	4.091	0,013	3.127	0,011	1.579	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	DINAS SOSIAL					-		-		-	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	5.851	100	7.332	100	5.603	DINAS SOSIAL
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					-		-		-	
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Persen	100	100	2.206	100	3.650	100	2.143	DINAS SOSIAL
1 6 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase korban Tindak Kekerasan yang menerima bantuan sosial	Persen	100	100	192	100	116	100	59	DINAS SOSIAL
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	1.316	100	1.641	100	1.729	DINAS SOSIAL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	100	100	2.550	100	267	100	449	DINAS SOSIAL
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	545	100	288	100	146	DINAS SOSIAL
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	Persen	100	100	46	100	75	100	38	DINAS SOSIAL
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-		-		-	
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI					6.336		6.490		9.988	
X X XX	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	5.275	100	5.575	100	5.028	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					-		-		-	
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	36,96	36,96	224	36,96	165	36,96	2.383	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja Yang ditempatkan	Persen	59,00	6,23	555	6,87	600	6,87	2.501	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	53,00	38,41	283	39,00	150	39,00	76	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
						-		-		-	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					13.401		9.672		14.172	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	96,03	96,46	5.406	98,87	6.574	99,3	5.523	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					-		-		-	
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	Persen	0,5	1,81	396	1,81	785	1,81	396	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	Persen	65	66	167	67	332	69	275	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kualitas keluarga	Persen	30	35	79	40	240	60	121	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen	0	40	-	50	92	70	46	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	Persen	65	70	157	75	400	85	202	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pendampingan dn Perlindungan Anak	Persen	50	55	694	60	340	70	516	PERLINDUNGAN ANAK
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					-		-		-	
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk terhadap Program KKBPK	Persen	10,50	13,50	48	17,50	159	20,50	231	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	19,92	23,26	5.283	26,75	460	36,92	3.509	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	Persen	56	58	1.171	60	290	75	3.351	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN					18.024		18.472		25.666	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	11,32	52,33	14.890	72,83	16.959	100	15.613	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					-		-		-	
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan infrastruktur dan seluruh kemandirian pangan yang tersedia	Persen	25,71	55,71	1.417	65,71	561	75,71	8.012	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Persen	27,1	57,91	1.207	73,32	582	83,29	1.854	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan pangan Utama	Persen	0	22,22	120	33,33	306	66,67	155	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	15	70	390	80	63	85	32	HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN					15.657		17.629		13.405	
X X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	96,69	97,14	6.663	98,57	6.575	100	6.205	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					-		-		-	
2 11 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	1	501	2	499	2	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Indeks	91,67	92,09	231	92,29	787	92,50	317	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Udara Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Indeks Persen	13,79 13,79	0 0	- -	65 65,00	- 265	35 35,00	- 50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persen	55	70	57	85	77	0	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 11 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	149	100	202	100	75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				100	61	0	-	0	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	97	100	63	100	32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	0	-	100	36	100	18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	Persen	90	90	7.898	90	9.125	90	6.657	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					13.449		10.592		8.436	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	97,60	97,60	12.371	97,60	9.829	97,60	8.051	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 12 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	90,00	91,00	449	92,50	403	93,00	203	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	90,00	0,00	-	92,00	70	92,50	35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen	22	22	629	70	290	90	146	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						-		-		-	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					25.226		27.816		15.795	
X X XX	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	90	4.841	90	5.607	90	4.579	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					-		-		-	
2 13 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen	N/A	0	75	25,38	4.816	50,76	2.432	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa	Persen	N/A	100	2.497	100	198	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan	Persen	N/A	100	16.727	100	14.703	100	7.425	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 13 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Administrasi Keuangan secara Akuntabel Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	N/A	60	1.087	80	2.493	100	1.259	MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					-	-	-	-	-	-	
DINAS PERHUBUNGAN NON URUSAN					16.243	18.416	12.301				
X											
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	97,74	98,24	8.794	98,94	9.662	99,94	7.880	DINAS PERHUBUNGAN
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Persen	75,89	80,29	1.902	85,10	4.664	90,17	2.355	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	49,68	69,88	5.546	81,84	4.090	92,47	2.066	DINAS PERHUBUNGAN
					-	-	-	-	-	-	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK NON URUSAN					15.121	15.238	9.659				
X											
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	93,99	94,66	6.029	95,00	7.071	100	5.535	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-		-		-	
2 16 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Persen	30,55	53,70	7.935	81,48	7.075	100	3.573	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Diskominfoopers Kab.Inhil	Persen	18	26,47	990	58,82	892	100	451	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					-		-		-	
2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen data statistik sektoral daerah yang tepat waktu	Persen	20	26,10	63	59,70	100	100	51	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					-		-		-	
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian	Persen	20	25	103	53	100	100	51	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
						-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					6.493		10.443		7.810	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	70,50	74,6	4.492	78,81	6.961	80,80	6.051	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-		-		-	
2 17 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan rekomendasi teknis Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	Persen	3	10	83	23	99	33	50	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	20,00	32,26	80	36,31	125	53,65	63	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	Unit	25	45	63	50	139	65	70	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan koperasi yang memiliki Kompetensi berdaya saing	Persen	45,50	62,83	67	70,68	247	78,53	125	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Produksi yang diberdayakan	Unit	6,00	6	-	-	#VALUE!	5,00	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi	Persen	67,00	70	1.503	71,00	1.717	72,00	867	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Skala UMKM yang meningkat	Unit	1382	1392	203	1402	1.156	1407	584	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					6.448		12.521		11.590	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
X	NON URUSAN					-		-		-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	60	70	5.829	80	11.243	100	7.632	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					-		-		-	
2 18 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	Persen	50	0	-	0	-	60	1.150	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	207	93	112	93	640	93	323	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Angka	3.25	3.64	139	3.70	345	3.80	1.910	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	60	65	368	70	180	80	517	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 18 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai	2.60	2.70	-	2.80	113	3.00	57	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN					20.982		19.452		13.288	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	61	63,77	7.192	65	7.378	70	6.141	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					-		-		-	
3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan	Persen	30	0	801	40	1.193	50	1.652	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	35	39,82	610	45	1.046	50	528	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang	Persen	30	0	70	35	200	40	101	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					-		-		-	
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	Persen	40	49,57	1.029	50	1.070	55	540	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Atlit Berprestasi yang Meningkatkan	Persen	70	91,54	8.677	95	6.380	100	3.222	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan Kepramukaan	Persen	0	100	868	100	850	100	429	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					-		-		-	
2 22 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang	Jenis	4	1	1.661	4	1.199	4	605	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 22 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional yang Berkembang	Persen	20	0	75	30	75	40	38	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 22 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Cagar Budaya	4	0	-	4	61	4	31	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH					14.583		4.308		3.467	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	10	3.535	100	4.042	100	3.332	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
2 23 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	40	40	10.952	42	159	45	80	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					-		-		-	
2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	2	9	96	24	107	43	54	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-		-		-	
	DINAS PERIKANAN					-		-		-	
	NON URUSAN					13.080		11.882		16.890	
X X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	40	66,67	5.933	80	6.453	100	5.551	DINAS PERIKANAN
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					-		-		-	
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton	54845,77	72281,92	4.774	81000	2.842	83000	6.191	DINAS PERIKANAN
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2259,08	4086,36	2.125	5000	2.312	5500	5.010	DINAS PERIKANAN
3 25 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan Perkapita Tahunan	Kg/Kapita/Th	39,69	39,96	248	40,10	275	40,20	139	DINAS PERIKANAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
	DINAS PERKEBUNAN					-		-		-	
X	NON URUSAN					23.772		27.629		23.190	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	66,24	67,77	9.564	68,53	10.691	76,16	8.883	DINAS PERKEBUNAN
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					-		-		-	
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	32,50	39,17	1.345	42,50	4.115	45,75	2.078	DINAS PERKEBUNAN
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	23,52	31,67	9.820	35,75	9.358	45,22	9.978	DINAS PERKEBUNAN
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	13,5	31,17	1.001	40,00	1.440	42,5	1.227	DINAS PERKEBUNAN
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan evaluasi	Persen	75	78,33	265	80	250	90	126	DINAS PERKEBUNAN
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	55,95	56,26	1.777	56,42	1.775	65,00	896	DINAS PERKEBUNAN
	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN					4.615		3.354		7.288	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					-		-		-	
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	21,38	61,25	2.268	81,19	1.993	90,95	2.606	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen	2,56	28,83	1.687	41,96	648	75,56	3.365	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	Persen	21,14	70,53	175	95,23	156	100	479	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	5	45	88	65	83	70	42	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	16,01	43,25	397	56,87	474	73,04	796	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					13.114		15.175		12.845	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	6.224	100	6.959	100	5.978	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-		-		-	
3 30 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran	Persen	100	100	30	100	174	100	88	DINAS PERDAGANGAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perusahaan yang Direkomendasikan Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persen	100	100	3.178	100	1.293	100	1.553	DAN PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kecamatan yang Dipantau	Persen	100	100	189	100	337	100	320	DAN PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	US Dolar	193,87	482,95	791	507,10	860	522,3	1.013	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen	23,42	41,33	311	74,56	505	93,65	795	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	80	85	246	90	262	95	132	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-		-		-	
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina	Persen	20,01	21,11	2.086	77,80	4.662	100	2.904	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	Persen	0	58	20	80	70	100	36	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	100	100	40	100	54	100	27	DINAS PERDAGANGAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
						-		-		-	DAN PERINDUSTRIAN
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI					305		200		101	
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					-		-		-	
3 32 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi	Persen	100	100	241	100	133	100	67	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 32 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	Persen	100	100	64	100	67	100	34	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
						-		-		-	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					-		-		-	
	SEKRETARIAT DAERAH					83.415		88.824		89.029	
4 1 X XX 1	SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	50.671	100	56.165	100	56.165	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persen	100	100	28.200	100	27.790	100	27.790	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai	Persen	100	100	4.545	100	4.870	100	5.075	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
		ketentuan peraturan perundang-undangan				-		-		-	
	SEKRETARIAT DPRD					96.641		101.107		101.107	
4 2 X XX 1	SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	60.730	100	58.834	100	58.834	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitasi	Persen	100	100	35.911	100	42.273	100	42.273	SEKRETARIAT DPRD
						-		-		-	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					10.687		12.341		12.341	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	6.865	100	7.911	100	7.911	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 5 1 2	PERENCANAAN PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	1.446	100	1.190	100	1.190	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah	Persen	100	100	1.594	100	2.180	100	2.180	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	(RPJPD, RPJMD,RENSTRA RKPD dan RENJA)	Persen	60		-		-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 5 2		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			70	782	80	1.060	90	1.060	
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					311.613		356.535		356.535	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEUANGAN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	90	93,33	15.248	95,00	21.648	95,00	21.648	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	100	294.794	100	331.857	100	331.857	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen	100	100	1.570	100	3.030	100	3.030	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN PENDAPATAN DAERAH					16.073		18.709		16.195	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEUANGAN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	90,87	91,62	12.422	92,00	14.954	93,00	12.549	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	8,86	9,29	3.650	9,5	3.756	10,02	3.647	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA					10.950		14.378		9.884	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	95	100	5.889	100	7.667	100	6.495	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 5 3 2	KEPEGAWAIAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan	Persen	100	100	2.294	100	3.998	100	2.019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 5 4 2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	40	48	2.767	50	2.713	52	1.370	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH					-		-		-	
X X XX 1	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	80	80,79	7.885	90	7.875	95	7.875	INSPEKTORAT DAERAH
6 1	INSPEKTORAT DAERAH					-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti pada tahun berkenaan	Persen	63,36	86	1.966	100	2.548	100	2.548	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Nilai	68	70	278	75	386	80	386	INSPEKTORAT DAERAH
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					-		-		-	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					10.415		15.630		10.037	
X X XX	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90	90	7.983	90	11.893	90	8.149	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					-		-		-	
8 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	438	100	900	100	455	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	0	100	1.264	100	1.605	100	811	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	0	100	227	100	645	100	326	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	Persen	100	100	132	100	275	100	139	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
8 1 6	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Persen	100	100	370	100	312	100	158	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN TEMBILAHAN						-		-		-	
						14.184		10.724		9.373	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	8.206	100	8.480	100	8.240	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	1.244	90	17	90	8	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	4.480	100	2.127	100	1.074	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	128	100	53	100	27	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	25	100	48	100	24	KECAMATAN TEMBILAHAN
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU						5.664		4.610		4.058	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	3.840	100	3.778	100	3.638	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	350	100	22	100	11	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.136	100	639	100	323	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	59	100	75	100	38	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	179	100	95	100	48	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
KECAMATAN TEMPULING						-	-	-	-	-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	4.705	100	4.637	100	4.433	KECAMATAN TEMPULING
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	611	100	71	100	36	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	Persen	100	100	2.238	100	825	100	416	KECAMATAN TEMPULING

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembangunan dikecamatan Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TEMPULING
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	77	100	45	100	23	KECAMATAN TEMPULING
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	209	100	53	100	27	KECAMATAN TEMPULING
					-	-	-	-	-	-	
KECAMATAN BATANG TUAKA						3.815		3.246		2.918	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.634	100	2.960	100	2.773	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	166	100	33	100	17	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	590	100	208	100	105	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan	Persen	100	100	127	0	-	0	-	KECAMATAN BATANG TUAKA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan Umum yang di selesaikan Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	197	100	45	100	23	KECAMATAN BATANG TUAKA
						-	-	-	-	-	
						3.218	2.459	2.129			
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.172	100	2.064	100	1.929	KECAMATAN CONCONG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	128	0	-	0	-	KECAMATAN CONCONG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	560	100	200	100	101	KECAMATAN CONCONG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN CONCONG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	58	100	130	100	66	KECAMATAN CONCONG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	200	100	65	100	33	KECAMATAN CONCONG
						-	-	-	-	-	
						7.107	4.428	3.852			
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	3.758	100	3.434	100	3.350	KECAMATAN ENOK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	702	100	59	100	30	KECAMATAN ENOK
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	2.242	100	799	100	403	KECAMATAN ENOK
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN ENOK
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	49	100	87	100	44	KECAMATAN ENOK
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	255	100	49	100	25	KECAMATAN ENOK
KECAMATAN GAUNG						-		-		-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.772	100	2.562	100	2.471	KECAMATAN GAUNG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	179	100	22	100	11	KECAMATAN GAUNG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	492	100	196	100	99	KECAMATAN GAUNG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN GAUNG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	114	100	29	100	14	KECAMATAN GAUNG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	344	100	101	100	51	KECAMATAN GAUNG
	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA					-		-		-	
						5.905		4.192		3.642	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	3.412	100	3.268	100	3.175	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	409	100	24	100	12	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.690	100	735	100	371	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	120	100	93	100	47	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	174	100	71	100	36	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
						-		-		-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
KECAMATAN KATEMAN						5.392		3.716		3.196	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.878	100	2.919	100	2.794	KECAMATAN KATEMAN
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	414	0	-	0	-	KECAMATAN KATEMAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.680	100	668	100	338	KECAMATAN KATEMAN
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN KATEMAN
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	116	100	46	100	23	KECAMATAN KATEMAN
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	204	100	83	100	42	KECAMATAN KATEMAN
KECAMATAN KEMPAS						4.843		4.023		3.521	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	3.123	100	3.305	100	3.158	KECAMATAN KEMPAS
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	236	0	-	0	-	KECAMATAN KEMPAS

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.155	100	616	100	311	KECAMATAN KEMPAS
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	60	100	52	100	26	KECAMATAN KEMPAS
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	170	100	50	100	25	KECAMATAN KEMPAS
KECAMATAN KEMUNING							-		-	-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.755	100	2.555	100	2.495	KECAMATAN KEMUNING
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	259	100	67	100	34	KECAMATAN KEMUNING
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	560	100	172	100	87	KECAMATAN KEMUNING
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN KEMUNING
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan	Persen	100	100	101	100	97	100	49	KECAMATAN KEMUNING

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan Umum yang di selesaikan Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	247	100	82	100	41	KECAMATAN KEMUNING
KECAMATAN KERITANG						-	-	-	-	-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	3.030	100	3.108	100	2.969	KECAMATAN KERITANG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	111	100	11	100	5	KECAMATAN KERITANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	570	100	308	100	156	KECAMATAN KERITANG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen		0	100	0	-	0	-	KECAMATAN KERITANG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	65	100	47	100	24	KECAMATAN KERITANG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	289	100	47	100	24	KECAMATAN KERITANG
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI						-	-	-	-	-	
						3.486	2.717	2.439			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.393	100	2.354	100	2.256	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	136	100	4	100	2	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	560	100	219	100	110	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	47	100	46	100	23	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	249	100	95	100	48	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	KECAMATAN MANDAH					-		-		-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.546	100	2.538	100	2.435	KECAMATAN MANDAH
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	140	100	37	100	19	KECAMATAN MANDAH
						3.737		3.115		2.726	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	560	100	410	100	207	KECAMATAN MANDAH
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN MANDAH
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	119	100	87	100	44	KECAMATAN MANDAH
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	271	100	42	100	21	KECAMATAN MANDAH
KECAMATAN PELANGIRAN						-	-	-	-	-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.697	100	2.701	100	2.596	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	113	100	26	100	13	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	560	100	289	100	146	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN PELANGIRAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	95	100	76	100	38	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	362	100	79	100	40	KECAMATAN PELANGIRAN
KECAMATAN PULAU BURUNG						-	-	-	-	-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.540	100	2.536	100	2.436	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	15	100	1	100	0	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	0	-	100	10	100	5	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	89	100	80	100	41	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	277	100	69	100	35	KECAMATAN PULAU BURUNG
						-	-	-	-	-	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
	KECAMATAN RETEH					6.165		4.503		3.956	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	3.630	100	3.650	100	3.525	KECAMATAN RETEH
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Daerah yang Terpenuhi Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	390	100	22	100	11	KECAMATAN RETEH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	1.682	100	720	100	364	KECAMATAN RETEH
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN RETEH
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	102	100	85	100	43	KECAMATAN RETEH
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	261	100	27	100	14	KECAMATAN RETEH
	KECAMATAN SUNGAI BATANG					-		-		-	
						3.459		2.743		2.405	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.330	100	2.359	100	2.211	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	197	100	19	100	9	KECAMATAN SUNGAI BATANG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 3	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	573	100	248	100	125	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	86	100	86	100	43	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	172	100	31	100	16	KECAMATAN SUNGAI BATANG
KECAMATAN TANAH MERAH						-	-	-	-	-	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	2.331	100	2.519	100	2.309	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	206	100	19	100	-	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	618	100	310	100	157	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TANAH MERAH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	ketentaraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	78	100	114	100	58	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	255	100	189	100	95	KECAMATAN TANAH MERAH
	KECAMATAN TELUK BELENGKONG					-		-		-	
						2.490		2.386		2.032	
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	1.857	100	2.087	100	1.881	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	55	100	56	100	28	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	46	100	46	100	23	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	100	0	-	0	-	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	67	100	101	100	51	KECAMATAN TELUK BELENGKONG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PD PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		
					Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	Target	Pagu Indikatif (Rp.Juta)	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	365	100	96	100	48	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
JUMLAH KESELURUHAN						2.128.162		1.900.406		1.953.709	

BAB

8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir 2019 – 2023

No	Indikator	Realisasi Tahun		Target Tahun		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	60.05	65.02	69.00	72.00	79.00
2	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur	NA	NA	NA	49,91	51,20
3	Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam	53,04	53,92	54,79	55,66	56,54
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,04	57,79	58,64	59,12	60,05
5	Indeks Pembangunan Manusia - IPM	66,84	66,54	66,54	67,53	68,04
6	Indeks Partisipasi Sosial	60	65	70	75	80
7	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	60	65	70	75	80
8	Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial	60,15	60,15	60,23	60,65	61,62
9	PDRB per Kapita (Juta per Kapita)	60,46	68,60	69,80	70,50	72,50
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,19	0,34	3,60	4,30	4,90

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.2 digunakan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir periode 2019 - 2023.

Tabel 8.2.
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran
Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
I	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)	43.501,00	62,701.99	65,022.92	51.079,53	54.399,70	58.207,67	58.207,67
1.1.2.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	4,84	4.16	0.34	6,00	6,50	7,00	7,00
1.1.3.	Inflasi (%)	5,00	2.40	3.30	3,60	3,50	3,40	3,40
1.1.4.	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun)	59,46	84.80	86.72	63,34	64,69	66,07	66,07
1.1.5.	Indeks Gini (Indeks)	0,33	0.30	0.31	0,32	0,31	0,31	0,31
1.1.6.	Indeks Williamson (Indeks)	0,29	N/A	N/A	0,24	0,22	0,21	0,21
1.1.7.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	54,02	48.29	44.29	53,03	52,71	52,39	52,39
1.1.8.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,60	6.54	5.93	7,30	7,20	7,10	7,10
1.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	66,30	66.84	66.54	68,08	68,90	69,72	69,72
1.2.2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,88	11.9	11.91	12,96	13,26	13,56	13,56
1.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,18	7.24	7.23	7,38	7,62	7,86	7,86
1.2.3.	APK SD/MI (%)	99,47	105.85	105.93	103,97	105,47	106,97	106,97
1.2.4.	APK SMP/MTs (%)	100,78	99.30	102.01	101,53	101,78	102,03	102,03
1.2.5.	Angka Harapan	67,07	67.66	67.85	68,40	68,80	70,00	70,00

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Hidup (Tahun)							
1.2.6.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1,10	0.02	0.03	0,80	0,70	0,60	0,60
1.2.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74	4.56	4.35	2,86	2,61	2,38	2,38
1.2.8.	Nilai AKIP (Prediket)	CC	CC	B	BB	BB	A	A
1.2.9.	Nilai LPPD (Prediket)	Tinggi	Tinggi	N/A	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.2.10.	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	44,36	60.05	65.02	69,00	72,00	79,00	79,00
1.2.11.	Keterbukaan Informasi (%)	32,28	77	95	60,00	80,00	95,00	95,00
1.2.12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	75,22	82.38	84.31	83,12	87,65	89,22	89,22
1.2.13.	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	60,00	N/A	N/A	65,00	65,00	65,00	65,00
1.2.14.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (%)	68,00	N/A	N/A	75,00	76,00	78,00	78,00
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
1.3.1.	Cakupan Fasilitas Seni (%)	50,75	50.75	50.75	56,00	58,00	60,00	60,00
1.3.2.	Jumlah Prestasi Olahraga (Kejuaraan)		5	5	5	5	5	5
II	Aspek Pelayanan Umum							
2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar							
2.1.1.	Pendidikan							
2.1.1.1.	APM SD/MI (%)	85,38	95.34	95.52	93,0000	97,0000	100,0000	100,00
2.1.1.2.	APM SMP/MTs (%)	75,72	81.26	82.06	78,00	79,00	80,00	80,00
2.1.1.3.	APS 7 - 12 Tahun (%)	97,66	99.08	99.75	100,00	100,00	100,00	100
2.1.1.4.	APS 13 - 15 tahun (%)	90,77	91.7	92.13	94,00	95,00	96,00	96
2.1.1.5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,05	0.05	0.01	0,02	0,01	0,01	0,01
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,07	0.07	1.83	0,04	0,03	0,02	0,02
2.1.1.7.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 7 - 12 Tahun (%)	72,32	73.02	74.91	78,00	80,00	82,00	82,00
2.1.1.8.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 13 -	64,05	65.00	63.89	73,00	76,00	79,00	79,00

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	15 Tahun (%)							
2.1.1.9.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SD/MI (Guru Per 10.000 Murid)	697,61	781.64	833.33	760,00	790,00	810,00	810,00
2.1.1.10.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SMP/MTs (Guru Per 10.000 Murid)	1.005,19	985.75	714.29	1.009,00	1.010,00	1.011,00	1.011,00
2.1.1.11.	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV (%)	84,61	86.53	71.82	96,00	98,00	100,00	100,00
2.1.2.	Kesehatan							
2.1.2.1.	Rasio Rumah Sakit (Per 1.000 Penduduk)	0,0042	0.004	0.004	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
2.1.2.2.	Rasio Puskesmas (Per 1.000 Penduduk)	0,0370	0.038	0.041	0,0400	0,0410	0,0420	0,0420
2.1.2.3.	Rasio Dokter Spesialis (Per 1.000 Penduduk)	0,0370	0.032	0.032	0,0440	0,0460	0,0480	0,0480
2.1.2.4.	Rasio Dokter Umum (Per 1.000 Penduduk)	0,1080	0.054	0.064	0,3000	0,4000	0,5000	0,5000
2.1.2.5.	Rasio Dokter Gigi (Per 1.000 Penduduk)	0,0039	0.026	0.032	0,0150	0,0200	0,0250	0,0250
2.1.2.6.	Rasio Perawat (Per 1.000 Penduduk)	0,7890	1.009	0.957	0,0840	0,0860	0,0860	0,0860
2.1.2.7.	Rasio Bidan (Per 1.000 Penduduk)	0,5950	0.881	0.568	0,6300	0,6400	0,6500	0,6500
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.1.3.1.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik (%)	14,22	14.22	14.52	23,00	26,00	30,00	30,00
2.1.3.2.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap (%)	59,23	59.23	57.84	73,23	76,73	80,23	80,23
2.1.3.3.	Proporsi Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	35,96	35.96	58.32	50,00	55,00	60,00	60,00
2.1.3.5.	Proporsi Irigasi Dalam kondisi Baik (%)	28,00	28.00	30.00	34,00	36,00	38,00	38,00
2.1.3.6.	Ratio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB (%)	76,00	77	78.00	79,00	80,00	81,00	81,00
2.1.3.7.	Rasio Rumah Ber IMB (%)	2,14	2.30	N/A	5,00	6,00	7,00	7,00

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Pemukiman							
2.1.4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	18,77	20.05	20.15	24,00	26,00	28,00	28,00
2.1.4.2.	Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,50	0.45	0.45	0,35	0,30	0,25	0,25
2.1.4.3.	Persentase luasan pemukiman kumuh diperkotaan (%)	25,00	22.00	22.00	15,00	13,00	10,00	10,00
2.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
2.1.5.1.	Rasio Personil Satpol PP (Per 10.000 Penduduk)	0,02	0.04	0.04	0,05	0,06	0,07	0,07
2.1.5.2.	Cakupan Penegakan Peraturan (%)	95,00	96.00	96.00	98,00	99,00	100,00	100,00
2.1.5.3.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	10,00	10.00	10.00	70,00	90,00	100,00	100,00
2.1.5.4.	Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5.5.	Indeks Rasa Aman	66,66	66,66	75,80	80,45	95,00	100	100
2.1.6.	Sosial							
2.1.6.1.	Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial (%)	90,00	90.00	72.70	96,00	98,00	100,00	100,00
2.1.6.2.	PMKS penerima bantuan sosial (%)	80,00	82.5	100	93,00	96,00	100,00	100,00
2.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
2.2.1.	Tenaga Kerja							
2.2.1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,27	64.66	63.08	65,00	66,00	67,00	67,00
	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,26	61.42	66.16	97,14	97,39	97,62	97,62
2.2.1.2.	Pencari Kerja Yang	82,74	99.00	3.89	85,00	86,00	87,00	87,00

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Ditempatkan (%)							
2.2.1.3.	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	75,00	26.54	0.00	84,00	87,00	90,00	90,00
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (%)	82,39	82.57	82.34	83,29	83,59	83,89	83,89
2.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	62,30	64.82	64.45	64,80	65,78	66,78	66,78
2.2.2.3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	90,98	91.45	96.56	94,00	95,00	96,00	96,00
2.2.3.	Pangan							
2.2.3.1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100,00	109	103.9	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	88,00	88.5	88.9	96,50	96,50	100,00	100,00
2.2.4.	Pertanahan							
2.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	41,39	N/A	N/A	45,00	46,00	47,00	47,00
2.2.5.	Lingkungan Hidup							
2.2.5.1.	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	95,00	N/A	N/A	98,00	99,00	100,00	100,00
2.2.5.2.	Persentase Penanganan Sampah (%)	81,50	70.15	81.49	84,00	85,00	86,00	86,00
2.2.5.3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	53,05	53.41	57.79	53,88	54,05	54,30	54,30
2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.2.6.1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	84,23	212	226	90,00	95,00	100,00	100,00
2.2.6.2.	Kepemilikan KTP (%)	57,00	98.00	99.00	85,00	90,00	100,00	100,00
2.2.6.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	671,28	542	556	850,00	950,00	1.000,00	1.000,00
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.2.7.1.	Status Indeks Desa Membangun	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Maju

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.7.2.	Cakupan Program Desa Maju Inhil Jaya (Desa)	236,00	236	236	236,00	236,00	236,00	236,00
2.2.7.3.	Pertambahan Jumlah Desa Maju (Desa)	2,00	2	11	2,00	2,00	2,00	12,00
2.2.7.4.	PKK Aktif (%)	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.5.	Posyandu Aktif (%)	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.2.8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	70,76	60.26	64.10	76,00	78,00	80,00	80,00
2.2.8.2.	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	73,92	92.93	77.82	79,00	81,00	83,00	83,00
2.2.8.3.	Ratio PPKBD Satu Setiap Desa/Kelurahan (%)	100,00	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.	Perhubungan							
2.2.9.1.	Tersedianya Angkutan Umum Yang melayani Trayek Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten (%)	73,00	73.2	77.78	79,00	81,00	83,00	83,00
2.2.9.2.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota (%)	75,00	72.4	83.31	90,00	92,00	95,00	95,00
2.2.9.3.	Tersedianya angkutan perairan yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)	85,00	85.5	87.40	93,00	95,00	97,00	97,00
2.2.10	Komunikasi dan Informatika							
2.2.10.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,06	2,07	2,08	2,08	2,09	3,0	3,0

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.10.2	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100,00	100	35	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.11.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah							
2.2.11.1.	Koperasi Aktif (%)	66,05	66.20	67.00	69,00	70,00	71,00	71,00
2.2.11.2.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	67,00	67.15	72.00	70,00	71,00	72,00	72,00
2.2.12.	Penanaman Modal							
2.2.11.1.	Realisasi PMDN (Rp Milyar)	8.730,00	385.2281	448.5968	12.445,00	13.938,00	15.611,00	15.611,00
2.2.11.2.	Realisasi PMA (USD Juta)	84,00	1.9223	274.3822	121,00	136,00	152,00	152,00
2.2.11.3.	Nilai ekspor bersih perdagangan (juta Rupiah)	5.116	385,23	448,6	1.681,9	2.782,6	7.491	7.491
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga							
2.2.13.1.	Jumlah Prestasi olahraga (Kejuaraan)	4,00	0	0	7,00	8,00	9,00	9,00
2.2.14.	Statistik							
2.2.14.1.	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka" (Judul)	1,00	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2.14.1.	Kecamatan Dalam Angka (Judul)	20,00	20	20	20,00	20,00	20,00	20,00
2.2.15.	Persandian							
2.2.16.	Kebudayaan							
2.2.16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	5,00	4	0	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2.16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	2,00
2.2.17.	Perpustakaan							
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4.972,00	5210	54684	7.072,00	7.772,00	8.472,00	8.472,00

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.	22.862,00	23000	54684	23.312,00	23.462,00	23.612,00	23.612,00
2.2.18.	Kearsipan							
2.2.18.1	Pengelolaan arsip secara baku (5)	30,36	31.5	50.74	60,00	70,00	80,00	80,00
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	3,00	0	25	6,00	7,00	8,00	8,00
2.3.	Layanan Pilihan							
2.3.1.	Pariwisata							
2.3.1.	Kunjungan Wisatawan (Orang)	3.115,00	91137	22047	4.500	5.000	5.500	5.500
2.3.2.	Pertanian							
2.3.2.1.	Produktivitas Padi (Ton GKG/Hektar)	4,02	3.891	3.94	4,20	4,25	4,30	4,30
2.3.2.2.	Produksi beras (Ton)	56.415,42	57000	49008.1	64.515,42	67.215,42	69.915,42	69.915,42
2.3.2.3.	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar)	1,19	1.21	1.22	1,25	1,27	1,30	1,30
2.3.2.4.	Produktivitas kelapa sawit (Ton CPO/Hektar)	2,53	2.54	2.52	2,80	2,90	3,00	3,00
2.3.2.5.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	44,74	44,68	46.78	47,54	48,56	49,61	49,61
2.3.3.	Perdagangan							
2.3.3.1.	Nilai Ekspor bersih Perdagangan (USD Juta)	184,88	301.51	409.15	270,00	300,00	330,00	330,00
2.3.3.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,02	17.55	16.14	14,40	14,50	14,60	14,60
2.3.4.	Perindustrian							
2.3.4.1.	Nilai produksi usaha menengah kecil (Rp Juta)	58.710,22	58710	49730	60.585,22	61.210,22	61.835,22	61.835,22
2.3.4.2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	28,32	23.63	24.05	28,56	28,63	28,71	28,71
2.3.5.	Transmigrasi							
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan							
2.3.6.1.	Produksi Perikanan (Ton)	57.080,60	56375.97	57104.85	60.080,60	61.080,60	62.080,60	62.080,60
2.3.6.2.	Konsumsi Ikan	38,67	39.26	39.69	43,47	45,07	46,67	46,67

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	(Kg/Kapita/ Tahun)							
2.4.	Urusan Penunjang							
2.4.1.	Perencanaan Pembangunan							
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	100,00	100	0	100,00	0,00	0,00	100,00
2.4.1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.3.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.	Keuangan							
2.4.1.	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.3.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Latihan							
2.4.3.1.	Pembinaan PNS melalui Pemberian Hukuman Disiplin (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
2.4.4.	Penelitian dan Pengembangan							
2.4.4.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	65,00	N/A	N/A	90,00	95,00	100,00	100,00
2.4.4.2.	Indeks Inovasi Daerah (Kategori)	N/A	N/A	Sangat Inovatif/ Zona Hijau	Sangat Inovatif/ Zona Hijau	Sangat Inovatif/ Zona Hijau	Sangat Inovatif/ Zona Hijau	Sangat Inovatif/ Zona Hijau
2.4.5.	Pengawasan							
2.4.5.1.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	47,21	47.30	70.96	85,00	90,00	100,00	100,00
2.4.6.	Sekretariat Dewan							
2.4.6.1.	Rasio Pembahasan Prolegda	85,48	85.48	100	93,00	97,00	100,00	100,00
III.	Aspek Daya Saing							
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
3.1.1.	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	N/A	N/A	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
3.1.2.	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	10.171,00	998.98	1060.412	11.677,10	11.910,64	12.148,86	12.148,86
3.1.2.	Nilai Tukar Petani	101,53	101.08	130.34	112,00	112,00	115,00	115,00
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	51,07	N/A	N/A	65,00	70,00	75,00	75,00
3.3.	Fokus Iklim Investasi							
3.3.1.	Angka Kriminalitas (Kasus Tertangani Per 10.000 Penduduk)	0,97	2.52	2.96	2,50	3,00	3,50	3,50
3.4.	Fokus Sumberdaya Manusia							
3.4.1.	Rasio Ketergantungan (%)	47,92	47.95	44.1	46,72	46,32	45,92	45,92
3.4.1.								

Indikator kinerja pencapaian SPM bidang pendidikan dasar, kesehatan, PU-PR, perumahan rakyat, pemerintahan dalam negeri dan sosial ditunjukkan pada Tabel 8.3 digunakan sebagai Indikator Kinerja yang wajib dicapai pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir periode 2019 – 2023.

Tabel 8.3.

Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas dan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
I.	PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan Dasar							
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun	90.51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar							
	B. Pendidikan Kesetaraan							
	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	18.85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	C. Pendidikan Anak Usia Dini							
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	92.02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II.	KESEHATAN							
	A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	D. Pelayanan kesehatan balita							
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	E. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar							
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	F. Pelayanan kesehatan pada usia produktif,							
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	G. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;							
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	H. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi							
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	I. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus							

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	J. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat							
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	K. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis							
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	L. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)							
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
III.	PEKERJAAN UMUM							
	A. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	36.58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	B. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	59.95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IV.	PERUMAHAN RAKYAT							
	A. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota							
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	B. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota							
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni							
V.	TRANTIBUMLINMAS							
	A. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	B. Pelayanan informasi rawan bencana							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	C. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	D. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	E. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VI.	SOSIAL							
	A. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti							
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	B. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti							
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	28.30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	C. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti							
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	D. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh	0.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti							
	E. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota							
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB

9

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijabarkan kedalam kegiatan tahunan yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan tahun 2023.

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 merupakan

pedoman atau acuan bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

- a. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program pembangunan sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 dengan sebaik-baiknya.
- b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tiap program maka dalam kerangka koordinasi perencanaan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, wajib menyesuaikan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) dengan Dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperan serta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rencana peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dalam

- pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
- d. Pada akhir tahun perencanaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.
- e. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Bupati Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN